Compile Background Information for the Development of a Strategic Environment and Social Assessment (SESA) Final Report for Indonesia's REDD+ Readiness Preparation

The World Bank

FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY

Compile background information for the development of a Strategic Environment and Social Assessment (SESA) Final Report for Indonesia's REDD+ Readiness Preparation

Pengumpul bahan abstrak : Yun Yudiarti

Laporan disusun oleh
Rinekso Soekmadi
Yun Yudiarti

2016

Kata Pengantar

Kegiatan Compile background information for the development of a Strategic Environment and Social Assessment (SESA) Final Report for Indonesia's REDD+ Readiness Preparation merupakan bagian dari persiapan REDD+ di Indonesia merupakan upaya kompilasi dokumen/publikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan REDD+ oleh berbagai pihak. Kegiatan kompilasi data ini dibawah arahan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, ekonomi, kebijakan dan Perubahan Iklim Badan Penelitian Pengembavgan dan Iovasi Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan Kompilasi data ini telah dipresentasikan di Litbang Kehutanan pada Jumat, 18 November 2016 yang dihadiri oleh para pihan untuk telah mendapat masukan. Selain itu juga telah dilakukan presentasi dan diskusi di Hotel Royal Amarossa pada Jumat, 25 Noevmber 2016 sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya.

Kompilasi data terkait SESA ini dapat terlaksana dengan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Forest Carbon Partnership Facility dan Word Bank. Kepada lembaga-lembaga yang telah memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan REDD+ kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga kompilasi data tentang REDD+ ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, November 2016

Tim Penyusun

Pengantar

Kegiatan Compile background information for the development of a Strategic Environment and Social Assessment (SESA) Final Report for Indonesia's REDD+ Readiness Preparation merupakan bagian dari persiapan REDD+ di Indonesia. Dokumen kompilasi data ini mencakup 2 bagian yang tidak terpisahkan yaitu:

1. Daftar Bibliografi yang berisi judul, nomor urut file, nama lembaga/orang/konsultan penyusun, tahun dipublikasikan, ringkasan dan lembaga pelaksana seperti yang termaktub dalam buku ini. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar berikut

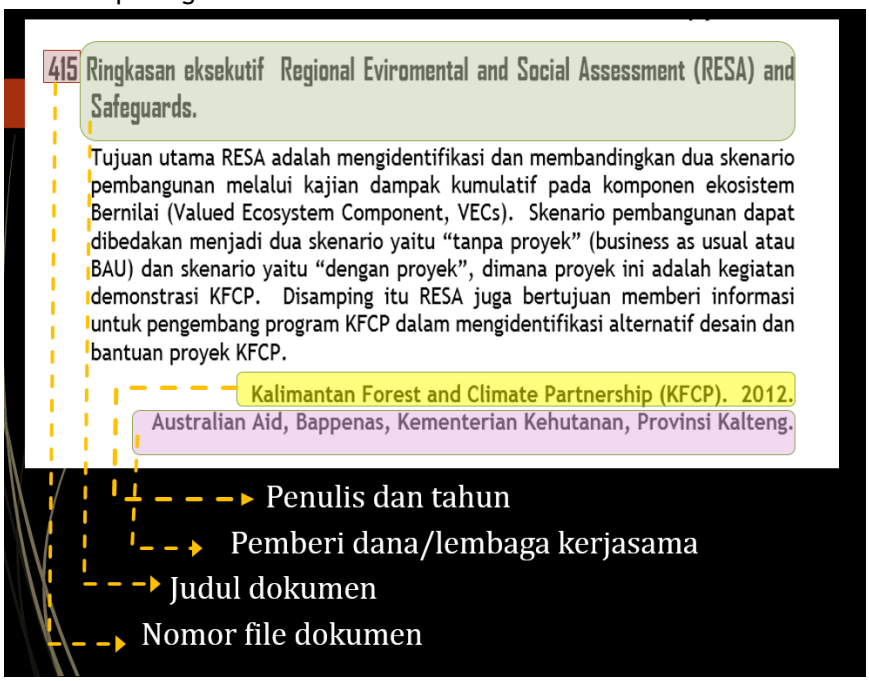

2. Dokumen lengkap dalam bentuk file dokumen, yang dapat dibaca oleh pengguna sesuai dengan nomor file yang ada pada bibliografi ini

Cara menggunakan Bibliografi ini adalah

1. Bibliografi ini dikelompokkan menjadi 8 kategori : a) Enviromental and Social Aspetc; b) Governance, c) Public consultation, d) Publication, e) Recomendation ESIA, f) Regulation, g) Strategic option Natursl Resources Manageent (NRM) dan h) Social Risk.

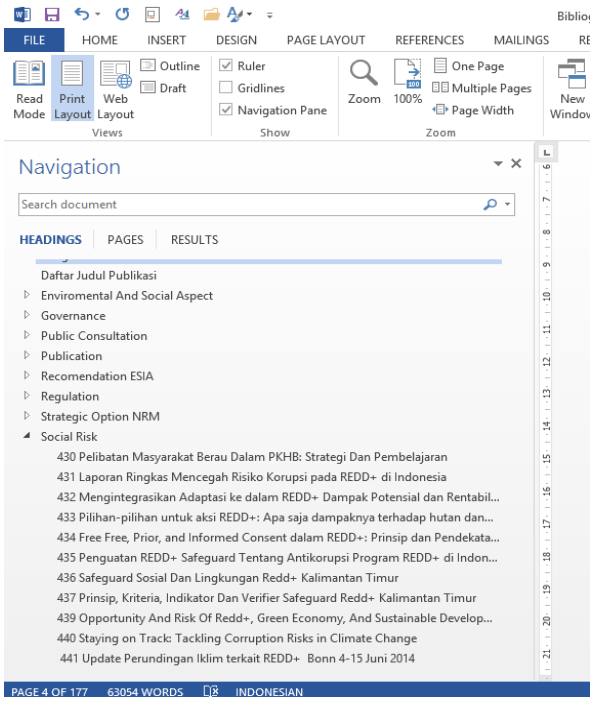

Pada setiap setitiga pada bagian kiri dapat diklik untuk menampilkan judul dokumen pada setiap kategori. Judul dokumen/publikasi pada masing-masing kategori dapat dilihat secara lengkap pada Daftar judul Publikasi.

2. Pada masing-masing kategori terdiri dari berbagai dokumen tentang REDD+ di Indonesia, laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh konsultan, makalah siaran pers, hasil kajian, Minute of Meeting, prosiding, dan kategori lainnya yang berkaitan dengan REDD + yang adapat dilihat ringkasan/abstrak nya pada daftar Abstrak.
3. Beberapa judul dokumen telah diberi warna kuning, dimana dokumen tersebut penting dibaca lebih lanjut terutama yang terkait dengan safeguard yang dapat dilihat pada folder-folder dalam dokuem terpisah.
4. Selamat menggunakan dokumen ini.

Daftar Judul Publikasi

Enviromental And Social Aspect 1

031 Best Practices Implementasi Safeguards Redd+ Pada Pt Riau Andalan Pulp And Paper 1

032 Integrating Gender Into Redd+ Safeguards Implementation In Indonesia 1

046 Panduan Pelibatan Masyarakat Setempat dalam Implementasi REDD+ di Indonesia Wilayah Timur. 1

051 Studi Kasus dan Tantangan Legalitas: Konservasi hutan bernilai karbon tinggi (HCS forests) pada areal konsesi perkebunan Sawit 2

053 Indonesia Palm : Sustainable Sourcing. 2

054 Toward Sustainability Palm Oil, the case of Indonesia 2

055 Review Pelaksanaan & Penerapan FPIC dalam Sektor Industri Sawit Berdasarkan Standard RSPO. 2

056 Indonesian deserves to consume Sustainable Palm Oil too. 3

057 Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk mendukung Sektor Perkebunan. 3

058 Kerangka Resolusi Konflik Program Redd+ Di TN-Kutai, TN-Tesso Nilo, TN-Kerinci Seblat, TN-Sebangau, & TN-Kayan Mentarang. 3

059 Model Kelembagaan dan Peta jalan pencegahan dan penyelesaian konflik terkait REDD+ di Indonesia. 3

062 Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+) di Indonesia. 4

082 Laporan Sintesis Capacity Building Pedoman Mainstreaming Redd+ Ke Dalam Sistem Perencanaan Nasional Dan Pedoman Greening MP3EI Bidang Redd+ Di Provinsi Prioritas REDD+ 4

084 Laporan Tahun 2014 Sekretariat Bersama REDD+ Kalimantan Tengah. 5

093 Laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Bersama (Sekber REDD+) Kalimantan Tengah, meliputi pelaksanaan proyek-proyek REDD+ bersama masyarakat di Provinsi Percontohan REDD+ Kalimantan Tengah. 5

107 Rancangan Konsep Instrumen Pendanaan REDD+ Di Indonesia 5

108 Korelasi Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana. 6

109 Mempertahankan Kuantitas Dan Memperbaiki Kualitas Hutan Dan Lahan Gambut 6

111 Laporan *Legal Audit* Dan *Legal Compliance* Terhadap Perusahaan-Perusahaan Pertambangan Dan Perkebunan Di Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur Dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. 6

130 Mengukur Implementasi Moratorium Di Kalimantan Tengah. 7

134 Kebijakan Perkebunan Dalam Pengelolaan Perkebunan Yang Lestari Berpotensi Ekonomi Dan Berkontribusi pada REDD+ (Komoditi Non Kelapa Sawit) 7

135 Penanganan perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan LH..... 8

136 Kebijakan nasional perubahan iklim dan REDD+ serta peran penegak hukum. . 8

137 Penelusuran, Penalaran dan penemuan Hukum. 8

138 Pembuktian dalam kasus LH“Scientific Evidence menjadi Legal Evidence” 8

141 Menggalang Aksi Bersama Solusi Pencegahan Bencana Asap Melalui Pengelolaan Lahan Gambut Yang Beretika. 8
149 Konflik Lahan, REDD+ dan FPIC. 9
150 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Mangrove Di Indonesia. 9
150 Ringkasan Laporan Pencapaian Hasil Kegiatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan & Promisi REDD dan Perdagangan Karbon. 10
161 Standar Sosial dan Lingkungan REDD+.Pengalaman Membantu Negara-Negara Dalam Membangun Sistem Informasi Rambu Pengaman (Safeguard). 10
174 REDD+ in Indonesia A Catalyst for Change. 10
203 Buku Panduan Pelaksanaan Pengukuran dan Pelaporan (MR) Proyek Khusus Eks-PLG di Provinsi Kalimantan Tengah, INDONESIA. Percontohan MRV Non-Karbon. 11
221 Progress Towards And Results Of A Participatory, Transparent And Comprehensive Approach To REDD+ Safeguards. 11
238 REDD+ SES catatan informasi mengenai Proses Multi-stakeholder 11
239 Adoption of a participatory, transparent and comprehensive approach to REDD+ safeguards in the Province of East Kalimantan, Indonesia, 2008 to 2015. 12
243 Pelatihan Penegakan Hukum di bidang SDA-LH dengan Pendekatan Multi-Door. 12
248 Indonesia Kerangka Hukum REDD+. Kerangka Pengaman (*Safeguard*). 12
262 Strategi Dan Rencana Implementasi MRV REDD+ (Draft) 2012. 13
313 Implementasi Rencana Aksi Nasional-Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Bidang Berbasis Lahan: *Mengintegrasikan Data Regional Dan MR Ke MRV Nasional* 13
372 Prosiding Proses Stakeholder dalam rangka Pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards REDD+ di Indonesia 2011-2012. 13
373 Draft Untuk Bahan Diskusi Membangun Kebijakan Kerangka Pengaman REDD+ di Indonesia Studi Komparatif terhadap SIS-REDD+ dan PRISAI 14
374 Laporan Penelitian Development Of A Time Series Analysis Of The Primary Economic And Policy Aspects Of Land Use Change. 14
377 Sistem Informasi *Safeguards* Redd+ Indonesia : Pembangunan Dan Operasionalisasinya. 15
395 Prosiding Konsultasi Publik dalam rangka Pembentukan, Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja REDD+ dan Tim Penyusunan RAD-GRK di Tingkat Provinsi 15
408 Mengembangkan Data *Baseline* Sosial Ekonomi dan Biofisik untuk Mengevaluasi Kesiapan Pelaksanaan REDD+. 15
412 Mengawal Safeguard dalam rangka persiapan implementasi REDD+ di Indonesia. 16
415 Ringkasan eksekutif Regional Eviromental and Social Assessment (RESA) and Safeguards. 17
416 Regional Eviromental and Social Assessment (RESA) 17
417 Dukungan Penguatan Kelembagaan Bagi Desa dalam Mengelola Kegiatan REDD+ Sebuah Pembelajaran Lapangan dari Demonstrasi REDD+ di Kabupaten Kapuas,

Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP)..... 17
418. Pengembangan dan Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan REDD+ di Indonesia. 18
419 REDD+ Social and Environmental Safeguards Development and Implementation in Indonesia 18
426 Pedoman Pengukuran Karbon untuk mendukung Penerapan REDD+ di Indonesia 19
427 Pedoman Penggunaan Model Alometrik untuk pendugaan Biomassa dan Stok Karbon Hutan di Indonesia 19
Pedoman Penggunaan Model Alometrik untuk pendugaan Biomassa dan Stok Karbon Hutan di Indonesia merupakan kebijakan teknis (operasional) Kementerian Kehutanan yang didasarkan atas hasil penelitian model-model alometrik untuk pendugaan biomassa pohon pada berbagai tipe ekosistem hutan di Indonesia. Pedoman ini dapat menjadi perangkat penting bagipengembangan system perhitungan karbon nasional Indonesia, sehingga tingkat akurasi semakin tinggi. 19
438 SVLK, Jalan Menuju REDD+..... 19

Governance 20
001 Implementasi kebijakan satu peta untuk merespon dampak perubahan iklim. 20
003 Peran, fungsi dan tantagan Badan Pengelola REDD+ 20
006 Indonesian Forest Reference Emission Level Submitted to the UNFCCC secretariat 20
007 Bienanial Update Report: Indonesia Experience 21
008 Introduction to Indonesia Experience: Biennial Update Report (BUR) and Forest Reference and Emission Level (FREL). 21
012 Identifikasi dan Klasifikasi dari Data yang Dibutuhkan maupun yang Tersedia untuk Implementasi REDD+ di Provinsi NAD. 21
013 Analisa Data Yang Disusun Sebagai Informasi Bagi Provinsi Aceh Dan Pengelola / Pelaksana Implementasi REDD. 21
014 Rencana aksi untuk mengurangi ketidaklengkapan dan/atau ketidakkonsistenan data dan untuk mengimplementasikan proses-proses validasi data. 22
015 Laporan mengenai pendampingan proses-proses pengadaan untuk memperoleh data yang diperlukan pemerintah Provinsi dan memfasilitasi penjangkauan masyarakat untuk menyertakan pemetaan partisipatif/masyarakat. 22
016 Laporan mengenai tindakan/pencapaian terobservasi yang memungkinkan adanya pengembangan lebih lanjut dari IMS yang ada dan proses-proses untuk mengelola data di Provinsi Aceh 23
017 Berita Acara penyerahan laporan. 23
025MODUL PELATIHAN Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat (Community Based Forest Fire Management) Provinsi Pecontohan REDD+ Kalimantan Tengah 23
033 FPIC/PADIATAPA Dalam Strategi Nasional REDD+. 24
045 Modul Konsep REDD + dan Implementasinya 24

080 Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ Juni2013..... 24
081 Penghitungan Emisi Berbasis Lahan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2009-2011 25
086 TOR Seminar REDD+ di Indonesia Dari Persiapan menuju Implementasi 19 Desember 2013 25
087 Redd+In Indonesia: Laying The Foundations For Transformative Change. 25
088 Masukan publik untuk Strategi dan Rencana Implementasi MRV REDD+. 25
100 Introduction to Midway Workshop towards the 3rd Revision of IMM 25
103 Keanekaragaman Hayati, Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Menuju Implementasi REDD+ di Indonesia 26
105 Diskusi Kelompok Kelembagaan MRV di Tingkat Nasional 26
106 Summary Hasil Diskusi Kelompok Kelembagaan MRV di Tingkat Sub Nasional. 26
128 Materi Pelatihan Sistim Informasi Geografis Dan Penginderaan Jauh Tingkat Dasar Untuk Pengelolaan Data Dasar Spasial Dan Kadaster Dalam Persiapan Data REDD+. 26
131 Milestone Provinsi Percontohan Di Kalimantan Tengah..... 27
132 Moving Towards Sustainability 27
139 Pemetaan Dan Analisa Mekanisme Pendanaan Nasional, Pengelolaan Hibah, Wali Amanah Dan Mekanisme Pasar Yang Ada Terkait Dengan Aktivitas REDD+ DI Indonesia. 27
146 Penyidikan Tindak Pidana terkait Keuangan..... 28
147 Teknik Penyusunan Dakwaan Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup-Yang Terkait Kejahatan Lain 28
148 REDD+ Lintas Sektoral Kolaborasi Partisipasi 28
152 Perkembangan Kegiatan REDD+di Provinsi Percontohan Kalimantan Tengah.. 28
154 Penyidikan tindak pidana SDA dan lingkungan. 29
155 Program efisiensi energi di sektor industri. 29
156 Prosiding Workshop Pengembangan Kapasitas dan Studi untuk Membangun Kerangka Kerja REDD+ di Tingkat Sub Nasional (*Capacity Building and Studies to Develop REDD+ Framework at the Sub National* Level). 29
157 Prosiding Rountable Discussion para pakar International, Mendefinisikan Jalan Menuju Solusi Jangka Panjang untuk Krisis kebakaran dan kabut asap Indonesia dengan fokus pada pemanfaatan dan managemen gambut yang berkelanjutan. 30
159 Seri briefing hak-hak, hutan dan iklim – Oktober 2011 SULAWESI TENGAH: Provinsi Uji Coba UN-REDD Indonesia. 30
175 Hutan, lahan Gambut, manusia dan budaya REDD+ dan Satgas Kelembagaan REDD+ sebuah pengantar. 31
199 Ringkasan Eksekutif Tim Kerja Pengarusutamaan REDD+ Ke Dalam Sistem Perencanaan Nasional..... 31
201 Buku Ajar. Penegakan Hukum Terpadu Dengan Pendekatan *Multi-Door* dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup di atas Hutan dan Lahan Gambut. 31
232 Panduan Fasilitasi Pengajuan Hutan Kemasyaraktan Dan Hutan Desa/Nagari. 31
258 Pemetaan skala besar pada level provinsi One Map di Kalimantan Tengah. ... 32

259 Protokol Pengelolaan Portal Data MRV Redd+ 32
269 Penataan Perizinan Sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Hutan Dan Lahan Gambut 32
295 Penyediaan Data Dasar Dan Peta Kadastral Untuk Provinsi Kalimantan Barat Di Indonesia Task 5: Pendampingan Dalam Pengembangan Dan Pelaksanaan Kajian Data Para Pemangku Kepentingan Serta Proses Persetujuannya. Deliverable 5a: Daftar Para Pemangku Kepentingan Dan Proyek/Program Yang Relevan Dengan REDD+ Di Provinsi Kalimantan Barat. 32
296 Berita Acara Serah Terima Data 33
297 Teknis Penggunaan Akses Kelola Perhutanan Sosial (AKPS) Untuk Admin Daerah Dan Admin Pusat. 33
298 Teknis Penggunaan Akses Kelola Perhutanan Sosial (AKPS) UNTUK Pengusul. . 33
299 Sistem Online Akses Kelola Perhutanan Sosial. 33
300 Teknis Penggunaan Akses Kelola Perhutanan Sosial (AKPS) UNTUK Publik. 34
409 REDD+ dan Forest Governance. 34
411 Skema REDD+ sebagai Peluang Pendanaan Program Konservasi di Taman Nasional. 34

Public Consultation 35

043 Catatan Proses Dan Hasil Fasilitasi Srap Redd+ Provinsi Kalimantan Barat. ... 35
044 Catatan Proses Dan Hasil Fasilitasi Srap Redd+ Provinsi Kalimantan Timur.... 35
048 Focus Grup Disscusion Redd+ Untuk Menguatkan Ekonomi Rakyat Dan Masyarakat Adat Di Indonesia. 35
049 Focus Grup Disscusion Redd+ Keanekaragaman Hayati, Pertumbuhan Yang Berkelanjutan, Dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Penegelolaan Hutan Konservasi Bersama Masyarakat 36
050 Focus Grup Disscusion Redd+ Penguatan Sektor Ekonomi Perkebunan Aneka Tanaman Menuju Tata Kelola Yang Rendah Emisi, Konservasi biodiversity Dan Berkelanjutan 36
133 REED+ di Indonesia Kemajuan dan Tantangan 37
143 REDD+: Pengelolaan hutan dan lahan untuk masa depan Indonesia 37
144 Sosialisasi STRADA Pelaksanaan REDD+ Kalimantan Tengah Peningkatan taraf hidup masyarakat pengelola sumberdaya hutan dan lahan gambut secara bijaksana 37
145 Peningkatan Kemandirian Masyarakat Lokal untuk Mengelola Sumberdaya Alam dan Dana 38
163 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan Indc Di 11 Provinsi di Aceh. 38
164 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi di Jambi 38
165 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi di Papua 39
166 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan Indc Di 11 Provinsi. Di Papua Barat 39
167 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi Di Sumatera Barat 39

168 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi Di Kalimantan Tengah 40
169 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi Di Sulawesi Tengah 40
170 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi Di Riau 40
171 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi Di Kalimantan Barat 41
172 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi Di Kalimantan Timur 41
230 Kick Off Sosialisasi STRADA Pelaksanaan REDD+ di Kaimantan Tengah 42
231 Adaptasi dan Mitigasi terhadap perubahan iklim 42
255 Startegi Daerah REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah 42
256 Menuju Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut 42
260 Strategi Operasional dan Program Kerja BP REDD+2014..... 42
261 Penyempurnaan Strategi Dan Rencana Implementasi MRV REDD+ 43
381 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi Di Sumatera Selatan 43
389 Prosiding Training of Trainers (ToT) Penghitungan dan Monitoring Karbon Hutan. 43
391 Prosiding Workshop Identifikasi Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan serta Aktivitas yang Menyebabkan Pengurangan Emisi, Peningkatan Serapan dan Stabilisasi Stok Karbon Hutan. 44
393 ProsidingKomunikasi Publik tentang Pengaturan Institusi dan Kerangka Regulasi untuk Implementasi REDD+ dan Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan *(Public consultation on institutional setting and legal framework for REDD+ implementation and mitigation ofclimate change in forestry sector)* 44
397 Prosiding. Workshop Komunikasi Stakeholder tentang Pengelolaan Data dan Pembelajaran Kesiapan/Kegiatan Demonstrasi REDD+..... 45
398. Prosiding. 2012. Workshop Koordinasi Mitra Kerjasama Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan “REDD+ Readiness 45
399 Prosiding. Workshop Review Status Demonstration Activities (DA) REDD+ di Indonesia. 45
402 Laporan Program FCPF REDD+ Readiness Preparation 46
403 Prosiding Dialog Prospek Perdagangan Karbon Dari Mekanisme Redd+ Dan Lokakarya "Rancangan Arsitektur Redd+ Di Indonesia..... 46
404 Prosiding Workshop Kerjasama Internasional..... 47
413 Kajian Penyusunan Konsultasi Publik bagi Dewan Kehutanan Nasional. 47

Publication 47

002 Press Release. Raising Support For Land Based Industries For Sustainable Development 48
004 Siaran Pers 11 Provinsi Siap Memulai Implementasi REDD+, Memperbaiki Tata Kelola Hutan Dan Lahan Gambut Untuk Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca .. 48
005 Siaran Pers Badan Pelaksana REDD+ bersama Provinsi Sulawesi Tengah dan 5 Kabupaten siap Implementasikan REDD+ 48

018 Pendekatan Multidoor Menyiapkan aneka pintu bagi keadilan lingkungan 49
019 Multidoor Approach Getting Ready With Various Doors To Environmental Justice 49
020 Indigenous Communitywaiting For Constitutional Court Decree Realization .. 49
021 Pekerjaan Rumah Menemukan Posisi Redd+Kemana Redd+ Akan Dibawa Setelah Paris Agreement Yang Memiliki Implikasi Dalam Penerapannya."..... 49
022 Pekerjaan Besar Badan Restorasi Gambut *(BRG)* selama 5 Tahun Brg Harus Memperbaiki 2 Juta Ha Lahan Gambut Yang Rusak. Dari Mana Dananya? 50
023 Masyarakat Adat menanti Realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mk35 Menandai Babak Baru Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat . 50
024 Program livelihood di Kabupaten Pulau Pisang Multi Manfaat REDD+ yang dirasakan warga 50
025 Seminar Moving The Redd+ Agenda Homework To Decide Where Redd+ How Will Redd+ Be Taken Forward In Light Of The Implications Of The Climate Goals Of The Paris Agreement?..... 51
026 Restorasi Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 51
027 Sustainable Restoration Of Peat Land For A Better Indonesia 51
028 Lesson from conflict Resolutio at Rainforest of hope 52
029 Pelajaran Resolusi Konflik di Hutan Harapan 52
030 REDD+ di Kalimantan Tengah : Pengandalian Kebakaran hutan dan ahan berbasis masyarakat..... 52
034 Badan Pelaksana REDD+ bersama Provinsi Sulawesi Tengah dan 5 Kabupaten siap Implementasikan REDD..... 53
035 Keputusan revisi belum final : Pemerintah akan tetap implementasikan PP Gambut. 53
036 Bali Targets Safeguarding Productive Land 53
037 Kelembagaan Baru Reforma Agraria..... 53
038 Kehutanan : Industri harus optimalkan perpanjangan sertifikasi kayu..... 54
039 Kemenhut mendorong industri kehutanan. 54
040 Bisnis Pulp dan Kertas: Industri Wajib TingkatkanTata Kelola Hutan. 54
041 Badan Pelaksana REDD+ bersama Provinsi Sulawesi Tengah dan 5 Kabupaten siap Implementasikan REDD+ 54
042 UNEP-RSPO dukung Industri sawit berkelanjutan. 54
104 Satgas REDD+ fasilitasi diskusi antara para pelaku bisnis perkebunan dengan pengelolaan secara lestari di Indonesia. 55
129 Menggalang Dukungan Industri Berbasis Lahan Untuk Pembangunan Berkelanjutan 55
173 REDD+ in Indonesia A Catalyst for Change. 55
176 REDD+ menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial: Tekad rakyat Indonesia untuk mengelola aset alam nasional demi kemakmuran bangsa 56
182 Presiden Republik Indonesia Kembali Tegaskan Komitmen Negara untuk Menurunkan Emisi Melalui Implementasi REDD+ 56
183 Badan Pengelola REDD+: Butuh Kolaborasi untuk Mendorong REDD+ menjadi Sebuah Gerakan Nasional..... 56

184 Solusi Jangka Panjang untuk Krisis Kebakaran dan Asap di Indonesia dengan Fokus Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan 56
185 *Prisai,* Kerangka Pengamanan Dengan Pendekatan Baru, Siap Diintegrasikan Ke Instrumen Pendanaan Redd+ 57
187 Dampak Tambang Terhadap Lingkungan Dan Sosial 57
188 Sosialisasikan Amdal Penolakan Pabrik Semen melalui pengadilan 57
189 REDD Kurang sosialisai. 58
190 Fighting for ancestral lands 58
191 Visi Baru Pengelolaan Lingkungan Bersama Tim Satgas REDD+ Baru: Menuju Pembangunan Lestari dan Berkeadilan. 58
192 Indonesia menuju COP 21 Memperjuangkan Kepentingan Nasional Berkontribusi Pada Upaya Global. 58
193 COP21 Paris – Lima Paris Action Agenda (LPAA) Sesi Hutan: Pengelolaan Hutan Berkesinambungan Memberikan Tiga Keuntungan 59
194 Flyer Indonesia-Norway REDD+ Partnersip transition towards phase-2. 59
196 Pencanangan Kerjasama Implementasi REDD+ oleh BP REDD+, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Berau. 59
197 The 2nd UN-REDD Regional Workshop: Kerangka Pengaman Sosial REDD+-Pembelajaran dari Berbagai Negara. 59
202 Pendidikan Yang Baik Untuk Pembangunan Indonesia Yang Lestari Dan Berkelanjutan Education For Sustainable Development (Esd) 60
207 Booklet Seminar Nasional dan Pameran Bersama. Moving REDD+ Indonesia Forward. 60
208 Festival Iklim. 60
209 Festival Iklim. 60
210 Sosialisasi REDD+ digelar di Barito Selatan. 60
211 REDD+ Implementation in Central Kalimantan 61
236 Forclime Programme Fc Module Memulai Kegiatan Di Lapangan Ditandai Dengan Penyelenggaraan District Kick Off Workshop Oleh Tiga Kabupaten ... 61
252 REDD+ Social and Enviromental Standard 61
265 Redd+ in Indonesia Paving the road to a sustainable future 62
383 The First Project Steering Committee Meeting (PSC) Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) 62
384 FCPF PC 12 Meeting 62
385 Koordinasi Awal Kerjasama Puspijak – FCPF dengan Provinsi NTB dan Sumatera Barat 63
386 Pertemuan Awal Kerjasama FCPF di Mataram, NTB 63
387 Sosialisasi Nasional Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan dan Kajian Sosial dan Lingkungan Strategis (Strategic Environmental and Social Assessment - SESA) 63
400 Booklet. COP19/CMP9 tahun 2013 TERSUKSES untuk REDD+: Citius, Altius, Fortius 63
401 Laporan Program FCPF REDD+ Readness Preparation. 64

Recomendation ESIA 64

009 Ringkasan Eksekutifaudit Kepatuhan Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. 64
047 Panduan Safeguard Gender. 64
060 Peta Jalan Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Terkait Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia. 65
061 Demonstration Activities : Guidance Cop Dan Tantangan Dalam Menuju Implementasi Redd+ Di Indonesia 65
077 Laporan Implementasi REDD+ Provinsi Aceh 65
079 Perhutanan Sosial dan Perubahan Iklim 66
083 Laporan Rangkaian Kegiatan BP REDD+ United Nation Climate Summit dan B4E 66
085 Laporan Hasil Evaluasi Proses Ujicoba Penerapan Prinsip Free, Prior, and Informed Consent 66
091 Catatan Mekanisme pengukuran dan pelaporan 66
092 Mekanisme Verifikasi 67
094 Draft Framework For Sharing Approaches For Better Multi-Stakeholder Participation Practices 67
095 Green Practices" Penurunan Emisi Karbon Dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi 67
096 A Guidance Note to Integrate Gender in Implementing REDD+ Social Safeguards in Indonesia. 68
098 Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 di Indonesia. 68
101 TOPIK Isu-isu Seputar MRV: 1) Informasi Safeguard; 2) Co-benefit, dan 3) Keanekaragaman hayati 68
102 Kajian Para Pihak Terkait dengan Upaya Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Tengah 69
140 Penerapan Padiatapa Proses Pembelajaran dan Uji Coba untuk Membangun Kesepakatan dengan Warga di Desa Lembah Mukti, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah 69
142 Asosiasi pengrajin industri kecil (APIK) Kabupaten Buleleng untuk penguatan ekonomi hijau 70
151 Ringkasan Laporan Pencapaian Hasil Kegiatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan & Promisi REDD dan Perdagangan Karbon 70
153 Peran BP-REDD+ dalam Mendukung Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 70
158 Stranas REDD+ dn Pokok-pokok STRADA/SRAP 71
162 Laporan Proses dan Hasil Konsultasi Nasional Krisis Tenurial Taman Nasional Tesso Nilo 71
178 Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak dalam Aktivitas REDD+ di Indonesia. 71
179 Rencana Implementasi MRV 2013-2015 72
180 Standar Sosial & Lingkungan REDD+ SSL REDD+ Versi 2 (10 September 2012) . 72
181 REDD+ SES. 2011. Standar Sosial & Lingkungan REDD+ SSL REDD+ Versi 1 (14 Juli 2011) 72

195 Masa Depan Hak-Hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum Rekomendasi Kebijakan. 73
198 Rights Based Safeguards Principle in Law. 73
200 Buku panduan Workshop *Urban & Climate Resilience* Mengenali karakter lingkungan secara mandiri 73
204 Pedoman Greening MP3EI Bidang Redd+ 73
205 Pedoman Mainstreaming Redd+ Ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan 74
227 Desain Konsep Sistem Informasi Safeguards REDD+ Indonesia 74
228 Kajian Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kota Manado 75
234 Kebijakan Penyelesaian Konflik Lahan Untuk Tata Kelola Kehutanan Yang Adil Dan Berkelanjutan 75
235 Submission By Indonesia National Forest Reference Emission Level For Deforestation And Forest Degradation In The Context Of The Activities Referred To In Decision 1/Cp.16, Paragraph 70 (Redd+) Under The Unfccc ... 75
240 Sharing Pandangan DKN tentang FPIC. 75
241 FPIC Konsep, Pendekatan dan Standard: dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional 76
242 Evaluasi dan Refleksi Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Pada Rezim SDA-LH 76
244 Peta jalan Kajian Peraturan terkait Kehutanan. 77
245 Prinsip Kriteria dan Indikator Safeguards REDD+ Indonesia – PRISAI versi Mei 2013 77
246 Kesimpulan Lokakarya Strategi dan Rencana Implementasi MRV REDD+ 77
247 Prosiding. Training of Trainers (ToT) Penghitungan dan Monitoring Karbon Hutan 77
249 REDD+ SES. Progress Towards And Results Of A Participatory, Transparent And Comprehensive Approach to REDD+ Safeguards 78
250 REDD+ Safeguards and REDD+ SES Training Kit Version 1 September 2014..... 78
251 Pedoman penggunaan Standar Sosial & Lingkungan REDD+ di tingkat negara. Versi 2, 16 November 2012 78
253 REDD+ SES. Standar Sosial & Lingkungan REDD+ SSL REDD+ Versi 2 (10 September 2012) 79
254 Lessons Learned for Credible and Effective REDD+ Safeguards Information Systems. november 2014 79
257 FREDDI: Instrumen Pendanaan REDD+ di Indonesia. 79
263 Working paper Striking The Balance: Ownership And Accountability In Social And Environmental Safeguards 79
264 Struktur dan Komposisi Komite Kerangka Pengaman 80
266 Sintesis Pengaman Sosial dan Lingkungan (SES) TFCA Kalimantan 80
285 Kajian Jasa Ekosistem Dan Isu Sosial Budaya. 80
286 Kajian Aspek Hukum Berbagai Konsesi Di Kawasan Hutan Gambut Rawa Tripa (TPSF) Kabupaten Nagan Raya Dan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh 80
378 Prosiding Workshop MRV untuk Kesiapan Implementasi Redd+ di Provinsi Nusa Tenggara Barat 81

379 Prosiding Workshop MRV untuk Kesiapan Implementasi Redd+ di Provinsi Sumatera Barat 81
380 Prosiding Workshop MRV untuk Kesiapan Implementasi Redd+ di Provinsi Sumatera Selatan 82
388 Pandangan Kamar Bisnis tentang Safeguard dalam implementasi REDD+ 82
390 Sagefurad REDD+ dalam perspektif Kamar Akademisi 82
392 Pandangan Kamar LSM/Pemerhati tentang Safeguard REDD+ 82
394 Pandangan Kamar Masyarakat tentang safeguard REDD 83
396 Pandangan dan Masukan Kamar-kamar DKN tentang Safeguard dalam Implementasi REDD+ 83
407 Penerapan dan Verifikasi Safeguards Sosial dalam Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Desa 83
424 Bagaimana SESA Seharusnya 84
425 Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 84
428 Getting Gender in the REDD+ Social and Enviromental Standars. Lessons from Action Research Booklet 1 85
428 Getting Gender in the REDD+ Social and Enviromental Standars. Action Steps for National REDD+ Program Booklet 2 85

Regulation 86

212 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut. 86
213 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut 86
214. Keputusan Ketua Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ Nomor:02/Satgas REDD+/09/2012 tentang strategi nasional REDD+ Indonesia 86
215 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 86
216 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 86
217 Kesepakatan Bersama antara Perprov Kalimantan Tengah dengan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ 87
218 Kesepakatan Bersama antara Perprov Kalimantan Timur, Pemkab Berau, Pemkab Kutai Barat, Pemkab Kutai Kartanegara dengan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD 87
219 Nota Kesepahaman antara Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ dengan Pertamina Foundation (PF) 87
220 Nota Kesepahaman antara Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ dengan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional 87
224 Deklarasi Program Nasional pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui penuruan emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan dan lahan gambut 88
233 Draf Final Rencana Aksi Nasional Untuk Implementasi Redd+ (RAN - REDD+) . 88
267 Kesepakatan Bersama antara Perprov Jambi, Pemkab Merangin, Pemkab Muaro Jambi, Pemkab Tebo dengan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ ... 88

268 Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 88
270 Peraturan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial NOMOR: P. 01/PKPS/PP/PSKL.0/5/2016 89
271 Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan nomor. P.7/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 89
272 Peraturan Gubernur Kalimantan tengah Nomor 17 tahun 2011 89
273 Gubernur Riau Nomor: Kpts.331/IV/2013 89
274 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 89
275 Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Program Penataan Perizinan 90
276 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 ... 90
277 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas 90
278 Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 90
279 Ringkasan Eksekutif Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Riau dalam Implementasi REDD+ 90
280 Strategi dan rencana aksi provinsi (SRAP) implementasi REDD+ Kalimantan Timur 91
281 Strategi dan rencana aksi provinsi (SRAP) Papua dalam implementasi REDD+ 91
282 Strategi dan rencana aksi provinsi (SRAP) Papua Barat dalam implementasi REDD+ 91
283 Kesepakatan bersama pelaksanaan program percontohan Kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah 92
293 Strategi dan rencana aksi provinsi (SRAP) Riau dalam implementasi REDD+ .. 92
382 Strategi Dan Rencana Aksi Redd+ Provinsi Sumatera Selatan. 92
405 Aide Memoire – Preparation and Supervision Mission 93
406 National Strategi REDD-Indonesia Readness Phase 2009 -2012. 93
419 Strategi Dan Rencana Aksi Provinsi Untuk Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Plus / Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation Plus (SRAP REDD+) Sumatera Barat 94
420 Strategi Dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Redd+ Aceh 94
421 Strategi Dan Rencana Aksi Provinsi (Srap) Implementasi Redd+ Kalimantan Timur 95
422 Strategi Dan Rencana Aksi Redd+ Provinsi Jambi 2012 – 2032 Dokumen Utama 95
423 Strategi Daerah Redd+ Kalimantan Tengah 96

Strategic Option NRM 96

011 Berbak Carbon Inisiative di kawasan Taman Nasional Berbak menuju Kesiapan Implementasi REDD+ di Indonesia 96
052 Rumusan Lokakarya 96
063 Dialog Awal tahun REDD+ 97

064 Pendampingan dalam Penyusunan dan Implementasi Penelaahan Data Multipihak dan Proses Persetujuannya 97
065 Materi Pelatihan Konsep Dasar Modeling dalam GIS Materi Pelatihan Pengelolaan WebGIS..... 97
066 Identifikasi dan Klasifikasi Data yang Diperlukan dan Tersedia untuk Implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat 98
067 Pendampingan dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Kajian Data Para Pemangku Kepentingan serta Proses Persetujuannya. Daftar Para Pemangku Kepentingan dan Proyek/Program yang Relevan dengan REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat 98
068 Penilaian Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dan Individu dalam Pengelolaan Data dan Perancangan Proses Pengembangan Kapasitas yang diperlukan..... 98
069 Identifikasi dan Klasifikasi Kebutuhan Data untuk Implementasi REDD+ di Provinsi Papua Barat. 99
070 Manajemen/Informasi Eksekutif untuk Implementasi REDD+ di Provinsi Papua 99
071 Hasil Kegiatan /Prestasi yang Dicapai Untuk Mengaktifkan Proses Berbagi Data dengan Para Pihak di Provinsi Papua. 99
072 Aksi/Capaian dalam Upaya Meningkatkan Pelembagaan Pengelolaan Data di Provinsi Papua. 99
073 Pengkajian Kapasitas Kelembagaan dan Staf Yang Diperlukan Untuk Pengelolaan Data di Provinsi Papua. 100
074 Identifikasi dan Klasifikasi Data yang Dibutuhkan dan Tersedia untuk Implementasi REDD+ di Provinsi Analisa Kebutuhanan data untuk implementasi REDD+ di Provinsi Sumatera Barat 100
075 Proses Sistem Pengelolaan Informasi / Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengelolaan Data di Provinsi Papua 100
076 Proses Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi / Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pengelolaan Data di Provinsi Papua 101
078 Pengelolaan dan Berbagi Data REDD+ di Papua. 101
089 Matrik Indikator PGA dalam Implementasi REDD+ di Indonesia Berdasarkan Kategori Isu 101
090 Matrik Indikator PGA dalam Implementasi REDD+ di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola 101
097 Implementasi Mekanisme REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.....102
099 Laporan Pertemuan Indonesia 11 Pertemuan Para Pihak Untuk Konsultasi Dan Konsolidasi Rencana Implementasi REDD+ Di 11 Provinsi.....102
110 Buku Kumpulan Peraturan Penegakan Hukum Terpadu dengan Pendekatan Multi-Door dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di atas Hutan dan Lahan Gambut 103
112 Pengembangan Model Pertanian Terpadu Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. 103
113 Program pengembangan Budidaya Perikanan keramba dan karet berbasis kearifan lokal pada kawasan program lahan Gambut. 104
114 Program pengembangan Budidaya Perikanan keramba dan karet berbasis kearifan lokal pada kawasan program lahan Gambut. 104

115 Green Livelihood Access for Central Kalimantan's Inclusive Environmental Response to Climate Change (GLACIER) 104
116 Green Livelihood Access for Central Kalimantan's Inclusive Environmental Response to Climate Change (GLACIER) Quarterly Report Draft January – March 2013 104
117 Green Livelihood Access for Central Kalimantan's Inclusive Environmental Response to Climate Change (GLACIER) Quarterly Report Draft July – September 2013.....105
118 Penyediaan Akses Modal Guna Penguatan Sosio Ekonomi, Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan bagi Para Penduduk di Wilayah Eks PLG Desa Manusup Hiiir, Tarantang, Lamunti, Pu!au Kaladan, Kalumpang dan Katimpun Periode dari 23 Juli -10 September 2012 105
119 Providing Capital Access for Socio-Economic Strengthening of Villagers and Sustainable Entrepreneurship Development in Ex-Mega Rice Project Area in Central Kalimantan.....105
120 Restorasi Hidrologi Dan Pelestarian Kearifan Lokal Pada Wilayah Rawan Kebakaran Lahan Dl Kecamatan Kapuas Murung Di Kabupaten Kapuas. 106
121 Providing Capital Access for Socio-Economic Strengthening of Villagers and Sustainable Entrepreneurship Development in Ex-Mega Rice Project Area in Central Kalimantan.....106
122 Penyediaan Akses Modal Guna Penguatan Sosio Ekonomi, Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan bagi Para Penduduk di Wilayah Eks PLG Desa Pulau Kaladan 106
123 Penyediaan Akses Modal Guna Penguatan Sosio Ekonomi, Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan bagi Para Penduduk di Wilayah Eks PLG Desa Katimpun 106
124 Penyediaan Akses Modal Guna Penguatan Sosio Ekonomi, Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan bagi Para Penduduk di Wilayah Eks PLG Desa Manusup Hilir 107
125 Dokumen Pendukung Progress Financial Report tahap II Kegiatan Khusus REDD+ di di daerah Eks PLG Pengembangan Teknologi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan berbasis perkebuan karet rakyat dan integrasi tanaman sela di Desa Jabiren kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulau Pisang Kalteng 107
126 Dokumen Pendukung Progress Financial Report tahap III Kegiatan Khusus REDD+ di di daerah Eks PLG Pengembangan Teknologi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan berbasis perkebuan karet rakyat dan integrasi tanaman sela di Desa Jabiren kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulau Pisang Kalteng 107
127 Laporan Teknis kegiatan tahap I, II, III 108
160 Pedoman untuk mempelajari berbagai dampak proyek REDD+ bagi mata pencarian.....108
177 Laporan Pelatihan Pembuatan Persemaian Dan Pembibitan Tanaman Hutan Lahan Gambut Desa Garong, Kecamatan Jabiren, Kab Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. 108
186 Scientific Evidence Dalam Perkara Kerusakan Lingkungan Hidup (Perusakan Akibat Pertambangan) 108
206 Di Balik Layar Menuju Sekolah Indonesia 108
222 Laporan Implementasi REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah 109

223 Tumbuh dengan REDD+: Memicu Keterlibatan Swasta dalam Paradigma Ekonomi Baru Indonesia 109
225 Pedoman Teknis Sistem Manajemen Informasi Energi Dan Emisi (SMIEE) Dalam Implementasi Konservasi Energi Dan Pengurangan Emisi Co2 Di Sektor Industri (Fase 1). 110
226 Submission By Indonesia National Forest Reference Emission Level For Deforestation And Forest Degradation In The Context Of The Activities Referred To In Decision 1/CP.16, PARAGRAPH 70 (REDD+) UNDER THE UNFCCC 110
229 Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim: Tarakan, Sumatera Selatan dan Malang Raya Ringkasan untuk pembuat kebijakan.....110
237 Modul Mengenal Masyarakat Peduli Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah. 110
284 Study Of Biodiversity In The Tripa Peat-Swamp Forest Scientific Studies For The Rehabilitation And Management Of The Tripa Peat-Swamp Forest.....111
287 Socio-economic study concerning the communities living in the Tripa Peat-Swamp Forest.....111
288 Ekologi Rawa Dan Disain Teknis Rehabilitasi Tanaman Di Areal Hutan Gambut Rawa Tripa Provinsi Aceh.....111
289 Laporan kanal Blocking 112
290 Laporan Wetland Restoration Plan 112
291 Cadangan Karbon Di Bawah Permukaan Tanah Di Ekosistem Hutan Gambut Rawa Tripa 112
292 Cadangan Karbon Di Atas Permukaan Tanah Di Ekosistem Hutan Gambut Rawa Tripa 113
294 Modul Pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan 113
301 Description Of Redd+ Relevant Data Available For Central Kalimantan Province By January 2012 Provision Of Baseline Data And Base Map Assessment For Central Kalimantan And Institutionalization Of An Integrated Cadastral Mapping And Survey System.....114
302 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia Deliverable 1: Identification And Classification Of The Data Required And Available For Redd+ Implementation In The Province Task 1a: Analysis Of The Specific Data Required For Redd+ Implementation In Jambi Province. ..114
303 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia Deliverable 1: Identification And Classification Of The Data Required And Available For Redd+ Implementation In The Province. Task 1b: Defined Classification System (Taxonomy) For Data Approved By The Redd+ Taskforce.....114
304 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia. Deliverable 1: Identification And Classification Of The Data Required For Redd+ Implementation In Jambi Province Task 1c: Report Detailing The Availability Of Data, From Secondary Resources, Required For Redd+ Implementation In Jambi Province.....115
305 AVAILABLE DATA FOR REDD+ IMPLEMENTATION IN EAST KALIMANTAN PROVINCE Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for East Kalimantan, Indonesia 115

306 Assistance In The Development And Implementation Of A Multistakeholder Data Review And Endorsement Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For East Kalimantan, Indonesia 115

307 Assessment Of Spatial Data Available For East Kalimantanprovision Of Baseline Data And Cadastral Maps For East Kalimantan, Indonesia.....116

308 Data Incompletenessand Inconsistenciesprovision Of Baseline Data And Cadastralmaps For East Kalimantan, Indonesia 116

309 Improving Institutionalization Of Data Management In East Kalimantan Province Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For East Kalimantan, Indonesia. 116

310 Data Sharing And Endorsement Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for East Kalimantan, Indonesia.....116

311 Pengelolaan Dan Berbagi Data Redd+ Di Kalimantan Timur Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For East Kalimantan, Indonesia.....117

312 Baseline Data For Redd+ In Central Kalimantan Province Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System 117

314 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province. Deliverable 2: Processing And Analysis Of Data From The Jambi Province Task 2a: Compiled Currently Available Data For The Province As a Reference Document And Include Any Constraint/Lessons Encountered. 117

315 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Identification And Classification Of The Data Required And Available For REDD+ Implementation In The Province Deliverable 1a: Analyse The Specific Data Required For REDD+ Implementation In The Province. 118

316 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Identification and Classification of the Data Required and Available for REDD+ Implementation in the ProvinceDeliverable 1b: Develop a Classification System (taxonomy) for Data in Consultation with the REDD+ Taskforce.....118

317 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Identification and Classification of the Data Required and Available for REDD+ Implementation in the ProvinceDeliverable 1c: Identify the Availability of Data, from Secondary Resources, Required for REDD+ Implementation in the Province 118

318 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Processing and Analysis of Data from the Province Deliverable 2a: Compile Currently Available Data for the Province as a Reference Document, and Include any Constraints/Lessons Encountered 119

319 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Processing and Analysis of Data from the Province Deliverable 2b: Analyze Compiled Data for the Province and Generate Management/Executive Information for REDD+ Implementation 119

320 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Analysis of Incomplete and/or Inconsistent Data and Process Development for the Acquisition of Additional Data and/or Validation of Data Deliverable 3b: Prepare a Plan to Mitigate Data Incompleteness and/or Inconsistency and Design Process for Corrective Data Acquisition with Validation through Ground-truthing.....120

321 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Analysis of Incomplete and/or Inconsistent Data and Process Development for the Acquisition of Additional Data and/or Validation of Data. Deliverable 3c: Assist the REDD+ Taskforce in Procurement Processes for the Acquisition of Required Data for the Province and Facilitate Community Outreach to Include Participatory/ Community Mapping.....120

322 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Integrate and Standardize Tools for Maintaining Data in the Province. Deliverable 4a: Review Current Information Management System (IMS) and Processes Used for Managing Data in the Province, and Recommend the Most Viable IMS and Processes to Support and Build Upon. 121

323 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Integrate and Standardize Tools for Maintaining Data in the Province. Deliverable 4b: Prepare an Action Plan to Enable Further Development of Existing IMS and Processes for Managing Data in the Province, in particular community/participatory cadastral mapping.....121

324 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Integrate and Standardize Tools for Maintaining Data in the Province. Deliverable 4c: Implement the Action Plan to Enable Further Development of Existing IMS and Processes for Managing Data in the Province. 121

325 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Task 5Assistance in the Development and Implementation of a Multi-Stakeholder Data Review and Endorsement Process Deliverable 5a: Develop a Registry of Stakeholders and Projects/ Programmes Relevant to REDD+ in the Province 122

326 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Task 5Assistance in the Development and Implementation of a Multi-Stakeholder Data Review and Endorsement Process Deliverable 5c :Implement the Action Plan to Enable Effective and Efficient Engagement of Stakeholders and to Ensure Their Views and Opinions are Reflected in the Compiled Data for the Province 122

327 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia.Task 6: Sharing Data with Stakeholders Including National and International Stakeholders. Deliverable 6a: Prepare an Action Plan for Effective Sharing of Data with Stakeholders Including National and International Stakeholders 123

328 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia. Task 6: Sharing Data with Stakeholders Including National and International Stakeholders. Deliverable 6b: Implement the Action Plan to Share Data with Stakeholders Including National and International Stakeholders. 123

329 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia. Facilitate and Enable the Institutionalization of Data Management in the Province Deliverable 7a: Analyze the Requirements for Improved Institutionalization of Data in the Province, in particular, Community/ Participatory Mapping.....124

330 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Facilitate and Enable the Institutionalization of Data Management in the Province Deliverable 7b: Assist the REDD+ Taskforce to Implement, in

Cooperation with Stakeholders, Measures to Improve the Institutionalization of Data Management in the Province 124

331 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia. Task 8:Assessment of Institutional and Individual Capacity Gaps in Data Management and Design of Required Capacity Development Processes Deliverable 8a: Assess Institutional and Individual Capacities Required for Data Management in the Province 125

332 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Task 8: Assessment of Institutional and Individual Capacity Gaps in Data Management and Design of Required Capacity Development Processes. Deliverable 8b: Design and Prepare Short- and Long-term Capacity Development Programmes to Address Gaps at District, Provincial and National Levels as well as for Relevant NGOs/CSOs and Community Groups 125

333 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Task 9: Develop Data Management Training and Capacity Development Programmes for Stakeholders in the Province Deliverable 9a: Collate and Prepare Relevant Training Material Appropriate for the Province, and Suitable for Direct and Distance Learning 126

334 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Task 9: Develop Data Management Training and Capacity Development Programmes for Stakeholders in the Province Deliverable 9b: Deliver Priority Training Courses to Key Stakeholders 126

335 Stakeholder Engagement Plan Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. The report identifies 22 stakeholder groups as priorities for engagement.....127

336 Dissemination Plan Of The Basemap And Cadastral Mapping System Design Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System 127

337 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2) Task 1. Identification and classification of the Data required and available for REDD+ Implementation in the Province. Deliverable 1a. Analyse the specific Data required for REDD+ implementation in the Province 127

338 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2) Task 1. Identification and classification of the Data required and available for REDD+ Implementation in the Province. Deliverable 1b: Develop a classification system (taxonomy) for data inconsultation with the redd+ taskforce 128

339 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2) Task 1. Identification and classification of the Data required and available for REDD+ Implementation in the Province. Deliverable 1c : Identify the Availability of Data from Secondary Resources, Required for REDD+ Implementation in the Province.....128

340 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 2. Processing and analysis of Data from the Province.Deliverable 2a: Compile currently available Data for the Province as a reference document, and include any constraints & lessons encountered. 129

341 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 2. Processing and analysis of Data from the Province.Deliverable 2b: Analyse compiled data for the province and generate management/excecutive information for REDD+ implementation.....129

342 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 3. Analysis of incomplete and/or inconsistent Data and process development for the acquisition of additional Data and/or validation of Data Deliverable 3a: Analyse incompleteness and/or inconsistency between Data available and Data required for REDD+ implementation in the Province 129

343 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 3. Analysis of incomplete and/or inconsistent Data and process development for the acquisition of additional Data and/or validation of Data Deliverable 3b: Assist the REDD+ Taskforce in Data Acquisition Processes for the Province, Including Participatory Community-Provided Data/Mapping 130

344 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 4. Integrate and Standardise Tools for Maintaining Data in the Province. Deliverable 4a: Review Current Information Management Systems (IMS) and Processes Used for Managing Data in the Province, and Recommend the Most Viable IMS and Processes to Support and Build Upon ..130

345 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 4. Integrate and Standardise Tools for Maintaining Data in the Province. Deliverable 4b: Prepare an Action Plan to Enable Further Development of Existing IMS and Processes for Managing Data in the Province, in Particular Community & Participatory Cadastral Mapping 131

346 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 5. Assistance in the development and implementation of a multi-stakeholder data review and endorsement process. Deliverable 5a: Develop a registry of stakeholders and projects/programmes relevant to REDD+ in the Province 131

347 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 5. Assistance in the development and implementation of a multi-stakeholder data review and endorsement process. Deliverable 5b: Prepare an action plan for stakeholder engagement in the province in consultation with the REDD+ Taskforce.....132

348 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 5. Assistance in the development and implementation of a multi-stakeholder data review and endorsement process. Deliverable 5c : Implement the Action Plan to enable effective and efficient engagementof stakeholder and to ensure their views and opinions are reflected inthe compiled data for the Province 132

349 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 6. Sharing Data with Stakeholders including National and International Stakeholders Deliverable 6a. Prepare an Action Plan for Effective Sharing of Data with Stakeholders including National and International Stakeholders 133

350 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 6. Sharing Data with Stakeholders including National and International Stakeholders Deliverable 6B: Implement the Action Plan to

share data with stakeholders including national and international stakeholders 133

351 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 7. Facilitate and enable the institutionalisation of data management in the province Deliverable 7a: Analyse the requirements for improved institutionalisation of data in the province, in particular community/participatory mapping 134

352 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 7. Facilitate and enable the institutionalisation of data management in the province Deliverable 7B : Assist the REDD+ Taskforce to implement, in cooperation with stakeholders, measures to improve the institutionalisation of data management in the Province 134

353 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 8. Assessment of institutional and individual capacity gaps in Data management and design of required capacity development processes Deliverable 8a: Assess institutional and individual capacities required for Data management in the Province.....135

354 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 8. Assessment of institutional and individual capacity gaps in Data management and design of required capacity development processes Deliverable 8B. Design and prepare short- and long-term capacity development programmes to address gaps at district, provincial and national levels as well as for relevant NGOs/CSOs and community groups 135

355 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2).Task 9. Develop Data Management Training and Capacity Development Programmes for Stakeholders in the Province deliverable 9a. Collate and Prepare Relevant Training Material Appropriate for the Province, and Suitable for Direct and Distance Learning. 136

356 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 9. Develop Data Management Training and Capacity Development Programmes for Stakeholders in the Province deliverable 9b. Deliver Priority Training Courses to Key Stakeholders 136

357 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System Delivery Plan For Priority Training To Support Redd+ In Central Kalimantan.136

358 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia. Deliverable 5:Assistance In The Development And Implementation Of A Multi-Stakeholder Data Review And Endorsement Process. Task 5a: Develop A Registry Of Stakeholders And Projects/Programmes Relevant To Redd+ In The Province 137

359 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia. Deliverable 5:Assistance In The Development And Implementation Of A Multi-Stakeholder Data Review And Endorsement Process. TASK 5b: Prepare An Action Plan for Stakeholder Engagement in The Province in Consultation with The REDD+ Taskforce.....137

360 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. Analysis Of Inconsistency And System Design To Improve The Quality And Quantity Of Spatial And Non-Spatial Data.....138

361 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia. DELIVERABLE 6:Sharing Data with Stakeholders Including National and InternationalStakeholders. TASK 6A:Action Plan for Effective Sharing of Data with Stakeholders Including Nationaland International Stakeholders....138

362 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. Design Of A System For Integrated Cadastral Mapping And Survey In Central Kalimantan 139

363 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia. DELIVERABLE 8: Assessment of Institutional and Individual Capacity Gaps in Data Management and Design of Required Capacity Development Processes TASK 8B: Programmes Prepared for Short and Long-Term Capacity Development to Address Gaps at District, Provincial and National Levels as Well as for Relevant NGOs/CSOs and Community Groups 139

364 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. Record Of Stakeholder's Views On The Proposed Basemap And Integratedcadastral Mapping And Survey System In Central Kalimantan 140

365 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia.DELIVERABLE 9: Develop Data Management Training and Capacity Development Programmes for Stakeholders in The Province TASK 9A: Training Material, Collated and Prepared in Accordance with the Specific Needs and Prevailing Conditions of Jambi Province.....140

366 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. Endorsement of the final basemap and proposed Integrated Cadastral Mapping and Survey (ICMS) system by stakeholders is required to ensure that the system is utilized, managed and upgraded 140

367 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. Report On Data Acquisition To Support Redd+ In Central Kalimantan 141

368 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. Report On Delivery Of Priority Training Needs In Support Of Redd+ In Central Kalimantan 141

369 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. Metadata And Storage System 142

370 Penyediaan Data Baseline dan Peta Kadastral untuk Provinsi-Provinsi Prioritas di Indonesia (Lot 1: Provinsi Aceh) Deliverable 8a : Penilaian kesenjangan kapasitas institusi dan individu dalam pengelolaan data serta rancangan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan di lingkup Provinsi Aceh 142

371 Progres Pembangunan Sistem Penyediaan Informasi Tentang Pelaksanaan Safeguards Redd+ (System For Information Provision On Redd+ Safeguards/SIS-Redd+) Di Indonesia. 142

375 Identifikasi Keglatan-kegiatan yang Mengurangi Emisi Karbon melalui Peningkatan Serapan Karbon dan Stabilisasi Simpanan Karbon Hutan di Indonesia 143

376 Prosiding Seminar “Green Grabbing” Di Indonesia: Apa Dan Bagaimana Kita Menyikapinya? 143
410 Sharing Pembelajaran Dari Implemantasi Redd+ Di Taman Nasional Meru Betiri 144
414 Proyek Restorasi dan Konservasi Hutan Gambut di Katingan dan Kotawaringin Timur. 144

Social Risk 144

430 Pelibatan Masyarakat Berau Dalam PKHB: Strategi Dan Pembelajaran 144
431 Laporan Ringkas Mencegah Risiko Korupsi pada REDD+ di Indonesia 145
432 Mengintegrasikan Adaptasi ke dalam REDD+ Dampak Potensial dan Rentabilitas Sosial di Setulang, Kabupaten Malinau, Indonesia 145
433 Pilihan-pilihan untuk aksi REDD+: Apa saja dampaknya terhadap hutan dan masyarakat? Suatu Pengantar bagi para pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah 145
434 Free Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+: Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek 146
435 Penguatan REDD+ *Safeguard* Tentang Antikorupsi Program REDD+ di Indonesia 146
436 Safeguard Sosial Dan Lingkungan Redd+ Kalimantan Timur 147
437 Prinsip, Kriteria, Indikator Dan Verifier Safeguard Redd+ Kalimantan Timur 147
439 Opportunity And Risk Of Redd+, Green Economy, And Sustainable Development 148
440 Staying on Track: Tackling Corruption Risks in Climate Change 148
441 Update Perundingan Iklim terkait REDD+ Bonn 4-15 Juni 2014 149

Enviromental And Social Aspect

031 Best Practices Implementasi Safeguards Redd+ Pada Pt Riau Andalan Pulp And Paper

Makalah disampaikan dalam Workshop Penerjemahan Keputusan COP-16 tentang "REDD+ Safeguards" dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi tentang Pelaksanaan Safeguards REDD+ di Indonesia Jakarta, 21 Maret 2011 PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) merupakan bagian dari Asia Pacific Resources InternationalLimited (APRIL) yang merupakan salah satu produsen pulp dan kertas terbesar di dunia•PT RAPP beroperasi secara terintegrasi di Provinsi Riau, Sumatera, untuk memproduksi serat kayu, pulp dan kertas. Minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan melalui SAFEGUARDS: HCV, Eco-Hidro, Fire & Haze, Sertifikasi PHPL, MRVCurah Hujan.

PT.RAPP. 2011

032 Integrating Gender Into Redd+ Safeguards Implementation In Indonesia

This report provides a country-level situation analysis of gender in the forestry sector and an analysis of the extent to which gender has been integrated in REDD+ policies in Indonesia. Drawing on lessons learned from the UN-REDD Indonesia Programme implementation, particularly in Central Sulawesi Province, the report identifies entry points for strengthening gender aspects in the REDD+ policies and programmes as well as the implementation of REDD+ social safeguards.

Abidah Billah Setyowati Jeannette Gurung, Yani Septiani. 2012.
UN-REDD

046 Panduan Pelibatan Masyarakat Setempat dalam Implementasi REDD+ di Indonesia Wilayah Timur.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Bogor, Indonesia. World Bank melalui Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Pengembangan mekanisme REDD+ dalam kerangka kerja UNFCCC, mengharuskan adanya sistem safeguards lingkungan dan sosial yang dikembangkan secara akuntabel, transparan dan partisipatif, sebagai mana ditetapkan pada COP-16. Terdapat dua prinsip penting dari 7 prinsip yang ada dalam sistem safeguards yang terkait secara langsung dengan masyarakat adat dan lokal yaitu: (1) Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun masyarakat lokal dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai hak-hak masyarakat adat; (2) Partisipasi penuh para pihak (stakeholders) terkait, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal. Karena itu panduan memberi ruang partisipasi masyarakat adat dan local secara luas.

Handoyo, dkk. 2014

FCPF

051 Studi Kasus dan Tantangan Legalitas: Konservasi hutan bernilai karbon tinggi (HCS forests) pada areal konsesi perkebunan Sawit

Makalah di presentasikan pada“KADIN-CGF Palm Oil Workshop . 2014. Jakarta, 13 November 2014. Menunjukkan studi kasus inisiatif konservasi hutan bernilai karbon tinggi (HCS forests) oleh salah satu grup bisnis sawit (Golden Agri/PT Smart) •Menjelaskan tantangan dari segi peraturan perundangan berlaku dalam mempertahankan hutan bernilai karbon tinggi yang berada di sejumlah konsesi sawit Golden Agri/PT Smart. Rekomendasi untuk mengatasi dampak lingkungan dan sosial yaitu 1) Tetap mengurus HGU pada seluruh areal izin lokasi, 2) Tidak melakukan tukar menukar kawasan hutan, 3) Areal HCS tidak dimasukkan ke dalam Peta Indikatif Moratorium; 4) Setidak-tidaknya, diperlukan dasar legalitas yang memadai untuk perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang ingin/bersedia memproteksi hutan HCS yang tersebar di areal konsesi-konsesi sawitnya

053 Indonesia Palm : Sustainable Sourcing.

Aim to achieve the following objective by 2019 ie 1) Certify all estates managed by the Group and its plasma smallholders to RSPO and ISPO; 2) Audit 100% of our palm oil and other crops against world class standards, such as RSPO, ISPO, 3) - Reduce our environmental footprint; 4) Improve the lives of the people living and working on our estates.

Franciscus Welirang. 2014

IndoAgri

054 Toward Sustainability Palm Oil, the case of Indonesia

Makalah disampaikan di Jakarta, 13 Nov 2014. **Industri Sawit Indonesia-** *Current Facts 1)* 4 juta kepala keluarga petani dan karyawan langsung, 16 juta KK tidak langsung; 2) 20 milyar dollar AS devisa rata-rata per tahun; 3) 4 % dari PDB Nasional (2013); 4) Trade surplus sektor pertanian sebagian besar disumbang komoditi sawit; 5) Menguasai pasar minyak nabati global, dengan pangsa pasar 17,5 %; 6) Kemajuan Daerah banyak yang dimulai dari perkebunan sawit (Sumut, Riau, Sulbar, dsb) dan 7)Sustainable. Asal Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia(1990-2012) dari *Degraded Land* dan *Low-carbon* Bukan Langsung dari Hutan Primer. Palm Oil sbg komoditas strategis, berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja; Palm Oil adalah sustainable sebagai tanaman pertanian, Indonesian Palm Oil sustainable secara regulasi; Problem sustainable PO supply chain di Indonesia adalah problem tata ruang nasional.

KADIN Indonesia, 2014.

055 Review Pelaksanaan & Penerapan FPIC dalam Sektor Industri Sawit Berdasarkan Standard RSPO

Makalah disampaikan pada Seminar Mencari Format Proses FPIC untuk Indonesia : Ragam Pandangan diselenggarakan di Hotel Novotel, Bogor 17 September

2012. FPIC dalam industri sawit 1) Menjadi standard dalam kebijakan pasar minyak sawit global (RSPO) 2). Proses FPIC membantu dan memastikan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal; 3). Proses FPIC merubah pola dan pendekatan sosialisasi dan konsultasi menjadi otoritas dan penerimaan sosial; 4). Proses FPIC seharusnya melindungi, memulihkan, dan mengembalikan hak masyarakat yang diambil paksa?

Norman Jiwan dan Carlo Nainggolan, 2012
Sawit Watch Departemen Mitigasi Resiko Sosial dan Lingkungan

056 Indonesian deserves to consume Sustainable Palm Oil too.

Almost 50% of Indonesian believe green products can reduce impact on environment. 25% of Indonesian are willing to get Sustainable Cooking Oil.

Irwan Gunawan. 2014
WWF

057 Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk mendukung Sektor Perkebunan.

Makalah disampaikan pada Workshop on "Towards Sustainable and Productive Palm Oil Sector of Indonesia, diselenggarakan di Jakarta, 13 November 2014. Luas areal moratorium (PIPPIB Revisi VI) adalah seluas **64.125.478 ha** mencakup : (1) Kawasan Hutan: **61.498.601 ha** (95,9%); (2) HPK : 2.530.091 ha (3,94%) terdiri dari a) Gambut = 1.223.060 ha; b) Hutan primer = 1.307.031 ha, c) Areal Penggunaan Lain (APL): **2.620.329 ha** (4,1%). (3) Gambut = 1.998.889 ha dan (4) Hutan primer = 621.440 ha. Dari izin prinsip seluas 1.213.891 ha, areal berhutan seluas **617.363 ha (50,9%)**; Dari SK Pelepasan Kawasan Hutan seluas 6.533.287 ha, areal berhutan seluas **1.671.871 ha (25,6%).**

Ruandha Agung Sugardiman, 2014
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

058 Kerangka Resolusi Konflik Program Redd+ Di TN-Kutai, TN-Tesso Nilo, TN-Kerinci Seblat, TN-Sebangau, & TN-Kayan Mentarang.

Makalah membahas peta konflik di 5 TN tersebut. Peta konflik dijelaskan berdasrkan 1) potensi konflik dan potensi damai di 5 TN; 2) Kronologis/sejarah konflik; 3) Peta aktor dan rekomendasi untuk resolusi konflik di 5 TN

Tim Resolusi Konflik. 2014

059 Model Kelembagaan dan Peta jalan pencegahan dan penyelesaian konflik terkait REDD+ di Indonesia.

RENCANA AKSI RESOLUSI KONFLIK DI TAHUN 2015 yaitu 1) Melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan di 5 Taman Nasional sebelumnya; 2) Inisiatif pengembanganan resolusi konflik di 3 site baru yaitu: a) Rintisan penyelesaian konflik di wilayah KPH (Donggala-Sulteng), b) Kekisruhan governance di wilayah konflik yuridiksi administrasi (Kalteng) dan c) Potensi konflik ekonomi yang terkait dengan tata ruang. Kasus sengketa tata ruang di Papua Barat. 3) Melakukan kajian untuk potensi konflik di hutan lindung; 4) Melakukan

persiapan dan capacity building untuk pengembangan kelembagaan resolusi konflik BP REDD+ tahun 2016-2020

Tim Resolusi Konflik. 2014

062 Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+) di Indonesia.

Proses multi pihak mengidentifikasi elemen instrumen yang relevan dengan REDD+ yang berkesesuaian dengan Kesepakatan Cancun Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan. Selama kurun waktu 2011 – 2012, proses multi pihak telah dilakukan untuk memfasilitasi pembangunan SIS-REDD+ di Indonesia, melalui identifikasi elemen-elemen dari instrumen-instrumen yang ada yang relevan dengan *safeguards* REDD+ sesuai dengan Keputusan Cancun. Proses multi pihak ini meliputi 3 lokakarya nasional, serangkaian *Focus Group Discussion*, serta lokakarya regional di Kalimantan Tengah. Proses ini difasilitasi oleh Pusat Standardisasi dan Lingkungan – Kementerian Kehutanan, dengan dukungan dari GIZ-FORCLIME. Laporan ini dimaksudkan sebagai dokumen publikasi yang menginformasikan hasil dari proses multi pihak selama 2 tahun tersebut; dan untuk merefleksikan proses yang telah dilalui, laporan ini disusun dengan struktur sebagai berikut : Pengantar; Identifikasi Elemen yang Relevan dari Instrumen yang ada; Identifikasi Prinsip, Kriteria dan Indikator dari Instrumen yang ada; dan Kesimpulan. Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi *Safeguards* REDD+ (SIS-REDD+) sebagai hasil dari proses tersebut disajikan sebagai lampiran dari laporan ini.

Neil Franklin dan Aisyah Sileuw. 2013

082 Laporan Sintesis Capacity Building Pedoman Mainstreaming Redd+ Ke Dalam Sistem Perencanaan Nasional Dan Pedoman Greening MP3EI Bidang Redd+ Di Provinsi Prioritas REDD+

Dalam laporan ini merekomendasikan untuk mainstreaming REDD+ di provinsi percontohan yaitu (1) Penguatan kapasitas untuk mainstreaming REDD+ membutuhkan penguatan pemahaman atas substansi REDD+ pada sektor penataaan ruang dan sektor berbasis lahan, serta penguatan pemahaman terhadap proses perencanaan yang didukung oleh “spatial baseline information” yang kuat mengenai kawasan hutan yang akan dipertahankan sebagai hutan tetap; (2) Disarankan kepada pemerintah daerah provinsi untuk mensosialisasikan pengetahuan pada capacity building ini ke pemda kabupaten. Cara lain adalah mewajibkan staf perencana pada SKPD kabupaten untuk mengikuti secara aktif dalam proses capacity building yang diadakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pertimbangannya adalah bahwa SKPD kabupaten merupakan penanggungjawab pelaksanaan REDD+ yang kewenangannya sudah diberikan kepada mereka; (3) Perlu dipertimbangkan status/legalitas pedoman mainstreaming REDD+ dan pedoman greening MP3EI, di dalam proses perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Tanpa adanya kejelasan status/ legalitas, maka kedua pedoman tersebut kemungkinan besar hanya menjadi pengetahuan. (4). Desentralisasi anggaran, termasuk anggaran pendidikan yang berorientasi pada peningkatan sumberdaya manusia, perlu di-reform agar penggunaannya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan Daerah; (5) Perlu ada pelatihan khusus

mengenai pendekatan insentif dan disinsentif sebagai instrumen pembangunan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. (6). Mainstreaming REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Greening MP3EI bidang REDD+, serta program dan kegiatan implementasi REDD+ secara keseluruhan perlu dilandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan untuk memastikan bahwa REDD+ selaras dan harmonis dengan pembangunan wilayah.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Redd+ Ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.2013

084 Laporan Tahun 2014 Sekretariat Bersama REDD+ Kalimantan Tengah.

Laporan Tahun 2014 yang merangkum kegiatan REDD+ baik yang difasilitasi secara langsung oleh Sekretariat Bersama REDD+ maupun kegiatan-kegiatan kerjasama antara Badan Pengelola REDD+ dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2014 masih merupakan masa transisi dalam pelaksanaan REDD+, yang mana pengembanga dan penguatan kelembagaan masih merupakan prioritas utama kegiatan yang dikembangkan di tingkat nasional dan sub nasional, termasuk sosialisasi REDD+ dan penyusunan Rencana Kerja di tingkat Kabupaten, serta penguatan konsep MRV. Selain itu, kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat pun tetap dilaksanakan, dengan tujuan memperkuat bantuan yang telah diberikan dan memastikan keberlanjutan program di masyarakat

Dozi Amrozi; Fenky Wirada; Mawardi; Roby Agus; Teguh Priyatmono; Agustinus Herry; Eko Sulistiono; Silfia Claudina. Editor Emanuel Migo dan Mayang Meilantina.2014

093 Laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Bersama (Sekber REDD+) Kalimantan Tengah, meliputi pelaksanaan proyek-proyek REDD+ bersama masyarakat di Provinsi Percontohan REDD+ Kalimantan Tengah.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan proyek REDD+ bersama masyarakat yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Bersama (Sekber) REDD+ Kalimantan Tengah, untuk rentang waktu kegiatan 1 (satu) tahun, Juni 2012–Juni 2013. Proyek-proyek REDD+ bersama masyarakat merupakan bagian dari 38 proyek utama yang dilaksanakan di Provinsi Percontohan Kalimantan Tengah. Hal ini bersesuaian dengan peran dan mandat Sekber REDD+ Kalteng, yakni untuk memberikan dukungan koordinasi dan komunikasi pelaksanaan kegiatan di Provinsi Percontohan REDD+ Kalteng. Berbagai proyek ini difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan stakeholder terkait.

BP REDD, 2013

107 Rancangan Konsep Instrumen Pendanaan REDD+ Di Indonesia

Dokumen mencakup 4 bab yaitu latar belakang, prinsip penyusunan, arsitektur institusional, penyaluran dan mobilisasi dana, kerangka pengaman, pembagian manfaat dan mekanisme insentif dan penutup. Mekanisme pendanaan yang diusulkan menyediakan landasan untuk membangun suatu intrumen pendanaan yang akan memampukan aplikasi rencana aksi nasional jangka panjang, suatu basis pemilik proyek yang luas, serta proses pengambilan keputusan dan

penyaluran dana yang lebih cepat. Hal ini berarti, penggunaan dana akan lebih efisien dan efektif. Desain yang dikemukakan dalam dokumen ini harus dikonsultasikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan dan para ahli lainnya, baik secara nasional maupun internasional, untuk memastikan aplikasinya. Para pihak terkait harus bersepakat mengenai jangka waktu dan penyesuaian dari elemen-elemen desain serta mekanisme terkait. Proses politis juga harus berjalan secara paralel. Walaupun ada tantangan besar bagi Indonesia, kemauan politis Presiden dan rakyat Indonesia akan mendukung penyusunan instrumen pendanaan ini.

Satgas REDD+, 2012

108 Korelasi Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana.

Peta penegakan hukum di Indonesia dimana berdasar kondisi aktual Banyaknya indikasi izin kebun dan tambang yang bermasalah, seperti tidak memiliki izin pinjam pakai/pelepasan KH. Contohnya di Kalimantan sekitar 900 kasus; Perkembangan ketentuan Pidana pada UU terkait PSDA-LH : Ruang lingkup ketentuan pidana pada UU terkait PSDA-LH semakin BESAR dan menurut data2 yang ada **Legislasi terkait PSDA-LH mengandalkan Penegakan Hukum Pidana. PENERAPAN UR-PR PADA TINDAK PIDANA PSDA-LH ; Prinsip hukum:** Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan penuntutan pidana dan •**Pasal 78 UULH:** Sanksi administratif tidak membebaskan PJU/K dari . pidana

Takdir Rahmadi. 2012

109 Mempertahankan Kuantitas Dan Memperbaiki Kualitas Hutan Dan Lahan Gambut

Makalah disampaikan pada Sosialisasi Strategi Daerah Redd+Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya, 21 Mei 2013. menjelaskan kondisi tutupan lahan an kawasan hutan di Kalimantan Tengah dan potensi cadangan karbon pada tutupan tersebut. Dalam makalah juga disampaikan STRADA REDD+ dan strategi untuk mencapai Milestone REDD+ di Kalimantan Tengah.

Bismart Ferry Ibie, 2013

111 Laporan *Legal Audit* Dan *Legal Compliance* Terhadap Perusahaan-Perusahaan Pertambangan Dan Perkebunan Di Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur Dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan ini berisi hasil uji tuntas dari segi hukum atas perizinan di bidang perkebunan terhadap 69 (enam puluh sembilan) badan usaha berbentuk perseroan terbatas pada masing-masing Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Sektor Pertambangan berdasr PP 23/2010 yang mengatur bahwa pengajuan permohonan persyaratan IUP OP salah satunya adalah memenuhi syarat lingkungan yaitu mempunyai dokumen lingkungan hidup. Akan tetapi sampai dengan tanggal Laporan LALC ini tidak ada ketentuan yang mengatur akibat atau konsekuensi hukum dalam hal syarat lingkungan tersebut tidak terpenuhi. Sehingga sekiranya perlu direkomendasikan untuk adanya pengaturan atau kebijakan dari kementerian terkait apakah pengajuan permohonan IUP ditunda atau dikembalikan sebelum syarat lingkungan terpenuhi. Perbedaan mempersepsikan tindakan dan kegiatan sektor perkebunan akan membawa implikasi terhadap tiga hal, yaitu

(1) segi pengaturan (*regulation*), (2) segi tata kelola (*governance*), dan (3) segi risiko (*risk*). Ketiga hal tersebut akan terjadi pada ketentuan sektor perkebunan yang menciptakan antar-wewenang, antar-norma, dan antar-regulasi. Pemetaan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan menjadi sangat penting dilakukan pemerintah agar tindakan dan kegiatan dalam sektor perkebunan tidak mengandung dua kelemahan mendasar dari segi hukum administrasi negara, yaitu: a. *kelemahan subtansial*, yaitu apabila tindakan dan kegiatan sektor perkebunan lahir dari dan berasal dari motivasi dan kebijakan yang tidak cermat, tidak memiliki latar belakang motivasi yang taat asas, serta menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi warga masyarakat; b. *kelemahan prosedur*, jika tindakan dan kegiatan sektor perkebunan lahir dari prosedur dan syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga ada pelanggaran prosedural dan bias administratif dalam hal tindakan dan kegiatan sektor perkebunan.

Nahr Murdono Law Office. 2013
Satgas REDD+.

130 Mengukur Implementasi Moratorium Di Kalimantan Tengah.

Memberikan rekomendasi atas dikeluarkannya Inpres Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pembeian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut yaitu (1) Penghentian Pengeluaran Ijin-Ijin Baru di Kalimantan tengah dan melakukan review dan penegakan hukum bagi perusahan yang bermasalah dan melanggar hukum; (2).Mengidentifikasi wilayah / hutan yang paling terancam seperti wilayah pegunungan muller dan swahner yang merupakan wilayah tangkapan air dan sumber-sumber penghidupan rakyat, Wilayah gambut khususnya EKS PLG untuk menyelamatkan gambut yang tersisa dan merehabilitasii kawasan tersebut dengan melibatkan masyarakat dan kearifan lokal. Merehabilitasi wilayah sepadan danau dan sungai, khususnya Danau sembuluh; dan (3).Penyelesaian masalah-masalah sosial dengan membuat satu sistem mekanisme pengaduan dan resolisi konflik di tingkat daerah, mengidentifikasi dan melindungi kawasan kelola rakyat/adat serta memastikan di akomodir dalam rancana tata ruang.

Walhi Kalteng.2012

134 Kebijakan Perkebunan Dalam Pengelolaan Perkebunan Yang Lestari Berpotensi Ekonomi Dan Berkontribusi pada REDD+ (Komoditi Non Kelapa Sawit)

Makalahdisampaikan pada workshop keanekaragaman hayati pertumbuhan yang berkelanjutan dan mitigasi emisi GRK penguatan sektor ekonomi perkebunan aneka tanaman pada tgl 9 November 2012. Strategi adaptasi dilakukan melalui penyesuaian sistem produksi terhadap pemanasan dan perubahan iklim global untuk mencegah perubahan iklim/pemanasan global. Stratgei mitigasi dilakukan untuk menurunkan emisi GRK maupun penyediaan wadah, menghasilkan energi terbarukan sehingga dapat meredam pemanasan dan perubahan iklim global

Nurwono Paridjo. 2012
Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

135 Penanganan perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan LH.

Makalah menyampaikan Isu perusakan lingkungan hidup nasional, masalah yang menjadi kendala dalam hukum pembuktian adalah : delik formal dan material, ultimum remedium atau premium remedium, ganti rugi atau pidana penjara dan saksi kumulatif.

Komariah Emong Sapardjaja, 2012
Universitas Padjajaran-Hakim Agung MA

136 Kebijakan nasional perubahan iklim dan REDD+ serta peran penegak hukum.

Makalah disampaikan dalam seminar penegakan hukum dengan pendekatan multidonor, november 2012. Kerusakan Lingkungan Hidup di Tanah Air mencapai 40-50 persendari luas wilayah yang ada. Kenaikan cukup signifikan itu terjadi sejak memasuki era otonomi daerah, damana kewenangan penanganan lingkungan ada di pemerintah daerah seempat. Perizinan yang dikeluarkan pemda setempat mengancam kerusakan lingkungan. Izin yang dikeluarkan kurang bersahabat dengan upaya pelestarian lingkungan, Justru banyak yang merusak". Dalam penegakan hukum diperlukan persyaratan baik hukum pidana, perdata dan administrasi.

Mas Achmad Santosa., 2012

137 Penelusuran, Penalaran dan penemuan Hukum.

Makalah disampiakan dalam pelatihan penegakan hukum dengan penegakan hukum dengan pendekatan multidoor. Makalah ini menjelaskan tentang 2 pokok bahasa yaitu (1) Tehnik dan metode penelusuran hukum, argumentasi hukum, penalaran hukum dan penemuan hukum; (2).Membuat putusan hukum / tuntutan hukum/ penemuan hukum yang memiliki argumentasi hukum dan penalaran hukum yang valid dan benar.

Daniek G. Sukarya, 2012

138 Pembuktian dalam kasus LH"Scientific Evidence menjadi Legal Evidence"

Perbuatan melawan hukum seperti perambahan, pembalakan (liar) huta, pembakaran hutan/lahan, penambangan di kawasan lindung dan budidaya di kawasan hutan perambahan. Pengambilan keputusan dalam kasus LH berdasarkan Fakta, Hasil Analisis Laboratorium, Modus Operandi, Pasal yang Disangkakan, Lalai, Sengaja, Kesengajaan Kemungkinan.

Bambang Hero Saharjo. 2012.
Fakultas Kehutanan IPB

141 Menggalang Aksi Bersama Solusi Pencegahan Bencana Asap Melalui Pengelolaan Lahan Gambut Yang Beretika.

Berisi langkah-langkah untuk menghadapi musim kemarau Februari 2016 yang terdiri dari 5 kegiatan yaitu : 1) restorasi matapencaharian bagi petani lahan gambut dan pendampingan; 2) quice response penyekatan kanal memanfaatkan data kontur dan monitoring air yang ada pada tiap konsesi (termasuk EKS PLG Kalteng) 3) pemetaan detail topografi LiDAR (Full/strip) skala nasional,

konsolidasi data spasial dan rezonasi; $) resolusi konflik dan penegakan hukum di tingkat tapak dan 5) pernyataan bersama pemangku kepentingan.

UGM dan Para Pihak. 2015

149 Konflik Lahan, REDD+ dan FPIC.

FPIC penting dalam kegiatan REDD+, masalah konflik adalah isu governance, bisa merugikan tapi dapat menjadi peluang untuk perbaikan tata kelola hutan khususnya di Indonesia. Dalam konteks REDD+ adalah bagaimana program mampu menyelesaikan konflik pada isu-isu fundamental conatohnya tenurial, koordinasi tata ruang, aspirasi masyarakat. REDD+ sebagai peluang untuk : 1) Perbaikan tata kelola hutan, kebijakan, dan kesempatan menyelesaikan isu-isu fundamental (*back to basics*) ; 2) Perbaikan sistem informasi/database dan landuse (tata guna lahan); 3) Pengembangan kapasitas para pihak. Sehingga FPIC penting sebagi upaya untuk mitigasi : Menghindari konflik sejak dini ; Menghormati aspirasi dan hak-hak masyarakat (safeguards); Memastikan masyarakat mendapat manfaat ; Seringkali menjadi kunci sukses program dan Minghindari biaya-biaya sosial dan ekonomi dikemudian hari.

Yurdi Yusmi. 2012.
Recoftc.

150 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Mangrove Di Indonesia.

Data terakhir dari Dirjen penataan Ruang Kementerian PU menunjukkankan bahwa baru 115 dari 398 kabupaten (28,9%), 35 dari 93 kota (37,6%) dan 13 provinsi dari 33 provinsi (39,4%) yang telah menyelesaikan RTRW daerahnya sampai proses legalisasi peraturan daerah (Perda). Padahal melalui PERDA Tata Ruang ini diharapkan alih fungsi kawasan Mangrove dapat dikendalikan karena alih fungsi lahan tersebut harus mendapat persetujuan DPRD setempat. Rekomendasi 1) Perpres SPEM No. 73 Thn 2012 dapat menjadi acuan untuk penyusunan action plan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di daerah, baik strategi secara umum maupun contoh program yang dilakukan oleh K/L, sehingga terwujud sinergitas dan sinkronisasi pengelolaan mangrove dari tingkat pusat sampai ke daerah; 2) Pengintegrasian kawasan dan program mangrove ke dalam RTRW/RPJPD/RPJMD. 3) Dalam konteks kawasan mangrove merupakan satu kesatuan ekosistem dengan DAS maka diperlukan penyusunan rencana pengelolaan DAS secara terpadu lintas wilayah, dan kemudian disinergikan dengan RPJPD/RPJMD masing-masing wilayah dalam DAS tersebut ▫ harus ada sinergi waktu perencanaan; 3) KKMD dapat fokus pada pengelolaan sumber daya mangrove secara in situ, namun dalam rangka optimalisasi pengelolaan mangrove maka diperlukan juga kerjasama dan koordinasi antar daerah dalam satu DAS; 4) di bawah koordinasi Forum DAS; dan 5) Pengenalan Instrumen KLHS dalam merumuskan rencana kelola DAS terpadu

Sjofjan Bakar, 2012

150 Ringkasan Laporan Pencapaian Hasil Kegiatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan & Promisi REDD dan Perdagangan Karbon.

Laporan ini menyajikan ringkasan kegiatan dan pencapaian hasil MRPP untuk AWP I dan II. Secara garis besar kegiatan MRPP untuk komponen ini terdiri atas fasilitasi kegiatan percepatan pembentukan wilayah dan organisasi KPHP Lalan, penguatan kapasitas SDM KPHP Lalan, kegiatan penyusunan Project Design Document (PDD), dan kegiatan survey di lapangan. Selama lebih kurang dua tahun MRPP memfasilitasi Dinas Kehutanan Kab. Muba, Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, dan stakeholder lain yang terkait dengan kegiatan tersebut. Hasil yang dicapai cukup memuaskan. Beberapa hasil yang dicapai dan menjadi tonggak sejarah bagi MRPP antara lain: (1) penetapan wilayah KPHP Model Lalan oleh Menteri Kehutanan pada bulan Desember 2009; (2) penetapan UPTD KPHP Lalan Mangsang Mendis oleh Bupati Muba; (3) dukungan untuk peningkatan kapasitas SDM KPHP dan staf Dinas Kehutanan Muba melalui keikutsertaan pendidikan dan latihan calon Kepala KPH, pembelajaran melalui berbagai pelatihan, workshop dan studi banding, dan aktifitas survey di lapangan; (4) tersedianya rancangan pembangunan KPHP Model Lalan, yang digunakan sebagai *blue print* bagi KPHP (lihat dalam dokumen rancangan pembangunan KPHP: rencana kegiatan KPHP sampai tahun 2011); (5) tersedianya PDD dalam versi sementara (*draft*).

Muhammad Sidiq. 2011
GIZ

161 Standar Sosial dan Lingkungan REDD+.Pengalaman Membantu Negara-Negara Dalam Membangun Sistem Informasi Rambu Pengaman (Safeguard).

REDD + SES menyediakan dukungan yang komprehensif untuk pengembangan dan pelaksanaan dari sistem informasi rambu pengamanan (SIS) secara multi-stakeholder yang dipimpin oleh Negara. REDD + SES dirancang untuk digunakan oleh program-program REDD +nasional atau sub-nasional (misalnya secara Yurisdiksi Negara atau Provinsi) untuk menunjukkan bagaimana perlindungan terhadap aspek sosial dan lingkungan yang ditangani dan dihormati di seluruh pelaksanaan REDD+. Inisiatif REDD + SES saat ini mendukung pengembangan SIS di tiga belas negara (18 yurisdiksi). REDD + SES saat ini berdasarkan dari pengalaman praktis selama empat tahun adalah salah satu rambu pengaman di tingkat internasional yang menyediakan dukungan secara komprehensif untuk pengembangan dan implementasi SIS.

Redd-standard, 2013.

174 REDD+ in Indonesia A Catalyst for Change.

Buku berisi ringkasan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satgas REDD. Under the new paradigm Indonesia's biodiversity itself also will become a source of economic growth as companies seek out forest product to be used for pharmaceuticals and other products in sustainable manner. Deforestration nad degradation in Indonesia brought the country to the brink of irresible enviromental peril. Along with much of the world, our countr woke up to this reality and took the firs steps to repair the damage.

Satgas REDD+. 2012.

203 Buku Panduan Pelaksanaan Pengukuran dan Pelaporan (MR) Proyek Khusus Eks-PLG di Provinsi Kalimantan Tengah, INDONESIA. Percontohan MRV Non-Karbon.

Pengukuran dalam rangka MRV-REDD+ pada intinya mengukur kinerja penurunan emisi yang dicapai dengan adanya kegiatan REDD+ dan dibandingkan dengan emisi pada saat kegiatan dimulai. Namun demikian, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Proyek Khusus Eks-PLG sebagian besar adalah kegiatan yang penurunan emisinya tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, pengukuran dilakukan secara tidak langsung, dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan/mendokumentasikan komponen-komponen pemicu terjadinya emisi, yaitu deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut; komponen keanekaragaman hayati dan manfaat ikutan yang didapat oleh masyarakat dengan adanya kegiatan REDD+; kelas-kelas mitigasi REDD+ yang dilaksanakan dalam proyek/kegiatan; prinsip-prinsip Kerangka Pengaman (PRISAI) yang dapat diterapkan dalam proyek. Buku ini merupakan panduan teknis dalam melakukan pengukuran, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan REDD+, sesuai dengan perangkat MR yang telah dikembangkan khusus untuk kegiatan di eks-PLG Provinsi Kalimantan Tengah.

Ellyn K. Damayanti, Indrawan Suryadi, Arief Darmawan. 2013.
Satgas REDD+

221 Progress Towards And Results Of A Participatory, Transparent And Comprehensive Approach To REDD+ Safeguards.

REDD+ Social and Environmental Standards Initiative. Province of East Kalimantan, Indonesia – In April 2015, the Provincial Government issued a decree changing the process for issuing land use permits (including for oil palm, plantation, mining etc.) ensuring that land tenure and high conservation value forests are more effectively addressed through a more transparent process with participation of local stakeholders. This change in the process for land-use decisions by the government greatly strengthens safeguards for all land use, in particular helping to protect local community and Indigenous Peoples land rights. Land tenure and rights have become a primary consideration for the Provincial Government, in large part because they were highlighted through the participatory identification of key safeguards issues for REDD+ in the province.

Durbin J., Lhumeau A. and Franks P., 2016
REDD+ SES.

238 REDD+ SES catatan informasi mengenai Proses Multi-stakeholder

Melaksanakan pendekatan *multi-stakeholder* merupakan inti dari penggunaan Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ di tingkat negara. Proses *multi-stakeholder* hendaknya melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, Masyarakat Adat, dan masyarakat setempat, serta sektor swasta di dalam pengembangan, peninjauan, dan persetujuan indikator spesifik menurut negara dan laporan asesmen kinerja program REDD+ terhadap indikatornya. Alasan penggunaan pendekatan *multi-stakeholder* adalah untuk: 1) Menciptakan suatu wadah untuk membangun konsensus dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan yang beragam, termasuk perempuan dan kelompok rentan; 2) Meningkatkan kualitas dan kredibilitas penilaian diri dari *multi-stakeholde, 3)*

Mendorong kepemilikan bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil; 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menggunakan konsultasi *multi stakeholder* dalam mengembangkan indikator dan proses asesmen: a) Memastikan standar dan proses penilaian itu relevan dan bermakna dan b) Membangun pemahaman dan kepemilikan dari pemangku hak dan pemangku kepentingan.

The Proforest Inisiative,

239 Adoption of a participatory, transparent and comprehensive approach to REDD+ safeguards in the Province of East Kalimantan, Indonesia, 2008 to 2015.

An outcomes evaluation. East Kalimantan started to use REDD+ SES guidance and tools in 2012 to develop a set of principles, criteria and indicators that would be used to assess the social and environmental performance of the Provincial REDD+ Strategy as a means to strengthen this performance and to support the implementation of REDD+ activities in East Kalimantan. In January 2015, the REDD+ Working Group finalized the first assessment of performance against the province-specific REDD+ SES indicators. The East Kalimantan safeguards team used the REDD+ SES principles, criteria and indicator framework to guide their work. This comprehensive treatment of safeguards issues helped to encourage the civil society organizations that had been suspicious about REDD+ to engage in the REDD+ design process and also helped to build the capacity of NGOs which increased government respect and requests for their support. The broad coverage of safeguards also helped to convince the Provincial Forestry Agency to create the information system section in 2013 (5), including for safeguards information, and also contributed to the inclusion of more information about safeguards in the current revision of the Provincial REDD+ Strategy and Action Plan.

Durbin J., Lhumeau A. and Franks P. Report. May 2016.

243 Pelatihan Penegakan Hukum di bidang SDA-LH dengan Pendekatan Multi-Door.

Makalah, berisi 5 materi yaitu : 1) Perencanaan tata ruang; 2).Perencanaan kehutanan dan hubungannya dengan penataan ruang; 3).Perencanaan lahan gambut dan hubungannya dengan penataan ruang dan kawasan hutan; 4).Masyarakat adat dan 5) Peran penegakan hukum

Hariadi Kartodihardjo. 2012.

248 Indonesia Kerangka Hukum REDD+. Kerangka Pengaman (*Safeguard*).

Pada bulan September 2012, Satgas REDD+ mengeluarkan draft prinsip yang harus menjadi dasar untuk kerangka pengaman nasional Indonesia. Prinsip-prinsip ini mengikuti kerangka pengaman REDD+ UNFCCC dan sebagai tambahan memasukkan prinsip-prinsip yang terkait dengan pembagian manfaat yang berkeadilan dan pertimbangan kesetaraan gender dalam partisipasi pemangku kepentingan (Daviet, 2012). Badan REDD+, segera setelah dibentuk, akan diberi amanat untuk mengintegrasikan dan melembagakan kerangka pengaman dalam kerangka kerja REDD+. Badan ini akan menjadi otorita nasional yang ditunjuk untuk: 1) Memfasilitasi penyusunan sistem kerangka kerja dan informasi untuk pelaksanaan kerangka pengaman REDD+; 2) Membentuk Komite Kerangka Pengaman; dan 3) Mensahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem

integritas REDD+ yang melibatkan kerangka pengaman dan pelaksanaan audit dalam bidang keuangan, interaksi sosial dan lingkungan (Strategi Nasional REDD+, 2012).

Suzy Huber. April 2013.

262 Strategi Dan Rencana Implementasi MRV REDD+ (Draft) 2012.

Dokumen ini disusun berdasarkan hasil analisis dan sintesis dari apa yang sudah dicapai dan apa yang bisa dilakukan dengan mengacu pada panduan mengenai pelaporan emisi gas rumah kaca yang sudah ada dan/sedang dikomunikasikan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak (standar IPCC maupun standar-standar lainnya). Sistem MRV ini wajib dibangun karena merupakan prasyarat untuk menunjukkan pencapaian komitmen yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat internasional, mendapatkan manfaat dari mekanisme kerjasama internasional REDD+ serta mekanisme pendanaan lain untuk menurunkan emisi GRK dari sektor berbasis lahan. Sistem ini mengkoordinasi kegiatan monitoring, pelaporan dan verifikasi, yang dilakukan di Indonesia dengan memperhatikan karakter-karakter khusus Indonesia dan sekaligus memenuhi prinsip-prinsip maupun standar internasional. Cakupan dari dokumen ini meliputi rasionalisasi, sistem MRV, lembaga MRV dan peta jalan (*roadmap*) tentang bagaimana sistem pengukuran/pemantauan, pelaporan dan verifikasi dari cakupan sistem MRV bisa ditindak-lanjuti menuju operasionalisasi MRV.

Satgas REDD, 2012

313 Implementasi Rencana Aksi Nasional-Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Bidang Berbasis Lahan: *Mengintegrasikan Data Regional Dan MR Ke MRV Nasional*

Makalah disampaikan di ICC-IPB Bogor, 4 Oktober 2011Provincial Emissions Are Dominated By Agriculture And Forestry Sectors, Which Are Also Being Counted On To Drive Future Growth 20 Priority Initiatives Have Been Identified To Reduce The CarbonIntensity Of Current Activities And To Grow Downstream And LowCarbon Sectors. Kabupaten dengan tutupan hutan yang tinggi berasosiasi dengan GDP yang rendah (Malinau, Nunukan, Kutai Barat, Berau, Bulungan). Aktivitas REDD di Kalimantan Timur diantaranya 1) Program DA Karbon Hutan Berau (PKHB); 2) Program DA-REDD Malinau; 3) Program Heart of Borneo (HoB); 4) Pengelolaan Model Hutan Lindung Wehea; 5) Tersusunnya Konsep Low Carbon GrowthStrategy. Kelemahan aktivitas REDD : a) Aktivitas deforestasi akibat adanya pembangunan infrastrukturMembayangi perluasan deforestasi yang tidak terkendali; b) Deforestasi di luar bidang kehutanan masih juga berjalan sepertiPenambangan dan reklamasi masih merupakan impian bagi kebanyakanPerusahaan tambang kecil; c) Deforestasi juga sangat berpotensi dengan adanya pemekaran wilayah seperti Kabupaten Tana Tidung akan segera terbangun infrastruktur, kawasanPemukiman, fasilitas umum dll., baik di tingkat kabupaten amaupunKecamatan.

Dedy Hadriyanto. 2011.

372 Prosiding Proses Stakeholder dalam rangka Pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards REDD+ di Indonesia 2011-2012.

Prosiding ini merupakan dokumentasi dari proses multipihak dalam rangka pembangunan Sistem Informasi *Safeguards* (SIS) REDD+ di Indonesia beserta

capaiannya. Proses multipihak yang didokumentasikan dalam prosiding ini mencakup beberapa workshop di tingkat nasional dan tingkat provinsi serta serangkaian *Focus Group Discussions* yang dilaksanakan selama tahun 2011-2012.

Novia Widyaningtyas; Andi Andriadi; Radian Bagiyono, Haryo Pambudi; Dinik Indrihastuti, Windyo Laksono, Erna Rosita, Andreas Rahutomo, Editor: Nur Masripatin, 2012
PUSTANLING, FCPF, GIZ.

373 Draft Untuk Bahan Diskusi Membangun Kebijakan Kerangka Pengaman REDD+ di Indonesia Studi Komparatif terhadap SIS-REDD+ dan PRISAI

Disampaikan Kepada Dewan Kehutanan Nasional 15 November 2013. Dalam rinciannya, masing-masing SISRE-DD dan PPRISAI menyatakan adanya mekanisme tertentu yang digambarkan dalam bagan-bagan yang menyangkut alur proses/koordinasi pada PRISAI dan alur informasi pada SIS REDD+. Nampak jelas bahwa PRISAI dibangun untuk memastikan agar setiap proyek REDD+ memenuhi prinsip-prinsip kerangka pengaman, sedangkan SIS REDD+ dibangun sebagai sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai mekanisme pelaporan dari tingkat tapak hingga ke internasional. SIS REDD+ secara lebih eksplisit menunjukkan pentaatan atas mandat Cancun. Kesepakatan pada prinsip, kriteria dan indikator yang sama akan membuka ruang untuk menyatukan kedua model yang dievaluasi, tanpa mengabaikan fungsi masing-masing. Namun demikian, menempatkan kedua sistem dalam suatu rancangan tata kelola yang menjamin efektivitas dan efisiensi kerja merupakan keharusan yang patut dipersiapkan secara matang.

Haryanto R. Putro; Emil Ola Kleden; Myrna A. Safitri. 2013
DKN

374 Laporan Penelitian Development Of A Time Series Analysis Of The Primary Economic And Policy Aspects Of Land Use Change.

Kesimpulan hasil penelitian Faktor sosial ekonomi :1). Di Jawa Timur perubahan lahan pertanian menjadi hutan rakyat karena faktor pasar, yang diindikasikan dengan harga kayu yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga produk pertanian. 2). Di Sumatera Selatan, pemanfaatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit didorong faktor ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD). Sebagian besar kebun karet yang ada di Provinsi Sumatera Selatan adalah milik masyarakat karena pengaruh faktor ekonomi dan budaya. 3). Tingginya jumlah penduduk yang masih tinggal di daerah pedesaan (sekitar dan dalam hutan), membutuhkan areal pertanian yang lebih luas sehingga menyebabkan terjadinya perubahan tutupan hutan. Seperti di Papua, sekitar 66,7% penduduk asli tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. 4). Sistem tenurial yang jelas mendorong masyarakat untuk melakukan penanaman, khususnya di Jawa Timur. Kondisi sebaliknya di Sumatera Selatan, sistem tenurial dan tata batas yang belum jelas, mendorong masyarakat untuk melakukan perambahan kawasan hutan. Faktor Sosial Budaya : 1. Pengakuan hak ulayat oleh pemerintah daerah diduga efektif dalam pencegahan perubahan penggunaan lahan oleh investor, khususnya kasus Papua. 2. Budidaya kopi di hutan lindung di Sumatera Selatan didorong oleh faktor ekonomi dan sosial budaya yang mengatur sistem pewarisan kebun kopi. 3.

Budaya menanam pohon yang berkembang di Jawa Timur mampu meningkatkan luas tutupan pohon.

Hariyatno Dwiprabowo; A. Ngaloken Gintings; Niken Sakuntaladewi Retno Mariyani; Iis Alviya; Doni Wicaksono; Virni Budi Arifanti; Deden Djaenudin; Tejo Damai Sentosa; Nining Kurniasih; Saiful Rahman, 2012. Puspijak dan FCPF.

377 Sistem Informasi *Safeguards* Redd+ Indonesia : Pembangunan Dan Operasionalisasinya.

Makalah. Disampaikan pada FGD PUSTANLING – BPIK Propinsi Jambi, 13-14 Mei 2014. Makalah memberikan pengantar untuk diskusi terfokus. Safeguards dan SIS-REDD+ adalah mandat dari Keputusan COP-16 di Cancun. SAFEGUARDS memenuhi kriteria diantaranya 1) Konsisten dengantujuan programkehutanan nasional, 2) Tata-kelola kehutananyang transparan danefektif, 3) Menghormati hak*Indigenous Peoples*4) Partisipasistakeholders secarapenuh, 5) Konsisten dengankonservasi hutan, 6) Mencegah resiko balik(reversals), 7)Adanya aksimengurangipengalihan emisi.

NUR MASRIPATIN, 2014.
Pusat Standardisasi dan Lingkungan

395 Prosiding Konsultasi Publik dalam rangka Pembentukan, Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja REDD+ dan Tim Penyusunan RAD-GRK di Tingkat Provinsi.

Prosiding merupakan kegiatan konsultasidengan para pihak yang diselenggarakan di 3 provinsi **yaitu** Ambon - Maluku, 1 Agustus 2012; Padang – Sumatera Barat, 27 September 2012; Lombok– Nusa Tenggara Barat, 23 Oktober 2012. Konsultasi publikasi diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman para pihak khususnya pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) terhadap kesepakatan internasional, kebijakan pemerintah pusat serta konsekuensinya terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait dengan implementasi program REDD+. Konsultasi publik juga untuk mendorong serta memfasilitasi terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA) REDD+ di daerah dan membentuk komitmen pemerintahdaerah dalam mendukung kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca serta memperkuat dan meningkatkan kapasitas Kelompok Kerja (POKJA) REDD+ yang telah terbentuk di daerah, khususnya dalam proses penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Implementasi REDD+ di tingkat provinsi.

Novia Widyaningtyas; Andi Andriadi; Radian Bagiyono, Haryo Pambudi; Dinik Indrihastuti, Windyo Laksono, Erna Rosita, Andreas Rahutomo, Editor: Nur Masripatin, 2012
PUSTANLING, FCPF, World Bank.

408 Mengembangkan Data *Baseline* Sosial Ekonomi dan Biofisik untuk Mengevaluasi Kesiapan Pelaksanaan REDD+.

degradasi hutan terjadi setiap tahun baik pada skala provinsi Jawa Timur maupun skala tapak, yang bersumber dari kegiatan: (1) perambahan lahan, (2) pencurian kayu, (3) penggembalaan, dan (4) kebakaran, sementara mekanime

dan SOP (*standard operating procedures*) mengenai pencegahannya juga belum tersedia dan jika sudah tersedia belum dilaksanakan secara konsisten, maka untuk mengurangi dan bahkan menghentikan kegiatan-kegiatan sebagai sumber degradasi hutan direkomendasikan agar perhatian yang lebih perlu diarahkan terhadap sistem pencegahan, termasuk sosialisasi dan penguatan serta pembentukan organisasi dan kelembagaan

Satria Astana; Tigor Butar Butar, Rahayu Supriadi, Lukas Rumboko Wibowo; Handoyo, Rahman Effendi, Ismatul Hakim; Elvida Wulandari dan Retno Maryani. 2013.
Puspijak& FCPF.

412 Mengawal Safeguard dalam rangka persiapan implementasi REDD+ di Indonesia.

Berisi laporan kegiatan berupa FGD untuk menjaring masukan dari para pihak tentang safeguard yang digunakan untuk implementasi REDD+. Membahas gap antara SIS REDD+ dan PRISAI melalui makalah yang disusun oleh konsultan : Haryanto, Emil Ola Kleden dan Myrna A. Safitri disampaikan kepada DKN pada FGD tangga; 15 November 2013. SIS-REDD+ adalah sistem informasi pelaksanaan berbagai kerangka pengaman di Indonesia. Namun secara metodologis menjadi tak terhindarkan bahwa SISREDD+ perlu mengembangkan sebuah standard penilaian yang menjadi landasan untuk memantau dan menilai pelaksanaan berbagai kerangka pengaman tersebut. Oleh karena itu ruang lingkup SIS-REDD+ tidak hanya berurusan dengan persoalan provider, user dan manajemen informasi, tetapi juga bersinggungan dengan penetapan standard penilaian terhadap berbagai kerangka pengaman di Indonesia. Hasil penilaian adalah salah satu bagian utama dari pelaporan kepada UNFCCC. SIS-REDD+ bekerja dalam ruang lingkup *pelaksanaan berbagai kerangka pengaman* oleh berbagai pelaksana proyek dengan fungsi melakukan penilaian. Sedangkan PRISAI bekerja dalam ruang lingkup *pelaksanaan proyek REDD+*, di mana capaian dalam program REDD+, pemenuhan aspek sosial dan lingkungan, serta akuntabilitas institusi pelaksana proyek menjadi fokus perhatian. Usulan yang kiranya dapat dipertimbangkan adalah: 1). PRISAI dan SIS-REDD+ dapat saling melengkapi, satu merupakan komplementaris bagi yang lain; 2). Agar fungsi komplementaritas dapat berjalan, maka sebaiknya PRISAI mengambil peran menangani persoalan-persoalan substansial seperti hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, sementara SIS-REDD+ dapat mengambil peran instrumental dengan menangani persoalan-persoalan sistem informasi dan pelaporan; 3). Dalam pembagian peran tersebut dapat dibangun kesepakatan tentang sebuah kerangka pengamanyang menjadi rujukan di tingkat nasional yang merupakan terjemahan dari tujuh kerangka pengaman yang dimandatkan oleh Kesepakatan Cancun; 4). Kerangka pengaman rujukan di tingkat nasional merupakan sebuah standard yang yang memandatkan sebuah mekanisme yang menginklusikan kerangka pengaman dalam proses penetapan kebijakan, sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, perencanaan di tingkat tapak, serta monitoring dan evaluasi kinerja di tingkat tapak; 5). Implementasi kerangka pengaman dapat dilakukan dengan mengakui standard yang digunakan dalam berbagai instrumen kerangka pengaman yang telah ada dan/atau akan dikembangkan dalam berbagai kontek pengelolaan hutan dan lahan gambut, baik legal/formal maupun kerangka pengaman yang bersifat sukarela (sertifikasi pengelolaan hutan lestari, HCV dsb.); 6. Pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antar lembaga yang akan diberi mandat untuk menerapkan PRISAI dan SIS-REDD+ lebih pada aspek metodologis, bagaimana mensinergikan peran masing-masing dalam sebuah proyek REDD+. Karena dari aspek legitimasi, tujuan dan fungsi, keduanya dapat berbagi peran yang dapat saling melengkapi sehingga terhindar tumpang tindih peran; 7). Dengan mempertimbangkan rekomendasi 1 sampai 6 di atas, maka terdapat

kebutuhan untuk menyempurnakan naskah PRISAI dan SISREDD+ yang ada sekarang untuk dapat memenuhi prinsip komplementaritas antara keduanya.

DKN dan Puspijak. 2013

415 Ringkasan eksekutif Regional Eviromental and Social Assessment (RESA) and Safeguards.

Tujuan utama RESA adalah mengidentifikasi dan membandingkan dua skenario pembangunan melalui kajian dampak kumulatif pada komponen ekosistem Bernilai (Valued Ecosystem Component, VECs). Skenario pembangunan dapat dibedakan menjadi dua skenario yaitu "tanpa proyek" (business as usual atau BAU) dan skenario yaitu "dengan proyek", dimana proyek ini adalah kegiatan demonstrasi KFCP. Disamping itu RESA juga bertujuan memberi informasi untuk pengembang program KFCP dalam mengidentifikasi alternatif desain dan bantuan proyek KFCP.

Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP). 2012.
Australian Aid, Bappenas, Kementerian Kehutanan, Provinsi Kalteng.

416 Regional Eviromental and Social Assessment (RESA)

The Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) is a demonstration activity for reducing Emission from Deforestasi and Forest Degradation (REDD+) within a single peat done of 120.000 ha within the Ex-Mega Rice Project (EMRP) area in Central Kalimantan. This single peat dome is the environmental regional that will be analysed in the RESA. The main purpouse of rehabilitating the are is to demonstrate potential carbon emission reduction, but doing so would have direct impact on peat swamp forest (PSF), peatland, land use, livelihoods and villages close to the site.

Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP). 2012.
Australian Aid, Bappenas, Kementerian Kehutanan, Provinsi Kalteng

417 Dukungan Penguatan Kelembagaan Bagi Desa dalam Mengelola Kegiatan REDD+ Sebuah Pembelajaran Lapangan dari Demonstrasi REDD+ di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP).

Beberapa cara pengurangan emisi yang diujicobakan dalam KFCP diantaranya adalah penanaman hutan, penutupan (penabatan) tatas, dukungan terhadap pengembangan mata pencaharian alternatif, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan lokal dalam mengelola kegiatan REDD+. Sebagian besar kegiatan KFCP dilakukan untuk masyarakat desa dan dikelola bersama oleh KFCP dan desa. Dalam membantu desa mengelola kegiatan-kegiatan tersebut, KFCP berupaya untuk menguatkan kapasitas kelembagaan desa, termasuk kelembagaan adat. Kedepannya, desa diharapkan memiliki kesiapan untuk mengelola program REDD+ dan pengelolaan hutan lainnya secara mandiri. Dukungan KFCP terhadap kelembagaan desa diberikan melalui: 1) pembentukan dan penguatan kapasitas tim pengelola kegiatan KFCP di desa, 2) penguatan kapasitas kelembagaan adat, 3) fasilitasi pembentukan forum koordinasi dan komunikasi desa, dan 4) bantuan kepada desa yang ingin mengajukan pengelolaan hutan desa. Makalah ini akan menjelaskan mengenai proses dan pembelajaran dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan desa sebagai

pengelola REDD+. Pembelajaran yang diperoleh dari upaya penguatan tersebut dapat digunakan sebagai pengetahuan untuk merumuskan metode dan pendekatan yang tepat dalam pengurangan emisi GRK melalui rehabilitasi lahan gambut yang mengalami kerusakan.

Obrien Tinus, Murianson, Jamil Gunawan, Lis Nurhayati dan Rachael. 2014

418. Pengembangan dan Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan REDD+ di Indonesia.

Studi ini berfokus pada pengembangan kerangka pengaman sosial dan lingkungan REDD+ diIndonesia. Sejalan dengan keputusan-keputusan UNFCCC, Strategi Nasional REDD+ (Stranas REDD+) jelas menetapkan bahwa kerangka pengaman sosial dan lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari memfungsikan REDD+. Dimulai bahkan sebelum dipublikasikannya strategi ini, Satuan Tugas REDD+ (Satgas REDD+), Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+) dan Kementerian Kehutanan mencapai banyak kemajuan dalam menetapkan sistem kerangka pengaman yang akan diterapkan di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, sistem kerangka pengaman independen yang diberlakukan misalnya oleh lembaga-lembaga pembangunan multilateral dan bank, LSM dan inisiatif-inisiatif swasta, serta skema sertifikasi, terus diterapkan dalam bentuk potongan kecil-kecil di seluruh nusantara. Studi ini berupaya untuk memfasilitasi pendekatan yang koheren untuk mengkaji dan mengelola proliferasi sistem kerangka pengaman, dan meninjau inisiatif-inisiatif terkait terhadap kriteria tolok ukur untuk kerangka pengaman yang ditetapkan oleh UNFCCC. Kesenjangan dan pembelajaran dari sistem kerangka pengaman yang ada diidentifikasi, berfokus pada tema-tema utama seperti PADIATAPA, tata kelola dan koordinasi, akuntabilitas dan keterlibatan pemangku kepentingan. Terakhir, rekomendasi diberikan untuk memandu pengembangan lebih lanjut kerangka pengaman REDD+ di Indonesia, termasuk peningkatan koherensi dan keselarasan, pembagian informasi yang lebih baik, dan upaya untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kerangka pengaman, termasuk dengan melaksanakan analisis biaya secara menyeluruh.

UNORCID. 2015.

419 REDD+ Social and Environmental Safeguards Development and Implementation in Indonesia

This study focuses on REDD+ social and environmental safeguards development in Indonesia. In line with the UNFCCC decisions, Indonesia's National REDD+ Strategy clearly stipulates that social and environmental safeguards are an integral part of a functioning REDD+ mechanism. Starting even prior to the publication of this strategy, the REDD+ Task Force, the National REDD+ Agency and the Ministry of Forestry made considerable progress in defining safeguards systems to be applied at a national level. In parallel, independent safeguards systems- imposed by, for instance, multilateral development agencies and banks, NGO and private initiatives and commodity certification schemes- continue to be applied in a patchwork form across the country. This study seeks to facilitate a coherent approach to assessing and managing the proliferation of safeguards systems, and to review relevant initiatives against the benchmark criteria for safeguards defined by the UNFCCC. Gaps and lessons learned from

available safeguards systems are identified, focusing on key themes such as FPIC, governance and coordination, accountability and stakeholder participation. Finally, recommendations are provided to guide the further development of REDD+ safeguards in Indonesia, including the improvement of coherence and harmonisation, better information sharing, and efforts to ensure accountability and sustainability in safeguards implementation, including by undertaking a thorough cost analysis.

UNORCID. 2015.

426 Pedoman Pengukuran Karbon untuk mendukung Penerapan REDD+ di Indonesia

Pedoman ini merupakan upaya para pihak di tingkat nasional untuk menjawab aspek metodologi sesuai hasil keputusan terkait REDD+ dimana tantangan sistem MRV diperjelas dengan rincian yang memfokuskan pada bagaimana pengukuran, pelaporan, monitoring dan verifikasi dapat dilaksanakan dengan metode yang komparabel dengan kegiatan mitigasi nasional, serta memenuhi persyaratan internasional. Buku pedoman ini mengacu pada berbagai hasil penelitian yang sudah dilakukan di Badan Litbang, Kementerian Kehutanan dan berbagai referensi lainnya. Diharapkan buku pedoman ini dapat mempermudah para pihak dalam pengukuran cadangan karbon dalam sistem MRV yang sudah menjadi kesepakatan hasil COP.

Nur Masripatin, Kirsfianti Ginoga, Ari Wibowo, Wayan Susi Dharmawan, Chairil Anwar Siregar, Mega Lugina, Indartik, Wening Wulandari, Niken Sakuntaladewi, Retno Maryani, Gustan Pari, Dana Apriyanto, Bayu Subekti, Dyah Puspasari, Arief Setiyo Utomo. 2010

427 Pedoman Penggunaan Model Alometrik untuk pendugaan Biomassa dan Stok Karbon Hutan di Indonesia

Pedoman Penggunaan Model Alometrik untuk pendugaan Biomassa dan Stok Karbon Hutan di Indonesia merupakan kebijakan teknis (operasional) Kementerian Kehutanan yang didasarkan atas hasil penelitian model-model alometrik untuk pendugaan biomassa pohon pada berbagai tipe ekosistem hutan di Indonesia. Pedoman ini dapat menjadi perangkat penting bagipengembangan system perhitungan karbon nasional Indonesia, sehingga tingkat akurasi semakin tinggi.

Peraturan kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2012

438 SVLK, Jalan Menuju REDD+

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu SVLK memastikan agar industri kayu mendapatkan sumber bahan baku dengan cara legal dari sebuah sistem pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) yang lestari, yang mengindahkan aspek legalitas, pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management, SFM), dan tata-kelola Pemerintah yang transparan dan akuntabel. Para pakar kehutanan menyebut instrument SVLK dan REDD+ dapat berperan memperbaiki tata kepemerintahan kehutanan. Di situ, legalitas kayu sebagai instrumen pengelolaan hutan lestari dapat diperhitungkan dalam skema kredit REDD+ dalam rancangan kebijakan nasional di masa depan. SVLK berupaya mencapai

cita-cita SFM melalui rute intervensi pengusahaan kayu (sertifikasi kayu). Sementara itu, REDD+ berupaya mencapai SFM melalui rute pengembangan kawasan lestari. REDD+ adalah upaya untuk mengurangi emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan. Akan halnya SVLK, adalah upaya menyelamatkan hutan dari pembalakan liar yang membuat merosot cadangan karbon secara tak langsung.

Arya Hadi Dharmawan, Bramasto Nugroho, Hariadi Kartodihardjo, Lala M Kolopaking Rizaldi Boer 2012
Kementerian kehutanan, UKaid, MFP dan Kehati

Governance

001 Implementasi kebijakan satu peta untuk merespon dampak perubahan iklim.

Makalah disampaikan pada Festival Iklim di Jakarta Centre tanggal 2 Februari 2016. Koordinasi dan sinergi antar K/L terkait diperlukan dalam penyiapan peta-peta tema/k untuk PIPIB (Peta Indikasi Penundaan Izin Baru). Dengan Peta PIPIB digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan tentang perbaikan tata kelola hutan primer dan lahan gambut. sehingga paya perbaikan tata kelola hutan primer dan lahan gambut diarahkan untuk pengurangan emisi GRK 26%.

Nurwadjedi. 2016.
Badan Informasi Geospasial.

003 Peran, fungsi dan tantagan Badan Pengelola REDD+

Makalah disampaikan pada Diskusi Publik Nasional WALHI di Jakarta 9 Mei 2014. Lembaga REDD+ sebagai lembaga independen bertanggungjawab langsung kepada Presiden; memiliki kewenangan yang kuat. Pembentukan Badan REDD+ dengan kewenangan maksimal untuk memperpanjang moratorium.

BP REDD+, 2014

006 Indonesian Forest Reference Emission Level Submitted to the UNFCCC secretariat

FREL development has been done after long processes, acrosyears. Technical and scientific aspects has been nationally reviewed (with all their respective advantage and disadvantage). There are some miss-understanding in : 1)Why FREL/FRL need to be submitted, 2) Does FREL cover all forestry sector activities, as referring to the nature of FREL that use for REDD+ ; 3)Other Indonesia's commitment and scheme (such as 26 % on national action plan/RAD of GHG) and other schemes that possibly covers the forestry sector?.."**T**RANSPARENCY, **A**CCURACY, **C**OMPLETENESS, **C**ONSISTENCY, **C**OMPARABILITY, as well as "PRACTICALITY AND COST EFFECTIVENESS" to employ MRV, has to be used to consideration (including technical and scientific) for decision making processes.

Directorate General of Climate Change Control Ministry of Enviromental and Forestry, 2015

007 Bienanial Update Report: Indonesia Experience

Lessons Learnt ie: 1) Capacity development for sectoralministries and local governments on GHG inventories and mitigations. 2) Increase capacity of sector in developing sectoralGHG Inventory including baseline/reference emission level as basis for measuring the achievement of mitigation actions;3)Enhance capacity of agencies responsible for collecting and understanding data and in developing templates to facilitate data collection;and 4) There is a need to develop functional data base for tracking information on GHG emissions, effects of mitigation actions, financial flows, and capacity building and technology transfer activities.

Directorate General of Climate Change Control Ministry of Enviromental and Forestry, 2015

008 Introduction to Indonesia Experience: Biennial Update Report (BUR) and Forest Reference and Emission Level (FREL).

Presented at Pavilion Indonesia, COP 2130 November 2015 Giving understanding what processes have been made in preparing BUR and FREL, Promote the submission of FREL and BUR, Introducing data and information used for generating FREL and BUR, and how it get along with the TACCC (transparency, accuracy, completeness, consistency, compatible) concepts, Indonesia has outline the country's transitions to a low carbon economy development and contribution to global efforts to prevent ≥ 2ºC increase of global temperature

Directorate General of Climate Change Control Ministry of Enviromental and Forestry, 2015

012 Identifikasi dan Klasifikasi dari Data yang Dibutuhkan maupun yang Tersedia untuk Implementasi REDD+ di Provinsi NAD.

Kumpulan data berikut yang dapat dikumpulkan dan digunakan untuk REDD+ : 1) batas administratif; 2) atribut biofisik termasuk rupabumi, hidrologi, geologi, lahan, iklim, tutupan lahan, simpanan karbon di atas lahan, dan sistem lahan; 3) Area prioritas REDD+ termasuk habitat biodata tertentu yang sudah dikenal, lahan terdegradasi/rusak, area yang berpotensi mengalami bencana, dan tanah yang telah direhabilitasi; 4) tata ruang, termasuk di dalamnya perkebunan, daerah moratorium, dan tata ruang nasional dan provinsi; 5) manajemen hutan dan lahan, termasuk lahan tradisional dan lahan potensial; 6) data sosial-ekonomi, termasuk sosial-budaya, demografis, ekonomi regional, infrastruktur publik, dan kesejahteraan manusia; 7) Citra Satelit Landsat; dan 8) toponimi.

LTS International dan PT Daemeter Consulting. 2015.

013 Analisa Data Yang Disusun Sebagai Informasi Bagi Provinsi Aceh Dan Pengelola / Pelaksana Implementasi REDD.

Menciptakan kondisi-kondisi pemungkin untuk memproses, menganalisa dan meng*update* data. Pendekatan-pendekatan ini penting untuk menginformasikan pengelolaan dan pelaksanaan REDD+. Kami mengidentifikasi

beberapa kebutuhan manajemen data dengan melakukan penilaian kapasitas pemangku kepentingan (lihat detailnya di Deliverable 8a). Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi defisiensi dan kekurangan pada akurasi, konsistensi, kelengkapan dan keterbandingan data, manajemen *sharing* dan pemanfaatan data secara *ad hoc*, terbatasnya sumberdaya perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumberdaya manusia (SDM) dan anggaran, mekanisme yang kurang memadai untuk menstandarkan IMS, dan dukungan teknis yang tidak merata secara geografis

LTS International dan PT Daemeter Consulting. 2015

D14 Rencana aksi untuk mengurangi ketidaklengkapan dan/atau ketidakkonsistenan data dan untuk mengimplementasikan proses-proses validasi data.

Data baseline dan peta-peta kadastral merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung pilar-pilar Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+ / Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) dan implementasi REDD+ di tingkat provinsi. Jenis-jenis data utama, yang memiliki dampak tinggi pada penilaian deforestasi dan degradasi, maupun yang berdampak langsung terhadap alokasi hutan dan lahan gambut di masa depan untuk berbagai pemanfaatan lahan, terdiri atas tutupan lahan, batas-batas administratif, rencana tata ruang, tata guna lahan dan hak-hak lahan, dan karakteristik biofisik lahan. Kami mendesain dan melaksanakan analisa ketidakkonsistenan dan ketidaklengkapan terhadap dataset penting yang disebutkan diatas, yang bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman yang komprehensif akan integritas data, untuk dapat mencerminkan betapa besar tingkat kompleksitas dan tantangan yang dihadapi untuk memeriksa kualitas data, juga menjaga jaminan mutu/kontrol mutu (QA/QC) data berstandar tinggi yang diperlukan untuk memproses data baseline yang bersih, bebas-error, dan siap digunakan untuk REDD+.

LTS International dan PT Daemeter Consulting. 2015

D15 Laporan mengenai pendampingan proses-proses pengadaan untuk memperoleh data yang diperlukan pemerintah Provinsi dan memfasilitasi penjangkauan masyarakat untuk menyertakan pemetaan partisipatif/masyarakat.

Data yang diperoleh atas nama Pemerintah Aceh dengan proyek yang meliputi data yang dibeli, yang diperoleh dari sumber-sumber domain publik, dan data yang berhubungan dengan pemetaan masyarakat. Kebutuhan untuk dataset tersebut diidentifikasi dalam Tugas 1 dengan membandingkan data kebutuhan untuk pelaksanaan REDD+ dan yang sudah tersedia di tingkat Provinsi. Proses pengambilan data ini sudah diperhitungkan dalam Tugas 3a mengenai analisa kelengkapan data dan karena itu secara eksplisit tidak dianggap sebagai bagian dari rencana tindakan untuk mengurangi ketidaklengkapan data yang fokusk pada proses-proses di masa depan diluar masa implementasi proyek ini yang merupakan domain dari Pemerintah (Tugas 3b). Data yang diperlukan dan perlu dibeli adalah data yang berasal dari lembaga pemerintah nasional yang memungut biaya untuk penyediaan data. Semua data yang diperoleh telah diproses dan tersedia secara offline, dengan beberapa dataset terpilih sudah tersedia online melalui IMS. Oleh karena itu laporan ini melaporkan data yang

belum dimiliki oleh Pemerintah Aceh akan namun sudah disediakan oleh proyek ini.

LTS International dan PT Daemeter Consulting. 2015

016 Laporan mengenai tindakan/pencapaian terobservasi yang memungkinkan adanya pengembangan lebih lanjut dari IMS yang ada dan proses-proses untuk mengelola data di Provinsi Aceh

Pengembangkan sebuah portal yang kuat yang mengoptimalkan fungsi sistem manajemen informasi secara esensial, seperti navigasi dan visualisasi antar dataset, mendefinisikan tingkat akses user, mengekspor peta dan *download/upload* data atau metadata, dan menjelajahi atribut data. Portal web sistem informasi geografis (geographical information system/GIS) sebagai *interface* yang interaktif dari IMS menampung berbagai mekanisme fundamental yang dianggap memenuhi kebutuhan yang paling mendesak dan mengatasi permasalahan terkait kesenjangan kapasitas pihak-pihak pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota: pemetaan dan interaksi web, keamanan web, verifikasi data, dan kontrol akses user untuk melihat, *download*, dan *upload* data dan metadata. Selain itu, untuk menyimpan, mem-*back up*, men-*share*, dan bertukar data, portal ini berfungsi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, mengurangi redundansi data dan biaya, dan mendukung efisiensi dan efektifitas data yang lebih baik.

LTS International dan PT Daemeter Consulting. 2015

017 Berita Acara penyerahan laporan.

Penyediaan Data *Baseline* dan Peta Kadastral untuk Provinsi-Provinsi Prioritas di Indonesia (Lot 1: Provinsi Aceh).

LTS International dan PT Daemeter Consulting. 2015

025MODUL PELATIHAN Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat (Community Based Forest Fire Management) Provinsi Pecontohan REDD+ Kalimantan Tengah.

Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Community Based Forest Fire Management (CBFFM) merupakan salah satu program strategis di Provinsi Percontohan REDD+ Kalimantan Tengah. Ini adalah kegiatan percontohan pengendalian kebakaran dengan mengembangkan kerangka partisipatif antara pemerintah dan masyarakat, melalui revitalisasi kearifan lokal dan pengintegrasian teknologi modern dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut. Buku pedoman (modul) pelatihan penanggulangan kebakaran hutan berbasis masyarakat ini bukan hanya menjadi pegangan dalam kegiatan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan berbasis masyarakat, tetapi juga menjadi pengetahuan mengenai tradisi dan kearifan masyarakat Kalimantan Tengah dalam memelihara dan memanfaatkan alam dan lingkungan secara bijak dan berkelanjutan.

Satgas REDD+ 2013.

033 FPIC/PADIATAPA Dalam Strategi Nasional REDD+.

PADIATAPA adalah instrumen baru, dengan membangun sistem yang memerlukan integritas tinggi (dan sedang belajar menjalankannya) yang akan sangat tergantung pada: Metodologi yang solid, Informasi yang jujur dan berimbang, Mekanisme yang akuntabel, Kesesuaian dengan sistem internasional, Efisiensi (cost effective dalam implementasi) dan Tata kelola pelaksanaan yang baik (good governance). Karena itu kita perlu membangunnya dengan kerangka pikir "bukan bisnis seperti biasa" (business un-usual mind set)

Satgas REDD+. 2012.

045 Modul Konsep REDD + dan Implementasinya

Materi yang disampaikan dalam modul "Konsep REDD + dan Implementasinya" ini, baru merupakan pengetahuan dasar terkait dengan kesepakatan internasional dan kebijakan nasional menyikapi isu perubahan iklim dan pemanfaatan karbon hutan. Masih diperlukan referensi lebih banyak untuk bisa memahami dengan lebih lengkap dan lebih mendalam karena perkembangan isu ini sangat cepat, dan saat ini masih dalam tahap penyusunan konsep-konsep yang bisa diterima dan diterapkan oleh semua negara. Khusus untuk Indonesia proses ini juga masih terus berjalan sehingga informasi harus terus diperbaharui. Konsep REDD+ menjelaskan 4 sub-materi pokok yaitu : 1. Sejarah lahirnya konsep REDD dan REDD+; 2. Konsep REDD+ meliputi jenis pendekatan REDD+, sumber pendanaan REDD+, tingkat referensi pembayaran REDD+, bagaimana mengatasi kebocoran karbon, dan bagaimana memantau, melaporkan dan memverifikasi penyediaan stok karbon; 3. Konsep REDD+ di Indonesia meliputi kebijakan REDD+ di Indonesia, Strategi Nasional REDD+ di Indonesia, Sumber Pendanaan REDD+, dan Kelembagaan REDD+ di Indonesia; 4. Proyek Percontohan REDD+ di Indonesia

Nurtjahjawilasa, Kusdamayanti Duryat, Irsyal Yasman, Yani Septiani, Lasmini 2013.

080 Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ Juni2013.

Gagasan dan apa yang dilakukan mengedepankan upaya untuk menerobos dan membongkar hal-hal yang bebas dari kontaminasi konflik kepentingan dan agenda politik. Transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas penerapan REDD+, menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan program REDD+ ke depan. Capaian dan buah pengalaman itulah yang dirangkum dalam Laporan Tugas ini. Harapan kami, hasil pembelajaran dan pengalaman ini akan menjadi salah satu modal dan titik pangkal yang akan dilanjutkan dan dikembangkan oleh Lembaga REDD+ yang akan terbentuk nanti.

BP REDD. 2013

081 Penghitungan Emisi Berbasis Lahan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2009-2011

Laporan mendeskripsikan besarnya deforestasi dan emisi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah pada kurun waktu 2009-2011 dengan mempertimbangkan pengaruh kebakaran hutan lahan serta dekomposisi lahan gambut, dimana dalam perhitungan TER sebelumnya tidak diperhitungkan. Sedangkan tujuannya adalah: [a] menghitung emisi berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Tengah pada kurun waktu 2009-2011, [b] mengidentifikasi sumber kegiatan emisi berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Tengah pada kurun waktu 2009-2011, dan [c] menghitung kinerja penurunan emisi berbasis lahan pada tahun 2011 berdasarkan tingkat emisi rujukan (REL) Provinsi Kalimantan Tengah.

Yusurum Jagau' Bismart Ferry Ibie; Yusuf Aguswan; Santosa Yulianto; Penyang; Patricia Erosa Putir; Humala Pontas; Alpius Patanan; Indrawan Suryadi; Arief Darmawan dan Teddy Rusolono. 2013.

086 TOR Seminar REDD+ di Indonesia Dari Persiapan menuju Implementasi 19 Desember 2013

Tujuan kegiatan 1) Memaparkan capaian-capaian Satgas REDD+ yang berupa inisiatif tata kelola REDD+ ; 2) Menjadi ruang interaksi dan dialog berbagai pihak yang terkait dengan REDD+ baik dari unsur pemerintah, masyarakat, UN, INGO, private sector serta masyarakat; 3) Menginformasikan kelembagaan baru dan mendiskusikan tantangan dan harapan Kelembagaan REDD+ tersebut; 4) Melakukan serah terima semua produk Satgas REDD+ kepada para pihak yang berwenang,; 5) Melakukan MoU dengan pemerintah daerah dalam implementasi REDD+

BP REDD, 2013

087 Redd+In Indonesia: Laying The Foundations For Transformative Change.

The aim of this publication is to give you a flavour of what REDD+ means to us in Indonesia as a vehicle of transformation towards sustainability. The publication of Indonesia's Forest Reference Emissions Level and the wideranging efforts being pursued to address forest and peat land fires really illustrate the need and meaning of REDD+ as Beyond Carbon. As you will see, these are the tip of the iceberg.

BP REDD. 2014

088 Masukan publik untuk Strategi dan Rencana Implementasi MRV REDD+.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapat masukan para pihak untuk Sistem MRV, Roadmap, Lembaga dan Komposisi Dokumen MRV REDD+. Acara ini mengundang Pustanling, LEI, WWF, Perguruan Tinggi dan pihak lainnya.

Satgas REDD+. 2012.

100 Introduction to Midway Workshop towards the 3rd Revision of IMM

To change the way we do business on forest and peatland : Ensuring that the remaining forest and peatland which biophysically intact can be saved; and

Ensuring that that maintaining the forest and peatland can go hand in hand with the national economic growth while assuring the prosperity of the local.

Satgas REDD+. 2012.

103 Keanekaragaman Hayati, Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Menuju Implementasi REDD+ di Indonesia

Jakarta, 8 November 2012. Makalah menjelaskan alur proses untuk mengali tema Keanekaragaman Hayati, Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca. REDD+ memungkinkan kompenssasi di luar pasar karbon, tidak harus menghasilkan karbon kredit tetapi harus menurunkan emisi; meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lokal dan menjaga keutuhan ekosistem merupakan tujuan utama yang sama pentingnya dengan penurunan emisi karbon; mekanisme kompensasi masih belum menemukan bentuk (masih didiskusikan)

Chandra Kirana 2012

105 Diskusi Kelompok Kelembagaan MRV di Tingkat Nasional

Diskusi Kelompok Kelembagaan MRV di tingkat Nasional Disampaikan dalam Lokakarya Penyempurnaan Strategi dan Rencana Implementasi MRV REDD+ 10-11 September 2012, Hotel Sari Pan Pacific, jakarta. 2012. Pokok-pokok diskusi : 1) Hubungan antara kelembagaan nasional dan subnasional; 2) Kemandirian (independence), termasuk pencegahan benturan kepentingan dan 3) Peta kelembagaan/dan kapasitas MRV yang ada, serta hubungannya dengan lembaga MRV

Satgas REDD+. 2012

106 Summary Hasil Diskusi Kelompok Kelembagaan MRV di Tingkat Sub Nasional

Diskusi Kelompok Kelembagaan MRV di tingkat Nasional Disampaikan dalam Lokakarya Penyempurnaan Strategi dan Rencana Implementasi MRV REDD+ 10-11 September 2012, Hotel Sari Pan Pacific, jakarta. 2012. Grand desain kelembagaan MRV Sub-Nasional perlu memperhatikan kebijakan desentralisasi beserta dinamikanya. Dalam pembentukan lembaga yang dimaksud, hal-hal berikut ini perlu menjadi pertimbangan utama : 1) Landasan hukum, 2) Prinsip-prinsip MRV (*tepat sasaran; tepat waktu/pelaku; tepat skala-; tepat guna; accepted-credible; legitimate*), 3) Kapasitas, 4) *Ad interim* period, 5) Breakdown tupoksi, 6) Aturan main, 7)Struktur organisasi, 8) Karakter (site specific) sumber-sumber emisi; dan 9) Memberdayakan institusi yang telah ada.

Satgas REDD+. 2012

128 Materi Pelatihan Sistim Informasi Geografis Dan Penginderaan Jauh Tingkat Dasar Untuk Pengelolaan Data Dasar Spasial Dan Kadaster Dalam Persiapan Data REDD+.

Disusun untuk:Para Stakeholder Kunci Di Provinsi Jambi *dan* United Nations Development Programme - REDD+ PROGRAMME. Berisi 18 materi meliputi 1) PENGENALAN ARCGIS 10.1; 2) ARC Catalog 10.1; 3) ARC GIS/ARC Map 10.1; 4)

membuat Data Spasial; 5) Editing Peta; 6) Topologi dan Query Data; 7) Spatial Analyst; 8) Layout dan cetak peta; 9) Konsep dasar penginderaan jauh; 10) Satelit dan sensor; 11) karakteristik Citra; 12) pengolahan Citra Satelit; 13) Pengenalan ERDAS imagine; 14) membaca data dan konversi; 15) koreksi Geometrik; 16) penajaman Citra; 17 klasifikasi dan 18) pengenalan Sistem Pengelolaan data dan informasi spasial.

Hatfield Indonesia. 2013

131 Milestone Provinsi Percontohan Di Kalimantan Tengah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan dalam program REDD+ sebagai bagian dalam kerjasama bilateralpemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia sejak ditanda-tanganinya *Letter of Intent* (LoI) pada tanggal 26 Mei 2010 berisi kegiatan yang akan dilaksanakan di Kateng berdasar LOI tersebut.

Satgas REDD+. 2010

132 Moving Towards Sustainability

Tropical deforestation and land use change not only result In ecological destruction, they can also exacerbate poverty, vulnerability to disasters andconftict As such, they demand urgent collective action with vision, boldness and practicality. Presently, Indonesia is at the forefront of trackling deforetation and land use change relatied to global clmate change.Indonesia has set an ambitious target of reducing carbon emissions by 26percent against a business-as-usual scenario by 2020 and potentially up to41 percent with international support. This is the first political commitmentof such a magnitude from a large developing country.

Satgas REDD. 2012

139 Pemetaan Dan Analisa Mekanisme Pendanaan Nasional, Pengelolaan Hibah, Wali Amanah Dan Mekanisme Pasar Yang Ada Terkait Dengan Aktivitas REDD+ DI Indonesia.

Laporan menjelaskan siklus pendanaan yang dibiaya oleh ICCTF mengikuti 9 langkah yaitu: Tahap 1: penyampaian prospective proposals:, Tahap 2: pre-appraise prospective proposals; Tahap 3: penelitian project proposal oleh TC; Tahap 4: penyampaian rekomendasi persetujuan/penolakan project proposals; Tahap 5: persetujuan proposal; Tahap 6: penandatanganan project agreement; Tahap 7: pelaksanaan kegiatan yang disetujui; Tahap 8: proses disbursement dana dan Tahap 9: monitoring, evaluasi dan audit.
Konsultan:

Fitri Harto 2012.
Kementerian Kehutanan & UNREDD

146 Penyidikan Tindak Pidana terkait Keuangan

Pelatihan Penegakan Hukum Terpadu Dengan Pendekatan *Multi-Door* dalam Penanganan Perkara Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup di atas Hutan dan Lahan Gambut Pullman Hotel, Central Park, Jakarta 2012. Makalah berisi tindak pidana kehutanan melalui bantuan hukum timbal balik dengan menghadirkan saksi, alat bukti, pemeriksaan. Tindak pidana kehutanan merupakan non dual criminality, dakwaan dapat dilakukan berlapis : Kehutanan + pencucian uang atau kurupsi.

R. Narendra Jatna, 2012

147 Teknik Penyusunan Dakwaan Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup-Yang Terkait Kejahatan Lain

Uraian perbuatan dakwaan : 1) Perbuatan yang didakwakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh bawahan/pelaku fisik, namun setelah ditarik garis pertanggungjwaban akhir ada pada si pemberi perintah/pemimpin kegiatan dan 2). Elemen kesalahan didapatkan dari: (a) Kesengajaan atau kelalaian yang terdapat pada bawahan hingga si pemberi perintah/pemimpin kegiatan; (b) Si Pemberi Perintah/Pemimpin Kegiatan telah TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA sebagai Pemegang Fiduciary Duty dan (c) Dokumen LH atau respon/masukan dari PPLH (Rekomendasi UKL/UPL atau Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk wajib Amdal atau pembahasan draft dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) perusahaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah) yang tidak dipenuhi/bertentangan dengan fakta perbuatan

Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya Kejaksaan Agung R.I.2012.

148 REDD+ Lintas Sektoral Kolaborasi Partisipasi

Makalah disampaikan di Jakarta 19 Desember 2013 berisi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 4 kelompok yaitu 1) kelompok kelembagaan dan system; 2) kelomopok strategi dan perencanaan tersusunnya SRAP di 9 provinsi; 3) pelaksanaan taktis di provinsi percontohan dan 4) strategi pendukung lainnya berupa situation room.

Satgas REDD, 2013

152 Perkembangan Kegiatan REDD+di Provinsi Percontohan Kalimantan Tengah.

Makalah berisi capaikan kegiatan yang telah dilaksanakn di Klaimantan Tengah dengan 7 program yang diluncurkan yaitu : 1) Membangun dan mengembangkan Kantor Pendukung REDD+, dan melibatkan pemangku kepentingan multi---level dan multi---sektor; 2) Menetapkan *basemap* dan informasi dasar untuk memulai integrasi data dan memantau *improvement; 3)* Menyusun strategi REDD+ dan pembangunan rendah karbon, termasuk kuantifikasi dampak lingkungan dan sosial---ekonomi; 4) Menerapkan penundaan penerbitan izin baru dan perbaikan tata kelola hutan & lahan gambut, sebagai bagian dari Moratorium secara nasional; 5) Membangun kapasitas lokal Kalimantan Tengah dan provinsi REDD+ lainnya, dan membangun *awareness* mengenai REDD+ dan moratorium; 6) Mengidentifikasi dan mengimplementasikan inisiatif *quick wins*

untuk menunjukkan pencapaian singkat dan memberikan dampak nyatadan 7) Implementasi program Hutan untuk Masyarakat Adat

Mathius Hosang. 2013.

154 Penyidikan tindak pidana SDA dan lingkungan.

Makalah membahas Tindak pidana (TP) pada kehutanan, pertambangan dan perkebunan. Bagaiman proses dan pembuktian utk TP SDA dan lingkungan. Kaitan gakkum dgn metode multi door: 1) Pernah dilaksanakan penerapan ini pd kasus2 yg melanggar UU No. 41/1999 ttg kehutanan, uu no. 18/2004 ttg perkebunan, uu no. 32/2009 ttg PPLH; 2) Dapat diterapkan selain UU point 1 tsb diatas, jg bisa ditambahkan UU lain baik itu TPPU maupun korupsi dgn mengikutsertakan penyidik dr Direktorat/instansi terkait; 3) Alterntif-alternatif adalah dpt dijadikan 1 berkas / splitzing dgn penerapan pasal UU yg berbeda. Penegakan hukul SDA dan Lingkungan juga masih mengalami Kendala/hambatan dalam penyelesaian TP SDA dan lingkungan : 1) membutuhkan waktu yg relatif lama (memerlukan alat bukti & barang bukti yg cukup byk btentu memerluka waktu yg relatif panjang); 2) membutuhkan anggaran yg besar d(dng kegiatan yg byk tentu menggunakan biaya yg relatif lebih besar) dan 3) perlu waktu utk menghadirkan ahli (Perlu menunggu jawaban & proses birokrasi utk menghadirkan ahli).

Gatot Subiyaktoro. 2012

155 Program efisiensi energi di sektor industri.

Kemenperin telah bekerjasama dengan berbagai stakeholder guna mendukung reduksi emisi karbon. Kemenperin juga telah menyusun Roadmap pengurangan emisi CO2 di Industri Semen, Baja, Pulp dan Kertas. **Rencana Aksi Sektor Industri (Hasil Kegiatan ICCTF Tahun 2010 – 2011) pada 2 agenda yaitu 1). Konservasi Energi, melaui a)** Perbaikan sistem monitoring dan manajemen energi; b) pemasangan kapasitor bank; c) Pemanfaatan panas buang (*waste heat recovery*); d) Pemasangan isolasi furnace; e) Pemasangan *Variable Voltage Regulator*. **2). Modifikasi proses dan teknologi, melalui : a)** Penggunaan teknologi hemat energi; b) Penggunaan bahan bakar alternatif (biomasa) di industri semen; c) Penerapan 3R/5R; d) *Blended cement* dan *alternatif fuel dan e)* Pelapisan refraktori kiln dengan bata tahan api bebas krom. **3). Penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO) melalui : a)** Penggantian bahan BPO menjadi non BPO; dan b) Penggantian teknologi ramah lingkungan.

Pusat pengkajian industri hijau dan lingkungan hidup, badan pengkajian kebijakan iklim dan mutu industri, kementerian perindustrian. 2012.

156 Prosiding Workshop Pengembangan Kapasitas dan Studi untuk Membangun Kerangka Kerja REDD+ di Tingkat Sub Nasional (*Capacity Building and Studies to Develop REDD+ Framework at the Sub National* Level).

Prosiding ini merupakan dokumentasi pelaksanaan 4 (empat) workshop Pengembangan Kapasitas dan Studi untuk Membangun Kerangka Kerja REDD+ di Tingkat Sub-Nasional (*Capacity Building and Studies to Develop REDD+ Framework at the Sub-National Level*) selama tahun 2012 di empat lokasi yaitu

Banjarmasin – Kalimantan Selatan, 9 Agustus 2012, Jember – Jawa Timur, 18 September 2012, Lubuk Linggau - Musi Rawas, 3 Oktober 2012, Kupang– Nusa Tenggara Timur, 20 November 2012 PUSAT STANDARDISASI DAN LINGKUNGAN, KEMENTERIAN KEHUTANAN

Novia Widyaningtyas, Andi Andriadi, Radian Bagiyono, Haryo Pambudi, Dinik Indrihastuti, Windyo Laksono, Erna Rosita, Andreas Budi Rahutomo, Editor: Nur Masripatin, 2012.

157 Prosiding Rountable Discussion para pakar International, Mendefinisikan Jalan Menuju Solusi Jangka Panjang untuk Krisis kebakaran dan kabut asap Indonesia dengan fokus pada pemanfaatan dan managemen gambut yang berkelanjutan.

Diskusi dilaksanakan di Jakarta 13-14 November 2015, Dalam rangka mengidentifikasi langkah dan solusi untuk jangka panjang dalam menghadapi krisis kebakaran dan kabut asap di Indonesia, serta upaya mengalihkan pemanfaatan hutan rawa gambut dengan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Program REDD+ UNDP dan Kedutaan Besar Norwegia menyelenggarakan Roundtable Discussion Para Pakar Internasional untuk menginisiasi langkah restorasi hutan gambut di Indonesia hingga lima tahun kedepan. Kegiatan yang dihadiri oleh para pihak yang berkaitan langsung dan peduli dengan hutan rawa gambut, baik Pemerintah, Pewakilan Negara-negara sahabat, Asosiasi Sektor swasta yang terkait dengan lahan gambut, LSM, lembaga kerjasama internasional, Perguruan Tinggi, Lembaga dan Ahli internasional yang melakukan kajian rawa gambut. Kehadiran para Ahli dalam dan luar negeri sangat penting untuk memberikan pembelajaran terkait dengan pendekatan yang berbasis Ilmiah dengan teknologi dan praktek yang teruji. Proses ini diharapkan dapat mengidentifikasi cara dan langkah yang tepat didalam mengelola, mengkonservasi, merestorasi (terutama untuk lahan gambut yang terdegradasi) dan memanfaatkan lahan gambut.

KLHK, kedutaan Norwegia & UNDP, 2015

159 Seri briefing hak-hak, hutan dan iklim – Oktober 2011 SULAWESI TENGAH: Provinsi Uji Coba UN-REDD Indonesia.

Lemahnya tata kelola di Sulawesi Tengah berkaitan erat dengan praktek pembangunan yang tidak adil dan tekanan terhadap sumber daya alam yang tidak adil di provinsi tersebut, yang menyebabkan ketidakseimbangan kontrol atas tanah dan hutan, di mana para pemilik modal mendominasi penguasaan hutan dan kontrol atas sumber daya yang ada. Masyarakat Katu dan masyarakat adat lain di Sulawesi Tengah telah menyatakan keinginan mereka agar program pembangunan, termasuk program UN-REDD, dapat mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Forest People Program. 2012

175 Hutan, lahan Gambut, manusia dan budaya REDD+ dan Satgas Kelembagaan REDD+ sebuah pengantar.

Buku ini mengulas tentang definisi REDD+, Satgas REDD+ : tugas dan tanggung awab, struktur kerja, profil dan aktifitas REDD+ berisi kegiatan-kegiatan di provinsi percontohan. Pada tahun-tahun awal Satgas REDD+ fokus pada 4 provinsi percontohan yaitu Kalimantan timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.

Satgas REDD+. 2012

199 Ringkasan Eksekutif Tim Kerja Pengarusutamaan REDD+ Ke Dalam Sistem Perencanaan Nasional.

Pelaksanaan REDD+ tidak hanya terkait sektor kehutanan saja, tetapi juga berkaitan dengan sektor pembangunan lainnya. Kebutuhan lahan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, energi, dan permukiman diidentifikasi sebagai pemicu terjadinya deforestasi. Tujuan Mainstreaming REDD+ ke dalam sistem perencanaan nasional adalah untuk mengintegrasikan dan menterpadukan program REDD+ sebagai unsur sektor kehutanan yang berbasis pengelolaan hutan lestari dalam mencapai sasaran pembangunan nasional

Satgas REDD+ 2013

201 Buku Ajar. Penegakan Hukum Terpadu Dengan Pendekatan *Multi-Door* dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup di atas Hutan dan Lahan Gambut.

Buku Ajar ini merupakan dokumen yang digunakan pada Pelatihan Penegakan Hukum Terpadu Dengan Pendekatan *Multi-Door* dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup di atas Hutan dan Lahan Gambut di Pullman Hotel, Jakarta. Buku ajar ini akan terus disempurnakan pada berbagai pelatihan berikut. **Para Kontributor Bahan Ajar:** Prof. Dr. Muladi, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo, Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo, Prof. Dr. Basuki Wasis, Dr. Yunus Husein, Josi Khatarina, S.H., LL.M., Sukma Violetta, S.H., LL.M, Indro Sugianto, S.H., MH, Rino Subagyo, S.H, Januar Dwi Putra, S.H, Lakso Anindito, S.H; Fallissa Ananda Putri, S.H, Aldilla Stephanie Suwana, S.H.

Kejaksaan RI dan Satgas REDD+. 2012.

232 Panduan Fasilitasi Pengajuan Hutan Kemasyaraktan Dan Hutan Desa/Nagari.

Kehadiran Pedoman ini digagas oleh Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk menjawab kebutuhan rekan-rekan fasilitator/pendamping terutama Penyuluh Kehutanan yang akan menjadi "Garda Terdepan" dalam perluasan dan pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat. Pedoman Fasilitasi Pengajuan Permohonan Perhutanan Sosial Oleh Penyuluh Kehutanan ini dilengkapi dengan tahapan proses, teknik fasilitasi dan contoh-contoh dokumen usulan beserta

persyaratannya, dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan dokumen usulan oleh masyarakat di tingkat kelompok/desa/nagari.

Agita Fernanda , Nora Hidayati , Kusworo Mulyono , Febrina Tri Susila Putri. Editor : First San Hendra Rivai2016
Dishut Sumatera Barat.

258 Pemetaan skala besar pada level provinsi One Map di Kalimantan Tengah.

Makalah menyampaikan maksud dan tujuan pembuatan peta Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi percontohan REDD+ sehingga perlu data dasar yang akurat dan dapat dipercaya untuk implementasi kegiatan yang berkaitan dengan program REDD+.

Skala 2012.

259 Protokol Pengelolaan Portal Data MRV Redd+

Tujuan pembentukan protokol data portal MRV REDD+ adalah mengatur mekanisme pengelolaan data dan informasi terkait kegiatan pengukuran, pemantauan dan verifikasi kegiatan REDD+ di Indonesia untuk menghindari inkonsistensi, replikasi, duplikasi, dan permasalahan akses bagi pakai data MRV REDD+.

Indrawan Suryadi. 2012.
Satgas REDD+.

269 Penataan Perizinan Sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Hutan Dan Lahan Gambut

Makalah membahas Pembelajaran dari Kalteng Registrasi dan audit izin akan berjalan efektif bila: 1) Dokumen perizinan tersimpan dengan lengkap di SKPD. Bila tidak, mekanisme registrasi langsung oleh perusahaan perlu segera diterapkan; 2)Adanya koordinasi dan transfer pemahaman mengenai program penataan perizinan sampai ke instansi teknis; dan 3)Penyederhanaan birokrasi. Kesepahaman bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan bersama seharusnya meminimalisir berbagai bentuk birokrasi yang tidak perlu dalam pelaksanaan setiap kegiatan.

Satgas REDD+, 2013

295 Penyediaan Data Dasar Dan Peta Kadastral Untuk Provinsi Kalimantan Barat Di Indonesia Task 5: Pendampingan Dalam Pengembangan Dan Pelaksanaan Kajian Data Para Pemangku Kepentingan Serta Proses Persetujuannya. Deliverable 5a: Daftar Para Pemangku Kepentingan Dan Proyek/Program Yang Relevan Dengan REDD+ Di Provinsi Kalimantan Barat.

Peran beberapa lembaga internasional seperti GIZ, WWF, JICA dan FFI yang telah bekerja di Provinsi Kalimantan Barat melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau dengan LSM setempat juga sudah membantu tersedianya berbagai data dan informasi yang bisa digunakan dalam rangka mendukung implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil

identifikasi pemangku kepentingan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana aksi pelibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan proyek, terutama dalam pengumpulan dan kajian data supaya hasilnya dapat diterima dan menjadi acuan untuk Provinsi Kalimantan Barat

PT Waindo SpecTerra. 2015.
UNDP, Norwegian Embassy

296 Berita Acara Serah Terima Data

Pihak Konsuktan memberikan Data Project Provision of Baseline Data and Cadastral Map For The West Kalimantan (LOT 2) Province ln lndonesia For The West Kalimantan Province kepada pemberi pekerjaan.

Waindo SpecTerra. 2014.

297 Teknis Penggunaan Akses Kelola Perhutanan Sosial (AKPS) Untuk Admin Daerah Dan Admin Pusat.

Modul AKPS menguraikan mengenai tahapan dalam penerbitan izin hutan sosial. Untuk memudahkan penggunaan, Modul AKPS disusun dari 4 bab yang menjelaskan masing-masing komponen AKPS. Bab 1 memuat urgensi pembuatan modul AKPS, dilanjutkan oleh Bab 2 yang memuat tentang pengertian teknis dari AKPS beserta elemen-elemen penyusunnya. Bab 3 menguraikan tata cara penggunaan AKPS per tahap sedangkan bab 4 menguraikan teknis korespondensi antara Tim Admin AKPS dengan pengusul izin.

Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

298 Teknis Penggunaan Akses Kelola Perhutanan Sosial (AKPS) UNTUK Pengusul.

Panduan berisi bagaimana pengguna melakukan pengusulan hutan desa ke KLHK. Pengusul sebelumnya harus melakukan Pendaftaran pengguna diperlukan untuk para pengusul Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Rakyat yang ingin mengajukan usulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sistem ini dapat di akses dengan alamat ttp://pskl.menlhk.go.id/akps/.

Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

299 Sistem Online Akses Kelola Perhutanan Sosial.

Modul ini disusun berdasarkan kepada kerangka regulasi yang terkait secara langsung yaitu Permenhut Nomor 89 tahun 2014 tentang Hutan Desa, Permenhut Nomor 88 tahun 2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Permenhut Nomor 55 tahun 2011 tentang Hutan Tanaman Rakyat. Modul ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi mengenai ketentuan, persyaratan dan tahapan pengajuan permohonan dalam perhutanan sosial yang meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyaraktan dan Hutan Tanaman Rakyat dan untuk memberikan panduan pelengkap dalam rangka pengoperasian aplikasi akses kelola perhutanan sosial yang dipersiapkan pada bagian tersendiri

Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

300 Teknis Penggunaan Akses Kelola Perhutanan Sosial (AKPS) UNTUK Publik.

Publik dapat mengakses Akses Kelola Perhutanan Sosial (AKPS) dengan alamat http://pskl.menlhk.go.id/akps/ tanpa harus melakukan pendaftaran.

Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

409 REDD+ dan Forest Governance.

Buku ini bertujuan untuk menjawab beberapa tantangan dalam upaya mitigasi emisi kehutanan yang di Indonesia. Dalam tulisan pertama diulas bagaimana sistem MRV dapat diterapkan untuk mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) kehutanan agar target penurunan emisi nasional memenuhi kaidah internasional dan dapat dilakukan di tingkat sub nasional. Tulisan kedua tentang status data stok karbon dalam biomas hutan di Indonesia, penulis sudah mengumpulkan dan menyediakan informasi mengenai status data biomas hutan yang dapat digunakan untuk membuat dugaan persediaan karbon biomas secara spasial yang sangat diperlukan untuk menyusun strategi pengurangan emisi dari deforestasi dan degrdasi hutan terutama untuk pengembangan sistem perhitungan karbon nasional. Hasil sintesa tulisan ini menyebutkan bahwa data stok karbon dalam biomas hutan di Indonesia secara umum tersedia untk semua tipe atau kategori hutan tetapi dengan distribusi yang tidak merata terutama untuk lokasi bagian timur Indonesia. Secara lebih detail, tulisan ketiga memaparkan tentang beberapa potensi tanaman hutan dalam menyerap karbon

Ari Wibowo, Kirsfianti Ginoga, Fitri Nurfatriani, Indartik, Hariyatno Dwiprabowo, Sulistya Ekawati, Haruni Krisnawati dan Chairil Anwar Siregar. Editor : Nur Masripatin dan Christine Wulandari.Puspijak. 2010.

411 Skema REDD+ sebagai Peluang Pendanaan Program Konservasi di Taman Nasional.

Makalah disampaikan di Jakarta 8 November 2012. UN-REDD menawarkan dukungan secara ekstensif bagi negara berkembang untuk menghadapi isu deforestasi dan degradasi hutan. UN-REDD beroperasi di sembilan negara: Bolivia, Republik Demokratik Kongo, **Indonesia**, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Tanzania, Vietnam dan Zambia. Bank Dunia mengkoordinasikan inisiatif Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (*Forest Carbon Partnership Facility*, FCPF)Beroperasi di 37 negara: Argentina, Bolivia, Chili, Costa Rica, Ekuatorial Guinea, El Salvador, Etiopia, Gabon, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, **Indonesia**, Kamboja, Kamerun, Kenya, Kolombia, Liberia, Madagaskar, Meksiko, Mozambik, Nepal, Nikaragua, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Republik Demokratik Laos, Suriname, Tanzania, Thailand, Uganda, Vanuatu dan Vietnam.

Herry Purnomo. 2012

Public Consultation

043 Catatan Proses Dan Hasil Fasilitasi Srap Redd+ Provinsi Kalimantan Barat.

Minute of Meeting ini merupakan catatan proses fasilitasi SRAP yang dilaksanakan di Pontianak, 13 Maret 2012RAD GRK akan disusun dengan pendekatan landscape berkelanjutan (draft awal), dengan semangat pengelolaan DAS. Untuk itu sedang disiapkan pula peraturan gubernur untuk pelaksanaannya, bahkan urgensinya diperkirakan setingkat dengan tanggap darurat. Untuk itu dukungan fasilitasi terus menerus dilakukan antara lain melalui rekomendasi untuk memperoleh raperpres HoB di atas. Upaya serupa dilakukan juga untuk program KPH (model), kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan, dan pengelolaan hutan lestari. Keseluruhannya dapat menjadi bagian dari langkah penting menuju RAD GRK.

Azis Khan. 2012

044 Catatan Proses Dan Hasil Fasilitasi Srap Redd+ Provinsi Kalimantan Timur

Minute of Meeting ini merupakan catatan proses fasilitasi SRAP yang dilaksanakan di Samarinda 8-9 Maret 2012. program strategis itu diyakini akan sangat terkait dengan sektor-sektor dan para pihak yang beraktivitas dengan basis sumberdaya hutan dan lahan, baik secara teknis maupun non teknis. Sementara ditekankan pula bahwa dalam pelaksanaannya, diperkirakan akan berdampak, antara lain atas lapangan kerja; sehingga pengembangan alternatif mata pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian dari pelaksanaan program strategis, terutama dalam mengimplementasikan strategi dan rencana aksi (SRAP) REDD+ di KalTim nantinya.

Azis Khan. 2012

048 Focus Grup Disscusion Redd+ Untuk Menguatkan Ekonomi Rakyat Dan Masyarakat Adat Di Indonesia

Minute of Meeting ini merupakan catatan proses FGD yang dilaksanakan Borobudur Hotel Jakarta, 7 November **2012.** Forum ini diharapakan dapat menjawab Empat pertanyaan *Pokok bahasan diskusi:* a). Potensi apa yang dimiliki untuk mendukung isu yang berkembang; b). Bagaimana menggali potensi tersebut; c). kesenjangan apa yang ada untuk menjapai tujuan; d). Bagaimana mengisi kesenjangan tersebut. Kesimpulan dari hasil diskusi adalah kesimpulan yang bisa sampaikan dalam FGD ini, yakni: 1). Perlunya akses terhadap market, informasi, fasilitas, kapasitas, inilah *challenge* yang kita hadapi. Ada juga kases terhadap publik, terhadap system, yang sebenarnya sudah ada, cmn belum tersambung karena masih berada pada pulau-pulau. 2). *Certainty* atau kepastian; semua yang kita lakukan sebagian berada dalam kerangka formal, dan sebagian lagi berada dalam informal. Ketika ngomong masalah informal, semuanya menjadi sulit, sebab tidak ada yang bertanggung jawab, dan legal status menjadi tidak jelas. Itulah mengapa legal status menjadi penting dalam sebuah kepastian; *3) Affirmative,* kita berada dalam suatu paham yang perlu mendapatkan affirmasi dari pihak yang lain, sehingga

apa yang kita lakukan menjadi sebuah proses yang mendewasakan kita. Affiirmasi berkakitan dengan sertifikasi, yaitu legal identity. Proses inilah yang sangat kita dambakan yakni adanya legal identity. Birokrasi dibangsa ini didapatkan dengan proses yang mahal, sehingga pendekatan kepada masayarakat pun berubah, dari yang dilayani menjadi yang melayani. Governance kita juga sudah. *4). Self Confidence,* harus ada rasa saling memperkuat antara masyarakat dan budaya Indonesia, tidak harus terdikotomi, satu dengan yang lain. Dalam ruangan harus membicarakan berbagai maslaha yang ada, dari system atau cara pengelolaan kayu yang ada. jika masalah tersebut telah dirumuskan silakan kirimkan ke satgas REDD+ atau kirim ke website kami dan akan diterbitkan. Kita punya kekuatan untuk maju, kita punya segalannya, keragaman dan modal sosial. Dan 5). Partisipasi masyarakat adat, jika presiden mendandatangani PP masyarakat adat, maka REDD+ akan memiliki komunitas akan mendukung pelibatan ini. Kita ingin memiliki model-model pengelolaan yang lebih baik. Saat ini kita semua berada dalam sebuah perjuangan bersama, butuh tindakan bersama untuk mewujudkannya.

Satgas REDD+, 2012

049 Focus Grup Disscusion Redd+ Keanekaragaman Hayati, Pertumbuhan Yang Berkelanjutan, Dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Penegelolaan Hutan Konservasi Bersama Masyarakat

Minute of Meeting ini merupakan catatan proses FGD yang dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta 8 November 2012. Menyajikan 3 orang panelis untuk kemudian mendiskusikan pembelajaran yang disampaikan oleh panelis. Pembelajaran pertama REDD+ PROGRAM KONSERVASI Program yang dilakukan ada beberapa program yaitu penurunan emisi dari deforestasi. Demplot Activity adalah kegiatan pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi dan institusi pengelolaan karbon hutan. Pembelajaran kedua Reformasi tata kelola untuk memberi insentif terhadap kebijakan REDD+ sebagai *on going process*. Kita harus belajar dari implementasi sekarang bukan diskusi. Strategi di tingkat nasional (Fase Readiness) melakukan kredit karbon dengan pengurangan emisi diperhitungkan. Pembelajaran ketiga adalah Implementasi REDD+ di Taman Nasional Meru Betiri. REDD+ di Taman Nasional Meru Betiri merupakan sebuah upaya untuk pembelajaran. Didalam pelaksanaan kami melibatkan berbagai institusi. Ini adalah bagaimana masyarakat dilibatkan dalam REDD+ ini. Serta memfasilitasi forum konsultasi.

Satgas REDD+, 2012

050 Focus Grup Disscusion Redd+ Penguatan Sektor Ekonomi Perkebunan Aneka Tanaman Menuju Tata Kelola Yang Rendah Emisi, Konservasi biodiversity Dan Berkelanjutan

Minute of Meeting ini merupakan catatan proses FGD yang dilaksanakan di Borobudur Hotel, Jakarta 9 November 2012. Proses diskusi dibagi menjadi 2 sesi, sesi pertama presentasi oleh 5 orang panelis. Panelis pertama Memaparkan tentang Karet dengan Kasus Perkebunan Karet di Jambi dan Kalimantan Barat., Panelis kedua Kebijakan perkebunan dalam pengelolaan perkebunan yang lestari, berpotensi ekonomi dan kontribusi pada REDD+

(komuditas Bon Sawit). Panelis ketiga Panelis memulai materinya dengan mengangkat pemahaman tentang bisnis perkayuan yang menunjuk pada beberapa karakter. Bisnis perkayuan adalah bisnis yang mudah (dilihat dan ditiru) tetapi susah dijalankan. Panelis keempat Peluang & Tantangan Kebun Rakyat Kakao. Ini merupakan cerita dari Sulawesi, untuk kakao pesaing kita pantai gading dan Gana.

Satgas REDD+, 2012

133 REED+ di Indonesia Kemajuan dan Tantangan

Minute of Meeting ini merupakan catatan proses kegiatan yang dilakukan oleh BP REDD pada **Rabu, 23 April 2014 Hotel Shangri La. Berisi kegiatan yang telah dilakukan oleh BP REDD yang dipresentasikan oleh Bpk Heru Praseto** mengukur *output* dan *input* kami untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahap transformasional : hasil kerangka untuk mencapai tujuan yakni : 1. Indonesia memiliki kapasitas kelembagaan dan operasional untuk melaksanakan program REDD+ berbasis kinerja skala besar dan melaporkan emisi. Output 1 : Operasi REDD + Kelembagaan di tingkat nasional dan tingkat daerah. Output 2 : reformasi regulasi dan penegakan di tingkat nasional dan tingkat daerah. Output 4 : beralih ke praktek pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan tingkat daerah. Output 5 : keterlibatan dan memungkinkan semua stakeholder dalam peningkatan jumlah provinsi. 2. Indonesia melaksanakan program untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari utama dengan mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi lahan tetap menjaga stok karbon.

BP REDD. 2014

143 REDD+: Pengelolaan hutan dan lahan untuk masa depan Indonesia

Makalah yang disampaikan pada pertemuan Indonesia 11 Jakarta 2 April 2014. Mei 2010, Indonesia menandatangi **Letter of Intent (LOI)** dengan Norwegia : suatu dukungan politik penting bagi pencapaian target Indonesia menurunkan emisi sebesar 41% dimana 83% akan dicapai melalui REDD+ dengan menggunakan **Pembayaran Berbasis Kinerja Visi 2020 BP REDD** Perbaikan **tata kelola lahan dan hutan** untuk mendapatkan **keseimbangan berkelanjutan** dari hutan, lahan dan sumber daya alam di dalamnya; dan Fokus cakupan adalah **tutupan hutan (biofisik),** bukan hanya kawasan hutan. Diimplementasikan dengan berbagai kegiatan diantaranya menyusun dokumen dasar bagi PEMPROV, 10 aksi-aksi imperatif, kerjasama dengan 11 provinsi percontohan.

BPREDD+. 2014.

144 Sosialisasi STRADA Pelaksanaan REDD+ Kalimantan Tengah Peningkatan taraf hidup masyarakat pengelola sumberdaya hutan dan lahan gambut secara bijaksana

MAkalah disampakain pada Sosialisasi region II Kalimantan Tengah Muara Teweh 28 Mei 2013. Makalah menjelaskan visi dan misi STRADA REDD+ Kalimantan Tengah dengan visi Terwujudnya Kelestarian Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut Demi Kesejahteraan, Harkat dan Martabat Masyarakat Kalimantan Tengah dijabarkan dalam 3 misi, 12 strategi, 23 program dan 121 program pokok.

Humala Pangaribuan, 2013

145 Peningkatan Kemandirian Masyarakat Lokal untuk Mengelola Sumberdaya Alam dan Dana

Makalah ini memberikan pengantar untuk diskusi untuk mendapat masukan dari para pihak tentang 3 tema dalam bentuk pertanyaan kunci untuk diskusi yaitu 1) Apakah rencana aksi yang ada sejalan dengan program/kegiatan di Kota? 2) Apakah rencana aksi tersebut telah diimplementasikan? 3) Apakah ada strategi/program/ kegiatan yang perlu ditambahkan dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat lokal untuk mengelola SDA dan dana? 4) Bagaimana mekanisme pelibatan masyarakat dalam program REDD+?

Yusurum Jagau. 2013.

163 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan Indc Di 11 Provinsi di Aceh

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Aceh, 20 Juli 2016. Kegiatan sosialisasi perubahan iklim ini merupakan langkah tindak lanjut pasca COP–21 di Paris bulan Desember tahun lalu. Komitmen nasional terhadap dunia internasional yang harus dibangun di daerah, yaitu melalui penerapan kearifan-kearifan lokal. Kegiatan ini akan membuka kembali dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah dilakukan oleh daerah terkait isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Termasuk capaian dan rencana yang akan ditargetkan ke depan. Tindak lanjut Paris Agreement termasuk implementasi NDC sangat bergantung pada pelaksanaan kebijakan pembangunan di sektor-sektor kunci dalam keseluruhan konteks kebijakan pembangunan nasional berkelanjutan yang berketahanan iklim. Karena itu, koordinasi, sinergi dan koherensi lintas-sektor dan lintas level tata-kelola (pusat-daerah) menjadi kunci penentu keberhasilan. Tanpa langkah nyata ini, maka upaya Indonesia untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak akan terwujud. Sementara itu, iklim sudah makin berubah menjadi ancaman nyata.

DJ PPI KLHK 2016

164 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi di Jambi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada **19 Juli 2016.** mengembangkan skema insentif untuk masyarakat yang membuka lahan dengan tidak membakar melalui anggaran APBN ataupun APBD, kemudian harusnya ada anggaran untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ini, dan adanya rencana kunjungan lapangan oleh Komisi VII terkait penyelesaian masalah PETI, salah satu solusi yang dapat dilakukan selain penegakan hukum juga aspek pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Isu pembangunan yang berwawasan lingkungan dan kerakyatan dalam dokumen-dokumen selalu ada, hanya kadang kita terkendala dalam implementasinya. Dalam RPJMD kita juga harus menyusun Kajian Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tujuannya untuk menilai bagaimana dampak pembangunan terhadap aspek lingkungannya.

DJ PPI KLHK 2016

165 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi di Papua

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di **Jayapura,27 Juni 2016.** kebijakan khusus bagi daerah yang tutup lahan yang masih luar biasa. Papua perlu diperhatikan karena punya kebijakan 80 persen, hanya 13 HPH yang aktif dari 25 HPH. Kepada Papua yang konteksnya konservasi, mitigasi mesti ditonjolkan. Provinsi harus diberikan apresiasi. Untuk pendanaan ada dua institusi yaitu BLH dan Kehutanan. Gas-Gas metan signifikan terhadap Perubahan Iklim. Sumber EC berasal dari hasil pembakaran fosil. Apabila EC tidak dihentikan maka kenaikan suhu tetap naik. Oleh karena itu harus ada pencegahan untuk mencapai 2 persen. Indonesia mempunyai komitmen untuk menurukan emisi sampai 29 persen dan 41 persen. Kontribusi Emisi Indonesia secara global 4 persen. Untuk kompensasi perlu ada road map Instalasi Daur Ulang Limbah. Perlu adanya integrasi PI dalam perencanaan daerah. Ratifikasi EP perlu ada masukan dari seluruh stakeholder dari tiap daerah.

DJ PPI KLHK 2016

166 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan Indc Di 11 Provinsi. Di Papua Barat

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Manokwari, 21 Juni 2016Dalam sesi dialog dtakeholder di daerah khususnya di Papua barat banyak menanyakan tentang lembaga di pusat yang menangnai isu REDD+, dan mekanisme penjualan karbon. Provinsi Papua Barat telah memiliki dokumen SRAP dan member GCF, Artinya gubernur sangat mendukung aksi-aksi yang dilakukan dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Hutan di Papua berkaitan dengan hak dimana kepemilikan tanah dan hutan semua berasal dari kepemilikan hak ulayat sehingga kita tidak bisa mengesampingkan proses perubahan iklim dari masyarakat yang memiliki hak ulayat itu. Banyak program yang sudah kami sosialisasikan di tingkat kabupaten salah satunya menyangkut carbon trade seperti apa yang pusat sudah sampaikan. Sampai sekarang kami tidak tahu berapa banyak ijin yang dikeluarkan pemerintah tentang carbon trade . Tapi sampai sekarang berapa ijin carbon trade yang sudah dikeluarkan untuk Papua. Berapa banyak pengusaha yang sudah memiliki ijin carbon trade untuk memanfaatkan carbon trade untuk masyarakat di Papua. Kalaupun belum ada kami yang di sini sosialisasi ke masyarakat, mereka menagih janji itu. Kapan kami punya hutan kami tidak tebang, kami tidak kelola, tapi hasil dari carbon trade itu ke mana

DJ PPI KLHK 2016

167 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi Di Sumatera Barat

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di **Padang, 23 Juni 2016.** laju deforestasi Sumatera Barat yang rendah, partisipasi target penurunan emisis di Sumatera Barat, serta Sumatera Barat sebagai salah satu daerah di Indonesia yang akan memberi andil pengurangan emisi. Untuk mendukung pendapat ini Kepala Dina Kehutanan Sumatera Barat menyampaikan data perubahan tutupan lahan Sumatera Barat yang tidak terlalu signifikan. Kontribusi tertinggi adalah di sektor lahan dan gambut. Penghasil emisi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat

adalah kabupaten Pasaman Barat dan Pesisir Selatan karena perubahan lahan. Penyebab deforestasi secara terencana di Sumatera Barat adalah kawasan hutan dialihkan jadi perkebunan. Konsistensi untuk pencegahan ERK adalah dalam tata ruang yaitu peta penundaan izin baru dalam pembangunan. Selain itu tidak diberikan izin pembuatan jalan muaro kambang dikarenakan apabila jalan ini dibangun akan memakai lahan yang menjadi hutan lindung.

DJ PPI KLHK 2016

168 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi Di Kalimantan Tengah

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di **Palangkaraya, 21 Juni 2016.** Bagian penting dalam proses ratifikasi adalah penyusunan dokumen NDC, yang dulu dinamakan RAN-GRK. Ini menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dalam dokumen ratifikasi. Dokumen ini merupakan aktualisasi atau keberlanjutan dari INDC. Penyusunan dan penyiapan NDC akan lebih komplit dan memuat banyak hal. Misalnya ada one data , bagaimana penyusunannya, bagaimana pedomannya, kebijakan program, dan perencanaannya. Pengembangan ownership (kepemilikan) dan komitmen kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif serta penyusunan kerangka kerja dan jaringan komunikasi NDC. Selanjutnya ada Enabling Environment Program untuk pengembangan kapasitas. Kemudian One Data emisi gas rumah kaca akan dapat diakses

DJ PPI KLHK 2016

169 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi Di Sulawesi Tengah

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di **Palu, 23 Juni 2016.** Pemerintah sekarang sedang berusaha menyusun NDC dengan melibatkan pemerintah di tingkat subnasional. Penyusunan NDC ini harus disesuaikan dengan RTRW dan konteks kedaerahan. NDC tidak bisa berdiri sendiri tetapi melibatkan seluruh sektor.Pembangunan di daerah dan di pusat berdasarkan pada RTRW. Hal ini karena kaitannya yang signifikan terhadap upaya mitigasi dan adaptasi. Penyusunan NDC juga harus melibatkan peranan dari daerah. Elemen ini menjadi tantangan dan tanggung jawab bersama karena sebagian besar mandat atau pengelolaan ada di daerah. Konsep harus jelas, dan mencari strategi yang sesuai kebutuhan daerah atau wilayah. Dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi 29 persen, maka harus dipastikan masyarakat mendapatkan apa, karena untuk mencapai target itu pasti akan bersinggungan dengan masyarakat sekitar hutan, harus dipastikan mereka mendapatkan kesejahteraan. Karena tidak perlu diragukan bahwa masyarakat cinta terhadap hutannya, mereka tidak akan hidup kalau hutan rusak.

DJ PPI KLHK 2016

170 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi Di Riau

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di **Pekanbaru, 22 Juni 2016.** KLHK sedang mereview perijinan-perijinan yang seharusnya tidak perlu diberikan. Belum ada

ijin-ijin baru yang diterbitkan oleh pemerintah propinsi. Konsistensi implementasi pemerintah daerah dan masarakat juga perlu berperan dalam mengawasi perijinan yang diterbitkan tersebut. Sejauh mana peran satgas REDD di daerah harus perlu dikomuikasikan dan dikoordinasikan. Daerah harus proaktif memberikan masukan. Pemerintah pusat juga harus mempertimbangkan kemampua dan kesiapan daerah untuk implementasi REDD+ terutama atas komitmen pemerintah menurunkan emisis 29 persen.

DJ PPI KLHK 2016

171 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi Di Kalimantan Barat

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di **Pontianak, 24 Juni 2016.** Green fund yang masuk ke pemerintah Daerah, akan **DIJADIKAN CATATAN PENTING** terkait dengan bantuan dari Negara lain ke Pemerintah Daerah. Akan dilakukan perhatian yang lebih hati-hati dalam meratifikasi dengan mengkaji satu persatu dengan melibatkan pakar hukum, dengan melibatkan penterjemah tersumpah. Penyusunan RTRW perlu pertimbangan daya dukung lingkungan hidup, sehingga pemberian ijin agar memperhatikan hal-hal tersebut. permasalahannya belum selesainya perhitungan evaluasi daya tampung lingkungan.

DJ PPI KLHK 2016

172 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi Di Kalimantan Timur

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di **Samarinda, 26 Juli 2016.** Komitmen bersama itu akan dituangkan dalam kerangka kerja yang lebih konkrit pada berbagai tingkatan dan isu. Perlindungan keragaman hayati, pemanfaatan yang berkelanjutan, peningkatan ekonomi yang berkesinambungan serta manfaat pembangunan yang lebih besar dan lebih luas bagi masyarakat merupakan beberapa tujuan bersama yang menjadi dasar dari ikatan komitmen yang dibangun dalam GGC. Untuk mempercepat dan memperluas pengimplementasian program Kaltim Hijau dan pengurangan emisi melalui skim REDD+, masih diperlukan kerjasama berbagai pihak terutama untuk programprogram yang mengarah pada perlindungan kawasan konservasi, pertumbuhan ekonomi hijau serta pembangunan rendah emisi. Terkait dengan penyusunan *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang akan dilakukan oleh Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Paris Agreement 2015, Kaltim mengusulkan agar dilakukan revisi RAD GRK di tingkat provinsi seluruh Indonesia, agar dapat menjadi bahan dalam penyusunan NDC. Revisi ini hendaknya dapat didukung dengan kebijakan dari pemerintah pusat agar dapat mengoptimalkan implementasi RAD GRK di berbagai tingkatan, seperti contohnya usulan kebijakan kepada Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah kabupaten dan kota dapat mengimplentasikan kegiatan dan melakukan pemantauan meskipun tidak menyusun RAD GRK tingkat Kabupaten/Kota.

DJ PPI KLHK 2016

230 Kick Off Sosialisasi STRADA Pelaksanaan REDD+ di Kaimantan Tengah

Makalah disiapkan oleh Tim Penyusun Sosialisasi Strada REDD+ Kalimantan Tengah yang dipresentasikan di Palangka Raya, 12 Pebruari 2013 berisi tentang STRADA yang telah disusun. Tujuan STRADA REDD+ Kalteng jangka panjang adalah Terwujudnya kelestarian sumberdaya hutan dan lahan gambut yang berbasiskan komunitas melalui kegiatan pencegahan dan pengurangan emisi, konservasi, penguatan stok karbon serta pengelolaan lestari yang mendukung pelestarian nilai-nilai kearifan dan pengetahuan lokal demi peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat masyarakat Kalimantan Tengah.

Tim Penyusun Sosialisasi Strada REDD+ Kalimantan Tengah, 2013

231 Adaptasi dan Mitigasi terhadap perubahan iklim

Makalah yang dipresentasikan di Jakarta, 3 Februari 2016, Climate Change Festival berisi kenapa terjadi perubahan iklim dan aktivitas yang mempengaruhi perubahan iklim

Cut Augusta M. Anandi, Fitri K. Aini,2016.
CIFOR-CGIAR

255 Startegi Daerah REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah

Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi Strada REDD+ Tingkat Kabupaten/Kota GPU Balai Antang, Muara Teweh, 28-29 Mei 2013. Makalah memaparkan tentang : latar belakang Strada, Struktur Dokumen Strada REDD+ Kalteng, Isu-isu strategis REDD+ Prov Kalteng, Visi misi dan tujuan, Strategi pelaksanaan REDD+, Program dan rencana aksi dan kaidah pelaksanaan REDD+ Prov Kalteng.

Yusurum Jagau, 2013.

256 Menuju Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut

Makalah disampaikan pada Pertemuan para pihak untuk konsultasi dan konsolidasi Rencana Implementasi REDD+ di 11 Provinsi Jakarta 2-3 April 2014. Makalah menjelaskan bagaimana poteret tata kelola hutan dan lahan gambut di Indoensiadan peraturan perundangan yang malah kontra prodikstif untuk tata kelola hutan. Kesimpulan dari makalah ini adalah bagaimana : 1) Peran daerah krusial dalam mendukung tata kelola hutan dan lahan gambut; 2)Koordinasi dan sinergi lintas K/L perlu menjadi perhatian utama dalam melaksanakan tata kelola hutan dan lahan gambut; 3)Efektivitas pelaksanaan tata kelola dan lahan gambut akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat nasional dan daerah, dan pembenahan aparatur penegakan hukum Indonesia.

Program Hukum BP REDD+/UKP4 2014

260 Strategi Operasional dan Program Kerja BP REDD+2014

Jakarta 2 April 2014. Makalah menjelaskan program-program yang telah dilaksanakan di 11 provinsi percontohan REDD+ dan capaian hingga April 2014. Strategi umum : 1) Integrasi kebijakan dan program REDD+ pada segala

tingkatan pemerintahan: pusat, provinsi, kabupaten hingga desa; 2) Tujuan ditentukan pada tingkat nasional, dengan pelaksanaan pada tingkat sub-nasional; 3) Pada tingkat sub-nasional, pengembangan kelembagaan pada jurisdiksi provinsi dan inovasi program pada jurisdiksi kabupaten hingga desa; 4) Dimulai dengan menawawarkan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten (MOU dan PKS); 5) Mendorong komitmen pemerintah pada berbagai tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten) secara bersama untuk menjalankan inisiiatif REDD+ ; 6) ▫Program pada sub-nasional dimulai dengan penyiapan institusi, ke program-program strategis dan secara bertahap bergerak ke program pembayaran berbasis kinerja

BP REDD+, 2014.

261 Penyempurnaan Strategi Dan Rencana Implementasi MRV REDD+

Makalah disampaikan pada Lokakarya Jakarta 10-11 September 2012. Makalah menjelaskan tentang poteret target penurunan emisi dari hutan dan gambut dan bagaimana peran sistem MRV dari mulai produksi, pemasaran sampai distribusi menjadi sistem yang dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan.

Satgas REDD+. 2012

381 Prosiding Sosialisasi Dan Komunikasi Paris Agreement 2015 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Dan INDC Di 11 Provinsi Di Sumatera Selatan

Diselenggarakan Di Palembang, 14 Juni 2016, Tahun 2012 terjadi pegeseran nilai/angka GRK sejak terjadi kebakaran hutan Tahun 2015. Harus ada kesepakatan batasan-batasan peningkatan 29 persen dari 26 persen RAD GRK. Terkait BRG, akan permanen atau adhock? Belum ada kejelasan mengingat Sumsel yang terparah di antara 7 provinsi. Banyak investor berminat pada energi selain fosil. Masing-masing Provinsi memiliki target yang didetailkan ke dalam RAD masing-masing daerah. Terimakasih dan kami menyambut baik apa yang telah dilakukan LAMAI. Sinergi masing-masing instansi sangat dibutuhkan. Tahun depan BRG anggarannya masih di KSDAE. BRG tidak bisa sendiri, harus melibatkan daerah.Korem sudah melaksanakan upaya penelitian BIOS 44 dan sudah ditebarkan. Kalau ada masalah, ada alat, ada sumber daya manusia dengan harapan masalah selesai. Limbah sawit bisa diubah menjadi energi, kami siap membantu. Kebakaran dikurangi dengan action dengan melaksanakanpatrol perburuan, komandan satgas (disayembarakan). Apabila sengaja dibakar langsung diproses hukum.

DJ PPI KLHK 2016

389 Prosiding Training of Trainers (ToT) Penghitungan dan Monitoring Karbon Hutan.

Prosiding mencakup rangkaian kegiatan yang teah dialksanakan di 2 lokasi yaitu di Ambon - Maluku, 30 – 31 Juli 2012 Jember – Jawa Timur, 19 – 20 September 2012 *(ToT on Carbon Accounting and Monitoring)*. Implementasi REDD+ ada beberapa hal yang diprasyaratkan, yaitu : tersusunnya Strategi Nasional, tersedianya *baseline/ Reference Level* (RL)/ *Reference Emission Level* (REL), tersedianya sistem penghitungan dan pelaporan stok karbon beserta perubahannya yang dapat diverifikasi (MRV), serta Sistem Informasi *Safeguards* (SIS). Keempat komponen tersebut adalah prasyarat utama yang harus dipenuhi

saat implementasi REDD+. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Standardisasi dan Lingkungan di Provinsi Maluku dan Provinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pihak di daerah di bidang teknis/ metodologis, yaitu penghitungan stok karbon dan monitoring perubahan tutupan hutan dan stok karbon, REL/RL dan MRV.

Novia Widyaningtyas, Radian Bagiyono, Haryo Pambudi, Andi Andriadi, Dinik Indrihastuti, Windyo Laksono, Erna Rosita, Andreas Rahutomo, Editor: Nur Masripatin, 2012.

Pustanling, FCPF, World Bank

391 Prosiding Workshop Identifikasi Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan serta Aktivitas yang Menyebabkan Pengurangan Emisi, Peningkatan Serapan dan Stabilisasi Stok Karbon Hutan.

Prosiding mencakup rangkaian kegiatan yang teah dialksanakan di 2 lokasi yaitu Ambon - Maluku, 10 Oktober 2012 Banjarmasin – Kalimantan Selatan, 17 Oktober 2012. Prosiding ini merupakan dokumentasi 3 (tiga) workshop tentang Identifikasi Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan serta Aktivitas yang Menyebabkan Pengurangan Emisi, Peningkatan Serapan dan Stabilisasi Stok Karbon Hutan (*Identification of Deforestation and Forest Degradation Drivers and Activities that Result in Reduced Emission, Increased Removals, and Stabilization of Forest Carbon Stocks*) di ketiga lokasi yaitu: Ambon – Maluku, Banjarmasin – Kalimantan Selatan dan Jambi.

Novia Widyaningtyas, Radian Bagiyono, Haryo Pambudi, Andi Andriadi, Dinik Indrihastuti, Windyo Laksono, Erna Rosita, Andreas Rahutomo, Editor: Nur Masripatin, 2012

Pustanling, FCPF, World Bank

393 ProsidingKomunikasi Publik tentang Pengaturan Institusi dan Kerangka Regulasi untuk Implementasi REDD+ dan Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan *(Public consultation on institutional setting and legal framework for REDD+ implementation and mitigation ofclimate change in forestry sector)*

Dalam menentukan Kelembagaan REDD+ harus diperhatikan: a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kelembagaan dan kewenangannya serta memperhatikan undang-undang otonomi daerah. b. Kelembagaan REDD+ tetap harus efisien dan memperhatikan *landscape* institusi K/L di pusat dan daerah yang saat ini secara nyata terlibat dalam REDD+. c. Perlu pengaturan mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat tapak dan bagaimana mekanisme tata kelola organisasi, tata pelaporan dan tata pengelolaan keuangan REDD+.

Novia Widyaningtyas, Radian Bagiyono, Haryo Pambudi, Andi Andriadi, Dinik Indrihastuti, Windyo Laksono, Erna Rosita, Andreas Rahutomo, Editor: Nur Masripatin, 2012

Pustanling, FCPF, World Bank

397 Prosiding. Workshop Komunikasi Stakeholder tentang Pengelolaan Data dan Pembelajaran Kesiapan/Kegiatan Demonstrasi REDD+.

Prosiding ini merupakan dokumentasi pelaksanaan 2 (dua) workshop ”Pengelolaan Data dan Pembelajaran Tentang Kesiapan/Kegiatan Demonstrasi REDD+(*Outreach on Management of Data and Lessons on Readiness Activities/REDD+ Demonstration Activities*) yang telah diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat pada tanggal 3 Agustus 2012 dan Musi Rawas, Sumatera Selatan pada tanggal 2 Oktober 2012. Workshop diselenggarakan untuk mengkomunikasikan ke *stakeholder* informasi mengenai isu perubahan iklim di sektor kehutanan, REDD+ dan perkembangan kesiapan implementasinya, sehingga diharapkan dapat dicapai peningkatan pemahaman dan kapasitas *stakeholder* mengenai penanganan isu perubahan iklim, REDD+ serta kesiapan implementasinya termasuk kelembagaan. Selain itu diharapkan dapat terwujud inisiatif pengelolaan data dan informasi kegiatan *readiness*.

Novia Widyaningtyas, Radian Bagiyono, Haryo Pambudi, Andi Andriadi, MM. Dinik Indrihastuti, Windyo Laksono, Erna Rosita, Andreas Rahutomo, Editor: Nur Masripatin, 2012

Pustanling, FCPF, World Bank

398. Prosiding. 2012. Workshop Koordinasi Mitra Kerjasama Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan “REDD+ Readiness

Workshop dilaksanakan di Jakarta, 22 November 2012. pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan dukungan dari donor partners tersebut perlu saling dikomunikasikan agar dapat menarik pembelajaran yang bermanfaat dari kerjasama yang telah dan sedang berjalan, serta menghindari tumpang tindih dan pengulangan yang tidak perlu. Workshop diselenggarakan untuk memperoleh informasi tentang status terkini dan mengkoordinasikan kegiatan kerjasama REDD+ *Readiness* antara lembaga donor, pihak pelaksana dan pemerintah, serta mengkomunikasikan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama REDD+ *Readiness* sebagai pembelajaran bagi kegiatan yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan.

Novia Widyaningtyas, Radian Bagiyono, Haryo Pambudi, Andi Andriadi, MM. Dinik Indrihastuti, Windyo Laksono, Erna Rosita, Andreas Rahutomo, Editor: Nur Masripatin, 2012

Pustanling, FCPF, World Bank

399 Prosiding. Workshop Review Status Demonstration Activities (DA) REDD+ di Indonesia.

Kegiatan workshop yang dilaksanakan di Jakarta. 22 Desember 2012. Berdasarkan hasil Workshop Review Status Pilots/DA REDD+ di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Standardisasi dan Lingkungan bekerjasama dengan UN-REDD 2010, diketahui pilot/DA REDD+ yang ada di Indonesia bervariasi dalam hal skala, approach, metodologi, dan kegiatan. Mengingat banyaknya jumlah serta keragaman DA tersebut, dan perkembangan negosiasi di tingkat internasional yang akan berpengaruh terhadap keberlanjutan DA jika dikaitkan

dengan rencana implementasi REDD+, maka perlu dilakukan *review* terhadap berbagai DA tersebut. *Review* ini diperlukan untuk mengetahui tingkat capaian *(progress)* DA REDD+ hingga saat ini serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi dari pelaksanaan/penyelenggaraan *Demonstration Activities* (DA) tersebut dalam rangka mempersiapkan implementasi penuh *(full implementation)* REDD+ di Indonesia.

Novia Widyaningtyas, Radian Bagiyono, Haryo Pambudi, Andi Andriadi, MM. Dinik Indrihastuti, Windyo Laksono, Erna Rosita, Andreas Rahutomo, Editor: Nur Masripatin, 2012

Pustanling, FCPF, World Bank

402 Laporan Program FCPF REDD+ Readness Preparation

Berisi dokumen administrasi, rencana kerja dan budget. Serta dokumen kontrak dengan konsultan. KAK Lokakarya konsultasi Publik Sistem Informasi pengaman untuk sosial dan lingkungan.

DKN dan Puspijak. 2012.

403 Prosiding Dialog Prospek Perdagangan Karbon Dari Mekanisme Redd+ Dan Lokakarya "Rancangan Arsitektur Redd+ Di Indonesia

Prosiding teridiri dari 2 kegiatan yaitu **Dialog Prospek Perdagangan Karbon dari Mekanisme REDD+.** diselenggarakan di Bogor 7 Maret 2013 dan LOKAKARYA "RANCANGAN ARSITEKTUR REDD+ DI INDONESIA" BOGOR, 18 APRIL 2013. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan lklim dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan,. Dialog ini dihadiri peneliti dan pengusul demonstration activities (DA) REDD+, otoritas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Perancang mekanisme pendanaan REDD+, skema karbon nusantara, dan pembeli potensial. Para pembicara yang menyampaikan materi adalah :1. Ari Wibowo, mewakili DA REDD+ di Taman Nasional Meru Betiri yang akan menyampaikan desain dokumen REDD+ dari kawasan konservasi, 2. Dharsono, mewakili DA REDD+ di kegiatan restorasi ekosistem Rimba Makmur Utama yang akan menyampaikan dokumen kesiapan pelaksanaan REDD+, 3. Doddy Sukadri, mewakili mekanisme pendanaan REDD+ melalui Skema Karbon Nusantara (SKN) yang akan menyampaikan skema karbon yang berbasis sumberdaya domestic; 4. Andi Pramaria, mewakili Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan yang telah menginisiasi kegiatan REDD+ di wilayahnya dan akan menyampaikan potensi pengurangan emisi karbon dari pengelolaan hutan yang lebih baik, 5. Paul Mustakim dan Rizal Boer, mewakili Perusahaan multinasionaf/nasional yang memiliki ketertarikan dengan program REDD+ baik melalui mekanisme carbon offset atau corporate social/environmental responsibility. LOKAKARYA "RANCANGAN ARSITEKTUR REDD+ DI INDONESIA" BOGOR, 18 APRIL 2013. Lokakarya "Rancangan Arsitektur REDD+ di Indonesia" dibuka dengan keynote speech Kepala Sadan Litbang Kehutanan Dr. Ir. Iman Santoso, M.Sc (sambutan terlampir), dilanjutkan dengan presentasi dari beberapa narasumber pada sesi pertama yang dipandu oleh Prof. Peter Kanowski (terbuka untuk umum). Acara selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi sesi kedua yang dipandu oleh Dr. Herry Purnomo (sesi tertutup dan hanya diikuti oleh pakar). Sistem Safeguards **untuk REDDI: 1)**

Indonesia saat ini sudah punya beberapa aktivitas yang sebenarnya merupakan layers of safeguards mulai dari AMDAL dll. Pertanyaannya adalah dengan adanya beberapa standar, apakah standar yang baru dapat diterima? Dalam hal ini, kita dapat memilih indikator yang berbeda-beda untuk diadopsi. 2) Banyak kesempatan untuk mengintegrasikan standar yang berbeda. Namun kesulitan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan standar atau sistem memiliki komponen yang sama tingkat robustness-nya . 3) Permasalahan yang biasanya terjadi adalah pada sistem monitoring dan kapasitas yang ada untuk mengimplementasikan sistem safeguards yang sudah disusun.

Deden Djaenudin, Zahrul Muttaqin, Achmad Pribadi, Jonny Holbert P 2013

Pusijak, FCPF, Worl Bank

404 Prosiding Workshop Kerjasama Internasional.

Workshop dilaksanakan di **Bogor 5 November 2012.** Tujuan kerjasama ini adalah untuk membantu pengembangan kapasitas institusi penerima dalam merancang strategi nasional REDD+ membangun skenario acuan tingkat nasional dan sub nasional, dan membangun sistem perhitungan karbon dan monitoring sesuai dengan kondisi lokal, regional dan nasional. Dengan demikian, tujuan pengembangan akan dipantau melalui indikator berikut ini: 1. SESA dipersiapkan dan disetujui oleh para pemangku kepentingan nasional termasuk lembaga-lembaga pemerintah yang kompeten; 2. Situasi dan kondisi yang berdampak pada Skenario Acuan Nasional (dasar) diukur dan dibahas bersama para pemangku kepentingan yang relevan, dan 3. Kajian tentang penyebab deforestasi, opsi bagi hasil dan opsi intervensi yang semakin memperkuat Strategi REDD+ nasional disusun dan disetujui oleh Pemerintah setelah dibahas dan disahkan oleh para pemangku kepentingan.

Ari Wibowo; Setiasih Irawanti; Zahrul Muttaqin; Subarudi; Fitri Nurfatriani; Niken Sakuntaladewi; Novi Widyaningtyas; Sulistyo A. Siran. Editor: Sulistyo A. Siran dan Bayu Subekti, 2012

Pusijak, FCPF, Worl Bank

413 Kajian Penyusunan Konsultasi Publik bagi Dewan Kehutanan Nasional.

Kajian ini berisi tentang pelaksanaan konsultasi publik yang menyesuaian dengan kondisi DKN sebagai organisai yang merepresentasikan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat nasional sebagaimana tercantum dalam misi, tujuan dan fungsinya. DKN secara eksplisit menyiratkan persyaratan perlunya partisipasi para pihak ataupun partisipasi masyarakat sipil pada umumnya dalam berbagai kegiatnnya. Maka, untuk meningkatkan kualitas keputusan, masukan maupun evaluasi atas melaksakan kebijakan pembangunan kehutanan yang dilakukan oleh DKN, DKN dituntut untuk menggunakan serangkaian kegiatan yang disebut Konsultasi Publik (KP).

R Yando Zakaria dan Paramita Iswari. 2014.

Publication

002 Press Release. Raising Support For Land Based Industries For Sustainable Development

Among the good practices discussed in the seminar were initiatives of several land based industries to integrate actions for environmental conservation and good social engagement into the strategies and regulations of their business. In the forestry sector for example, some actors in the forestry business have been proactive in implementing the principles of sustainable forest management which affect the reduction of carbon emissions. Additionally, the plantation sector has initiated the Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) and Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) for the past several years, which is also contributing in emissions reduction from the palm oil plantation in Indonesia. Similar initiatives also exist in other sectors, including the extractive industry, in particular the mining industry. We must appreciate these good practices although it is not without flaws and still needs some improvements.

SATGAS REDD. 2012.

004 Siaran Pers 11 Provinsi Siap Memulai Implementasi REDD+, Memperbaiki Tata Kelola Hutan Dan Lahan Gambut Untuk Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca

Lebih dari 170 peserta dari 11 provinsi dan 29 kabupaten yang kaya dengan sumberdaya hutan dan lahan gambut, termasuk delapan orang bupati dari Sumatra Barat, Jambi dan Sulawesi Tengah, menunjukkan antusiasmenya saat berkumpul di kantor operasional Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+) di Jakarta, Rabu (2/4) untuk mendiskusikan dan menyepakati kegiatan REDD+ di wilayahnya masing---masing.

BP REDD+, 2014

005 Siaran Pers Badan Pelaksana REDD+ bersama Provinsi Sulawesi Tengah dan 5 Kabupaten siap Implementasikan REDD+

Provinsi Sulawesi Tengah mengukuhkan komitmennya untuk mengurangi kerusakan hutan, memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas tutupan hutan untuk membantu menurunkan tingkat emisi rumah kaca dan memperlambat perubahan iklim. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Bupati Donggala Kasman Lassa, Bupati Tolitoli Moh. Saleh Bantilan, Bupati Sigi Aswadi Randalembah, Bupati Tojo Una-Una Damsik Ladjalani, Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu dan Kepala Badan Pengelola Penurunan Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+) Heru Prasetyo, di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. “Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan visi dan tekad yang kuat untuk memelihara hutan dan memperbaiki kualitasnya. Hal ini sejalan dengan misi BP REDD+ dalam mewujudkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumahkaca hingga 41% pada tahun 2020 melalui hutan yang sehat sebagai paru-paru dunia.”,

BP REDD+, 2014

018 Pendekatan Multidoor Menyiapkan aneka pintu bagi keadilan lingkungan

Buletin REDD+ Indonesia. Edisi Maret 2016. Versi bahasa Indonesia. Berisi kegiatan yang telah dijalankan di lingkup KLHK Buletin ini diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Program REDD+ UNDP. Lokakarya dan Pelatihan (lokalatih) Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Multidoor berlangsung dinamis. Sebanyak 40 peserta melakukan simulasi bedah kasus pidana lingkungan yang terkait korporasi. Mereka berasal dari utusan Mahkamah Agung (hakim), Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Pemerintah Provinsi Riau

KLHK, Norwegian Embassy, UNDP, 2016

019 Multidoor Approach Getting Ready With Various Doors To Environmental Justice

Buletin REDD+ Indonesia. Edisi Maret 2016. Versi bahasa Inggris. Workshop and Training on Handling Forest and Land with Multidoor Approach turned out to be lively. The participants, 40 of them, were involved in corporate environment criminal case analysis simulation. They were representatives from several institutions such as Supreme Court (Judge), Attorney Office, Police Department, Environment and Forest Ministry and Riau Province local government at the event.

KLHK, Norwegian Embassy, UNDP, 2016

020 Indigenous Communitywaiting For Constitutional Court Decree Realization

Buletin REDD+ Indonesia. Edisi April 2016. Versi bahasa Inggris. The statement was expressed during Multiparty Communication in Accompaniment Process in Drafting Local Regulation (Perda) of Indigenous Communities, Jambi Province. The event was held in Jambi, on Wednesday March 30, 2016, by Jambi Provincial Government, Environment and Forestry Ministry and UNDP REDD+ Program. There certainly is one objective behind all of this: lessons to learn from Local Regulation on Protection and Recognition of Indigenous Community of Marga Serampas in Merangin District on February 16, 2016. They are lessons, along with building common understanding among decision makers and related parties in encouraging recognition to indigenous community and forest through local regulation.

KLHK, Norwegian Embassy, UNDP, 2016

021 Pekerjaan Rumah Menemukan Posisi Redd+Kemana Redd+ Akan Dibawa Setelah Paris Agreement Yang Memiliki Implikasi Dalam Penerapannya."

Buletin REDD+ Indonesia. Edisi Mei 2016. Versi bahasa Indonesia. Seminar yang diikuti sekitar tiga ratus peserta ini menghasilkan sejumlah rumusan. Pertama, menentukan posisi (positioning) REDD+ di dalam *Nationally Determined Contributions* (NDC) Indonesia. Kedua, diperlukan koordinasi pengaturan mekanisme kerja untuk kepentingan implementasi antara lembaga nasional (pusat) dan sub-nasional (daerah). Ketiga, melibatkan potensi sektor swasta, NGO dan masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya memenuhi komitmen pemerintah 29%, termasuk melalui inisiatif REDD+. Keempat, pemerintah

memiliki pekerjaan rumah. Antara lain menyiapkan mekanisme untuk merekognisi semua inisiatif dari sektor swasta, NGO dan masyarakat melalui sistem registry nasional (SRN). Pemerintah harus merekognisi metodologi yang digunakan oleh masyarakat lokal dalam sistem MRV untuk implementasi REDD+. Lalu menyiapkan mekanisme pendanaan dan pembagian manfaat untuk memberikan insentif pada inisiatif REDD+ oleh swasta, NGO dan masyarakat untuk mewujudkan *sustainable financing* di REDD+.

KLHK, Norwegian Embassy, UNDP, 2016

022 Pekerjaan Besar Badan Restorasi Gambut *(BRG)* selama 5 Tahun Brg Harus Memperbaiki 2 Juta Ha Lahan Gambut Yang Rusak. Dari Mana Dananya?

Buletin REDD+ Indonesia. Edisi Februari 2016. Versi bahasa Indonesia. Duta Besar AS untuk Indonesia, Robert Blake dalam diskusi di Festival Iklim mengatakan pada Februari 2016, *Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA Indonesia)* menandatangani dua hibah untuk mendukung kerja mengatasi perubahan iklim. Pertama, lewat *Berbak Green Prosperity Project* akan *merestorasi hidrologi* rawa gambut di Jambi dengan hibah senilai US$ 17 juta. "Ini untuk mengurangi kebakaran di gambut. Ini bagian dari yang akan dilakukan AS dalam mendukung Badan Restorasi Gambut.

KLHK, Norwegian Embassy, UNDP, 2016

023 Masyarakat Adat menanti Realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mk35 Menandai Babak Baru Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat

Buletin REDD+ Indonesia. Edisi Juni 2016. Versi bahasa Indonesia. Komunikasi Multipihak dalam Rangka Proses Pendampingan Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Jambi. Acara yang diadakan di Jambi pada Rabu, 30 Maret 2016 ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Program REDD UNDP. Tujuan acara ini adalah menyampaikan proses pembelajaran atas disahkannya Perda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas di Kabupaten Merangin pada 16 Februari 2016. Selain itu untuk membangun kesamaan pemahaman kepada para pengambil kebijakan dan multipihak dalam rangka mendorong pengakuan masyarakat adat dan hutan adat melalui peraturan daerah.

KLHK, Norwegian Embassy, UNDP, 2016

024 Program livelihood di Kabupaten Pulau Pisang Multi Manfaat REDD+ yang dirasakan warga

Buletin REDD+ Indonesia. Edisi Desember 2015. Versi bahasa Indonesia. Berisi kegiatan yang telah dijalankan di lingkup KLHK Bibit pohon karet setinggi 70 sentimeter berjajar di kebun pembibitan Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya. Pada setiap baris terdapat papan nama pemilik bibit tersebut. "Ini bibit unggul bantuan Program UNDP REDD," kata Ibu Jenta, pengurus Kelompok Tani Pembibitan Karet Pilang Bahijau

KLHK, Norwegian Embassy, UNDP, 2016

025 Seminar Moving The Redd+ Agenda Homework To Decide Where Redd+ How Will Redd+ Be Taken Forward In Light Of The Implications Of The Climate Goals Of The Paris Agreement?

Buletin REDD+ Indonesia. Edisi May 2016. Versi bahasa Inggris. Berisi kegiatan yang telah dijalankan di lingkup KLHK Subnational governments need to be engaged in implementing REDD+, especially since we are required to conduct Measurement, Reporting and Verification (MRV), but lack the capacity to do so", said Karsono, a seminar participant representing the West Kalimantan Forestry Agency. Other participants called more concrete actions in implementing the Constitution Court Ruling No. 35/2012 (MK 35) recognizing the tenure rights of customary communities and the need for better crosssector collaboration to realize climate goals. Questions raised by seminar participants demonstrate the interests and concerns shared amongst local authorities and stakeholders involved in implementing REDD+ pilot projects in 11 provinces and 76 districts. The seminar and exhibition not only convened local authorities, but also brought together representatives from ministries, private sector actors, academicians and non governmental organizations.

KLHK, Norwegian Embassy, UNDP, 2016

026 Restorasi Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik

Buletin REDD+ Indonesia. Edisi Desember 2015. Versi bahasa Indonesia. Berisi kegiatan yang telah dijalankan di lingkup KLHK Bencana kabut asap akibat kebakaran gambut dan hutanmenyebar luas ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke negara tetangga. Tingkat pencemaran udara akibat asap telah melewati batas ambang bahaya. Dampak bencana asap pada 2015 telah mempengaruhi ke segala aspek kehidupan. Berbagai upaya telah dilakukan yang melibatkan sumber daya nasional dan internasional. Untuk menyatukan langkah dan kekuatan semua pihak menghadapi kesiapan bencana kabut asap, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Kyoto University melaksanakan Workshp Pakar Penanganan dan Pembelajaran Kabut Asap di Indonesia Berbagai Aspek Penyelesaiannya, di Hotel Aryadhuta Jakarta, pada 5-6 November 2015. Workshop ini dihadiri oleh berbagai perwakilan masyarakat, perguruan tinggi dari Indonesia dan Jepang, kementerian dan lembaga terkait, Kementerian LHK dan Program REDD+ UNDP.

KLHK, Norwegian Embassy, UNDP, 2016

027 Sustainable Restoration Of Peat Land For A Better Indonesia

Buletin REDD+ Indonesia. Edisi Desember 2015. Versi English. Berisi kegiatan yang telah dijalankan di lingkup KLHK. The smog disaster due to the peat and forest fires widely spread to various regions in Indonesia, even to neighboring countries. The air pollution level due to the smoke passed the danger threshold limit. The impact of the smoke disaster in 2015 affected all aspects of life. Various efforts have been made involving national and international resources. To unify measures and force of all parties facing the preparedness of the smog

disaster, the Ministry of the Environment and Forestry in cooperation with Kyoto University conducted an Expert Workshop on Handling and Learning Smog in Indonesia and the Various Solution Aspects, at Hotel Aryadhuta in Jakarta, on 5-6 November 2015. The workshop was attended by various representatives of the community, universities from Indonesia and Japan, the related ministries and institutions, the Ministry of the Environment and Forestry and the REDD+ UNDP Program.

KLHK, Norwegian Embassy, UNDP, 2016

028 Lesson from conflict Resolutio at Rainforest of hope

Buletin REDD+ Indonesia. Edisi Januari 2016. Versi bahasa Inggris. Berisi kegiatan yang telah dijalankan di lingkup KLHK The creation of Conflict Resolution Tenurian and Indigineous Forest Directorate in KLHK shows the State awareness, and comittment to conflict resolution. So far, there are Constitutional Court decree no 25/2012 and Minister KLHK decree on Forest Right and Conflict Resolution which provide legal basic to the issue. Meanwhile Working Group Tenure decree is in the making right now. In the mean time, KLHK offered social forestry approach to settle conflicts. There is a good lesson learned from Hutan Harapan conflict resolution. KLHK concluded that there are several stages before the agreement between conflicting parties reached. First, problem solution among those who sympathize with the poor, pro-environment and human rights. Second, change of rules."

KLHK, Norwegian Embassy, UNDP, 2016

029 Pelajaran Resolusi Konflik di Hutan Harapan

Buletin REDD+ Indonesia. Edisi Januari 2016. Versi English. Berisi kegiatan yang telah dijalankan di lingkup KLHK 25/2012, Permenhut Hutan Hak dan Rancangan Permenhut Penyelesaian Konflik. Permen Hutan Hak menjadi basis hukum bagi masyarakat adat melakukan klaim hutan hak, jika komunitas mereka telah diakui. Permen Penyelesaian Konflik sedang disusun konsepnya adalah Working Group Tenure. Saat ini solusi penyelesaian konflik melalui KLHK adalah perhutanan sosial. Terkait konflik di Hutan Harapan, kata Vivien dan Hanni Hadiati, KLHK telah mengindetifikasi dan menindaklanjuti masalah-masalah yang didiskusikan. Pertama, penyelesaian masalah di tingkat tapak yang pro masyarakat miskin, lingkungan dan HAM. Kedua, perbaikan kebijakan.

KLHK, Norwegian Embassy, UNDP, 2016

030 REDD+ di Kalimantan Tengah : Pengandalian Kebakaran hutan dan ahan berbasis masyarakat

Brosur berisi tentang inisiatif dan kegiatan yang diinisiasi Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan REDD+. Pentingnya menjaga hutan sangat berharga untuk terus menerus menyerap CO2 yang ada di atmosfer.Menurut hasil riset terbaru, dari 32 milyar ton CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan manusia per tahun, ternyata kurang dari 5 milyar ton yang diserap oleh hutan. Jadi kehilangan satu tegakan pohon = kehilangan berlipat ganda (kehilangan

cadangan karbon di daratan dan kehilangan ekosistem yangmampu menyerap karbon di atmosfer)

BP REDD+, 2014

034 Badan Pelaksana REDD+ bersama Provinsi Sulawesi Tengah dan 5 Kabupaten siap Implementasikan REDD

Gubernur Sulawesi Tengah. Longki Djonggala menyambut baik inisiatif ini, "Melalui kerjasama ini, mekanisme REDD+ diarusutamakan melalui strategi, pembuatan kebijakan dan implementasi program daerah. Provinsi Sulawesi Tengah juga mendapat manfaat peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan meliputi sumber daya manusia, penyempuranaan data dan peta serta pengembangan infrastruktur. Sebaliknya Provinsi Sulawesi Tengah mengupayakan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan dan peraturan di tingkat daerah untuk memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan REDD+."

BP REDD+, 2014

035 Keputusan revisi belum final : Pemerintah akan tetap implementasikan PP Gambut.

Kliping. Investor Daily Indonesia. 15 Jan 2015. Pemerintah akan Tetap Implementasikan PP Gambut Nomor 71 tahun 2014. Tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Untuk memutuskan perlu tidaknya revisi aturan tersebut, KLHK akan meminta masukan dari pemangku kepentingan. Apabila tidak diperoleh titik temu, keputusan final perlu tidaknya revisi PP tersebut akan diambil dalam rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian.

Damiana Simanjuntak 2015
Investor Daily Indonesia

036 Bali Targets Safeguarding Productive Land

To preserve produtive land, eforcing the regulation is the modt important thing, as well as effort to intensify agricultural production such as providing subsidies and centives and providing access to the market.

Wasti Atmodjo 2014
Jakarta Pos,

037 Kelembagaan Baru Reforma Agraria

Kliping Kebijakan pembaharuan agraria, yang pada intinya adalah identifikasi penguaasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menjalankan redistribusi tanah (land reform) dengan memprioritaskan kepemilikan untuk petani miskin, menyelesaikan konflik-konflik agraria serta menyiapkan pembiayaan dan kelembagaan yang memadai.

Noer Fauzi Rachman 2014
Harian Kompas

038 Kehutanan : Industri harus optimalkan perpanjangan sertifikasi kayu

Harian Kompas 4 Januari 2014. Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sepakat memperpanjang tengat waktu wajib memiliki sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) bagi usaha kecil menengah berorientasi ekspor dari Januari 2014 menjadi 1 Januari 2015.

Harian Kompas 4 Januari 2014.

039 Kemenhut mendorong industri kehutanan.

Industri kehutanan di jawa berkembang pesat, tetap di luar jawa kurang berkembang dan perlu mendorong investor untuk berivestasi pada sektor industri kehutanan di Sumatera, Kalimantan dan Papua. HTI akan didorong untuk menjadi pemasok bahan bakunya.

Harian Media Indonesia 10 April 2014.

040 Bisnis Pulp dan Kertas: Industri Wajib TingkatkanTata Kelola Hutan.

Pemerintah berkomitmen mengawal dan memastikan perbaikan tata kelola hutan tanaman industri di setiap perusahaan. Untuk itu industri bubur kayu dan kertas terintegrasi dengan hutan harus terus menerus meningkatkan tata kelola dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Yanto Kusdiantono. Kliping. Koran Sindo 2 Februari 2015.

041 Badan Pelaksana REDD+ bersama Provinsi Sulawesi Tengah dan 5 Kabupaten siap Implementasikan REDD+

PAlu April 13, 2014. Gubernur Sulawesi Tengah. Longki Djonggala menyambut baik inisiatif ini, “Melalui kerjasama ini, mekanisme REDD+ diarusutamakan melalui strategi, pembuatan kebijakan dan implementasi program daerah. Provinsi Sulawesi Tengah juga mendapat manfaat peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan meliputi sumber daya manusia, penyempuranaan data dan peta serta pengembangan infrastruktur. Sebaliknya Provinsi Sulawesi Tengah mengupayakan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan dan peraturan di tingkat daerah untuk memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan REDD+.” Lebih jauh Longki menjelaskan bahwa persiapan dan pengembangan program-program strategis REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah disesuaikan dengan karakeristik masing-masing kabupaten dan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat dengan memperhatikan kearifan lokal dan melibatkan masyarakat secara lebih luas.

Muhammad Subarkah 2014

042 UNEP-RSPO dukung Industri sawit berkelanjutan.

Kliping Suara Pembaharuan. 20 November 2014. Sertifikasi minyak sawit berkelanjutan (CSPO), sesuai dengan standar lingkungan yang disepakati secara global yang berhubungan dengan praktik terbaik dalam ekonomi, sosial dan lingkungan. Minyak sawit berkelanjutan berpotensi memberikan kontribusi

signifikan, temasuk upaya UNEP pada konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan ekonomi hijau.

Suara Pembaharuan, 2014

104 Satgas REDD+ fasilitasi diskusi antara para pelaku bisnis perkebunan dengan pengelolaan secara lestari di Indonesia.

Siaran Pers. Workshop adalah bagian terakhir dari serangkaian pertemuan yang diikuti oleh kelompok pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Workshop sebelumnya telah mendengarkan masukan-masukan dari sektor pertambangan, HPH dan perkebunan sawit, kalangan konservasi dan juga menyoroti upaya-upaya untuk menjaga dan membangun potensi rakyat sekitar hutan agar mampu berperan aktif dalam mengurangi deforestasi dan perusakan hutan. Semua masukan dari rangkaian workshop ini akan disimpulkan dan menjadi masukan penting bagi Lembaga REDD+ yang akan dibentuk Pemerintah dalam waktu dekat.

Satgas REDD+ 2012

129 Menggalang Dukungan Industri Berbasis Lahan Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Siaran pers dari seminar "*We Care, We Share. A Gallery of Good Practices in Land-based Industries: Palm Oil, Mining, and Forestry* Praktik baik yang dimaksud di sini adalah inisiatif sejumlah industri berbasis lahan memadukan upaya pelestarian lingkungan, keterlibatan sosial yang baik ke dalam strategi dan aturan bisnis mereka. Di sektor kehutanan, misalnya, sejumlah pelaku bisnis kehutanan secara proaktif sudah menerapkan kaidah-kaidah *sustainable forest management* yang berdampak pada turunnya emisi karbon. Di sektor perkebunan, sejak beberapa tahun lalu timbul inisiatif *Roundtable for Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO), yang pada gilirannya juga berkontribusi pada penurunan emisi dari kebun-kebun kelapa sawit di Indonesia. Inisiatif serupa juga ada di sektor-sektor lain, termasuk di industri ekstraktif semacam pertambangan. Meski belum sempurna dan perlu diperbaiki, praktik-praktik ini patut dihargai

Satgas REDD+ 2012

173 REDD+ in Indonesia A Catalyst for Change.

Leaflet. Ringkasan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satgas REDD. Engaging stakeholders is the key to implementing REDD+ in Indonesia. The National Forestry Council and the REDD+ Task Force are developing a strategic partnership to ensure transparency and fair representation for all, including vulnerable groups such as indigenous people living in affected areas. The REDD+ Agency will implement and apply the principles of Free and Prior Informed Consent in all REDD+ programs and projects. Preparing adequate safeguards will ensure that REDD+ activities have proper monitoring and control over program management, financial accountability and the impact of programs on vulnerable groups and the natural environment.

Satgas REDD+ 2012

176 REDD+ menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial: Tekad rakyat Indonesia untuk mengelola aset alam nasional demi kemakmuran bangsa

Pada kesempatan sebelumnya Satgas REDD+ telah menyelenggarakan workshop yang diikuti kalangan perkebunan; pertambangan, HPH dan perkebunan sawit; kalangan konservasi serta menyoroti upaya-upaya untuk menjaga dan membangun potensi rakyat sekitar hutan agar mampu berperan aktif dalam mengurangi deforestasi dan perusakan hutan. Semua masukan dari workshop-workshop ini akan menjadi masukan penting bagi Lembaga REDD+(*) yang akan dibentuk Pemerintah dalam waktu dekat. Profil industri-industri berbagai hasil hutan dan perkebunan yang dikelola secara lestari dengan menonjolkan aspek partisipasi dan pembangunan ekonomi rakyat – seperti berbagai produk anyaman rotan, kain tenun adat, rempah-rempah, pernak pernik interior, produk-produk kayu bersertifikat ekolabel, kopi ekolabel

Satgas REDD+ 2012

182 Presiden Republik Indonesia Kembali Tegaskan Komitmen Negara untuk Menurunkan Emisi Melalui Implementasi REDD+

REDD+ Menjadi Topik Utama Pertemuan Puncak tentang Perubahan Iklim di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. program '1 Million Green Youth Ambassadors' yang diinisiasi di Bali bulan lalu. "Sepertiga penduduk Indonesia adalah remaja di bawah usia 14 tahun, merepresentasikan kekuatan yang demikian besar untuk mendorong perubahan. Edukasi dan orientasi terhadap nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan akan terjadi secara efektif di kelompok usia remaja. Sikap yang pro-lingkungan ini akan mempengaruhi pandangan dan keputusan mereka saat menjadi pemimpin kelak di masa depan.

BPREDD+ 2014

183 Badan Pengelola REDD+: Butuh Kolaborasi untuk Mendorong REDD+ menjadi Sebuah Gerakan Nasional

Dalam kegiatan "Diskusi Awal Tahun 2015" yang diselenggarakan oleh BP REDD+ hari ini, Heru Prasetyo, Kepala BP REDD+, mengatakan, "Dengan bekerja di daerah, BP REDD+ punya implikasi lokal agar masyarakat lebih sejahtera melalui tata kelola hutan dan lahan gambut yang lebih baik. Sekaligus, punya implikasi global karena kaitannya dengan upaya penanggulangan perubahan iklim."

BPREDD+ 2014

184 Solusi Jangka Panjang untuk Krisis Kebakaran dan Asap di Indonesia dengan Fokus Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan

"Defining a Pathway toward a Long-Term Solution to Indonesia's Fire and Haze Crisis with A Focus on Sustainable Peatland Management". Hasil yang diharapkan dari forum ini adalah sbb.: 1). Kesepahaman akan urgensi pengembangan solusi jangka panjang untuk masalah Asap Indonesia; 2). Deliniasi tantangan utama untuk mencapai manajemen lahan gambut yang

berkelanjutan untuk meminimalkan kebakaran dan asap; 3) Identifikasi basis ilmiah berbasis, teknologi dan praktek yang baik untuk manajemen lahan gambut, konservasi dan pemanfaatan, restorasi lahan gambut yang terbakar/terdegradasi; 4). Kejelasan peran dan tanggung jawab dari para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan; 5). Kemitraan strategis untuk mencapai pengelolaan lahan gambut berkelanjutan diidentifikasi; dan 6). Sebuah roadmap awal untuk jangka panjang, menengah dan pendek untuk i) pemecahan masalah Asap di Indonesia; dan ii) mengurangi emisi melalui pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, sebagai masukan untuk strategi yang lebih luas untuk dipresentasikan pada COP21 di Paris.

DJ PPI, KLHK 2015

185 *Prisai,* Kerangka Pengamanan Dengan Pendekatan Baru, Siap Diintegrasikan Ke Instrumen Pendanaan Redd+

Sebagai bagian dari skema tata kelola lingkungan, instrumen pendanaan REDD+, selain harus memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi, harus juga dipastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif dari sisi sosial dan lingkungan. Untuk memenuhi prasyarat itu, instrumen pendanaan membutuhkan kerangka pengamanan (selanjutnya disebut dengan "s*afeguards"*). Secara ringkas *safeguards* ini merupakan upaya dini untuk memastikan bahwa sebuah program mau pun proyek REDD+ ini tidak melawan atau menyimpang dari tujuannya sendiri, selain juga membebaskan proyek itu dari kemungkinan menjadi arena baru korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian, keberadaan *safeguards* mencirikan tata kelola instrumen pendanaan REDD+ yang baik dan berstandar tinggi. Bila berhasil diwujudkan, ini akan menjadi daya tarik yang kuat bagi pemberi donor dan juga sektor swasta yang ingin berinvestasi pada kegiatan REDD+.

Satgas REDD+. 2012

187 Dampak Tambang Terhadap Lingkungan Dan Sosial

Kliping. PT Semen Indonesia Rembang mendapat penolakan dari warga, karena menambang pada kawasan karst pegunungan kendeng. Kawasan Kars seharusnya dibuat zonasi. Artinya harus dipilih kawasan karst yang boleh ditambang yang potensi dampak lingkungan dan social kecil.

Budi Bramantyo, Harian Kompas, 2014

188 Sosialisasikan Amdal Penolakan Pabrik Semen melalui pengadilan

Sosialisasikan Amdal Penolakan Pabrik Semen melalui pengadilan, karena pihak perusahan merasa dari awal investasi telah memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.

Harian Kompas, 2014

189 REDD Kurang sosialisai.

Harian Media Indonesia. 1 Nov 2014. Program pengurangan emisi gas rumah kaca dinilai hanya melibatkan para elite dan kurang melibatkan masyarakat sekitar hutan.

Vera Erwati Ismany Harian Media Indonesia, 2014

190 Fighting for ancestral lands

Desember 2012. We will accept REDD only if the government and legal system recognize our rights. That's why we say: No rights, no REDD. This is our position. We will accept REDD if the government accepts our proposal to have an indigenous people's law that guarantees our rights, and if there is a mechanism for us in the government system to administer the rights of indigenous people as citizens of this nation. Because right now we are non-existent, as far as the law is concerned.

Abdon Nababan, 2012
ASIA Views

191 Visi Baru Pengelolaan Lingkungan Bersama Tim Satgas REDD+ Baru: Menuju Pembangunan Lestari dan Berkeadilan.

Satgas Kelembagaan REDD+ yang bersifat lintas sektor dan kementerian ini dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2011, melanjutkan mandat Satgas sebelumnya yang telah berakhir pada 30 Juni 2011. Hasil Satgas REDD+ pertama antara lain: dokumen Strategi Nasional REDD+ yang telah dikonsultasikan secara luas dengan berbagai pemangku kepentingan, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, serta dipilih dan disiapkannya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan REDD+ yang pertama di Indonesia. Dengan mandat yang telah diperbarui, Satgas REDD+ Indonesia akan memasuki fase pembangunan institusi dan pelaksanaan program strategis. Sepuluh Tim Kerja yang diketuai oleh orang-orang terpilih, dari jajaran pemerintahan dan non-pemerintahan, akan bekerja dengan dedikasi penuh dalam membangun hubungan sinergis dengan instansi lain sepanjang 2012 ini. "Komposisi Tim Kerja ini merefleksikan semangat untuk menghadapi masalah-masalah era baru.

Satgas REDD+, 2012

192 Indonesia menuju COP 21 Memperjuangkan Kepentingan Nasional Berkontribusi Pada Upaya Global.

COP21 ditargetkan akan menghasilkan regime pananganan perubahan iklim global baru yang akan mengikat semua negara pihak (*applicable to all*) dengan tetap memperhatikan prinsip CBDR-RC. Keberhasilan dalam negosiasi dan penjangkauan dapat dibuktikan dengan seberapa jauh kepentingan Indonesia terakomodasi ke dalam kesepakatan/ keputusan COP-21, meningkatnya pengakuan atas upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta upaya terkait lainnya, dan meningkatnya peluang yang dapat ditangkap dari skema-skema yang terbangun melalui kesepakatan/keputusan COP termasuk

pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas institusi dan SDM. Semoga delegasi Indonesia dapat mengemban tugas memperjuangkan kepentingan bangsa di COP 21 Paris dan dalam waktu yang sama berkontribusi pada upaya global

DJ PPI KLHK.2015

193 COP21 Paris – Lima Paris Action Agenda (LPAA) Sesi Hutan: Pengelolaan Hutan Berkesinambungan Memberikan Tiga Keuntungan

LPAA adalah kerjasama antara Pemerintah Peru, Perancis , dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). LPPA bertujuan untuk mempromosikan dan menampilkan aksi iklim dari berbagai elemen mulai dari peran negara hingga organisasi non pemerintah. LPAA ingin menampilkan pada skala contoh bagaimana tindakan nyata di tingkat praktek sudah terjadi. LPAA juga mendorong agar aksi-aksi nyata tersebut dapat bergerak lebih cepat, agar berkontribusi secara substansial untuk mengatasi krisis perubahan iklim.

Yayasan Perspektif Baru. 2015

194 Flyer Indonesia-Norway REDD+ Partnersip transition towards phase-2.

REDD+ serves a critical role in helping fulfil the priorization on alleviating rural poverty and enabling development, emphasizing good governsnce snd snit-corruption sd key to improve forest and peat land management and supporting the shift towards low emissions development, acommitment reflected by decision of the administration to reduce fuel subsidies by 70% between 2014 and 2014.

196 Pencanangan Kerjasama Implementasi REDD+ oleh BP REDD+, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Berau.

“Program REDD+ di Kabupaten Berau disusun berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten Berau, yang disampaikan kepada BP REDD+ melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Setelah usulan ini dikaji bersama BP REDD+, maka teridentifikasi program-program potensial untuk diterapkan di wilayah kami, antara lain penguatan terhadap Program Karbon Hutan Berau (PKHB), penguatan pengelolaan Kawasan Pemangkuan Hutan (KPH) Berau Barat dan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Desa, Hutan Adat serta Hutan Hijau REDD+”

BP REDD+. 2014.

197 The 2nd UN-REDD Regional Workshop: Kerangka Pengaman Sosial REDD+-Pembelajaran dari Berbagai Negara.

Siaran pers Hasil yang diharapkan dari lokakarya ini adalah kesamaan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kerangka pengaman sosial di negara-negara mitra UN-REDD ini dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mendukung implementasi mekanisme REDD+ nanti, serta harapan atas peningkatan kapasitas yang lebih mumpuni dari para tim UN-REDD untuk merancang dan melaksanakan kerangka pengaman sosial sesuai dengan kondisi

nasional dan kedaulatan negara-negara mitra UN-REDD. Hal ini, pada saatnya, akan mendorong dengan lebih cepat perkembangan pelaksanaan mekanisme REDD+ di setiap negara nanti.

Kementrian Kehutanan. 2012

202 Pendidikan Yang Baik Untuk Pembangunan Indonesia Yang Lestari Dan Berkelanjutan Education For Sustainable Development (Esd)

Buku berisi tentang hutan, pentingnya menjaga hutan, dan metode-metode pembelajaran serta alat bantu yang harus disiapkan dalam meberikan materi dan pelajaran.

Ria Zhafarina Hadju dan Aulia Wijiasih 2013.
Satgas REDD+ dan Sekolah Sobat Bumi

207 Booklet Seminar Nasional dan Pameran Bersama. Moving REDD+ Indonesia Forward.

Tujuan dari seminar nasional : 1) Menginformasikan dan mengkomunikasikan progres terkini persiapan implementasi REDD+ di Indonesia untuk masing-masing aspek arsitektur REDD+, serta mendiskusikan implikasi *Paris Agreement* 2). Mengumpulkan masukan dan gagasan untuk menyusun langkahlangkah konkrit selanjutnya untuk mewujudnyatakan implementasi REDD+ Indonesia secara penuh, pre-2020 dan post-2020

DJ PPI KLHK. 2016

208 Festival Iklim.

Booklet. Tujuan Pelaksanaan : 1) Membangun upaya bersama *stakeholders* dalam *best practices* agenda pengendalian perubahan iklim. 2) Ÿ Mensosialisasikan Hasil *Paris Agreement* sebagai landasan pelaksanaan Pengendalian Perubahan Iklim Global dan Nasional. Dan 3) Menginformasikan dan mengkomunikasikan hasil-hasil *best practices* yang terjadi di nasional dan sub-nasional kepada seluruh masyarakat yang sejalan dengan *Paris Agreement*.

DJ PPI KLHK. 2016

209 Festival Iklim.

Booklet VERSI English. PURPOSES ; 1) To develop a joint effort among stakeholders in the framework of best practices in the agenda of climate change mitigation. 2) To promote Paris Agreement as the foundation of the Global and National Climate Change Control. Dan 3) To inform and disseminate the best practices occuring at national and sub national levels to entire public as in line with the Paris Agreement.

DJ PPI KLHK. 2016

210 Sosialisasi REDD+ digelar di Barito Selatan.

Komitemn bupati Barsel mendukung implementasi REDD+ dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global.

Kalteng Pos. Selasa, 26 Agustus 2014

211 REDD+ Implementation in Central Kalimantan

Progress of REDD+ implementation under REDD+ Task Force After selection of the pilot province the government of Central Kalimantan signed an MoU with the REDD+ Task Force and committed to implement 5 programs as following. a. Development and improvement of institution and processes in order to prepare Central Kalimantan to implement REDD+ program comprehensively; b. Development and improvement of various policies and regulations at local level, required in order to create legal framework for REDD+ implementation in Central Kalimantan; c. Development of various strategic activities to implement REDD+ comprehensively; d. Shifts in paradigm and working culture in all elements of relevant stakeholders in Central Kalimantan, which required in order to succeed REDD+; e. Multi-stakeholders Involvement throughout planning, implementation and monitoring of REDD+.

BP REDD+ 2014

236 Forclime Programme Fc Module Memulai Kegiatan Di Lapangan Ditandai Dengan Penyelenggaraan District Kick Off Workshop Oleh Tiga Kabupaten

District Kick Off Workshop kegiatan Forclime Programme FC Module telah dilaksanakan di tiga kabupaten yaitu Berau, Malinau (Kabupaten Kalimantan Timur), dan Kapuas Hulu (Kalimantan Barat). Workshop yang menandai dimulainya program di tingkat kabupaten tersebut dilaksanakan selama dua hari di masing-masing lokasi dan merupakan kelanjutan dari National Kick Off Workshop yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Mei 2011. Tujuan workshop adalah untuk memberikan informasi tentang program ForClime FC-Module kepada instansi dan para pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten serta melakukan analisis awal tentang lokasi Demonstration Activities (DA).

GIZ Forclime 2011

252 REDD+ Social and Enviromental Standard

SSL REDD+ dapat digunakan oleh pemerintah, LSM, agensi finansial dan pemangku kepentingan lain untuk mendesain dan mengimplementasikan program REDD+ yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat dan menghasilkan manfaat signifikan terhadap aspek sosial dan keanekaragaman hayati. Standar ini didesain untuk program-program yang dipimpin oleh pemerintah yang dilaksanakan di tingkat nasional atau negara bagian/provinsi/regional dan untuk segala bentuk pendanaan berbasis dana atau berbasis pasar. Dengan memberikan kerangka komprehensif dari masalah-masalah kunci terkait performa program REDD+ terhadap aspek sosial dan lingkungan, standar ini dapat memberikan pedoman untuk membantu proses desain REDD+ dan memberikan mekanisme pelaporan mengenai bagaimana rambu-rambu dipatuhi dan manfaat program REDD+ terhadap aspek sosial dan lingkungan dilaksanakan. Negara Bagian Acre di Brazil, Provinsi Kalimantan Tengah di Indonesia, Ekuador, Nepal dan Tanzania saat ini berpartisipasi dalam inisiatif SSL REDD+ dan telah mengadopsi pendekatan berbagai pemangku

kepentingan (multi stakeholder) berikut ini dalam menggunakan standar tersebut.

REDD+SES 2011

265 Redd+ in Indonesia Paving the road to a sustainable future

Indonesia's successes in the readiness phase are a refl ection of the highlevel political will supporting REDD+. This includes the crucial component of more transparent and accountable government, a necessary foundation to actualise broader sustainable development objectives that are progrowth, pro-jobs, pro-poor and pro-environment. This has, of course, led to the launch of a National REDD+ Strategy, the selection of Central Kalimantan as the pilot province, the development of a parallel provincial REDD+ Strategy and implementation of REDD+-related activities supported by the United Nations in Central Kalimantan. All of this is in addition to the establishment of a two-year logging moratorium that has laid the foundation for crucial building blocks for REDD+, such as the One Map Initiative.

Satya Tripathi 2013. Asia Views

383 The First Project Steering Committee Meeting (PSC) Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)

Publikasi. REDD+ READINESS PREPARATION THE FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY BRIEF INFO Edisi 1, Juni 2012. FCPF/UN-REDD was one of the biggest global instrument in the world, and the process was directed to carbon fund. He mentioned that in the Steering Committee, the World Bank acted as a supervisor not a member.

FORDA. KLHK dan FCPF. 2012

384 FCPF PC 12 Meeting

Publikasi. FORDA. KLHK dan FCPF. 2012. REDD+ READINESS PREPARATION THE FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY BRIEF INFO Edisi 2, Juli 2012. FCPF PC 12 Meeting. agenda sidang yang ke 12 difokuskan pada pembahasan *Readiness Package* dan *Mid-term Progress Report*, *Methodology and Pricing for Carbon Fund* , dan *Fiscal Year 13 Annual Budget for the Readiness Fund.* Sidang kali ini agak berbeda dari sidang sebelumnya. Sidang ini didahului dengan workshop sehari yang mendiskusikan dua agenda penting FCPF dan satu agenda bersama UN-REDD *Programme* dan FCPF. Kedua agenda FCPF tersebut adalah '*Readiness Package'* dan rekomendasi kelompok kerja PC tentang '*Methodology and Pricing for the FCPF Carbon Fund*', sedangkan topik workshop agenda bersama FCPF dan UN-REDD adalah '*Country Needs Assessment*'.

FORDA. KLHK dan FCPF. 2012

385 Koordinasi Awal Kerjasama Puspijak – FCPF dengan Provinsi NTB dan Sumatera Barat

Publikasi. FORDA. KLHK dan FCPF. 2012. REDD+ READINESS PREPARATION THE FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY BRIEF INFO Edisi 3, Agustus 2012. Koordinasi Awal Kerjasama Puspijak – FCPF dengan Provinsi NTB dan Sumatera Barat. Sistem pengaman seharunya dapat memberikan: 1) • Jaminan keadilan dalam hal distribusi manfaat; 2) Jaminan keadilan dalam hal gender; 3) Jaminan penggunaan dan pembelanjaan dana yang tepat dan 4) Jaminan-jaminan pengaman lain seperti penghormatan terhadap hak atas tanah, dan lain sebagainya

FORDA. KLHK dan FCPF. 2012

386 Pertemuan Awal Kerjasama FCPF di Mataram, NTB

Publikasi. Puspijak dan FCPF. 2012. WARTA Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Edisi April 2012. Pertemuan awal kerjasama FCPF di Mataram. FCPF/FKKH (Forest Carbon Partnership Facility/Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan) merupakan skema global yang memiliki tujuan utama menurunkan emisi gas rumah kaca kehutanan melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi hutan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan. Disamping itu FCPF bertujuan untuk mengisi gap dalam fase persiapan REDD+.

FORDA. KLHK dan FCPF. 2012

387 Sosialisasi Nasional Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan dan Kajian Sosial dan Lingkungan Strategis (Strategic Environmental and Social Assessment - SESA)

Publikasi. Puspijak dan FCPF. 2012. WARTA Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Edisi Februari 2012. Acara ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal tentang keberadaan FCPF, Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial Strategis (SESA) yang merupakan bagian dari dukungan bagi Proses Kesiapan (Readiness Plan), dan. Kerangka Acuan Kerja (KAK) SESA dan ESMF yang telah disusun untuk kemudian dapat disempurnakan. Target dari acara ini adalah peserta mampu memahami sosok dan posisi SESA & ESMF sebagai bahan finalisasi TOR SESA pada acara konsultasi publik SESA/ESMF yang enyelenggaraannya akan diatur lebih lanjut.

FORDA. KLHK dan FCPF. 2012

400 Booklet. COP19/CMP9 tahun 2013 TERSUKSES untuk REDD+: Citius, Altius, Fortius

Pada COP 19/CMP19 yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai dengan 23 November 2013 di Warsawa, isu kehutanan merupakan agenda persidangan yang paling berhasil dalam hal pencapaian jumlah keputusan. Pada COP 19 / CMP 9 tersebut telah dihasilkan keputusan yang berarti untuk REDD+, yang disebut *Warsaw REDD+ Framework*. *Framework* ini berisi tujuh keputusan yaitu: (i) *finance*, (ii) koordinasi dan institusi, (iii) REL/RL, (iv) MRV, (v) NFMS, (vi) Drivers-DD, dan (vii) *safeguards*. Dengan demikian *guidance* untuk negara berkembang yang berkomitmen melaksanakan REDD+ secara penuh (*full implementation)* telah tersedia. Salah satu contohnya adalah keputusan yang terkait dengan agenda MRV yang akan memberikan basis pembayaran atas hasil

REDD+. Di pihak lain negara maju diminta komitmen yang lebih kuat terkait dengan penyediaan dan mobilisasi pendanaan REDD+.

Nurmasripatin, Yetti Rusli dan Kirsfianti Ginoga 2013

401 Laporan Program FCPF REDD+ Readness Preparation.

Berisi dokumen administrasi, TOR, rencana kerja dan budget. Serta dokumen kontrak dengan konsultan.

DKN dan Puspijak dan FCPF 2012.

Recomendation ESIA

009 Ringkasan Eksekutifaudit Kepatuhan Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau.

Tujuan dari audit kepatuhan adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan perusahaan dan kabupaten/kota tersebut dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Selain itu, audit kepatuhan dapat mengidentifikasi kebijakan yang seharusnya dilakukan serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang harus segera dilakukan. Hasil Audit terdiri dari 3 yaitu 1) Perusahaan Perkebunan : Dari 5 (lima) perusahaanperkebunan yang diaudit, 1 perusahaan tergolong sangattidak patuh (18,50 % dari 97 kewajiban) dan 4 (empat)perusahaan tergolong tidak patuh (antara 23 % sampai 48 %dari 97 kewajiban);2). Perusahaan Kehutanan : Dari 12 (dua) belas perusahaanyang diaudit 1 (satu) perusahaan tergolong sangat tidakpatuh (7,22% dari 122 kewajiban), 10 (sepuluh) perusahaantergolong tidak patuh (antara 26, 19 % sampai 47, 54 % dari122 kewajiban) dan 1 (satu) perusahaan tergolong kurangpatuh (52, 38 % dari 122 kewajiban);3). Pemerintah Kabupaten dan Kota: Dari 6 (enam) kabupaten dan kota, 1(satu) kabupaten patuh (92, 74% dari 67kewajiban), 1 (satu) kabupaten cukup patuh (82, 86% dari 67kewajiban) , dan 4 (empat) kabupaten kurang patuh (antara60, 56,54 % sampai 67,38% dari 67 kewajiban. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengelola REDD+, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembanguan (UKP PPP)

Bambang Hero Saharjo 2014

047 Panduan Safeguard Gender.

Rekomendasi untuk safeguard Gender yaitu 1) Setiap kegiatan yang mengatasnamakan pelestarian lingkungan dan skema REDD+ harus mengakomodir kepentingan perempuan adat/lokal dikomunitasnya terkait akses dan kontrol dalam PSDA; 2. Pengelola proyek, harus mengakomodir kearifan lokal dalam mengelola hutan dalam implementasi skema REDD+ di perempuan adat/lokal komunitasnya; 3. Hasil konfensi perubahan iklim dunia tentang Safeguards yang didalamnya juga mengatur tentang Peran dan Hak perempuan harus diperankan dalam skema REDD+ di Sulawesi Tengah; 4. Kebijakan yang mengatur tentang skema REDD+ harus memperhatikan situasi

perempuan adat/lokal yang ada dikomunitasnya; 5. Skema REDD+ bisa mengurangi konflik dimasyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam 6. Skema REDD+ yang akan di implementasikan bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan perempuan adat/lokal dikomunitasnya dan 7. UN-REDD Programme Indonesia memfasilitasi kegiatan FGD dikomunitas perempuan adat/lokal yang bersentuhan langsung dengan hutan guna mengkonsultasikan dan pembobotan Safeguards Gender yang suda disusun oleh tim perumus

Ruikmini P. Toheke 2012

060 Peta Jalan Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Terkait Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia.

Makalah menjabarkan Peran BP-REDD+ Ikut Serta Dalam Pencegahan Dan Penyelesaian Konflik. Perbaikan tata kelola hutan dan lahan tidak akan selesai apabila konflik terkait pemanfaatan hutan dan lahan tidak diselesaikan; BP REDD+ berfungsi melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan sengketa dan konflik sesuai amanat Perpres 62/2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisa Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut; Luas kawasan hutan Konservasi + Lindung = 59 Juta Ha sehingga memiliki kontribusi signifikan untuk penurunan emisi gas rumah kaca, kepastian peruntukannya sudah jelas, pengukuhannya lebih baik, kondisi hutannya relatif lebih baik, namun tidak bebas dari konflik;

Tim Resolusi Konflik. 2014

061 Demonstration Activities : Guidance Cop Dan Tantangan Dalam Menuju Implementasi Redd+ Di Indonesia

Makalah menjelaskan peran Demontration Area untuk proyek REDD+ : 1) DA memegang peran strategis sebagai sarana pembelajaran dan sebagai 'result-based actions' di tingkat tapak yang memiliki potensi untuk 'scaled up' pada phase transisi menuju 'full implementation', 2)¤Sebagai salah satu upaya memberikan guidance nasional, telah disusun "RSNI tentang guidance penyelenggaraan DA-REDD+", sehingga memenuhi persyaratan internasional dan sesuai dengan kebijakan/program nasional.

Nur Masripatin 2012

077 Laporan Implementasi REDD+ Provinsi Aceh

Laporan berisi kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Aceh dalam implementasi REDD+ di Aceh. Selama bekoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Aceh, BP REDD+ telah mencatat 12 program prioritas yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh untuk implementasi REDD+ di Aceh. 12 program tersebut yaitu: 10 Percepatan penyelesaian konflik tenurial; 2) Peningkatan Kapasitas Institusi Pengelola Hutan; 3) Internalisasi konsep pembangunan berwawasan lingkungan dalam dokumen rencana pembangunan wilayah; 4) Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lahan; 5) Penguatan tata kelola kehutanan dan pemanfaatan lahan; 6) Pemberdayaan ekonomi lokal dengan prinsip berkelanjutan; 7) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kelestarian lingkungan ; 8) Mengembangkan sistem pengaman (*safeguards*) sosial dan lingkungan; 9) Penyediaan alternatif mata pencaharian

yang berkesinambungan pasca konflik; 10) Menurunkan ketergantungan terhadap kayu alam; 11) Peningkatan penegakan hukum dn 12) Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

BP REDD+. 2015

079 Perhutanan Sosial dan Perubahan Iklim

Makalah. Berisi data-data karbon stock di areal PIAPS Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial) dan rekomendasi bagi relawan/penggiat/ masyarakat untuk berkontribusi terhadap program perubahan iklim

DJ PSKL KLHK 2016

083 Laporan Rangkaian Kegiatan BP REDD+ United Nation Climate Summit dan B4E

BP REDD+ bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga lainnya mendukung peluncuran laporan NCE dalam versi bahasa Indonesia yang dilengkapi dengan *policy brief* dalam konteks Indonesia yang direncanakan akan diadakan pada bulan November 2014.

BP REDD+. 2014

085 Laporan Hasil Evaluasi Proses Ujicoba Penerapan Prinsip Free, Prior, and Informed Consent

Rekomendasi atas proses FPIC untuk implementasi REDD+ di Indonesia yaitu: (1) Proses komunikasi hendaknya tidak "satu kali putaran", melainkan beberapa kali sampai kedua belah pihak sepakat dan dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan ini hendaknya tidak terbatas hanya sampai consensus melainkan perlu menegaskan kerja fasilitator sampai ke pelaksanaan proyek (2) Perlu proses rekruitmen yang representatif dan pelatihan intensif bagi fasilitator yang dilakukan berdasarkan proses seleksi yang sistematis, dirumuskan tertulis dan proses seleksi dilakukan secara terbuka; (3) Perbaikan Panduan FPIC perlu menekankan kapan FPIC diperlukan dan pentingnya kecukupan informasi secara kontekstual dan spesifik lokal yang menggambarkan keseluruhan program dan posisi bagian-bagian secara menyeluruh; (4) Perlu disusun toolkit evaluasi pelaksanaan FPIC yang lebih menekankan pada verifikasi atas adopsi prinsip FPIC bukan teknik verifikasinya; (5) Perlu melakukan sebuah survey atau kajian tentang berbagai kelompok sosial yang ada di dalam sebuah masyarakat beserta konteks tenurialnya.

Didik Suharjito; Emil O. Kleden dan Haryanto R. Putro. 12 Juli 2012

091 Catatan Mekanisme pengukuran dan pelaporan

Catatan masukan diskusi kelompok untuk mekanisme pengukuran dan pelaporan sebanyak 25 point. Point penting untuk MRV diantaranya adalah 1) Perlu untuk menentukan cakupan pengukuran yang dimaksud dalam sistem MRV; 2) Disarankan untuk fokus pada identifikasi deforestasi berikut drivernya.

Satgas REDD+. 2012

092 Mekanisme Verifikasi

Working group yang akan menjawab key question tentang verifikasi **1. Apa yang dimaksud VERIFIKASI ?** Verifikasi merupakan serangkaian proses kaji ulang (*review*) terhadap laporan hasil kegiatan REDD+ yang dilakukan secara independen dan transparan **2. Untuk apa VERIFIKASI ?** Verifikasi dilakukan untuk memeriksa/menilai dalam rangka memastikan: kelengkapan, akurasi, transparansi, konsistensi, dan komparabilitas dari laporan hasil kegiatan REDD+ **3. Apa yang di-VERIFIKASI ? a)** Data dan informasi: emisi, serapan, cadangan karbon, perubahan tutupan hutan, dan perubahan cadangan karbon (penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan/konservasi cadangan karbon hutan/peningkatan cadangan karbon hutan); b) Metodologi: kesesuaian dengan guidelines (IPCCC/COP), konsistensi metodologi yang dipakai dalam penetapan REL/RL dengan metodologi yang digunakan untuk pengukuran dalam periode tertentu. **4. Bagaimana mem-VERIFIKASI ?** Verifikasi dilakukan di tingkat nasional dan internasional; apakah sudah sesuai (konsisten) dengan standar yang ada dalam guidance COP. **5. Siapa yang mem-VERIFIKASI ?** Verifikasi dilakukan oleh lembaga independen (internal dan eksternal) **6. Kapan di-VERIFIKASI ?** REDD+ dilaksanakan secara bertahap ▫ apa semua tahap perlu verifikasi ? periodisitas ? Hanya *result-based actions* yang diverifikasi dengan periodisitas mengikuti periode Pengukuran (***M****easurement*) dan Pelaporan (***R****eporting*) **7. Dimana hasil VERIFIKASI disimpan / diapakan hasil VERIFIKASI?** Hasil verifikasi akan disimpan dalam Registry nasional dan diinformasikan ke registry internasional

Satgas REDD+. 2012

094 Draft Framework For Sharing Approaches For Better Multi-Stakeholder Participation Practices

Based on this preliminary research, it is evident that more in-depth information and lessons concerning certain key stakeholder engagement issues is needed. Some key challenges and areas for further development fueled by information sharing include: a) Mapping and Categorizing Stakeholders;b) Identifying Effective Engagement Approaches for Different Objectives; c) Participation and Free, Prior, and Informed Consent; d) Managing Time and Expectations; and e) Grievance Mechanisms and Conflict Resolution.

Florence Daviet UNREDD, UNDP, FAO, UNEP 2011

095 Green Practices" Penurunan Emisi Karbon Dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi

Praktek Pengelolaan Hutan Alam Produksi di PT. Sari Bumi Kusuma Unit Seruyan Kalteng Riap tumbuh hutan alam produksi dengan sistim silvikultur konvensional relative sangat kecil (<1m3/ha/th). Makin banyak sinar matahari yang diterima, makin cepat pertumbuhan pohon, makin besar riap tumbuh, makin banyak karbon yang diserap dan makin banyak karbon yang disimpan. Jika pohon yang ditebang dimanfaatkan, disimpan dan dijaga (tidak lapuk dan tidak dibakar), maka kayu yang disimpan hampir tidak melepas karbon. Menebang pohon, menyimpan kayunya dan menggantikannya dengan pohon baru berperan sangat positif dalam proses penyerapan dan penyimpanan

karbon.Produk kayu berdasarkan proses seperti tsb merupakan "green product", dan membantu mencegah/mengurangi pemanasan global.

Nana Suparna. 2012

096 A Guidance Note to Integrate Gender in Implementing REDD+ Social Safeguards in Indonesia.

The Task Force is currently developing REDD+ safeguards, known as PRISAI (*Prinsip, Kriteria, Indikator* Safeguard REDD+ Indonesia), which contains principles, criteria, and indicators to be complied with by REDD+ implementing agencies. The safeguards include the principle to promote "full and effective stakeholder participation with consideration of **gender equality"** (principle 5). It includes criteria and indicators to assure the acknowledgement and fulfilment of women's rights in the implementation of REDD

Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resources Management (WOCAN)
UNREDD, UNDP, FAO, UNEP 2012

098 Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 di Indonesia.

Buku. Hasil kajian tata kelola hutan, lahan dan REDD+ secara partisipatif (*Participatory Governance Assessment* atau PGA) yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh UNDP dan UNREDD Programme merupakan pekerjaan penting untuk menyediakan informasi sahih mengenai kondisi tata kelola hutan, lahan dan REDD+ sebagai *baseline*, rekomendasi kebijakan dan peta jalan, serta instrumen pemantauan tata kelola hutan, lahan dan REDD+. Informasi yang dihasilkan dari kajian ini perlu dihasilkan secara periodik dan menjadi sumbangsih penting bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan masyarakat adat untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut di Indonesia sebagai prasyarat untuk menekan laju degradasi dan deforestasi hutan di Indonesia.

Abdul Wahib Situmorang, dan Hariadi Kartodihardjo 2013

UNDP & UN-REDD.

101 TOPIK Isu-isu Seputar MRV: 1) Informasi Safeguard; 2) Co-benefit, dan 3) Keanekaragaman hayati

Moderator : B.Steni (UNDP) , Hiromi (JICA) , Sabina (MenLH) , Mari (PhD candidate Oxford Univ), Hendi (CI), Erwin (ZSL), Fultera (WWF), Zulfikar (JKMA Aceh), Iskhaq (UNSRI), Lilik (IPB). Komentar umum : (1)Terlalu sedikit ulasan ttg isue safeguard, co-benefit & biodiversity; (2).SIS masih terlalu umum dan (3).Perlu memasukan secara eksplisit Keputusan COP 16, FCCC/CP/2010/7/Add.1 atau *Cancun Agreement*, tentang 7 macam. Issue Safeguards : a) Mekanisme pengukuran dan pelaporan (MR) safeguards perlu dibuat (misal berdasar World Bank/UN-REDD); b) Baseline/indikator untk poverty tidak berbasis acuan BPS (nilai rupiah), tetapi tergantung daerah; c) Bagaimana bentuk SIS : Cakupan, Capaian, evaluasi dan future plan, dan bagaimana mengkaitkan dengan MRV; d) Verifikasi safeguard perlu masuk dalam SIS; e) Verifikasi : Kuantitatif & Kualitatif; f) Apabila proponent adalah

Pemerintah/Pemda : Cakupan Safeguard hanya pada REDD policy atau policy lain yg terkait dengan emisi ?

Satgas REDD+ 2012

102 Kajian Para Pihak Terkait dengan Upaya Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Tengah

Kemitraan Pemerintahan emerintah Daerah dan masyarakat sipil di Kalimantan Tengah sangat berharap dapat berperan besar dalam banyak program dan kegiatan terkait dengan penurunan emisi karbon dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Ada anggapan kuat di kalangan pemerintah dan masyarakat di sini bahwa berbagai program dan kegiatan terkait REDD saat ini hanya menguntungkan "pihak luar". Sementara Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil berharap mereka mendapatkan peran lebih besar dalam berbagai kegiatan terkait REDD+, banyak kalangan di Kalimantan Tengah masih menganggap kegiatan REDD sebatas adanya kucuran dana besar, sekedar kegiatan proyek yang melibatkan perusahaan atau lembaga dengan modal besar. Banyak yang belum sepenuhnya memahami hal-hal mendasar terkait dengan perubahan iklim dan berbagai inisiatif terkait mitigasi dan adaptasi seperti yang perlu dikembangkan oleh mereka sendiri tanpa menunggu adanya bantuan dana besar dari luar.

Suraya Affif; Kussarianto; Bismart Ferry Ibie. 2011

140 Penerapan Padiatapa Proses Pembelajaran dan Uji Coba untuk Membangun Kesepakatan dengan Warga di Desa Lembah Mukti, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah

Proses uji coba dilaksanakan di 5 dusun. Proses pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau *Free, Prior, Inform, and Consent* (FPIC) di Desa Lembah Mukti berjalan dengan lancar. Beberapa hal yang membuat proses berjalan baik karena pada dasarnya masyarakat sudah terbiasa untuk memutuskan masalah yang dihadapi bersama dengan jalan musyawarah. Warga melakukan musyawarah di hampir semua setiap program pembangunan yang akan masuk desa tesebut. Hanya saja, dalam ujicoba PADIATAPA ini, warga mendapat pengalaman yang sama sekali baru, yakni pemenuhan hak warga untuk menentukan setuju atau tidaknya program tersebut dilaksanakan di desanya. Selama ini, musyawarah dilakukan untuk hanya mengoordinasikan saja, soal apakah program itu mereka setujui atau tidak, mereka tak punya hak sama sekali. Dengan pengalaman yang baru tersebut, warga berharap bahwa proses yang dilaksanakan tersebut juga dapat diterapkan untuk program pembangunan yang lain. Proses uji coba ini sekaligus memberi gambaran kepada Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah bahwa panduan yang telah disusun dapat dipahami dan dilaksanakan dalam praktik tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Disadari juga bahwa tidak setiap PADIATAPA di tingkat masyarakat akan mudah dilaksanakan karena perbedaan-perbedaan kepentingan yang di masyarakat.

POKJA REDD+ Sulawesi Tengah 2012
Kemenhut, UN-REDD, FAO, UNDP

142 Asosiasi pengrajin industri kecil (APIK) Kabupaten Buleleng untuk penguatan ekonomi hijau

KSU APIK Telah dilaksanakan Audit VLK Hutan Hak Pada Tanggal 27 Juni – 1 Juli 2012 Oleh Tim Audit dari : PT TRANsTRA PERMADA dan telah lulus sertifikasi VLK. APIK telah memiliki Rencana pengelolaan dan master plan. Terdapat empat program dalam rencana pengelolaan yaitu 1) Perluasan Wilayah Kerja Hutan Rakyat di Seluruh Buleleng , 2) Pendataan dan Sosialisasi menyeluruh ke petani Hutan Rakyat di Buleleng; 3).Perencanaan pasca panen dan 4).Bekerjasama dengan lebih banyak pengguna produk kayu baik di dalam dan di luar negeri. Peluang aplikasi REDD+ dan ekonomi hijau bagi komunitas diantaranya 1).Sinergitas semua pihak (Pemerintah, corporate, Komunitas Masy, LSM, dll); 2). Asosiasi2 yang ada, bisa dijadikan jembatan untuk pembangunan ekonomi hijau yg diharapkan pemerintah dan 3).Program diarahkan langsung kepada komunitas

Gussti Putu Armada. 2013.

151 Ringkasan Laporan Pencapaian Hasil Kegiatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan & Promisi REDD dan Perdagangan Karbon

Laporan ini menyajikan ringkasan kegiatan dan pencapaian hasil MRPP untuk AWP I dan II. Secara garis besar kegiatan MRPP untuk komponen ini terdiri atas fasilitasi kegiatan percepatan pembentukan wilayah dan organisasi KPHP Lalan, penguatan kapasitas SDM KPHP Lalan, kegiatan penyusunan Project Design Document (PDD), dan kegiatan survey di lapangan. Selama lebih kurang dua tahun MRPP memfasilitasi Dinas Kehutanan Kab. Muba, Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, dan stakeholder lain yang terkait dengan kegiatan tersebut. Hasil yang dicapai cukup memuaskan. Beberapa hasil yang dicapai dan menjadi tonggak sejarah bagi MRPP antara lain: (1) penetapan wilayah KPHP Model Lalan oleh Menteri Kehutanan pada bulan Desember 2009; (2) penetapan UPTD KPHP Lalan Mangsang Mendis oleh Bupati Muba; (3) dukungan untuk peningkatan kapasitas SDM KPHP dan staf Dinas Kehutanan Muba melalui keikutsertaan pendidikan dan latihan calon Kepala KPH, pembelajaran melalui berbagai pelatihan, workshop dan studi banding, dan aktifitas survey di lapangan; (4) tersedianya rancangan pembangunan KPHP Model Lalan, yang digunakan sebagai blue print bagi KPHP (lihat dalam dokumen rancangan pembangunan KPHP: rencana kegiatan KPHP sampai tahun 2011); (5) tersedianya PDD dalam versi sementara (draft).

Muhammad Sidiq. 2011.
GIZ Forclime.

153 Peran BP-REDD+ dalam Mendukung Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Buku dengan judul: “Peran BP-REDD+ dalam Mendukung Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)” dengan maksud untuk memperjelas posisi BP-REDD+ dan identifikasi apa yang dapat dilakukan BP-REDD+ terhadap upaya kovergensi pembangunan KPH. Buku ini tersusun berkat masukan dan kontribusi dari semua pihak yang berkomitmen untuk membangun KPH. Buku ini bersifat strategis bagi BP-REDD+ karena akan menjadi sebagai acuan untuk

memerankan kontribusi BP-REDD+ terhadap rangkaian kegiatan yang sedang dan akan dilakukan oleh para pihak. Melalui Buku ini BP-REDD+ dapat mengetahui status perkembangan KPH agar dapat mengetahui ruang-ruang kosong sebagai tempat kontribusi terhadap pengembangan KPH.

Soetrisno Karim, Didy Wurjanto, Sudarsono Soedomo 2014

158 Stranas REDD+ dn Pokok-pokok STRADA/SRAP

Materi Sosialisasi & Kosultasi Publik STRADA. Kalimantan Tengah. Muara Teweh, 28-29 Mei 2013. Kriteria Pokok-pokok Isi RAN-REDD+ 1). Sarana pemecahan masalah dicapainya targettarget fisik dalam RAN-GRK 2). Konsolidasi kegiatan inti dan penunjang untuk memenuhi syarat perlu dan syarat cukup (*necessary and sufficient conditions*) pemecahan masalah 3). Penataan kelembagaan perencanaan program dan kegiatan pembangunan 4). Memperhatikan prioritas kegiatan yang ditetapkan dalam SRAP REDD+. Kerangka Pengama merupakan Kriteria dan indikator yang tercakup di dalam kebijakan nasional untuk memastikan bahwa pelaksanaan REDD+ tidak menyimpang dari tujuan awalnya, terkait: a) tata kelola program dan akuntabilitas finansial, b) dampak pada hubungan dan posisi sosial bagi kelompok masyarakat rentan, dan c) dampak terhadap lingkungan hidup.

Asep Suntana. 2013

162 Laporan Proses dan Hasil Konsultasi Nasional Krisis Tenurial Taman Nasional Tesso Nilo

Konsultasi Nasional Krisis Tenurial Taman Nasional Tesso Nilo merupakan langkah awal dalam rangka memantapkan kerjasama antara lembaga negara/ lembaga pemerintah, serta kelompok masyarakat dan korporasi. Acara tersebut mengundang 93 lembaga, diharapkan, capaian-capaian yang telah dihasilkan dalam Konsultasi Nasional ini dapat menjadi kerangka besar bersama guna mewujudkan keseimbangan antara keadilan ekologis dan pemenuhan hak atas kesejahteraan masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidupnya di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Pasca pelaksanaan Konsultasi Nasional, Tim Perumus telah melakukan pembahasan lanjutan guna menindaklanjuti sejumlah substansi hasil konsultasi, yang kemudian disusun dalam bentuk Buku Saku “Laporan Proses dan Hasil Konsultasi Nasional Krisis Tenurial Taman Nasional Tesso Nilo” ini.

Komnas HAM dan Pemprov Riau 2016
UNDP

178 Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak dalam Aktivitas REDD+ di Indonesia.

Subjek utama FPIC adalah masyarakat adat dan masyarakat lokal. Pelaksanaan FPIC ini akan diterapkan dengan menggunakan panduan umum dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan konteks sosial budaya dan ekonomi setempat. Pengaturan mengenai kelembagaan dapat dilakukan dengan cara memperkuat rencana desain kelembagaan *safeguard* dan penyelesaian konfl ik yang sedang berjalan. Keberhasilan pelaksanaan FPIC dalam menjamin

terwujudnya tujuan REDD+, adalah tersedianya kelembagaan yang memadai. Pelaksanaan FPIC dalam aktivitas REDD+, perlu ada mekanisme penanganan keluhan/komplain. Mekanisme penanganan keluhan/komplain ini adalah saluran-saluran yang dipersiapkan oleh pelaksana proyek REDD+kepada masyarakat selama proses FPIC dilakukan

DKN & UN REDD 2011

179 Rencana Implementasi MRV 2013-2015

Makalah. Berisi pentingnya MRV dan rencana MRV di provinsi percontohan. Kebutuhan Dana untuk MRV mencakup 4 komponen antara lain: 1) Data: pengadaan, analisis, pemutakhiran; 2) Peralatan : Perangkat lunak: pengadaan, pemutakhiran, pemeliharaan dan Perangkat keras: pengadaan, pemeliharaan, reparasi; 3) Kegiatan-kegiatan: Peningkatan kemampuan, Riset, Publikasi, Partisipasi agenda nasional & internasional dan 4) Lembaga MRV: Infrastruktur: lunak & keras, Kebutuhan rutin kantor, Remunerasi pegawai dan Kerjasama dengan K/L dan multipihak

Satgas REDD+. 2012.

180 Standar Sosial & Lingkungan REDD+ SSL REDD+ Versi 2 (10 September 2012)

Negara-negara dapat menggunakan SSL REDD+: 1) Sebagai panduan untuk melakukan praktek yang baik – menggunakan sebagian dari isi dan proses SSL REDD+ untuk memperkuat pendekatan suatu negara dalam mengembangkan sistem informasi rambu pengaman (tidak menerapkan SSL REDD+); 2) Untuk memberikan kerangka pelaporan kinerja dengan menggunakan sebagian besar isi dan proses SSL REDD+ - menerapkan SSL REDD+ sebagai dasar dari sistem informasi rambu pengaman negara tersebut (tidak sepenuhnya menerapkan SSL REDD+); 3) Untuk memberikan mekanisme komprehensif mengenai pelaporan kinerja yang mengikuti pedoman-pedoman yang diberikan – sepenuhnya menerapkan SSL REDD+ untuk sistem informasi rambu pengaman secara konsisten di semua negara.

REDD+ SES 2012

181 REDD+ SES. 2011. Standar Sosial & Lingkungan REDD+ SSL REDD+ Versi 1 (14 Juli 2011)

Standar tersebut dikembangkan melalui proses menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, lembaga sosial masyarakat (organisasi non pemerintah) dan organisasi kemasyarakatan lainnya, organisasi Masyarakat Adat, institusi kebijakan dan penelitian internasional dan sektor swasta. Sebuah Komite Standar yang mewakili keseimbangan dari sejumlah pihak yang tertarik mengawasi inisiatif standar ini. Sebagian besar anggota komite tersebut berasal dari negara-negara dimana REDD akan dilaksanakan. Hal ini sekaligus merupakan pengakuan bahwa pemerintah dan masyarakat dari negara-negara ini hendaknya memimpin adopsi standar tersebut. Inisiatif standar ini difasilitasi the Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA) dan CARE International.

REDD+ SES 2011

195 Masa Depan Hak-Hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum Rekomendasi Kebijakan.

Proyek Akses terhadap Keadilan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Van Vollenhoven Institute (VVI) mengkaji bagaimana masyarakat miskin dan kurang beruntung di Indonesia menghadapi ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana situasi tersebut dapat mereka diatasi. Tujuan penting dari proyek ini adalah untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menerapkan Strategi Nasional untuk Akses terhadap Keadilan yang memperkuat Indonesia sebagai "Negara hukum". Untuk tujuan inilah maka VVI mengembangkan kerangka analitis yang dikembangkan lebih lanjut dalam kajian konsep mengenai negara hukum, pluralisme hukum dan bantuan hukum. Berdasarkan kerangka analisis ini, studi kasus dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia yang berfokus pada isu gender, tanah, buruh dan lingkungan.

Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS. 2010

198 Rights Based Safeguards Principle in Law.

Kerangka pengaman ini diharapkan untuk dapat menjadi dasar dalam penerapan REDD+ agar tidak hanya terfokus pada hutan tapi juga isu hak, tata kelola kehutanan, keadilan, dan lingkungan hidup. Safeguard apabila diimplementasikan maka 1) dapat dijadikan"meluruskan" kompleksitas sektor kehutanan di Indonesia; 2) Apabila diterapkan dengan maksimal, akan menjadi sarana pembuktian yang valid atas pengurusan yang baik sektor kehutanan Indonesia; dan 3) Memberikan bukti nyata keseriusan mempertimbangkan masyarakat sebagai bagian dari"negara"

Giorgio Budi Indrarto, Indonesian Center for Environmental Law. 2011.

200 Buku panduan Workshop *Urban & Climate Resilience* Mengenali karakter lingkungan secara mandiri

Workshop ini bertujuan untuk menguji model assesment karakteristik dasar kota/wilayah secara mandiri sebagai modal untuk melakukan assesment secara mandiri. Selanjutnya hasil assesment ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan khusus pengembangan wilayah seperti menyiapkan strategi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim atau tujuan lainnya bergantung kepada visi dan missi daerah.

Riset Delapan Kota Indonesia –Yayasan Tunas Nusa Indonesia. 2016
KLHK, Norwegian Embassy, UNDP

204 Pedoman Greening MP3EI Bidang Redd+

Pedoman Greening MP3EI digunakan pada tahapan (a) penyusunan arah kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi MP3EI serta (b) penyusunan rencana aksi MP3EI. Panduan greening MP3EI bidang REDD+ ini menjadi alat yang memberikan dasar perencanaan pembangunan yang melibatkan kepentingan para pihak, agar dapat diharmoniskan. Keselarasan pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, lingkungan hidup dan nilai-nilai sosial masyarakat. Perencanaan yang didasarkan pada pedoman greening MP3EI bidang REDD+ ini, mempertimbangkan pengambilan keputusan

mulai dari isu strategis seperti kesesuaian pembangunan dengan tata ruang, kesesuaian pembangunan dengan daya dukung dan daya tampinglingkungan hingga memberikan opsi-opsi yang berupa alternative trade off untuk memberikan hasil pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara umum.

Satgas REDD 2012

205 Pedoman Mainstreaming Redd+ Ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ini disusun untuk memberikan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menginternalisasikan prinsip-prinsip yang ada dalam Stranas REDD+, yang telah dijabarkan menjadi RAN REDD+ dan/atau SRAP REDD+ bagi penyusunan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari RAN/RAD GRK. Mengingat konteks dan ruang lingkupnya yang mengedepankan cara-cara baru dalam mengelola hutan dan lahan gambut secara terpadu dan lintas sektor, implementasi sistem perencanaan pembangunan semestinya diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pembangunan nasional dan daerah. Sementara itu, aktivitas untuk mencapai tujuan REDD+ terdiri dari perbaikan kinerja sektor berbasis lahan, terutama kehutanan, pertanian dan lahan gambut, serta pengendalian dampak negatif terhadap luas kawasan hutan tetap, keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat lokal akibat konversi hutan alam dan kawasan hutan menjadi lahan pertanian, kebun, tambang dan infrastruktur pembangunan lainnya.

Haryanto R. Putro; Mahawan Karuniasa; Rebekka S. Angelyn. Editor: Nita Kartika, Medrilzam, Nur Hygiawati Rahayu, Dadang Jainal Mutaqin, Pungky Widiaryanto, Miranti Triana Zulkifli, Mohammad Showam, Sudarsono Soedomo, Bahruni Said, Ahmad Bahri R 2013.

Bappenas & Satgas REDD+

227 Desain Konsep Sistem Informasi Safeguards REDD+ Indonesia

Sistem Informasi Safeguards (SIS) dalam Sistem MRV adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana Safeguards dilaksanakan dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan REDD+. Selain itu, SIS dibangun untuk dapat memantau penghidupan masyarakat, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati yang terkena dampak usaha penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui kegiatan REDD+. SIS juga akan memantau perubahan pemicu deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut. SIS yang bersifat non-biomassa dan non-karbon dibangun untuk mengawal agar mekanisme REDD+ mampu memberikan penghargaan (reward) yang lebih besar untuk dapat diterima oleh masyarakat setempat yang kinerja penurunan emisinya berjalan baik. SIS akan merangkum semua informasi tersebut untuk dilaporkan kepada Badan REDD+ sebagai bahan untuk laporan yang akan disampaikan oleh National Focal Point Indonesia untuk bidang Perubahan Iklim kepada Konvensi Kerangka Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC).

Ellyn K. Damayanti, Arief Darmawan, Indrawan Suryadi, Iwan Wibisono, Steni Bernad, Virza Sasmitawidjaja, John Paterson, Roy Rahendra dan Edwin Yulianto 2013.

228 Kajian Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kota Manado

Dokumen ini adalah untuk membantu pemerintah kota dalam mengidentifikasi kerentanan terhadap perubahan iklim, dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap berbagai sarana infrastruktur penting, dan juga ditujukan untuk mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dalam meningkatkat ketahanan terhadap perubahan iklim di Kota Manado. Secara khusus, Kajian Kerentanan terhadap Perubahan Iklim ini bertujuan: (i) membangun pemahaman tentang bagaimana kota terpapar terhadap ancaman perubahan iklim dengan cara mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai kerentanan di kota, mengidentifikasi kelemahan secara kapasitas dan kebutuhan kelembagaan; (ii) memberi rekomendasi di level perencanaan kepada lembaga pemerintah yang berperan dalam pembangunan kedepan dan disesuaikan dengan tujuan visi pembangunan yang resilience, (iii) dan mendesain serta mengimplementasikan serangkaian training penguatan kapasitas yang terkait dengan perubahan iklim dan aset – aset dan proyek-proyek infrastruktur perkotaan

Cascadia consulting group. Kota Kita. 2014.
USAID. Climate Change Resilient Develoment.

234 Kebijakan Penyelesaian Konflik Lahan Untuk Tata Kelola Kehutanan Yang Adil Dan Berkelanjutan

Makalah disampaikan di Jakarta 3 Februari 2016. Makalah berisi tentang kebijakan penanganan konflik tenurial, mekanisme pananganan. Konflik hanya bisa diselesaikan jika diperoleh kesepahaman para pihak dengan mengedepankan kepentingan bersama yaitu mewujudkan hutan lestari, masyarakat sejahtera, kelangsungan dunia usaha dan terlindunginya masyarakat adat serta kearifan lokal untuk kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Eka W Soegiri Direktur Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat. 2016.

235 Submission By Indonesia National Forest Reference Emission Level For Deforestation And Forest Degradation In The Context Of The Activities Referred To In Decision 1/Cp.16, Paragraph 70 (Redd+) Under The Unfccc

Indonesia accepts the invitation as in Dec. 12/CP.17 to voluntarily submit proposed national FREL for deforestation and forest degradation in the context of results---based payments for activities relating to REDD+ Under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Kelompok Kerja FREL Submission : Kemen. Lingk.Hidup dan Kehutanan, Kemen. Pertanian, BPREDD+, BIG, LAPAN, IPB, TNC, WWF, UNORCID, CIFOR. 2014.

240 Sharing Pandangan DKN tentang FPIC.

Makalah disampaikan pada Seminar FPIC untuk REDD+; Proses Penguatan Para Pihak dalam Pelaksanaan REDD+, Hotel Novotel Bogor, 17 September 2012. Pandangan: Safeguard yang dimiliki pemerintah dan MDBs (ADB, WB, IFC) berbeda beda, (misal kata C dalam FPIC, consent, broad consultation, consultation) dan bukan consent sebagai hak. Tidak cocok , kenyataan (mikro 0-100.000$ asset, 10 orang, smallholder diatas itu) sedangkan perisai sebagai

safeguard nasional sedang dicoba dituntaskan. Rekomendasi: gunakan safeguard yang terbaik/tinggi dalam hal perlindungan hak , dengan melakukan assesment tentang safeguard yang ada, serta memperkuat proses pembentukan safeguard nasional.

Martua T. Sirait Komisi 4. Lingkungan dan Perubahan 2012

241 FPIC Konsep, Pendekatan dan Standard: dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional

Makalah disampaikan pada Seminar Mencari Format Proses FPIC untuk Indonesia: Ragam Pandangan, Hotel Novotel, Bogor, 17 September 2012. FPIC dalam REDD + di Indonesia: 1) Ketidaksinambungan antara kerangka dan peraturan ditataran nasional serta provinsi mengenai MA; 2) Aspirasi Satgas REDD + mengenai FPIC belum ditetapkan sebagai peraturan; 3) Manfaat pengaturan pembagian manfaat tidak jelas atau belum ditetapkan sebagai kebijakan mengikat 4) Konsultasi mengenai REDD + didominasi oleh pemerintah, LSM dan sedikit keterwakilan sektor swasta; 5) Tokoh-tokoh masyarakat adat BELUM ditempatkan sebagai wakil pemegang hak yang seharusnya berperan sentral. Rekomendasi : a) Pelatihan hak-hak masyarakat, FPIC dan REDD+ untuk semua pihak; b) •Reformasi sektor kehutanan di ranah nasional untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal sehingga peraturan provinsi dan proyek percontohan dapat menghormati pemegang hak; c) Pelibatan IP dalam memproduksi pelaporan paralel pada pelaksanaan tahap Kesiapan REDD+.

Patrick Anderson, Forest Peoples Programme 2012

242 Evaluasi dan Refleksi Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Pada Rezim SDA-LH

Ada 3 perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana: 1) Sasaran penerapan sanksi administrasi ditujukan pada perbuatan, sedangkan pidana ditujukan pada pelaku; 2) Sanksi hukum pidana fokusnya adalah orangnya (dader, offender), beda dengan penegakan hukum administrasi yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kepada keadaan semula (reparatoir) . Jadi, fokus sanksi administrasi adalah pada perbuatan bukan pada orang/pelaku (punitif/condemnatoir); 3) Prosedur sanksi administrasi dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan (preventif-represif nonjustisial), sedangkan prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan (justisial). Pendekatan Multi Pintu (multi door approach): a) Menangkap pelaku yang menjadi otak dari suatu kejahatan yang terorganisir dan bukan pelaku lapangan saja; b) Merestorasi kondisi lingkungan hidup terutama hutan; c) engembalikan kerugian negara yang hilang akibat kejahatan yang terjadi dan merampas keuntungan yang dihasilkan dari tindak kejahatan tersebut; d) Mendapatkan pajak yang seharusnya untuk dibayarkan ke Negara; dan e) Menimbulkan efek jera dengan cara memiskinkan pelaku kejahatan serta memberi hukuman seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas illegal tersebut.

Asep Warlan Yusuf. 2012.

244 Peta jalan Kajian Peraturan terkait Kehutanan.

Isu pokok yang menyebabkan deforestasi dan degradasi. Ada 13 Usulan kriteria peraturan prioritas dilihat dari sisi Isu, skala, urgensi dan feasibility.

WGL 2012.

245 Prinsip Kriteria dan Indikator Safeguards REDD+ Indonesia – PRISAI versi Mei 2013

Kerangka pengaman yang dirumuskan dalam STRANAS merupakan kebutuhan yang mendesak pada tingkat nasional maupun sub-nasional. Dengan berkaca pada sejarah pembangunan nasional yang acapkali gagal menangkap maupun menjembatani kompleksitas sosial dan lingkungan, Pemerintah Indonesia memandang perlu mengembangkan kerangka pengaman dalam setiap proyek pembangunan, termasuk REDD+. Pemerintah Indonesia melalui UKP4/SATGAS REDD+ sudah menyusun kerangka pengaman berbasis kegiatan atau proyek yang disebut dengan PRISAI sebagai inisiatif awal untuk membentuk kerangka pengaman nasional REDD+. PRISAI adalah kerangka pengaman minimum REDD+. PRISAI dibentuk dengan dua tujuan utama sebagai berikut: 1). Mencegah pelaksanaan REDD+ dari resiko-resiko sosial dan lingkungan yang bisa mencederai semangat REDD+ sebagai mekanisme yang potensial menyelamatkan lingkungan hidup dan manusia. 2). Mendorong terwujudnya perubahan kebijakan sumber daya alam, terutama hutan dan lahan gambut yang merealisasikan prinsip dan cara kerja tata kelola yang baik, prinsip hak-hak asasi manusia dan semangat demokrasi.

Satgas REDD+2013

246 Kesimpulan Lokakarya Strategi dan Rencana Implementasi MRV REDD+

Kesimpulan Lokakarya Strategi dan Rencana Implementasi MRV REDD+, Workshop Nasional Jakarta, 10-11 September 2012. Langkah lanjut : 1).Perlu penyelesaian dokumen secepatnya sesuai masukan-masukan yang sudah ada; 2).Perlu secepatnya ada pengambilan keputusan tentang MRV (penetapan strategi MRV, base year, Sub-Nasional REL/RL) Lembaga MRV perlu segera ada; 3).Perlu ada aksi langsung di lapangan terutama peningkatan kapasitas sub nasional

Satgas REDD+2012

247 Prosiding. Training of Trainers (ToT) Penghitungan dan Monitoring Karbon Hutan

Prosiding yang dilaksanakan di Jember – Jawa Timur, 19 – 20 September 2012 (ToT on Carbon Accounting and Monitoring). Terkait dengan kesiapan daerah terhadap implementasi program REDD+, maka dirasa perlu untuk meningkatkan kapasitas POKJA REDD+ di daerah agar mampu melakukan penghitungan stok karbon dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat. Mengingat pentingnya kemampuan penghitungan stok karbon tersebut khususnya dalam penyusunan baseline/ REL/ RL maupun dalam pengembangan sistem MRV, maka perlu diselenggarakan Training of Trainers (TOT) untuk operator penghitungan stok karbon di daerah. Dari Hasil TOT ini diharapkan operator yang dilatih dapat melatih operator lain di daerah sebagai bagian dari transfer of knowledge.

Mengingat pentingnya peningkatan kapasitas dari POKJA REDD+ tersebut khususnya dalam hal penghitungan stok karbon dan monitoring perubahannya dari waktu ke waktu, maka Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan The World Bank dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) telah menyelenggarakan Training of Trainer (TOT) untuk Penghitungan Karbon dan Monitoring di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19-20 September 2012.

Novia Widyaningtyas, Radian Bagiyono, Haryo Pambudi, Andi Andriadi, Dinik Indrihastuti, Windyo Laksono, Erna Rosita, Andreas Rahutomo 2012 Pustanling, KLHK, FCPF dan World Bank.

249 REDD+ SES. Progress Towards And Results Of A Participatory, Transparent And Comprehensive Approach to REDD+ Safeguards

REDD+ Social and Environmental Standards Initiative. May 2016. Report. This report provides compelling evidence of the progress and results from developing and implementing country approaches to safeguards in ten countries/jurisdictions. It catalogues, through outcomes identified by country actors themselves, the real changes that are occurring within the countries and helps to build confidence in the potential for truly effective safeguards for REDD+ anchored in the countries' policies, laws, regulations and institutions. The REDD+ SES Initiative has been at the forefront in defining and promoting good practices for REDD+ safeguards, and has made an important contribution by supporting government and civil society actors to develop participatory, transparent and comprehensive country-led approaches to safeguards.

Man Bahadur Khadka, Novia Widyaningtyas, Tamrini Ally Said., 2016

250 REDD+ Safeguards and REDD+ SES Training Kit Version 1 September 2014

This Training Kit has seven (7) sessions that follow a logical progression from climate change to the REDD+ safeguards information system and the role the REDD+ SES Initiative: 1). Climate change and REDD+; 2). The concept of safeguards; 3). REDD+ safeguards; 4). Country Safeguards approach; 5). The REDD+ Social & Environmental Standards Initiative (REDD+ SES); 6). REDD+ SES principles, criteria, and indicators dan 7). Process for using REDD+ SES at country level

REDD+ SES 2014

251 Pedoman penggunaan Standar Sosial & Lingkungan REDD+ di tingkat negara. Versi 2, 16 November 2012

Dokumen ini memberikan pedoman tentang langkah-langkah penggunaan SSL REDD+ di tingkat negara untuk asesmen multi-stakeholder yang dipimpin oleh negara terhadap desain, implementasi, dan hasil program REDD+, 'proses SSL REDD+', dan merupakan pelengkap dari dokumen yang terpisah (SSL REDD+Versi 2) yang menentukan prinsip, kriteria, dan kerangka indikator, 'isi SSL REDD+'. Bersama-sama, isi dan proses SSL REDD+ memberikan mekanisme yang dapat digunakan untuk menunjukkan apakah dan bagaimana rambu pengaman dipatuhi, termasuk bagaimana pemberian berbagai manfaat yang ada.

REDD+ SES 2014

253 REDD+ SES. Standar Sosial & Lingkungan REDD+ SSL REDD+ Versi 2 (10 September 2012)

Berkaca dari pengalaman baru di negara-negara yang menggunakan SSL REDD+ dan pedoman yang diberikan mengenai kegiatan rambu-rambu untuk REDD+ oleh Konferensi Para Pihak dari Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim (the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change), revisi untuk mengembangkan Versi 2 SSL REDD+ ini bertujuan untuk: 1. mengarusutamakan prinsip, kriteria dan indikator untuk mengurangi duplikasi dan pengulangan; 2. mengatasi celah sehingga semua elemen sosial dan lingkungan SSL REDD+ dari rambu-rambu Cancun (the Cancun safeguards) diperhatikan dengan baik; 3. membuat indikator lebih sederhana agar lebih mudah dipahami dan diterjemahkan; 4. mengurangi jumlah indikator keseluruhan; dan 5. menjaga kualitas dan kedalaman kerangka SSL REDD+.

REDD+ SES 2012

254 Lessons Learned for Credible and Effective REDD+ Safeguards Information Systems. november 2014

Based on experiences from some countries participating in the REDD+ SES Initiative, approaches to developing and implementing SIS vary between countries but generally comprise the following six key elements. They are : 1. Defining the Scope and Objectives, 2. Building on Existing Information Systems, 3. Establishing Institutional Arrangements and Processes for Stakeholder Participation, 4. Identifying the Specific Information Needed, 5. Collecting, Compiling and Analyzing Information, 6. Reviewing, Reporting and Using Information.

REDD+ SES 2014

257 FREDDI: Instrumen Pendanaan REDD+ di Indonesia.

Makalah disampaikan pada Workshop Indonesia 11 di Jakarta, 2 april 2012 tentang Kriteria Seleksi FREDI dibangun mulai dari kriteria yang bersifat umum, Portfolio Program urgent. PRISAI sebagai salah satu instrumen safeguard lingkungan dan sosial yang akan memandu proses seleksi.

Agus Sari. 2014.

263 Working paper Striking The Balance: Ownership And Accountability In Social And Environmental Safeguards

This working paper seeks to help the Bank and other financial institutions take stock of experiences to date and distill lessons for the future. We look at four different approaches to protecting against social and environmental harm: 1. The traditional safeguards approach, which applies to most project lending. 2. The Use of Country Systems approach, which the Bank has applied to some project lending on a pilot basis. 3. The approach used for Program for Results investments, which applies to the Bank's results-based lending pilot. 4. The

approach used for Development Policy Loans, which applies to loans that support changes to policies and institutions.

WRI. April 2013.

264 Struktur dan Komposisi Komite Kerangka Pengaman

Komite Kerangka Pengaman (KKP) akan terdiri dari 5-9 anggota purna waktu. Jangka waktu kerja anggota KKP adalah 2-3 tahun. Hal ini diperlukan agar KKP mempunyai tanggung jawab lebih lanjut atas rekomendasi yang diberikan kepada Majelis Wali Amanat atas suatu usulan aktivitas REDD+. Selain itu, jangka waktu kerja yang relatif lama akan memberi jaminan konsistensi antara rekomendasi dengan pemantauan pelaksanaan PRISAI oleh KKP. Pendekatan yang diambil Komite dalam menjalankan mandatnya adalah melalui proses konsensus kolektif

Satgas REDD. 2013.

266 Sintesis Pengaman Sosial dan Lingkungan (SES) TFCA Kalimantan

Setiap penerima hibah harus memiliki praktik terbaik, standar, dan kebijakan pengaman sosial dan lingkungan. Praktik terbaik, standar, dan kebijakan pengaman itu harus dimuat di dalam Perjanjian Penerimaan Hibah (Grant Recipient Agreement). Penerima hibah TFCA KALIMANTAN harus dapat mematuhi prinsip tersebut, mengadopsi dan mengaplikasikan kebijakan pengamanan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan proyek yang mereka ajukan untuk bisa didanai melalui program ini

TFCA Kalimantan

285 Kajian Jasa Ekosistem Dan Isu Sosial Budaya.

Collaboration Between Syiah Kuala University and United Nations Development Programme Under controlled by SATGAS REDD+/UKP4. Ruang lingkup dari kajian jasa lingkungan dan isu-isu sosial budaya di Kawasan Hutan Gambut Rawa Tripa diantaranya adalah : 1. Latar belakang terjadinya konversi dari rawa menjadi perkebunan kelapa sawit; 2. Melakukan identifikasi hot spot (titik api); 3. Evaluasi terhadap manajemen kebakaran hutan berbasis komunitas dan relevansinya dengan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan (Posko Dalkarhut) 4. Mengkaji dampak konversi rawa tripa terhadap fungsi lingkungan khususnya banjir, kekeringan, kebakaran, dll dan 5. Valuasi jasa lingkungan, baik nilai ekonomi maupun nilai lingkungan.

Syiah Kuala University 2013

UNDP

286 Kajian Aspek Hukum Berbagai Konsesi Di Kawasan Hutan Gambut Rawa Tripa (TPSF) Kabupaten Nagan Raya Dan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh

Collaboration Between Syiah Kuala University and United Nations Development Programme Under controlled by SATGAS REDD+/UKP4. Ruang lingkup kegiatan Studi Aspek Hukum berbagai Konsesi di Kawasan Ekosistem Hutan Gambut Rawa Tripa ini ini adalah sebagai berikut : (1) Mengidentifikasi status hukum terhadap

semua lahan yang ada dalam areal Kawasan Ekosistem Hutan Gambut Rawa Tripa; (2) Analisis yuridis persyaratan dan mekanisme perolehan hak atas tanah oleh perusahaan perkebunan, atas lahan yang berada dalam areal Kawasan Ekosistem Hutan Gambut Rawa Tripa; (3) Analisis yuridis pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan pemegang HGU yang berada dalam areal Kawasan Ekosistem Hutan Gambut Rawa Tripa.

Syiah Kuala University 2013

UNDP

378 Prosiding Workshop MRV untuk Kesiapan Implementasi Redd+ di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hasil Pertemuan Workshop Sistem MRV Perhitungan Karbon untuk REDD+ di provinsi NTB, pada 20 September 2012 dihadiri oleh 75 peserta terdiri dari berbagai elemen antara lain pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota, akademisi, masyarakat, LSM, dan Swasta, menghasilkan rumusan sebagai berikut : Hutan sangat penting dalam konteks pengurangan emisi karbon, oleh karena itu kondisi sumberdaya hutan perlu dimonitor, sehingga perlu adanya sistem monitoring hutan yang handal dan transparan melalui perhitungan karbon secara akurat dan akuntable. Hal ini harus ditunjang adanya kepastian adanya Peran Masyarakat dalam mengimplementasikan program REDD+ dengan penerapan prinsip kriteria indikator SafeguardsIndonesia : 1. Memastikan status hak atas tanah dan wilayah, 2. Melengkapi atau konsisten dengan target pengurangan, emisi, konvensi dan kesepakatan internasional terkait 3. Memperbaiki tata kelola kehutanan, 4. Menghormati dan memberdayakan pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal 5. Partisipasi para pemangku kepentingan secara penuh dan efektif dan mempertimbangkan keadilan gender 6. Memperkuat konservasi hutan alam 7. Aksi untuk menangani resiko-balik (reversals) 8. Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi 9. Manfaat REDD dibagi secara adil ke semua pemegang hak dan pemangku kepentingan yang relevan 10. Menjamin informasi yang transparan, akuntabel dan terlembagakan.

Kirsfianti L. Ginoga, Zahrul Muttaqien
Puspijak KLHK dan FCPF 2012

379 Prosiding Workshop MRV untuk Kesiapan Implementasi Redd+ di Provinsi Sumatera Barat

Hasil rumusan workshop yang dilaksanakan 13-14 September 2012 : 1) perlu formulasi konsep MRV yang lebih mudah dan sederhana untuk dipahami oleh masyarakat lokal dengan mengedepankan adopsi kearifan lokal dan teknologi lokal masyarakat dalam penyusunan sistem MRV di Provinsi Sumbar; 2) Sistem kelembagaan MRV Sumbar terdiri dari lembaga REDD+ Provinsi, Institusi MRV Provinsi (pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota, Pokmas, Wali Nagari, Perusahaan Kehutanan, LSM); 3) Kesiapan sistem MRV Sumbar terbentuknya Pokja REDD, draft RAD penurunan emisi GRK, Institusi MRB Provinsi. Kebutuhan yang diperlukan mendapatkan fasilitasi secara intensif meliputi bimbingan, pelatihan dan teknologi untuk kegiatan monitoring dan pelaporan perhitungan karbon Provinsi; 4) permasalahan yang dihadapi Provinsi Sumber terkait

penyiapan sistem MRV adalah koordinasi dan harmonisasi perencanaan antara tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Kirsfianti L. Ginoga, Zahrul Muttaqien
Puspijak KLHK dan FCPF 2012

380 Prosiding Workshop MRV untuk Kesiapan Implementasi Redd+ di Provinsi Sumatera Selatan

Rumusan workshop yang dilaksanakan 12 November 2012 di Jambi mencakup 7 rekomendasi untuk sisem MRV implementasi REDD+ di Provinsi Sumetera Selatan yaitu 1) Tugas Tim Pokja menyiapkan rencana dan mekanisme REDD+; 2) Diperlukan dukungan alih teknologi, pendanaan dan pembangunan yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi; 3) penentuan REL disesuaikan dengan kondisi setiap provinsi dan kabupaten; 4) system kelembagaan MRV masih proses pembahasan; 5) terminalogi verifikasi diganti menjadi review atau evaluasi; 6) perlu konsep MRV yang lebih mudah dipahami masyarakat local; 7) peran dan pelibatan masyarakat dalam MRV terutama saat pengukuran dan pemantauan.

Kirsfianti L. Ginoga, Zahrul Muttaqien
Puspijak KLHK dan FCPF 2012

388 Pandangan Kamar Bisnis tentang Safeguard dalam implementasi REDD+

Safeguard pada tingkatan Kriteria dan Indikator (level pusat), akan tidak aplikatif dengan kondisi daerah setempat, untuk itun perlu Safeguard Nasional hanya meliputi Prinsip dan Kriteria saja, sedangkan Indikator dan Verifier disesuaikan dengan kondisi daerah setempat

Agus Wahyudi, David, Bambang Soekartiko, Bambang Supriyambodo, Imam Harmain, Endro Siswoko, Aldrianto Proadjati, Hasbillah 2013.

390 Sagefurad REDD+ dalam perspektif Kamar Akademisi

Menjelaskan pokok-pokok pikiran tentang safeguards Prisai dan SIS-REDD : 1) perlunya penjelasan mengani ruag lingkup/obyek safeguard; 2) intensitas/kekuatan safeguard REDD+ sebagai rambu-rambu dan mendorong inisiatif; 3) Perlu dijelaskan metode dalam safeguard; 4) validasi untuk menilai akurasi sistem safeguard, kejelasan kelembagaan sageguard REDD+ dan implementasi safeguard REDD+ pada unit KPH.

Kamar Akademisi, 2013

392 Pandangan Kamar LSM/Pemerhati tentang Safeguard REDD+

Masih terdapat masalah da;am hal : 1) Disharmonisasi Kedua Konsep Safeguard (Dualisme Kelembagaan); 2).Tidak Mengakomodir Konvensi-Konvensi Internasional; 3).Konsep Safeguard Terlalu Detail (Prinsip, Kriteria Dan Indikator); 4).Kurang Mempertimbangkan Kekhususan Daerah Dan Ekosistem Rentan Seperti Pulau-Pulau Kecil; 5).Belum Memasukan Isu Gender Dan Tata Kuasa dan 6) Belum Jelasnya Kelembagaan Pelaksana Safeguard Di Level Daerah/Tapak

Kamar LSM, 2013

394 Pandangan Kamar Masyarakat tentang safeguard REDD

Pandangan dan Masukan Tentang Safeguard Dalam Implementasi REDD+ : 1) Prinsip safeguard REDD+ harus menghormati bentuk keberagaman daerah; 2) Perlu adanya mekanisme perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam bentuk peraturan perundangan-undangan (UU, Perda, dll); 3) Kamar masyarakat setuju dengan Tim Penyusun Kajian, bahwa prinsip dapat dibuat di pusat dengan menghormati keberagaman daerah dan melakukan monitoring; 4) Kriteria dan indikator di susun berdasarkan konteks daerah. Dan 5) Mekanisme monitoring serta hasil monitoring harus tersedia dan mudah di akses oleh masyarakat

Kamar Masyarakat, 2013

396 Pandangan dan Masukan Kamar-kamar DKN tentang Safeguard dalam Implementasi REDD+

Pandangan dan Masukan Kamar-kamar DKN tentang Safeguard dalam Implementasi REDD+1) Belum ada upaya untuk mengaitkan safeguard REDD+ dengan berbagai sistem yang sekarang ada seperti SVLK, SFM; sehigga perlu Mengupayakan adanya suatu link/kaitan yang jelas dari safeguards REDD dengan sistem yang ada sekarang tersebut; 2) Dalam perspektif Pemda pertanyaannya berangkat dari pemahaman mengenai "Nasional strategic, Sub nasional implementation". Safeguards yang dibuat dimaksudkan untuk mendukung strategi nasional berarti, Sub nasioanal (daerah) perlu mengembangkan safeguard untuk implementasinya untuk itu Perlu dibuat safe guard level Sub nasional

Kamar DKN, 2013

407 Penerapan dan Verifikasi Safeguards Sosial dalam Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Desa

Pengalaman KFCP, selain dari safeguards yang masih berkembang tersebut, menyusun indikator yang mudah dipahami dan dipraktikkan oleh warga desa merupakan tantangan lain dalam menerapkan safeguards di tingkat kegiatan. Sebagian dari prinsip dan standar safeguards merupakan hal yang tidak biasa bagi masyarakat, sehingga diperlukan waktu dan tenaga yang lebih besar untuk mengenalkannya. Belajar dari kondisi tersebut, kedepannya penyelenggaraan inisiatif REDD+ perlu didahului oleh uji coba pelaksanaan safeguard. Hal ini dilakukan agar tersedia ruang pembelajaran, baik bagi masyarakat maupun program. Masyarakat akan memperoleh kesempatan untuk mempelajari safeguard, sementara program dapat mencari cara yang sesuai untuk melaksanakan safeguard tersebut. Laporan ini membahas pembelajaran yang diperoleh dari praktik penerapan safeguard di tingkat kegiatan oleh desa dan KFCP, dari pertengahan 2011 hingga pertengahan 2013. Pembelajaran dari penerapan dan verifikasi safeguard ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan dan pelaksanaan sistem safeguards dalam program REDD+ di Indonesia.

Lis Nurhayati, Barbara Howard, Rachael Diprose, Benjamin Tular, dan Risa Yudhiana 2014.
Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP), Aus Aid Bappenas

424 Bagaimana SESA Seharusnya

Berkaca pada proses nasional REDD+ secara khusus pembentukan PRISAI dan juga hasil diskusi public tanggal 13-14 Desember 2012 maka beberapa hal yang harus dilakukan SESA ke dalam konteks proses nasional REDD+ adalah sebagai berikut: 1) SESA harus ditempatkan sebagai salah satu proses untuk menyiapkan instrumen yang nantinya digunakan PRISAI untuk melakukan assessment di tingkat tapak. Saat ini, PRISAI sedang mengembangkan lebih tajam kriteria dan indikator agar bisa aplikatif di lapangan. Namun pada saat yang sama, PRISAI juga membutuhkan berbagai instrumen lain untuk secara lebih dalam dan holistik menganalisa konteks sosial-lingkungan di lapangan. Pendalaman konteks akan membantu desain implementasi PRISAI lebih mampu menjangkau persoalan yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya. SESA seharusnya berkontribusi untuk memperkaya assessment seperti ini; 2) SESA harus memulai proses dari wilayah yang menjadi target lokasi proyek REDD+. Tujuannya adalah agarassessment yang dilakukan lebih mendekati kompleksitas lapangan. Hasil darilapangan akan memperkaya uji coba PRISAI yang nantinya bisa membantu desain pelaksanaan PRISAI dan 3) Proses FCPF dan SESA Bank Dunia terlambat. Padahal SESA seharusnya dibuat untuk membantu negara dalam menentukan prioritas-prioritas apa dalam penanganan deforestasi dan degradasi hutan, dan mekanisme pelibatan multi-pihak dalam pembentukan Strategi Nasional REDD+. Meski demikian, SESA masih bisa dilanjutkan untuk bisa mengejar sekaligus mengisi inisiatif yang sudah berjalan secara nasional. Dalam hal ini, SESA tidak boleh menegasikan dan membajak proses yang sudah berjalan. Tetapi membantu melakukan identifikasi atas kekurangan dari proses saat ini. SESA hanya dapat menjadi komplementer dari inisiatif nasional saat ini.

DKN 2012

425 Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS dapat disusun melalui banyak cara. Terlepas apakah KLHS tersebut pada aras kebijakan, sektoral, regional, atau programatik, KLHS dapat mengadopsi multi-bentuk (form) – bahkan nama - serta memberi penilaian atas keputusan strategik yang akan diambil. Menilik hal ini KLHS dapat kita katakan merupakan family of tools. Sehingga KLHS yang dipandang bermutu adalah yang dapat diadaptasikan dan disesuaikan (tailor-made) dengan konteks aplikasinya. Buku ini berisi konsep dan prinsip dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan prosedur serta metode KLHS. Konsep dan Prinsip Dasar KLHS berisi 8 bagian yaitu 1. Konsep-konsep Dasar; 2. Definisi KLHS; 3. Tujuan dan Manfaat KLHS; 4. Relung Intervensi KLHS; 5. Prinsip Dasar dan Nilai-nilai KLHS; 6. Mutu KLHS; 7. Kelembagaan/Pendekatan KLHS dan 8. Wajib vs Sukarela KLHS. Sedangkan Prosedur dan Metode KLHS terdiri dari 7 tahapan yaitu : 1. Prosedur Generik KLHS; 2. Penapisan; 3. Pelingkupan; 4. Dokumen KLHS (termasuk analisis); 5. Partisipasi Masyarakat; 6. Pengambilan Keputusan
7. Pemantauan dan Tindak Lanjut

Atiek Koesrijanti, Laksmi Wijayanti, Soeryo Adiwibowo, Triarko Nurlambang 2007

ESP2-DANIDA

428 Getting Gender in the REDD+ Social and Enviromental Standars. Lessons from Action Research Booklet 1

Describes the development of the action research project, the methodology and process of the action research, the baselines developed in each of the 4 countries, the steps to design a gender sensitive strategy or program, and the research outcomes that informed the action checklists in Booklet 2. Steps to capture the gender dimension in a REDD+ program : 1) Conduct an analysis of the gender differentiated use, access to and control of forest resources, and of the gender inequities that are observed in many forest-related processes (e.g., participation, transparency, distribution of benefits, etc); 2) Carry out a gender differentiated analysis of the potential positive and negative social impacts – the risks and opportunities – associated with a gender-blind (compared to a gender responsive) REDD+ program.; 3) Understand the current situation of the country with regards to policies (environmental, gender, sustainable development), climate change initiatives, forestry programs, gender equality, enabling conditions that address gender issues, etc; 4) Identify gender equality and women's rights issues that should be included in a REDD+ program, including a gap and opportunity analysis. Dan 5) Propose concrete suggestions to address gender equality and women's rights in the REDD+ program, particularly in the safeguards and standards.

Andrea Quesada-Aguilar, Eleanor Blomstrom and Raja Jarrah 2013

428 Getting Gender in the REDD+ Social and Enviromental Standars. Action Steps for National REDD+ Program Booklet 2

Summarizes the action research, and contains three distinct action checklists: (1) Essential actions to develop a gender sensitive REDD+ Program (to be followed in all REDD+ phases); (2) Actions to address the gender components of the REDD+ SES Principles, Criteria, and Indicators (PCI); and (3) Actions to develop a gender responsive country-level interpretation of Indicators. A gendered approach to REDD+ could contribute toward positive change in a number of ways, including: 1. Demonstrating how one initiative for climate change mitigation can be used to benefit poor women and men, with lessons applicable for other areas of climate change response; 2. Bringing good practice and lessons learned from other development sectors with more established experience to the arena of forest conservation; 3. Introducing good gender practice to sectors such as forestry that have been traditionally male oriented, and promoting cross-fertilization between sectors; 4. Using multi-sectoral entry points for working on gender, including (but not limited to) energy security, livelihoods diversification, credit and savings, land rights, and local governance; 5. Raising awareness of institutional and policy obstacles to gender equality, and building capacity to overcome them.

Andrea Quesada-Aguilar, Eleanor Blomstrom and Raja Jarrah 2013

Regulation

212 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut.

Salah satu isi Inpres tersebut ditujukan kepada Menteri Kehutanan yaitu Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

INPRES 2013.

213 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut

Salah satu isi Inpres tersebut ditujukan kepada Menteri Kehutanan yaitu Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

INPRES 2011

214. Keputusan Ketua Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ Nomor:02/Satgas REDD+/09/2012 tentang strategi nasional REDD+ Indonesia

Menetapkan Strategi nasional reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) Indonesia yang selanjutnya disebut Stranas REDD+ Indonesia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

Keputusan Ketua Satgas REDD+ 2012.

215 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+). Susunan Satgas REDD yang terdiri dari berbagai kementerian.

Kepres 2013.

216 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+). Satgas Kelembagaan REDD+ bertugas

melaksanakan kegiatan persiapan untuk implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia dan wewenang yang melekat pada Stagas REDD.

Kepres 2011

217 Kesepakatan Bersama antara Perprov Kalimantan Tengah dengan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+

Kesepakatan Bersama antara Perprov Kalimantan Tengah dengan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Nomor: 08/KB-KSD/KTG/2012 dan Nomor: MoU-002/REDD+/12/2012. Tentang pelaksanaan program kalimantan tengah sebagai provinai percontohan untuk implementasi pengurangan dari REDD+ di Indonesia.

Kesepakatan Bersama 2012

218 Kesepakatan Bersama antara Perprov Kalimantan Timur, Pemkab Berau, Pemkab Kutai Barat, Pemkab Kutai Kartanegara dengan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD

Kesepakatan Bersama antara Perprov Kalimantan Timur, Pemkab Berau, Pemkab Kutai Barat, Pemkab Kutai Kartanegara dengan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Tentang pelaksanaan program kalimantan timur sebagai provinai percontohan untuk implementasi pengurangan dari REDD+ di Indonesia

Kesepakatan Bersama 2012

219 Nota Kesepahaman antara Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ dengan Pertamina Foundation (PF)

Nota Kesepahaman antara Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ dengan Pertamina Foundation (PF) nomor: MoU-001/REDD+/02/2012 dan Nomor: 008/PF-DIR/NK/II/2012 Program Sekolah Sobat Bumi akan digunakan untuk pengembangan dan komunitas hidup hijau yang termasuk dalam Program SSB.

Nota Kesepahaman. 2012.

220 Nota Kesepahaman antara Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ dengan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

Nota Kesepahaman antara Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ dengan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Nomor Mou-002/REDD+/03/2012 Dan 06/03/2012. Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dalam Rangka Pemantauan Hutan Dan Gambut Untuk MRV (Monitoring, Reporting, Verification) REDD+ Di Indonesia.

Nota Kesepahaman. 2012.

224 Deklarasi Program Nasional pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui penuruan emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan dan lahan gambut

Deklarasi :Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum & Hak Azasi Manusia, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Nadan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Ketua Komisi Nasional Hak Azasi Manusia dan Kepala Badan Pengelola REDD+ pada Senin, 1 September 2014. Deklarasi Program Nasional pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui penuruan emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan dan lahan gambut.

Deklarasi Bersama 2014

233 Draf Final Rencana Aksi Nasional Untuk Implementasi Redd+ (RAN - REDD+)

Rencana aksi ini mempunyai kandungan baru dalam menyelenggarakan tata kelola hutan dan lahan dengan pendekatan penyelesaian masalah-masalah fundamental, perwujudan kondisi pemungkin dalam bentuk program dan kegiatan baru yang belum tertuang dalam rencana pembangunan sebelumnya. Pendekatan seperti biasa (business-as-usual approach) dalam mengelola hutan dan lahan perlu ditransformasi hingga akhirnya menjadi paradigma dan budaya kerja baru. Rencana aksi ini juga menuntun lembaga-lembaga dan unit-unit perencana pemerintah ke arah cara-cara baru melakukan perencanaan pembangunan. Secara operasional, rencana aksi nasional ini merupakan penjabaran Strategi Nasional REDD+ menuju perbaikan menyeluruh yang memiliki lima pilar yaitu: (1) Perangkat Kelembagaan dan Proses; (2) Perangkat Hukum dan Peraturan; (3) Program Strategis; (4) Paradigma dan Budaya Kerja, dan (5) Partisipasi Masyarakat.

Satgas REDD+. 2012

267 Kesepakatan Bersama antara Perprov Jambi, Pemkab Merangin, Pemkab Muaro Jambi, Pemkab Tebo dengan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+

Kesepakatan Bersama antara Perprov Jambi, Pemkab Merangin, Pemkab Muaro Jambi, Pemkab Tebo dengan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Nomor 05/NK/HKM/2013 tanggal 21 Juni 2013, Nomor 08/BAPPEDA Mrg/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, Nomor 08/HK/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 dan Nomor 188/04/HK/2013 tanggal 21 Juni 2013 Tentang pelaksanaan pelaksanaan penataan perizinan di , Kab Merangin, Kab Muaro Jambi, Kab Tebo serta fungsionalisasi situation room pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka untuk implementasi program pengurangan dari REDD+ di Indonesia

Kesepakatan Bersama 2013

268 Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NOMOR: 04/PMK .02/2012 NOMOR: PB.1 /Menhu

t-II/2011 Tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam rekening Pembangunan Hutan

Peraturan Bersama 2012

270 Peraturan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial NOMOR: P. 01/PKPS/PP/PSKL.0/5/2016

Peraturan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial NOMOR: P. 01/PKPS/PP/PSKL.0/5/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial. Ruang lingkup peraturan ini meliputi: a) Tugas dan Fungsi Pokja PPS; b) Keanggotaan Pokja PPS; c). Pembiayaan Pokja PPS; dan d). Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pokja PPS.

Perdir 2016

271 Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan nomor. P.7/PSKL/SET/PSL.0/5/2016

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan nomor. P.7/PSKL/SET/PSL.0/5/2016. Tentang pelayanan akses kelola perhutanan sosial. PErmohonan Hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat dapat diajukan secara manual atau elektronik.

Perdirjen 2016

272 Peraturan Gubernur Kalimantan tengah Nomor 17 tahun 2011

Peraturan Gubernur Kalimantan tengah Nomor 17 tahun 2011. Pedoman perizinan pengelolaan usaha perkebunan berfungsi sebagai standar pelayanan minimum atau acuan bagi proses perizinan pengelolaan usaha perkebunan di Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalteng 2011

273 Gubernur Riau Nomor: Kpts.331/IV/2013

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.331/IV/2013 tentang strategi dan rencana aksi Provinsi (SRAP) Riau dalam implementasi Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+)

Keputusan Gubernur Riau 2013

274 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan

Permen LH 2012

275 Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Program Penataan Perizinan

Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Program Penataan Perizinan Di Kabupaten Merangi N, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Dalam Rangka Implementasi Program Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) DI INDONESIA antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Kabupaten Tebo, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Nomor; PKS-01/UKP-PPP/12/2013; Nomor 18/NK.Gub/B.Ekbang-HKM.2.3/XII/2013; Noor 22/BAPPEDA-Mrg/VI/2013; Noor 22/HK/XII/2013 dan 18/14/HK/2013.

Perjanjian Kerja Sama 2013

276 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah: a. mekanisme pengelolaan hibah terencana; b. tata cara pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang; dan c. tata cara pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga.

Permen Keu 2011

277 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk: 1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia; 2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab social dan lingkungan; dan 3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

PP 47 tahun 2012

278 Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/918/B.Eko-Bapp/2012 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Strategi Dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Implementasi Redd+ Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 - 2013

Keputusan Kepala Bappeda Kaltim 2012

279 Ringkasan Eksekutif Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Riau dalam Implementasi REDD+

Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Riau REDD+ merupakan perbaikan sistem tata kelola seluruh lahan hutan dan lahan bergambut dalam kawasan hutan dan APL. Dalam tatanan masyarakat dan sistem kelembagaan pemerintah

yang sekarang, perbaikan itu dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan pembangunan rendah emisi, baik secara sendiri maupun dengan bantuan luar negeri

Adnan Kasry; Rifardi, Suwondo dan Fredrik Suli 2013.

280 Strategi dan rencana aksi provinsi (SRAP) implementasi REDD+ Kalimantan Timur

Merujuk STRANAS REDD+ dan spesifikasi kondisi Kaltim, maka ruang lingkup strategi dan rencana aksi yang dikembangkan dalam dokumen SRAP REDD+ Kaltim ini meliputi/ berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: 1. Pengembangan, perubahan dan/atau penyempurnaan syarat yang harus dipenuhi bidang/ sektor berbasis lahan (kehutanan, pertanian pangan, perkebunan, pertambangan, dan sektor penggunaan lahan lainnya) guna mencegah/menang-gulangi/mengendalikan deforestasi dan degradasi hutan (beserta dampak yang ditimbulkannya) di tingkat provinsi (SRAP Pra-Syarat/pre-requirements). 2. Penciptaan dan perbaikan berbagai aspek atau elemen di bidang/sektor berbasis lahan yang dapat mempercepat/memperlancar implementasi berbagai upaya dalam rangka mencegah/menanggulangi dan mengendalikan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta upaya peningkatan penyerapan/penyimpnan karbon (SRAP Kondisi Pemungkin/enabling condition). 3. Perbaikan dalam arti perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap tata kelola program/kegiatan bidang/sektor terkait dengan pemanfaatan lahan yang dapat mencegah/menanggulangi/ mengendalikan deforestasi dan degradasi hutan, serta bahkan meningkatkan kemampuan penyimpnan dan penyerapan karbon (SRAP Reformasi Sektor/sectorial reform). 4. Pelaksanaan pengukuran, pelaporan dan pelaksanaan verifikasi berbagai upaya pencegahan/penanggulangan/ pengendalian deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan kemampuan penyerapan/ peningkatan karbon (SRAP MRV/Measurement, reporting and verification).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Satgas REDD+ 2012.

281 Strategi dan rencana aksi provinsi (SRAP) Papua dalam implementasi REDD+

Rencana aksi mitigasi Provinsi Papua dalam implementasi REDD+ terbagi dalam 2 kelompok aksi yaitu: (a) peningkatan serapan karbon hutan, mencakup aksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL); Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR); Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm); Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI); dan Pelaksanaan Restorasi Ekosistem Hutan (REH); dan (b) Stabilisasi simpanan karbon hutan, mencakup aksi: Pencegahan perambahan hutan dalam KSA dan HL; Pengurangan konversi hutan menjadi APL; Penurunan luas areal RKT IUPHHK; Implementasi Reduced Impact Logging (RIL)/PHPL dan SVLK; dan Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat Adat (PHL-BMA)

Pemerintah Provinsi Papua dan Satgas REDD+ 2012.

282 Strategi dan rencana aksi provinsi (SRAP) Papua Barat dalam implementasi REDD+

Dokumen ini berisi strategi-strategi propinsi dan rencana-rencana aksi dengan beberapa skenario yang harapkan dapat diimplementasikan untuk

mewujudkwan manfaat pembangunan sektor kehutanan dan lahan secara berkelanjutan. Beberapa pilar kunci yang menjadi perhatian dalam ide pembangunan sektor kehutanan dan lahan berkelanjutan di Propinsi Papua Barat dimuat secara singkat, padat dan jelas dalam dokumen ini. Pilar-pilar kunci ini menjadi karangka penyangga pengembangan rancangan kegiatan-kegiatan dalam ruang pembangunan rendah karbon atau pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Dokumen ini akan terus dipertajam termasuk diperkuat dengan komunikasi dan koordinasi aktif antar SKPD dan lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam mendukung komitmen Provinsi Papua Barat mewujudkan pembangunan sektor kehutanan dan lahan yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan bagi manusia, pembangunan dan lingkungan Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Satgas REDD+ 2012.

283 Kesepakatan bersama pelaksanaan program percontohan Kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

Kesepakatan bersama pelaksanaan program percontohan di Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulau Pisang, Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Implementasi Program pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut (REDD+) di Indoensia. Antara di Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulau Pisang, Provinsi Kalimantan Tengah dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Kesepakatan bersama 2013

293 Strategi dan rencana aksi provinsi (SRAP) Riau dalam implementasi REDD+

Implementasi SRAP REDD+ Provinsi Riau dilakukan secara sinergi dengan RPJM Nasional/Daerah, Rencana Strategis Nasional dan Revisi Tata Ruang Provinsi Riau, terutama dalam keterkaitan dan dampaknya bagi sektor berbasis lahan. Agar SRAP Riau dapat menjadi arus utama untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan dan lahan gambut, maka diselaraskan dengan RAD-GRK Provinsi Riau. Pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Riau dalam Implementasi REDD+ dapat memberikan tingkat kelayakan atau nilai manfaat dan biaya yang berbeda-beda pada skala internasional, nasional, lokal maupun pada skala kegiatan atau skala proyek. Dalam kondisi demikian diperlukan solusi finansial, ekonomi maupun kelembagaan yang memungkinkan terwujudnya berbagai skema insentif sehingga SRAP dapat dijalankan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi beremisi rendah. Untuk itu, diperlukan penyusunan Rencana Bisnis Implementasi SRAP.

Pemerintah Provinsi Riau dan Satgas REDD+ 2012.

382 Strategi Dan Rencana Aksi Redd+ Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam implementasi SRAP REDD+ Sumatera Selatan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain adalah : 1). Mewujudkan makna dari REDD+ sebagai mekanisme insentif. Dicapainya penurunan emisi CO2 dari aksi-aksi mitigasi

berkaitan dengan penanganan proses deforestasi dan degradasi hutan serta berbagai kegiatan konservasi karbon, penyimpanan karbon serta peningkatan penyerapan karbon hutan akan menghasilkan additionality dan memberikan harapan didapatnya insentif dari kebijakan fiskal dan pasar karbon. 2). Perbaikan tata kepemerintahan dan tata kelola kehutanan memerlukan reformasi birokrasi aparatur pemerintahan hingga tingkat tapak kesatuan pengelolan hutan, yang diindikasikan oleh : meningkatnya implementasi tata-nilai dan etika, meningkatnya kedisiplinan, meningkatnya profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta semakin mantapnya jiwa korsa rimbawan. 3). Keberhasilan implementasi SRAP REDD+ akan sangat ditentukan oleh dapat dijalankannya pengarusutamaan subtansi isi SRAP REDD+ kedalam kerangka dasar RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2013-2018, serta kedalam mekanisme dan proses perencanaan pembangunan /kehutanan daerah. 4. Keberhasilan implementasi REDD+ akan sangat membantu dalam keberhasilan dari jajaran kehutanan dalam mereposisi opini publik dan daerah terhadap kehutanan. Harus dijelaskan bahwa issu kehutanan bukan sebagai penghambat dan penghadang bagi kepentingan ekonomi untuk investasi non kehutanan dan kepentingan masyarakat setempat, malainkan sebagai kunci keberhasilan dalam pembangunan sosial dan ekonomi berbasis keseimbangan ekosistem, dan pendorong untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. 5). Ciri utama dari isi subtansi SRAP REDD+ Sumatera Selatan adalah tuntutan peran aktif para pemangku kepentingan dalam berbagai proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pengurusan hutan.

Pemerintah Provinsi Sumsel dan Satgas REDD+ 2013

405 Aide Memoire – Preparation and Supervision Mission

FCPF Safeguards: There has already been significant attention and strong performance in developing environmental and social safeguard instruments for Indonesian REDD+ activities. However, several safeguard instruments and frameworks (i.e. SIS-REDD+) have been developed to comply with UNFCCC safeguard principles, but not specially addressing World Bank safeguard policy requirements. The FCPF PC calls for Emission Reduction Programs to meet the World Bank's environmental and social safeguard standards, in addition to supporting UNFCC REDD+-related safeguard guidance. In that vein, the FCPF Grant Agreement calls for completion of a Strategic Environmental and Social Assessment (SESA) and an Environmental and Social Management Framework (ESMF), including a resettlement policy framework, an indigenous peoples' planning framework, a pest management framework, and guidelines and procedures for the development of environmental and social management plans, resettlement action plans, indigenous peoples' development plans, pest management plans and physical cultural resources management plans. Hence, there is an urgent need to complete both the SESA and ESMF as soon as possible.

Republic of Indonesia Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), BioCarbon Fund Initiative for Sustainable (BioCF ISFL) 2016

406 National Strategi REDD-Indonesia Readness Phase 2009 -2012.

In order to strengthen the readiness for full implementation post 2012, Indonesia has prepared REDD strategy for the 2009-2012 Readiness Phase. This strategy is aimed at providing guidance relating to policy intervention to address

drivers of deforestation and forest degradation, and providing infrastructures necessary for the implementation of REDD/ REDD-plus. This strategy also integrates all actions relevant to REDD-plus including activity funded from the foreign resources. This book is presented as one of the media to enhance dissemination of information on the Readiness Strategy of REDD-Indonesia and the progress of the implementation including the development of Demonstration Activities, which is expected to contribute to the strengthening of knowledge, understanding, and collaborative actions relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation in Indonesia.

Kemenhut, AusAid, GIZ, FCPF, UNREDD, CIF-FIP, ITTO, TNC, KFS-KOICA 2010

419 Strategi Dan Rencana Aksi Provinsi Untuk Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Plus / Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation Plus (SRAP REDD+) Sumatera Barat

Penyusunan Arah dan Program Strategi REDD + Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan secara makro (bersifat eksternal) maupun mikro wilayah (bersifat internal) berdasarkan isu-isu strategis yang berhubungan dengan deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Kerangka strategi REDD + Provinsi Sumatera Barat dibangun untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dijabarkan sebagai berikut : (1) Menurunkan emisi GRK yang berasal dari sektor penggunaan lahan dan perubahannya serta kehutanan; (2) Meningkatkan simpanan karbon; (3) Meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati; dan (4) Meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi ekonomi hutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka program strategi REDD + Provinsi Sumatera Barat menekankan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang tertuang dalam bentuk kebijakan strategis pengelolaan sumberdaya alam Sumatera Barat

Tim penyusun SRAP Provinsi Sumatera Barat 2013
Satgas REDD+ & UNDP

420 Strategi Dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Redd+ Aceh

Strategi Rencana Aksi Provinsi REDD+ Aceh ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasi dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan agar mempunyai dampak yang kongkrit bagi pencegahan pemanasan global dan keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Strategi Rencana Aksi dimaksud telah dirumuskan melalui pelibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti: masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha, selain peran aktif dari pemerintahan, namun lebih jauh dari itu, pelibatan para pemangku kepentingan secara inklusif perlu terus dipertahankan dalam setiap tahapan siklus pembangunan Strategi dan rencana aksi pelaksanaa REDD+ Aceh dikelompokkan ke dalam 3 fase yakni: (1) fase pra persiapan, (2) fase persiapan dan (3) fase implementasi. Pada setiap fase tersebut diuraikan tentang strategi, rencana aksi, indikator kinerja, waktu pelaksanaan, lokasi dan instansi pelaksana.

Tim penyusun SRAP Provinsi Aceh 2012
Satgas REDD+ & UNDP

421 Strategi Dan Rencana Aksi Provinsi (Srap) Implementasi Redd+ Kalimantan Timur

Dokumen SRAP REDD+, ini menjadi pedoman bagi DDPI, bersama dengan Pokja REDD Provinsi, dan DKD untuk didorong ke dalam kerangka perencanaan pembangunan dan/atau program sektoral atau lembaga lain yang berkaitan dengan program/ proyek REDD+ di Kaltim sebagai bentuk dari internalisasi dokumen SRAP REDD+ terhadap lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah. Proses internalisasi dimaksud dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui rencana aksi daerah penurunan gas rumah kaca (RAD GRK Kaltim). Pemantauan sosial dalam kegiatan REDD+ tidak dapat dilakukan secara langsung, karena akan membutuhkan banyak sumber daya. Karena itu perlu untuk membangun sebuah Kriteria dan Indikator yang dapat digunakan untuk memantau dipenuhinya Prinsip PADIATAPA dan dijalankannya upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Agar dapat memantau lingkungan, maka Kriteria dan Indikator di atas juga harus mampu menunjukkan bahwa kegiatan REDD+ tidak bertentangan dengan upaya penyelamatan keanekaragaman hayati dan standar lingkungan hidup berkelanjutan. Selain itu Kriteria dan Indikator yang dibangun dapat menunjukkan keberadaan tindakan pemulihan jika ada pengabaian atau pelanggaran terhadap hak masyarakat dan lingkungan hidup

Tim penyusun SRAP Provinsi Kalimantan Timur 2014
Satgas REDD+ & UNDP

422 Strategi Dan Rencana Aksi Redd+ Provinsi Jambi 2012 – 2032 Dokumen Utama

Pra-Syarat pelaksanaan REDD+ yang telah dibahas dalam pertemuan-pertemuan resmi di tingkat internasional. Pra-Syarat atau perangkat pelaksaaan REDD+ yang harus disiapkan adalah: 1) Pembuatan peraturan terkait pelaksanaan REDD+; 2) Pembangunan metodologi REDD+, termasuk di dalamnya penetapanTingkat Emisi Referensi (Reference Emission Level/REL) di REL/RL di tingkat sub-nasional, serta sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV), termasuk penanganan pengalihan emisi (displacement of emission); 3) Kelembagaan, mekanisme-mekanisme Kerangka Pengaman, Padiatapa dan mekanisme finansial termasuk di dalamnya mekanisme distribusi dan insentif manfaat dari hasil pelaksanaan REDD+. Strategi ini akan dilaksanakan secara lintas sektor guna mempersiapkan dan membangun pondasi kebijakan dan kelembagaan REED+ di provinsi yang kokoh dan memiliki kapabilitas dalam mengelola proses perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan REDD+ secara penuh lingkup provinsi. Dokumen SRAP REDD+ Jambi hanya memungkinkan dilaksanakan, bilamana daerah beserta para pihak yang terkait termasuk masyarakat di dalamnya, disamping memiliki komitmen yang tinggi terhadap keseluruhan substansi yang ada dalam dokumen ini, juga tetap konsisten dan siap menghadapi konsekuensi yang timbul, termasuk dalam hal penyediaan dukungan politik, administrasi dan keuangan. Begitu pula Pemerintah Pusat beserta seluruh institusi yang terlibat dan berkepentingan dalam upaya pelaksanaan SRAP REDD+ harus terus memberikan dukungan nyatanya. Beberapa rencana aksi dalam dokumen ini secara jelas menunjukkan bahwa persoalan deforestasi dan degradasi hutan sebagian besar justru pemecahannya harus dimulai dari tatanan pemerintah pusat.

Perbatakusuma, E.A, Ridwansyah, M, Irfan, A.,Akiefnawati, R., Widodo, W., Kurniawan, D., Primadona, E., Shakti, M., Andrian, I, Erwin, D., Lindawati, dan Alfiansyah (Eds.) 2013
Warsi, ZSL, FFI, World Agroforestry Centre, Satgas REDD+ & UNDP

423 Strategi Daerah Redd+ Kalimantan Tengah

Tujuan jangka menengah untuk 1) Kelembagaan REDD+ berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan; 2) Adanya kelembagaan dan sistem MRV yang kredibel dan akuntabel; 3) Diterapkannya prinsip skala ekonomi (economies of scale) dalam kegiatan hijau (green businesses) yang berbasiskan masyarakat untuk mempertahankan dan memperbaiki cadangan karbon menjadi ekonomi hijau (green economy) yang menghasilkan produk hijau (green products) memiliki keterkaitan dan dampak penggandaan nilai tambah, lapangan pekerjaan dan jasa; 4) Terwujudnya kesepakatan formal untuk mengakses dan memanfaatkan pasar global atas produk hijau dan jasa lingkungan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari; 5) Berkembangnya peluang-peluanginvestasi yang ramah lingkungan (green investments) yang melibatkan secara langsung lembaga dan masyarakat lokal; 6) Meningkatnya status kepemilikan, penguasaan dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lestari sumberdaya hutan dan lahan gambut. Untuk itu perlu strategi dan rambu-rambu rambu pengaman agar kegiatan-kegiatan REDD+ mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat tambahan maka Kalimantan Tengah. Rambu pengaman (safeguards) adalah seperangkat prinsip, kriteria, dan indikator untuk memastikan bahwa pelaksanaan REDD+ tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Rambu pengaman diterapkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan masalah sosial, tata kelola keuangan, dan dampak terhadap lingkungan hidup dari kegiatan REDD+ yang dilakukan. Prinsip, kriteria, dan indikator rambu pengaman merujuk pada asas-asas hukum internasional, nasional, adat maupun kebiasaan yang berlaku dan diterima sebagai pedoman yang digunakan oleh banyak pihak pada isu-isu tersebut di atas. COP 16 di Cancun menetapkan tujuh prinsip afeguards yang harus dilaksanakan bersamaan.

Tim penyusun SRAP Provinsi Kalimantan Tengah 2014
Satgas REDD+ & UNDP

Strategic Option NRM

011 Berbak Carbon Inisiative di kawasan Taman Nasional Berbak menuju Kesiapan Implementasi REDD+ di Indonesia

BTN Berbak bekerjasama dengan para pihak membangun inisiatif untuk implementasi REDD+. Kerjasama dengan ZSL untuk melakukan patrol pengamanan dan penanganan konflik satwa dan permohonan regristrasi menjadi DA-REDD+. Melakukan berbagai kegiatan tentang Kehati, penutupan kanal, penyuluhan, pemadaman kebakaran, rehabilitasi dan kegiatan lainnya.

Hayani Suprahman 2012

052 Rumusan Lokakarya

Rumusan Lokakarya yang diselegarakan pada 4-5 Februari 2015 yaitu. Membangun baseline data untuk mendukung kerja pemetaan terkait karhutla dan advokasi thd pengelolaan sda lainnya. inventarisasi produk perundangan sebagai bahan dasar dalam melakukan analisa hukum-kebijakan dan mengkaji

singkronisasi antar perundangan (sda); Memperkuat jaringan kerja melalui pembagian peran (kamar: data, investigasi, analisa, pelaporan, kampanye). Inisiasi pertemuan 7 region kelompok masyarakat sipil yang menghadapi persoalan karhutla sebagai bagian dari upaya menekan komitmen KLHK; Pelatihan investigasi bersama: PPNS, penyidik polda dan kelompok masyarakat sipil Kalbar

BPREDD 2015

063 Dialog Awal tahun REDD+

Makalah berisi 10 Imperatif BP REDD+ 2014 yaitu 1) Monitoring moratorium & One Map; 2.Penataan perizinan berbasis lahan; 3.Dukungan dalam penegakan hukum; 4.Pemetaan hutan adat dan pengembangan kapasitas untuk masyarakat adat; 5.Pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 6. Desa hijau; 7.Sekolah hijau; 8.Dukungan untuk perencanaan tata ruang; 9.Dukungan untuk resolusi konflik; 10.Program strategis penyelamatan Taman Nasional dan Hutan Lindung.

BPREDD 2015

064 Pendampingan dalam Penyusunan dan Implementasi Penelaahan Data Multipihak dan Proses Persetujuannya

Laporan berisi acuan untuk penyusunan rencana aksi pelibatan pemangku kepentingan kunci dalam kegiatan penelaahan data, penilaian kapasitas lembaga dan individu dalam pengelolaan data, penyusunan program pengembangan kapasitas (baik jangka panjang dan pendek) untuk mengatasi kesenjangan kapasitas dan penyusunan pelatihan pengelolaan data dan program pengembangan kapasitas untuk pemangku kepentingan kunci di provinsi Sumatera Barat.

Waindo SpecTerra 2015
UNDP, Norwegian Embassy

065 Materi Pelatihan Konsep Dasar Modeling dalam GIS Materi Pelatihan Pengelolaan WebGIS

Penyusunan Bahan Pelatihan yang Disesuaikan dengan Kebutuhan dan Kondisi di Provinsi Sumatera Barat. Laporan berisi Dokumen berisi materi pelatihan Konsep Dasar dan Modeling dalam GIS yang terdiri dari empatmodul. Modul 1 berisi materi Konsep Dasar GIS, Sistem Koordinat, dan Georeferensi. Modul 2berisi materi Input Data dan Query Data. Modul 3 berisi materi Kartografi Digital, PengantarGeodatabase, dan Geoprocessing Tools. Modul 3 berisi Analisa Spasial yaitu PerhitunganDeforestasi dan Degradasi Hutan. Materi pelatihan disusun agar dapat digunakan sebagaibahan belajar mandiri. Contoh kode dan hasilnya diberikan secara berdampingan agar dapatdiketahui hasil dari suatu kode.

Waindo SpecTerra 2015
UNDP, Norwegian Embassy

066 Identifikasi dan Klasifikasi Data yang Diperlukan dan Tersedia untuk Implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat

Laporan berisi hasil identifikasi kebutuhan data untuk implementasi SRAP REDD+ Kalimantan Barat. Selanjutnya laporan kegiatan ini akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan klasifikasi data berdasarkan taksonominya dan inventarisasi ketersediaan data di pemangku kepentingan kunci

Waindo SpecTerra 2015
UNDP, Norwegian Embassy

067 Pendampingan dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Kajian Data Para Pemangku Kepentingan serta Proses Persetujuannya. Daftar Para Pemangku Kepentingan dan Proyek/Program yang Relevan dengan REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat

Dokumen ini melaporkan kegiatan yang dilakukan dalam "Pendampingan Pengembangan dan Implementasi Kajian Data dan Proses Pendukungan dari Para Pemangku Kepentingan" dan "Membuat daftar para pemangku kepentingan dan proyek/program yang relevan terhadap REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat". Kegiatan ini merupakan salah satu dari tiga aktivitas lain yang bersama-sama memulai kegiatan seluruh proyek. Kegiatan ini terkait erat dengan pemangku kepentingan terkait data yang diperlukan untuk implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil aktivitas ini akan diacu oleh 2 aktivitas lain membahas mengenai ketersediaan data di Provinsi Kalimantan Barat dan rencana aksi keterlibatan para pemangku kepentingan terkait data spasial.

Waindo SpecTerra 2015
UNDP, Norwegian Embassy

068 Penilaian Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dan Individu dalam Pengelolaan Data dan Perancangan Proses Pengembangan Kapasitas yang diperlukan

Laporan berisi bangaimana merancang dan mempersiapkan program-program peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan, terutama mereka yang terlibat di dalam Jaringan Data Spasial Provinsi Kalimantan Barat. Program pengembangan dan penguatan kapasitas bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat sangat penting demi efektivitas, berkelanjutan peran, dan kontribusi aktif mereka dalam pengembangan maupun penggunaan data dasar REDD+. Menyajikan rancangan dan persiapaan program jangka pendek dan jangka panjang dalam pengembangan kapasitas untuk mengatasi kesenjangan di tingkat kabupaten dan provinsi. Keluaran pekerjaan ini adalah dokumen rancangan program pengembangan kapasitas yang dihasilkan melalui proses partisipatif dan kolaboratif.

Waindo SpecTerra 2015
UNDP, Norwegian Embassy

069 Identifikasi dan Klasifikasi Kebutuhan Data untuk Implementasi REDD+ di Provinsi Papua Barat.

Berbagai data spasial dan statistik diperlukan untuk efektifitas implementasi REDD+di Provinsi Papua. Data ini dapat membantu para pembuat kebijakan untukmengembangkan skenario bisnis-seperti-biasa, menentukan besaran cadangan karbon,mengembangkan kebijakan untuk menghindari deforestasi dan degradasi lahan,mengembangkan kebijakan yang akan mengurangi emisi karbon, menghitung biayapeluang (opportunity cost), mengembangkan skenario tingkat emisi referensi danmemantau dampak kebijakan REDD+ terhadap hutan.Laporan ini menyediakan informasi tentang data tertentu, yaitu sebanyak 90 tema,yang dibutuhkan untuk implementasi REDD+ di Provinsi Papua dan menyediakaninformasi tentang kenapa informasi ini penting dan signifikan. Sistem klasifikasi(taksonomi) data REDD+.

Sekala 2015
UNDP, Norwegian Embassy

070 Manajemen/Informasi Eksekutif untuk Implementasi REDD+ di Provinsi Papua

Data yang akurat dan lengkap tentang tata guna lahan, perubahan penggunaan lahan, dan rencana penggunaan lahan adalah dasar prasyarat untuk perencanaan tata ruang yang baik dan untuk merencanakan intervensi REDD+. Laporan ini menyajikan: Analisis data yang dikumpulkan untuk provinsi Papua dan Manajemen / informasi eksekutif untuk pelaksanaan REDD+

Sekala 2015
UNDP, Norwegian Embassy

071 Hasil Kegiatan /Prestasi yang Dicapai Untuk Mengaktifkan Proses Berbagi Data dengan Para Pihak di Provinsi Papua.

Laporan ini memberikan rincian tentang informasi yang dibagi dengan berbagai pemangku kepentingan di Papua dan metode yang digunakan di mana data ini dibagi. Semua data yang dikumpulkan untuk proyek ini telah dibagi dengan mayoritas pemangku kepentingan yang relevan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten pada saat lokakarya dan pertemuan. Data peta masyarakat juga telah dibagi dengan organisasi-organisasi yang mewakili para pemangku kepentingan. Data yang dikumpulkan untuk proyek ini juga dapat diminta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau dari BIG.

Sekala 2015
UNDP, Norwegian Embassy

072 Aksi/Capaian dalam Upaya Meningkatkan Pelembagaan Pengelolaan Data di Provinsi Papua.

Laporan ini mencakup informasi mengenai bukti-bukti kegiatan/pencapaian yang telah dilakukan oleh SEKALA dalam meningkatkan pelembagaan pengelolaan data di Provinsi Papua. Laporan ini merupakan salah satu dari serial laporan yang merupakan hasil kegiatan dan dibuat SEKALA untuk Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Satuan Tugas Pembangunan Rendah Karbon Provinsi

Papua, dan Pemerintah Pusat dalam proyek “Penyediaan Data Dasar dan Peta Kadastral untuk Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia”.

Sekala 2015
UNDP, Norwegian Embassy

073 Pengkajian Kapasitas Kelembagaan dan Staf Yang Diperlukan Untuk Pengelolaan Data di Provinsi Papua.

Laporan ini merupakan salah satu dari serangkaian laporan dan hasil kegiatan lainnyayang dibuat oleh SEKALA untuk UNDP, Satuan tugas untuk Pembangunan Rendah Emisi Karbon di Papua dan Pemerintah Provinsi Papua di bawah proyek "Penyediaan Data Dasar dan Peta Kadastral untuk Provinsi Papua dan Papua Barat (Lot 5) diIndonesia ". Laporan ini menjelaskan bagaimana proyek akan memastikan bahwa pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam pengelolaan data terlibat secara efektif dan efisien dalam proyek. Kelompok-kelompok kunci meliputi instansi pemerintah provinsi dan kabupaten terkait serta organisasi non-pemerintah internasional, nasional dan lokal atau organisasi penelitian yang berperan dalam pengelolaan data di provinsi ini.

Sekala 2015
UNDP, Norwegian Embassy

074 Identifikasi dan Klasifikasi Data yang Dibutuhkan dan Tersedia untuk Implementasi REDD+ di Provinsi Analisa Kebutuhanan data untuk implementasi REDD+ di Provinsi Sumatera Barat

Laporan berisi hasil identifikasi kebutuhan data untuk implementasi SRAP REDD+ Sumatera Barat. Selanjutnya laporan kegiatan a ini akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan klasifikasi data berdasarkan taksonominya dan inventarisasi ketersediaan data di pemangku kepentingan kunci serta Pengumpulan, editing, dan analisa data.

Waindo SpecTerra 2015
UNDP, Norwegian Embassy

075 Proses Sistem Pengelolaan Informasi / Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengelolaan Data di Provinsi Papua

Laporan ini mencakup : Laporan SPI/TIK saat ini dan proses yang digunakan untuk mengelola data di provinsi ini, termasuk rekomendasi mengenai SPI yang paling layak dan proses untuk mendukung dan membangun" Dan "Rencana Kegiatan untuk pengembangan SPI lebih lanjut dan proses untuk mengelola data di Provinsi, khususnya pemetaan masyarakat/partisipatif. Rencana kegiatan disahkan oleh Badan Pengelola REDD+".

Sekala 2015
UNDP, Norwegian Embassy

076 Proses Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi / Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pengelolaan Data di Provinsi Papua

Kapasitas Sistem Pengelolaan Informasi (SPI) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara keseluruhan sangat rendah, terutama di kabupaten yang baru terbentuk, seperti Boven Digoel, Asmat, dan Keerom. Adanya keterbatasan listrik dan internet merupakan tantangan yang penting dipertimbangkan untuk pengembangan SPI / TIK di provinsi ini. Pelatihan GIS, penginderaan jauh dan pengelolaan basis data keruangan sangat diperlukan untuk membangun kapasitas pejabat pemerintah dalam mengelola data yang relevan di kantor BAPPEDA kabupaten dan provinsi.

Sekala 2015
UNDP, Norwegian Embassy

078 Pengelolaan dan Berbagi Data REDD+ di Papua.

Pengelolaan data spasial merupakan tanggung jawab teknisi yang telah ditunjuk atau diberikan mandat oleh institusi. Para teknisi ini tidak bisa melakukannya sendiri tanpa adanya perangkat pendukung seperti panduan, peralatan, infrastruktur dan staf pendukung yang dapat membantu dalam melakukan tugas-tugas pengelolaan data tersebut. Membangun peran dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat merupakan kunci sukses dari pengelolaan dan berbagi data. Informasi yang disediakan dalam dokumen ini akan memandu staf teknis institusi yang akan mengelola data dan melakukan sharing terhadap data yang telah dikumpulkan dalam rangka proyek ini.

Sekala 2015
UNDP, Norwegian Embassy

089 Matrik Indikator PGA dalam Implementasi REDD+ di Indonesia Berdasarkan Kategori Isu

Isu yang dimaksud dalam matrik ini adalah 1) Perencanaan wilayah dan kehutan yang berkelanjutan, berkeadilan dan tidak rentan korupsi; 2) pengaturan hak yang berkelanjutan, berkeadilan dan tidak rentan korupsi; 3) pengorganisasian yang akuntabel dan mampu mewujudkan pengelolaan hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan, berkeadilan dan tidak rentan korupsi; 4 Pengelolaan hutan termasuk isu tata hutan, pemanfaatan, perlindungan, konservasi dan pengawasan yang berkelanjutan, berkeadilan dan tidak rentan korupsi; 5) pengendalian dan penegakan hokum dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan, berkeadilan dan tidak rentan korupsi; 6) Infrastruktur REDD+.

UN REDD 2012

090 Matrik Indikator PGA dalam Implementasi REDD+ di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Isu yang dimaksud dalam matrik PGA berdasar prinsip-prinsip tata kelola diantaranya adalah: 1) Partisipasi; 2) Akuntabilitas; 3) transaransi; 4) kapasitas; 5) efektivitas; 6) equity. Partisispasi disini adalah jaminan keterlibatan kelompok-kelompok di masyarakat dalam proses dan pelaksanaan satu kegiatan atau kebijakan yang akan berdampak buruk terhadap masyarakat. Partisipasi

disini juga termasuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil agar keterlibatan kelompok rentan dan terpinggirkan menjadi berarti. Akuntablitas disini adalah setiap kegiatan, kebijakan, keputusan dan hasil akhir dari satu kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat atau kepada konstituennya. Akutanbiltas disini juga termasuk penyedian penanganan pengaduan dan penyedian konflik. Transparansi disini adalah setiap kegiatan, kebijakan, keputusan dan hasil akhir dari setiap kegiatan terutama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Transparansi disini juga termasuk upaya yang dilakukan oleh kelompok- kelompok non negara untuk memastikan adanya keterbukaan dari Negara dan aturan internal di lembaga-lembaga non Negara yang mempraktekan prinsip-prinsip keterbukaan. Kapasitas disini adalah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga Negara dan non Negara untuk meningkatkan kemampuan aparat negara dan masyarakat agar tata kelola hutan yang baik dapat terwujud. Efektivitas disini adalah keberhasilan terhadap rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disini termasuk aturan yang memastikan tujuan tersebut dapat tercapai seperti yang direncanakan. Equity disini adalah jaminan Negara yang diberikan kepada kelompok-kelompok non Negara terutama masyarakat lokal dan adat untuk mendapatkan pengakuan, distribusi, perlindungan dan kepastian terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.

UN REDD 2012

097 Implementasi Mekanisme REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah

Di tingkat provinsi, UN-REDD Programme Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Institusi di Sulawesi Tengah yang menjadi pusat kegiatan (focal point) UN-REDD Programme Indonesia adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan penunjukkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah.Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi REDD+ yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 522/84/DISHUTDA-G.ST/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.Di tahun 2011 ini, Pokja REDD+ Sulteng bekerja sama dengan program UN-REDD Programme Indonesia untuk melaksanakan rencana kerjanya. Pada saat ini Pokja tersebut sedang mengembangkan draf Strategi Daerah (Strada) implementasi REDD+, menyusun kriteria pemilihan lokasi aktivitas percontohan, pelatihan penginderaan jauh (remote sensing), berikut metodologi pengukuran, serta mekanisme konsultasi dengan masyarakat (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan atau Free, Prior and Informed Consent). Kegiatan untuk tingkat kabupaten di Sulteng sedang dipersiapkan untuk segara mulai dilaksanakan.

Ditjen Planologi. Dinas kehutanan Prov. Sulteng, 2012
FAO, UNDP, UNEP UNREDD

099 Laporan Pertemuan Indonesia 11 Pertemuan Para Pihak Untuk Konsultasi Dan Konsolidasi Rencana Implementasi REDD+ Di 11 Provinsi

Pertemuan Indonesia 11 ini, diselenggarakan di Jakarta 2-3 April 2014. untuk memperkenalkan BP REDD+ secara komprehensif serta melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan 11 provinsi untuk memantapkan persiapan pelaksanaan

program REDD+ di daerah masing-masing. Lebih dari 170 peserta dari 11 provinsi dan 29 kabupaten yang kaya sumber daya hutan dan lahan gambut, 8 Bupati dari Provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Sulawesi Tengah, serta 30 LSM duduk bersama menyatukan langkah untuk melaksanaan REDD+ secara konkrit. Pertemuan Indonesia 11 ini juga menjadi ajang untuk menyamakan persepsi bahwa program REDD+ adalah benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara. Laporan ini merangkum seluruh proses konsolidasi dan pengintegrasian tematik melalui diskusi-diskusi bernas dan terarah. Seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif dalam empat kelompok diskusi berdasarkan tema-tema penting seperti kelembagaan, pendanaan, REL/MRV, hukum dan moratorium, program strategis dan pengembangannya, pelibatan para pihak, PRISAI, dan registry. Agar lebih kontekstual, seluruh peserta Pertemuan Indonesia 11 juga difasilitasi dalam diskusi yang terbagi dalam kelompok-kelompok provinsi. Semua diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan dan usulan penting menyangkut implementasi REDD+ di setiap provinsi. Diskusi juga merumuskan rekomendasi-rekomendasi penting yang akan menjadi titik tolak komitmen dan realisasi pelaksanaan REDD+ di setiap provinsi.

BP REDD+ 2014

110 Buku Kumpulan Peraturan Penegakan Hukum Terpadu dengan Pendekatan Multi-Door dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di atas Hutan dan Lahan Gambut

Buku ini memuat 9 UU dalam upaya penegakan hukum untuk penangan perkaran tindak pidana SDA-LH yaitu 1. UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan 3. UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. UU No. 18/2004 tentang Perkebunan 5. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang 6. UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 7. UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 8. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejaksaan RI, MA, Kepolisian negara dan Satgas REDD+ 2012

112 Pengembangan Model Pertanian Terpadu Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Berisi laporan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat di wilayah kegiatan dalam upaya untuk mengurangi emisi dan deforestasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan dilakukan pada 2 lokasi yaitu : (1) Membangun model pertanian terpadu seluas 2 ha di Desa Henda, Keamatan Jabiren Raya Dan (2) Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan petani di Desa Henda, Desa Garung dan Desa Saka Kajang Kecamatan Jabiren Raya.

Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. 2013
UNDP

113 Program pengembangan Budidaya Perikanan keramba dan karet berbasis kearifan lokal pada kawasan program lahan Gambut.

Laporan Final. Berisi laporan pelaksanaan kegiatan di 5 desa/kelurahan Kabupaten Kapuas dan Kota Palangka Raya dan pelaporan kegiatan di setiap desa beserta tahapan pelaksanaan pengembangan mata pencaharian bagi masyarakat melalui bantuan bibit dan sarana prasarana produksi pertanian.

JARI indonesia 2013.
UNDP

114 Program pengembangan Budidaya Perikanan keramba dan karet berbasis kearifan lokal pada kawasan program lahan Gambut.

Berisi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di 5 desa/kelurahan Kabupaten Kapuas dan Kota Palangka Raya dan pelaporan kegiatan di setiap desa beserta tahapan pelaksanaan pengembangan mata pencaharian bagi masyarakat melalui bantuan bibit dan sarana prasarana produksi pertanian

JARI indonesia 2013.
UNDP

115 Green Livelihood Access for Central Kalimantan's Inclusive Environmental Response to Climate Change (GLACIER)

Quarterly Report Draft April – June 2013. UNDP dan Stgas REDD+. GLACIER's project design and implementation are on the right track, and inline with the mentioned strategies. The three project components play different roles in combating deforestation, forest and peat land degradation, which is an important part of REDD+. Component one of the GLACIER project directly tackles deforestation drivers by establishing a system of community fire management, setting up an agroforestry model and assessing the impact of blocking the canals and tatas where these activities will provide lessons in how to engage local people in REDD+ in the future. Furthermore, the findings on the impact of blocking the canals and tatas will enable people to prioritise peat-land/forest rehabilitation areas. Components two and three are part of the REDD+ programme strategy that help to improve the local socio-economic situation through providing alternative livelihood options that will have no negative effects on existing carbon stocks. The success of these alternative livelihood options will help to show local people that there is another way of development that does not harm the environment.

ILO Country Office for Indonesia and Timor-Leste 2013
UNDP, Satgas REDD+

116 Green Livelihood Access for Central Kalimantan's Inclusive Environmental Response to Climate Change (GLACIER) Quarterly Report Draft January – March 2013

Project decided to combine both the community proposals with result of an expert assessment on the peat land revitalization and rehabilitation and introduce some selected peat land interventions to model pilot interventions.

The labour market is quite tight for experts on tropical peatland and finding expert with time to support the project was a challenge. In addition, while there are many projects on peat land, there is an absence of collaboration and data sharing with other projects and programmes.

ILO Country Office for Indonesia and Timor-Leste 2013
UNDP, Satgas REDD+

117 Green Livelihood Access for Central Kalimantan's Inclusive Environmental Response to Climate Change (GLACIER) Quarterly Report Draft July – September 2013

In this reporting periode the project also carried out a knowledge sharing workshop at province level held on the 19 September 2013. An independent facilitator and 4 co-facilitators from Lembaga Dayak Panarung (LDP), a local NGO, facilitated the workshop process that was attended by 67 persons who we representatives of the five target villages, relevant government agencies from province and districts the REDD+ Interim Working Team (Jakarta), Ministry of Manpower and Transmigration, disstrict and provincial PNPM, ILO Country Office and UNORCID. The workshop identified good practices, lessons-to-be-learnt, relevancy of the practices with the REDD+ national strategy, in particular for 1) conservation and rehabilitation; 2) sustainable landscape management 3) sustainable lihoods; and 4) local community and stakeholder engagement and inclusion

ILO Country Office for Indonesia and Timor-Leste 2013
UNDP, Satgas REDD+

118 Penyediaan Akses Modal Guna Penguatan Sosio Ekonomi, Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan bagi Para Penduduk di Wilayah Eks PLG Desa Manusup Hiiir, Tarantang, Lamunti, Pu!au Kaladan, Kalumpang dan Katimpun Periode dari 23 Juli -10 September 2012

Laporan perkembangan proyek yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan Sosialisasi awal ini diiaksanakan di 6 (enam) kampung dim ana proyek akan diimplementasikan yaitu di Desa Manusup Hilir, Tarantang Lamunti, Pulau Kaladan, Kalumpang dan Katimpun. Sebanyak 6 orang berangkat dari Palangka Raya pada tanggal 11 Agustus 2012, yaitu: Marchony, Mastuati, Rokhmond Onasis, Karolina Pratiwi, Tevitius dan Andri Saputra.

Lembaga Dayak Panarung (LDP) 2012.
UNDP, Satgas REDD+

119 Providing Capital Access for Socio-Economic Strengthening of Villagers and Sustainable Entrepreneurship Development in Ex-Mega Rice Project Area in Central Kalimantan

Laporan perkembangan proyek yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan pelatihan menciptakan ide usaha di 4 kampung yang belum terlaksana pada tahap sebelumnya yaitu di Desa Manusup Hilir, Tarantang Lamunti, Pulau Kaladan,

Kalumpang dan Katimpun dan kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan selama periode September- Desember 2012.

Lembaga Dayak Panarung (LDP) 2012.
UNDP, Satgas REDD+

120 Restorasi Hidrologi Dan Pelestarian Kearifan Lokal Pada Wilayah Rawan Kebakaran Lahan DI Kecamatan Kapuas Murung Di Kabupaten Kapuas.

Berisi laporan perkembangan kegiatan periode Nopember 2012-Januari 2013 Aktivitas yang dilaksanakan dalam periode ini terbagi menjadi tiga yaitu: (1) sosiolisasi, (2) pembentukan pokmas,(3), survey don pemetaan

Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Dan Otonomi Daerah (P3WOD)
Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya 2013.

121 Providing Capital Access for Socio-Economic Strengthening of Villagers and Sustainable Entrepreneurship Development in Ex-Mega Rice Project Area in Central Kalimantan

Laporan berisi perkembangan kegiatan selama periode Desember 2012 – Februari 2013 berupa pelatihan managmen usaha dan kecerdasan finansial di 3 desa.

Lembaga Dayak Panarung (LDP) 2012.
UNDP, Satgas REDD+

122 Penyediaan Akses Modal Guna Penguatan Sosio Ekonomi, Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan bagi Para Penduduk di Wilayah Eks PLG Desa Pulau Kaladan

Laporan hasil diskusi terfokus yang dilaksanakan di Dea Pulau Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas. Focus Group Diskusi (FGD) ini diadakan di desa Pulau Kaladan bertujuan untuk mencari atau mengidentifikas! sumber-sumber pendapatan dan masalah-masalah apa saja yang dihadapi masyarakat desa Pulau Kaladan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Lembaga Dayak Panarung (LDP) 2012.
UNDP, Satgas REDD+

123 Penyediaan Akses Modal Guna Penguatan Sosio Ekonomi, Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan bagi Para Penduduk di Wilayah Eks PLG Desa Katimpun

Laporan hasil diskusi terfokus yang dilaksanakanpada tanggal 28-30 Agustud 2012 di Desa Katimpun Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas. Focus Group Diskusi (FGD) ini diadakan di desa Pulau Kaladan bertujuan untuk mengidentifikasi sumber pendapatan masyarakat desa Katimpun, sosiaiisasi FPIC dan menyampaikan rencana program pembentukkan KUB serta rencana pelaksanaan pendidikan/ pelatihan kewirausahaan sebagai prasyarat da!am tahapan pemilihan keanggotaan KUB

Lembaga Dayak Panarung (LDP) 2012.

UNDP, Satgas REDD+

124 Penyediaan Akses Modal Guna Penguatan Sosio Ekonomi, Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan bagi Para Penduduk di Wilayah Eks PLG Desa Manusup Hilir

Laporan hasil diskusi terfokus yang dilaksanakanpada tanggal 28 Agustus 2012 di Manusup Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas. Focus Group Diskusi (FGD) ini diadakan di desa Pulau Kaladan bertujuan untuk mengidentifikasi sumber pendapatan masyarakat desa Katimpun, sosiaiisasi FPIC dan menyampaikan rencana program pembentukkan KUB serta rencana pelaksanaan pendidikan/ pelatihan kewirausahaan sebagai prasyarat da!am tahapan pemilihan keanggotaan KUB

Lembaga Dayak Panarung (LDP) 2012.
UNDP, Satgas REDD+

125 Dokumen Pendukung Progress Financial Report tahap II Kegiatan Khusus REDD+ di di daerah Eks PLG Pengembangan Teknologi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan berbasis perkebuan karet rakyat dan integrasi tanaman sela di Desa Jabiren kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulau Pisang Kalteng

Berisi TOR kegatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah kegiatan khusus REDD+ di daerah Eks PLG Pengembangan Teknologi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan berbasis perkebuan karet rakyat dan integrasi tanaman sela di Desa Jabiren kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulau Pisang Kalteng meliputi 6 kegiatan yaitu 1) Penanaman Nanas; 2) pemetaan lokasi survey pemetaan lahan gambut dan survey lanjutan; 3) pengukuran Piezometer Nanas; 4) Pengukuran GRK melalui penyiapan GC Mobile (reinstalansi varian 490 GC); 5) pengukuran agronomis tanaman karet dan nanas; dan 6) pembuatan pintu air sederhana

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah. 2013
UNDP, Satgas REDD+

126 Dokumen Pendukung Progress Financial Report tahap III Kegiatan Khusus REDD+ di di daerah Eks PLG Pengembangan Teknologi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan berbasis perkebuan karet rakyat dan integrasi tanaman sela di Desa Jabiren kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulau Pisang Kalteng

Berisi laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah, kegiatan khusus REDD+ di daerah Eks PLG Pengembangan Teknologi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan berbasis perkebuan karet rakyat dan integrasi tanaman sela di Desa Jabiren kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulau Pisang Kalteng meliputi kegiatan yaitu 1) Seminar hasil; 2) temu lapang dan umpan balik kegiatan khusus REDD+ di daerah Eks PLG Pengembangan Teknologi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan berbasis perkebuan karet rakyat dan integrasi tanaman sela di Desa Jabiren kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulau Pisang; 3) pembuatan 2 pintu air sederhana oleh kelompok tanu panenga.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah. 2013
UNDP, Satgas REDD+

127 Laporan Teknis kegiatan tahap I, II, III

Berisi laporan kegiatan teknis tahap I, II dan III yaitu pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan musyawarah desa dan pelatihan anyaman rotan di Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulau Pisang

Balai kerjasama Antar Desa (BKAD) 2013.
UNDP, Satgas REDD+

160 Pedoman untuk mempelajari berbagai dampak proyek REDD+ bagi mata pencarian

Pedoman ini digunakan untuk memahami dampak proyek-proyek REDD+ angkatan pertama bagi mata pencarian. Proyek-proyek ini direncanakandan didanai oleh sejumlah pihak yang bertujuanuntuk melaksanakan serangkaian kegiatan untukmengurangi deforestasi dan degradasi hutan,untuk memajukan konservasi dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan untuk menambah cadangan karbon hutan.

Jagger P., Sills E.O., Lawlor, K. dan Sunderlin, W.D. 2011
CIFOR

177 Laporan Pelatihan Pembuatan Persemaian Dan Pembibitan Tanaman Hutan Lahan Gambut Desa Garong, Kecamatan Jabiren, Kab Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan pelatihan di selenggarakan pada tanggal 18-20 Mei 2016. Pelatihan pembuatan persemaian dan pembibitan tanaman hutan rawa gambut memiliki tujuan utama sebagai berikut: 1) Mengenal fungsi dan peran persemaian dalam revegetasi 2) Mampu membuat persemaian dalam mengoperasikannya dalam kegiatan pembibitan 3) Mengetahui teknik-teknik penyiapan bibit tanaman hutan rawa gambut dan 4) Mampu melakukan kegiatan pembibitan melalui benih, anakan aam dan vegetatif

Badan Restorasi Gambut (BRG) & UNDP 2016.

186 Scientific Evidence Dalam Perkara Kerusakan Lingkungan Hidup (Perusakan Akibat Pertambangan)

PEMBUKTIAN ILMIAH : 1.INDUKSI, Induksi diawali dengan pengamatan dan menghasilkan teori atau kesimpulan dampak yang teruji; dan 2.DEDUKSI, Deduksi diawali dengan teori (hipotesis) lalu menghasilkan pengamatan (peramalan) atau pembuktian.

Basuki Wasis 2012.

206 Di Balik Layar Menuju Sekolah Indonesia

Konsep ESD selaiknya merujuk pada apa yang dikenal dengan Kompas Atkisson dimana kita diajak untuk melihat keseimbangan empat hal penting, yaitu lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Dengan pembelajaran dan pemahaman yang baik, maka ESD akan menjadi salah satu sarana yang akan

membawa perubahan paradigma dan budaya kerja. Hal ini hanya dapat berjalan jika ada edukasi publik yang dijalankan secara luas dan sistematis. Salah satu caranya adalah kampanye publik, program pendidikan di sekolah formal, program pelatihan di masyarakat serta pelatihan untuk kaum profesional. Buku yang terdiri dari 6 bab yang berisi tentang REDD+ berbagi cerita tentang hutan yang ada di Kalimantan Tengah, permainan tentang lingkungan, aksi untuk menjaga lingkungan dan metode-metode pembelajaran yang menarik dalam upaya pelestarian lingkungan.

Aulia Wijiasih Reksoatmojo, Ardanti Andiarti. Editor: Leo Wahyudi S 2013. Pertamina Foundation, Pertamina Sekolah sobat bumi Satgas REDD+

222 Laporan Implementasi REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemda Sulteng) telah menyatakan tekad mendukung komitmen global pemerintah Indonesia menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (Green House Gas/GRK) dengan mencanangkan kontribusi sebesar 3,5% dari proyeksi angka penurunan 26% secara Nasional pada tahun 2020. Hingga bulan April 2015, masih berjalan dua bentuk kegiatan sebagai bagian dari implementasi REDD+, yakni kegiatan Pengembangan dan Penyempurnaan Data Dasar dan Peta Kadastral Provinsi (Cadastral Mapping and Baseline Development) dan kegiatan Pemberdayaan Sumberdaya Alam melalui Penguatan Masyarakat Hukum Adat (BERSAMA). Kedua kegiatan ini merupakan inisiatif dari Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+) sebagai bagian dari kerjasama untuk mempersiapkan kelembagaan sub-nasional dalam rangka implementasi REDD+, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Pusat yang diwakili oleh BP REDD+ dengan Pemda Sulteng.

UNDP & BP REDD+ 2015

223 Tumbuh dengan REDD+: Memicu Keterlibatan Swasta dalam Paradigma Ekonomi Baru Indonesia

Dokumen Kajian ini bertujuan untuk menjadi bahan proses diskusi. Analisis dan kesimpulan yang dijabarkan merupakan pemikiran dari penulis yang selanjutnya akan diperkaya melalui proses peer review oleh komunitas riset, praktisi dan pemangku kebijakan sehingga hasil dari riset ini dapat melalui pemeriksaan teliti yang menyeluruh. potensi Indonesia terhadap investasi ramah-iklim ini menunjukkan bahwa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga lingkungan bisa berwujud sebagai sebuah upaya yang saling melengkapi. Di saat REDD+ memungkinkan kejelasan peraturan, invesasi dalam modal sumber daya manusia dan institusional, sektor swasta memiliki peran untuk membawa inovasi teknis dan investasi. Kesempatan untuk menghasilkan keuntungan melalui investasi pada REDD+ untuk mendukung baik pemerintahan yang baik maupun manajemen lingkungan yang berkesinambungan- untuk kebaikan umum, meningkatkan produktifitas lahan dan tenaga kerja, melakukan inkubasi pada modul ecotourism yang inovatif, dan bermitra dengan pemimpin masyarakat yang tampil untuk melayani dan memperkuat masyarakat pedesaan pada skala besar — hanyalah beberapa dari banyaknya saluran untuk melakukan investasi pada ekonomi baru yang ramah iklim di Indonesia.

Agus P. Sari. 2014.

225 Pedoman Teknis Sistem Manajemen Informasi Energi Dan Emisi (SMIEE) Dalam Implementasi Konservasi Energi Dan Pengurangan Emisi Co2 Di Sektor Industri (Fase 1).

Pedoman Teknis ini disusun untuk meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan konservasi energi dan pengurangan emisi CO2 di sektor industri yang telahdibahas oleh unsur pemerintah, tenaga ahli dan praktisi.Diharapkan Pedoman Teknis ini bermanfaat bagipara pihak yang berkepentingan dalam menerapkankonservasi energi dan pengurangan emisi CO2.

BPKIMI- Kemenperin 2011

226 Submission By Indonesia National Forest Reference Emission Level For Deforestation And Forest Degradation In The Context Of The Activities Referred To In Decision 1/CP.16, PARAGRAPH 70 (REDD+) UNDER THE UNFCCC

The national FREL in this submission was developed by experts representing cross ministerial agencies and organizations through a "transparent scientific-based participatory process". The FREL construction covered area of 99.3 million ha 99 natural forests in 2000 or approximately 80 % of the total territory of forest areas and 52% of the total country land area. Two activities under decision 1/CP.16 paragraph 70 were included in FREL construction, namely: deforestation and forest degradation. Above ground biomass (AGB) and soil in peat land, and CO2 were the pools and gas included in FREL construction. The rationales of area, activities, pools and gases covered in the FREL construction are explained in the following chapters.

BPREDD+ 2014

229 Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim: Tarakan, Sumatera Selatan dan Malang Raya Ringkasan untuk pembuat kebijakan

Hasil kajian dilaksanakan Kota Tarakan, Provinsi Sumatera Selatan dan Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) menunjukkan empat sektor yang berpotensi rentan terhadap perubahan iklim yaitu sektor pesisir (termasuk didalamnya perikanan dan kelautan), sektor air (termasuk sumberdaya air dan bencana banji, longsor), pertanian dan kesehatan. Rekomendasi dari kajian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Tarakan, Provinsi Sumatera Selatan dan Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) melalui integrasi hasil kajian dalam RPJMD, RPJP maupun perangkat perencanaan lainnya.

KLH 2012.
GIZ, AusAID.

237 Modul Mengenal Masyarakat Peduli Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah.

Modul Mengenal Masyarakat Peduli Kebakaran Hutan dan Lahan, sebagai acuan bahan ajar Diklat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat hanya salah satu upaya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat

sehingga diharapkan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah akan terus berkurang tanpa mengorbankan kepentingan dan pola hidup masyarakat sendiri.

Sidik R. Usop, Mukti Aji Dan Edy Subahani. 2012.

284 Study Of Biodiversity In The Tripa Peat-Swamp Forest Scientific Studies For The Rehabilitation And Management Of The Tripa Peat-Swamp Forest.

Kawasan Hutan Rawa Gambut yang terletak di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten ABDYA telah mengalami kerusakan yang serius. Kerusakan tersebut disebabkan oleh (1). Pembukaan lahan hutan gambut oleh perusahaan yang berada disekitarnya, (2) Pembukaan lahan hutan Rawa Gambut oleh masyarakat untuk perkebunan sawit masyarakat dan (3) pembukaan lahan untuk perkebunan bukan sawit. Namun di sisi lain masih banyak dijumpai lahan hutan sekunder dan primer yang masih dihuni oleh satwa dan vegetasi hutan gambut sebagai habitatnya untuk berlindung dari gangguan yang dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat

Syiah Kuala University. 2013
Satgas REDD+ & UNDP

287 Socio-economic study concerning the communities living in the Tripa Peat-Swamp Forest

Studi Aspek Sosial Ekonomi yang penekananan pada mata pencaharian masyarakat di Kawasan Ekosistem Hutan Gambut Rawa Tripa. Hasil kajian ini menyatakan Keberadaaan lembaga lokal fungsional adat masih diharapkan masyarakat dalam upaya konservasi lahan Rawa Tripa, perlunya penguatan Pawang Uteun dan hukum adat hutan dalam upaya pelestarian dan konservasi hutan di kawasan Rawa Tripa. Sementara itu, lembaga yang dinilai responden ikut berperan terlibat dalam perbaikan hutan dilahan Rawa Tripa sebagian besarnya masih berasal dari lembaga lokal, seperti pawang uteun atau kelompok tani (64,39%) dan lembaga yang didirikan untuk pembangunan desa PNPM dan Lembaga Kepemudaan (20,55%). Sementara lembaga mitra dari luar yang dinilai ikut terlibat adalah Yayasan Ekosistem Leuser (YEL).

Syiah Kuala University. 2013
Satgas REDD+ & UNDP

288 Ekologi Rawa Dan Disain Teknis Rehabilitasi Tanaman Di Areal Hutan Gambut Rawa Tripa Provinsi Aceh.

Hasil kajian menyatakan bahwa Sebagian besar areal dalam Kawasan Hutan Gambut Rawa Tripa (TPSF) yang telahdikonversi menjadi lahan pertanian/perkebunan, sesuai (S2 hingga S3) untuktanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, kemiri, dan kopi robusta,serta hampir seluruh areal sangat sesuai (S1) untuk beberapa tanamankehutanan/konservasi seperti jabon, ramin, jelutung, jati, mahoni, astonia, beringinrawa, medang, kruing, cemara laut dan lain-lain. Sehingga perlu Pengaturan muka air tanah pada lahan gambut mencegah terjadinya perubahan yang ekstrim pada karakteristik biofisik lahan gambut di perkebunan kelapa sawit. Rekomendasi upaya untuk mengatur muka air Perlu dilakukan penghambatan aliran dalam saluran drainase yang telah

dibuat pada areal perkebunan (blocking canal) untuk menjaga agar kedalaman air tanah tidak menjadi terlalu dalam, terutama untuk menghindari kebakaran bahan gambut serta menghambat proses emisi karbon yang berlebihan.

Syiah Kuala University. 2013
Satgas REDD+ & UNDP

289 Laporan kanal Blocking

Rawa Tripa merupakan rawa lebak yaitu rawa yang tidak dipengaruhi oleh aliran akibat pasang surut air laut yang berarti aliran air hanya bergerak kesatu arah dari hulu ke hilir. Untuk kondisi yang demikian maka konstruksi bangunan air yang cocok dan layak untuk dibangun adalah bangunan pelimpah baik pelimpah ambang tipis maupun pelimpah ambang lebar. Pintu apung otomatis dapat juga dibangun pada kondisi ini apabila memang layak ditinjau dari ketersediaan dana pembangunannya. Material yang baik digunakan untuk konstruksi adalah yang terbuat dari fiber resin dimana materialnya ringan dan tahan korosi.

Syiah Kuala University. 2013
Satgas REDD+ & UNDP

290 Laporan Wetland Restoration Plan

Sistem tata air Rawa Tripa yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang berada di Rawa Tripaperlu segera diperbaiki. Hasil oberservasi lapangan menunjukkan bahwa drainage yang dibuatperusahaan-perusahaan HGU Kebun Kelapa Sawit belum memenuhi kaidah konservasi yangbaik sehingga menyebabkan terjadinya over drain (drainase berlebihan) yang menguras airgambut secara cepat. sistem tata air Rawa Tripa tersebut disarankan untuk direstorasi kembali dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : (1) Mendesain dan memodifikasi sistem kanal dan bangunan air agar kelebihan air dapat dibuang ke dalam keadaan air sungai/laut; (2) Mengatur keseimbangan air di lahan sesuai dengan kebutuhan yaitu membuang kelebihan air pada waktu hujan dan mempertahankan air yang dibutuhkan pada saat musim kemarau; dan (3) Penempatan dan pembangunan bangunan air yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan air di lahan sesuai dengan kebutuhan yaitu membuang kelebihan air pada waktu hujan dan mempertahankan air yang dibutuhkan pada saat musim kemarau.

Syiah Kuala University. 2013
Satgas REDD+ & UNDP

291 Cadangan Karbon Di Bawah Permukaan Tanah Di Ekosistem Hutan Gambut Rawa Tripa

Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata kedalaman gambut adalah 361,28 (SEM= 26,48) cm. Rata-rata kadar air dan berat isi tanah adalah 72,96% (±0,85) dan 0,174 g/cm3 (±0,07). Rata-rata kemasaman tanah adalah 6,02 (±0,16). Rata-rata konsentrasi karbon (C) dan nitrogen (N) adalah 29,36% (±0,91) dan 1,47% (±0,12). Rata-rata kerapatan karbon pada hutan primer (36,86±2,68 Mg/ha), kebun kelapa sawit/kebun campuran (39,33±2,04 Mg/ha), hutan sekunder (26,68±1,95 Mg/ha), dan Lahan bukaan (12,06±1,89). Total cadangan korbon di bawah permukaan tanah adalah 76.206.098 Mg. Total cadangan C di

bawah permukaan tanah pada hutan primer menurun 19.627.165 Mg, pada hutan sekunder C menurun 6.765.395 Mg, pada kebun kelapa sawit/kebun campuran/pertanian lahan kering meningkat 21,241,959 Mg, dan lahan terbuka meningkat 908.740 Mg dari tahun 2007 hingga 2013. Total cadangan C di bawah permukaan tanah yang hilang dari seluruh ekosistem EHGRT dari tahun 2007-2013 adalah 4,241,861. Hutan primer dan sekunder yang ada perlu dijaga dan dipertahankan karena umumnya berada pada kedalaman gambut >300cm mengingat cadangan karbon, keragaman hayati, serja jasa ekologi yang terkandung di dalamnya.

Syiah Kuala University. 2013
Satgas REDD+ & UNDP

292 Cadangan Karbon Di Atas Permukaan Tanah Di Ekosistem Hutan Gambut Rawa Tripa

Dari hasil kajian disimpulkan bahwa: 1) Stok karbon atas pemukaan total pada Tahun 2013 seluruh kawasan rawa gambut tripa mencapai 5.115.995,07 ton C. 2). Terjadi penurunan stok karbon atas permukaan dalam kurun waktu tahun 2006-2013 sebesar 6.254.643,40 ton C dari 11.370.638,47 ton C pada Tahun 2006 menjadi 5.115.995,07 ton C pada Tahun 2013. 3). Nilai emisi karbon di kawasan rawa gambut tripa dipengaruhi oleh parameter volumetric water contents, soil temperature, electric conductivity, water table, kedalaman gambut serta curah hujan. 4). Perkiraan total emisi yang terjadi pada tahun 2013 di seluruh kawasan Rawa Gambut Tripa mencapai 10.382.349,27 kg C atau 10.382,35 Ton C. Dari hasil kajian ini disarankan perlu dilakukan pengukuran secara realtime terhadap emisi CO2 pada Kawasan Rawa Gambut Tripa, untuk dapat memprediksi perkembangan dinamika CO2 yang lebih akurat.

Syiah Kuala University. 2013
Satgas REDD+ & UNDP

294 Modul Pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan

Modul terdiri dari 5 materi yaitu : 1) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Melalui Kuliah Kerja Nyata; 2) Perubahan Iklim dan Pemanasan Global; 3) Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut; 3) Pendekatan Biofisik Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut ;4) Aktifitas Pendampingan oleh Mahasiswa Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut; 5) Kearifan Lokal dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut; 6) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Menuju Pembangunan Rendah Emisi Konservasi dan restorasi lahan gambut dapat memberikan sumbangan besar terhadap mitigasi perubahan iklim. Peningkatan pedoman dan kapasitas untuk pelaporan emisi lahan gambut akan merupakan hal yang berharga bagi negosiasi yang tengah berlangsung untuk keberhasilan program REDD+. Namun demikian, untuk memperkirakan emisi CO2 dari lahan gambut, dan membuat kebijakan dalam lingkup nasional untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada gambut, definisi lahan gambut sangat penting. Hal ini akan menyamakan pemahaman yang kemudian akan memudahkan untuk menyatukan pandangan terhadap masalah yang terjadi yang berkaitan dengan lahan gambut di Provinsi Riau.

Haris Gunawan; Suwondo, Arifudin dan Ashaluddin Jalil 2013

301 Description Of Redd+ Relevant Data Available For Central Kalimantan Province By January 2012 Provision Of Baseline Data And Base Map Assessment For Central Kalimantan And Institutionalization Of An Integrated Cadastral Mapping And Survey System

Accurate and complete data on land use, land use change, and land use plans, is a basic prerequisite for planning REDD+ interventions. In Central Kalimantan, overlaps and discrepancies in land use classification, land allocations for concessions and business licenses, and customary uses by communities, have caused conflicts between communities, government and private sectors, to the detriment of regional development and local livelihoods. A first step towards resolving these problems is to compile the available data and make the overlaps and discrepancies explicit. This is one of the overall aims of the project being undertaken by PT Sekala for the President's Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight (UKP4) and REDD+ Regional Commissariat (Komda REDD+) Central Kalimantan.

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

302 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia Deliverable 1: Identification And Classification Of The Data Required And Available For Redd+ Implementation In The Province Task 1a: Analysis Of The Specific Data Required For Redd+ Implementation In Jambi Province.

This report contains the first step for REDD+ implementation activities. Prior defining data taxonomy and conducting data collection, specific data for REDD+ purposes should be defined. In relation with data requirement, preliminary list of stakeholder in Jambi Province in relation with REDD+ activities was identified, they are: 1) government/public sector, 2) civil society, 3) local communities/indigenous people and vulnerable group, 4) private sector, 5) general public and 6) external communities.

Hatfiled 2013
UNDP, Satgas REDD+

303 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia Deliverable 1: Identification And Classification Of The Data Required And Available For Redd+ Implementation In The Province. Task 1b: Defined Classification System (Taxonomy) For Data Approved By The Redd+ Taskforce

Proposed data categorization for REDD+ activities in Jambi Province divided into base map category and thematic category. Base map category refers to data that describes general condition in Jambi Province such as administrative boundary, roads, river and elevation. Thematic category refers to data that can be drivers for REDD+ or support the analysis of REDD+ activities. The important component of implementation and monitoring of these REDD activities is required the systematic long-term monitoring of forests and other land use for assessing and comparing the historical and future rates of deforestation and degradation.

Hatfiled 2013
UNDP, Satgas REDD+

304 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia. Deliverable 1: Identification And Classification Of The Data Required For Redd+ Implementation In Jambi Province Task 1c: Report Detailing The Availability Of Data, From Secondary Resources, Required For Redd+ Implementation In Jambi Province

Data requirements for REDD+ activities can be available through data custodian or secondary resources. PTHI defined data custodian as agencies/organizations/ institutions that have a mandate or authority for producing that data. The secondary resources are non-data custodians that produce data on a voluntary-base or as an alternative data source.

Hatfiled 2013
UNDP, Satgas REDD+

305 AVAILABLE DATA FOR REDD+ IMPLEMENTATION IN EAST KALIMANTAN PROVINCE Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for East Kalimantan, Indonesia

The report identifies 38 data themes, and, on the basis of information available at the time of writing, concludes that complete coverage of East Kalimantan is available for 24 of these themes, while for the rest the data is partial or in the form of site-specific cases. Multiple data sets are available for at least 28 of the data themes, and where this is the case the text indicates whether the project will select one source, or combine different sources.

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

306 Assistance In The Development And Implementation Of A Multistakeholder Data Review And Endorsement Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For East Kalimantan, Indonesia

Several of the stakeholder groups face obstacles to their effective engagement, primarily lack of background knowledge about REDD+, or difficulties in choosing representatives and finding the resources to participate (the latter applies particularly to indigenous and forest dependent communities). The report identifies potential obstacles for each group and proposes mitigating actions which can be taken by the project. In the case of indigenous and forest-dependent communities it is noted that large-scale engagement is not feasible ornecessary under this project, but that such engagement should be considered as part of the next steps for the development of REDD+ in East Kalimantan

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

307 Assessment Of Spatial Data Available For East Kalimantanprovision Of Baseline Data And Cadastral Maps For East Kalimantan, Indonesia

This report presents analysis of data that is available and relevant to the planning and implementation of REDD+ in East Kalimantan. It also provides a list of procured data (including data on customary and local community forest management) for this project (Appendix A). The paper reveals the following management/executive information which can assist with REDD+ planning and implementation.

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

308 Data Incompletenessand Inconsistenciesprovision Of Baseline Data And Cadastralmaps For East Kalimantan, Indonesia

This report provides information on data incompleteness and/or inconsistency between data available and data required for REDD+ implementation in East Kalimantan. It also provides information on the further steps taken by SEKALA to improve some of the identified data discrepancies and steps that still need to be undertaken to improve the completeness and consistency of available spatial data on East Kalimantan.

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

309 Improving Institutionalization Of Data Management In East Kalimantan Province Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For East Kalimantan, Indonesia.

Geospatial data that collected during this project has been improved it's discrepancies and inconsistency, and metadata has been provided. However, besides this geospatial data, JDSD will also need collaboration with partners to guarantee data access and sharing through development policy or data sharing protocol as one of legal basis of the establishment of the clearing house (institution).

Sekala 2013

UNDP, Satgas REDD+

310 Data Sharing And Endorsement Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for East Kalimantan, Indonesia

Data sharing has been done with data custodian, the key stakeholders who will approve the deliverable of the project and to other stakeholders (national and international). Sharing data with data custodian conducted during the verification process where the data custodian was shared the draft data to be verified. Sharing data with REDD+ Taskforce, Bappeda and DDPI of East Kalimantan, and BIG have been agreed to be part of deliverables of this project. SEKALA has shared draft of the baseline data with REDD+ Taskforce and Provincial Bappeda for review and comments. At the end of this project the baseline data will be shared to all of those institutions.

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

311 Pengelolaan Dan Berbagi Data Redd+ Di Kalimantan Timur Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For East Kalimantan, Indonesia

SOP ini memberikan informasi tentang prosedur pengelolaan dan berbagi data yang dikumpulkan untuk desain dan implementasi REDD+ di Kalimantan Timur. SOP ini merupakan dokumen yang tidak bisa dipisahkan dengan Laporan No. 1 tentang "Ketersediaan Data Dasar untuk REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur". Data spasial yang dikumpulkan sebagai hasil dari kegiatan "Provisi Data Dasar untuk REDD+ dan Pemetaan Kadastral di Kalimantan Timur" hingga akhir Juni 2013.

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

312 Baseline Data For Redd+ In Central Kalimantan Province Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System

In the decade between 2000 and 2011 Central Kalimantan lost between 800,000 and 900,000 ha of forest, 10% of the area that existed in 2000, or 1% per year. The rate of deforestation in the five years 2006-2011 was twice as fast as that during the period 2003 - 2006. This was caused by an increase in the rate of clearance of swamp forest after 2006. Average annual deforestation 2000-2011 on mineral soils (i.e. nonpeatland) was 51,000 ha per year, and on peatlands 39,000 ha per year. However, the smaller area of forest on peatlands means that this represents a deforestation rate on peatland of over 2% per year, almost three times faster than than on mineral soils (0.7 % per year)

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

314 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province. Deliverable 2: Processing And Analysis Of Data From The Jambi Province Task 2a: Compiled Currently Available Data For The Province As a Reference Document And Include Any Constraint/Lessons Encountered.

Some constraints during the process of data collection include: unavailability of data at the primary custodian institution, unwillingness to share the data, confidentiality issues, internal policy of the data custodian not to share the data, the data is still in the process of acquisition and therefore is in completed, old data and have not been updated with recent condition, data only available in an image format, and bureaucracy issues. Lessons that can be learned related to the constraints of spatial data acquisition REDD+ are gradual socialization that is well-planned is required to develop understanding among stakeholders, establishment of agreement among stakeholders is facilitated by using formal letters, although this can slow the process, and high level support is required in a letter from the provincial leadership (Governor) to make a formal request to the primary data custodian agencies in Indonesia such as the Ministry of Forestry

(MoF), Statistics Indonesia (BPS), and the National Agency for Geospatial Information (BIG).

Hatfiled 2013
UNDP, Satgas REDD+

315 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Identification And Classification Of The Data Required And Available For REDD+ Implementation In The Province Deliverable 1a: Analyse The Specific Data Required For REDD+ Implementation In The Province.

Analisis kebutuhan data dilakukan berdasarkan Strategi Nasional REDD+ dengan 8 aktivitas. Data yang diperlukan untuk implementasi REDD+ dikelompokkan menjadi: a) 5 data dasar, b) 11 data tematik, dan c) 3 citra. Jumlah keseluruhan data tidak tetap, karena data yang baru dapat diciptakan dari data dasar dan data tematik untuk setiap aktivitas.

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

316 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Identification and Classification of the Data Required and Available for REDD+ Implementation in the ProvinceDeliverable 1b: Develop a Classification System (taxonomy) for Data in Consultation with the REDD+ Taskforce.

Pembuatan sistem klasifikasi data yang digunakan untuk implementasi REDD+ di Provinsi Riau ini didasarkan pada data yang telah dianalisis dan dispesifikasikan pada task sebelumnya. Ada 75 data yang tersedia untuk proses klasifikasi. Proses klasifikasi dimulai dengan melihat pada struktur fisik data (kelas aras 1), kemudian dari format data (kelas aras 2), dari informasi data (kelas aras 3), dari klasifikasi terkait Undang-Undang No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (kelas aras 4), dan dari informasi data yang lebih rinci (kelas aras 5). Dari sistem klasifikasi yang terbentuk ini terdapat 75 data spasial. Skala atau tingkat ketelitian peta tidak ikut dalam proses klasifikasi karena ketelitian peta telah termasuk dalam data spasial tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang tersedia

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

317 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Identification and Classification of the Data Required and Available for REDD+ Implementation in the ProvinceDeliverable 1c: Identify the Availability of Data, from Secondary Resources, Required for REDD+ Implementation in the Province

Identifikasi ketersediaan data dari sumber sekunder dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yaitu membangun kesediaan para pihak (stakeholder) untuk memberikan informasi ketersediaan data di lembaganya. Untuk memastikan survey dapat berjalan dengan baik, proses pelibatan (engagement) para pihak (stakholder) dilakukan melalui beberapa tahapan dari mulai Identifikasi data yang diperlukan untuk pelaksanaan dalam REDD+ di Provinsi

Riau, identifikasi para pihak baik dari instansi pemerintahan ataupun non pemerintah yang berpotensi sebagai penyedia data tersebut, dan pelaksanaan inventarisasi dan pengumpulan data pihak melalui kunjungan kepada para pihak. Dari proses identifikasi dapat disimpulkan bahwa ketersediaan data untuk Provinsi Riau telah tersedia di instansi pemerintah pusat, Provinsi, dan kabupaten. Ketersediaan data tersebut di dominasi oleh skala 1: 250.000 yang bersumber dari instansi pemerintah pusat dan Provinsi

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

318 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Processing and Analysis of Data from the Province Deliverable 2a: Compile Currently Available Data for the Province as a Reference Document, and Include any Constraints/Lessons Encountered

Pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pada ketersediaan data dari instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Provinsi, dan instansi pemerintah Kabupaten yang menjadi wali data, setelah pengumpulan data tersebut selesai dilakukan disusunlah metadata spasial dan kompilasi dari data tersebut. Hasil kompilasi data-data tersebut yang disusun sebagai Album Peta yang kemudian dipaparkan kepada pemangku kepentingan di Provinsi Riau sebagai bagian dari konfirmasi terhadap kebenaran informasi yang disajikan pada data tersebut.

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

319 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Processing and Analysis of Data from the Province Deliverable 2b: Analyze Compiled Data for the Province and Generate Management/Executive Information for REDD+ Implementation

Data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah data penutup lahan Kementerian Kehutanan tahun 1990 – 2011, Data sebaran gambut yang di peroleh dari Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian Kementerian Pertanian, serta batas administrasi kabupaten yang di peroleh dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau. data tersebut kemudian dilakukan proses tumpang susun dan kemudian dilihat perubahan selama kurun waktu tahun 1990 – 2011. Berdasarkan data tersebut diketahui selama kurun waktu tahun 1990 – 2011 telah terjadi perubahan tutupan hutan sebesar 2.693.893, 98 Hektar. Salah satu factor yang mempengaruhi perubahan tutupan hutan tersebut adalah aktifitas perkebunan yang selama waktu tersebut meningkat sebanyak 1.316.006, 53 Hektar.

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

320 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Analysis of Incomplete and/or Inconsistent Data and Process Development for the Acquisition of Additional Data and/or Validation of Data Deliverable 3b: Prepare a Plan to Mitigate Data Incompleteness and/or Inconsistency and Design Process for Corrective Data Acquisition with Validation through Ground-truthing

Berdasarkan analisis konsistensi dan kelengkapan data yang telah disusun dalam laporan sebelumnya, di ketahui bahwa terdapat beberapa variasi batas administrasi, informasi toponimi yang masih belum dilengkapi seluruhnya karena adanya pembaharuan informasi, adanya variasi informasi penutup lahan yang berbeda-beda, Provinsi Riau masih menggunakan Tata Guna Hutan Kesepakatan Tahun 1986 yang kondisi sudah tidak relevan, terdapat tumpang tindih ijin pemanfaatan kawasan dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Riau yang masih dalam proses penyelesaian. Langkah-langkah perencanaan yang disusun dalam penyelesaian masalah tersebut adalah 1. Dengan melakukan kegiatan survey lapangan dengan GPS Geodetic yang dilakukan untuk membantu pemilahan terhadap kondisi data yang tersedia yang akan digunakan. 2. Melakukan proses multistakeholder review untuk melakukan konfirmasi terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan. 3. Menyampaikan metode perbaikan data yang dilakukan sehingga didapatkan kesepahaman terhadap data yang akan digunakan

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

321 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Analysis of Incomplete and/or Inconsistent Data and Process Development for the Acquisition of Additional Data and/or Validation of Data. Deliverable 3c: Assist the REDD+ Taskforce in Procurement Processes for the Acquisition of Required Data for the Province and Facilitate Community Outreach to Include Participatory/ Community Mapping.

Analisis konsistensi dan kelengkapan atas ketersediaan data yang dibutuhkan dan rencana yang disusun untuk mengatasi kesenjangan terhadap kualitas data telah dilakukan, maka proses untuk mendapatkan data dengan kualitas yang baik untuk pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau dapat dilakukan. Proses untuk mendapatkan data yang terbaru, dan dapat dipercaya dilakukan dengan proses pemilahan atas beberapa jenis data, dan kompilasi data untuk melengkapi informasi dengan konfirmasi terhadap pemangku kepentingan.

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

322 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Integrate and Standardize Tools for Maintaining Data in the Province. Deliverable 4a: Review Current Information Management System (IMS) and Processes Used for Managing Data in the Province, and Recommend the Most Viable IMS and Processes to Support and Build Upon.

Berdasarkan data yang terkumpul selama wawancara dan FGD, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum praktek pengelolaan data dan informasi di lingkup Provinsi Riau telah berjalan meskipun masih terdapat sejumlah catatan penting untuk perbaikan. Di antara catatan yang paling penting adalah belum adanya payung hukum di tingkat provinsi dan kabupaten yang menjadi rujukan resmi tata kelola (governance) informasi serta penjabarannya ke dalam mekanisme dan prosedur yang lebih teknis. Mengacu kepada kondisi pengelolaan informasi tersebut di atas maka untuk perbaikan direkomendasikan pengelolaan Informasi Berdasarkan Tata Kelola Yang Disepakati Bersama serta mendefinisikan Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengelolaan Data dan Informasi .

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

323 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Integrate and Standardize Tools for Maintaining Data in the Province. Deliverable 4b: Prepare an Action Plan to Enable Further Development of Existing IMS and Processes for Managing Data in the Province, in particular community/participatory cadastral mapping

Rencana Aksi Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi (IMS) ini disusun berdasarkan masukan stakholder di dalam proses FGD serta mengacu kepada sejumlah dokumen peraturan perundangan yang berlaku. Secara umum langkah yang telah di tempuh adalah: 1) identifikasi permasalahan dan tantangan di dalam pengelolaan data dan informasi di Provinsi Riau yang mencakup, 2) Identifikasi arahan rencana aksi, 3) rumusan program dan kegiatan aksi termasuk di dalamnya integrasi dan standarisasi perangkat untuk penglolaan data dan pemetaan secara partisipatif.

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

324 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Integrate and Standardize Tools for Maintaining Data in the Province. Deliverable 4c: Implement the Action Plan to Enable Further Development of Existing IMS and Processes for Managing Data in the Province.

Sebagai sebuah “proses”, pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi menuju kondisi yang diharapkan akan memerlukan waktu sehingga keberhasilan proses mempersyaratkan adanya peran aktif para pihak di Provinsi Riau yang melanjutkan inisiatif-inisiatif yang telah dimulai oleh tim Proyek. Berdasarkan hal tersebut tindak lanjut diperlukan untuk penerbitan payung hukum dan mekanisme baku, sosialisasi kebijakan induk pengelolaan data dan informasi;

meninjau kembali tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga baik walidata dan pengguna data menyesuaikan dengan mekanisme yang disepakati; dan perbaikan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

325 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Task 5Assistance in the Development and Implementation of a Multi-Stakeholder Data Review and Endorsement Process Deliverable 5a: Develop a Registry of Stakeholders and Projects/ Programmes Relevant to REDD+ in the Province

Pencatatan (register) para pemangku-kepentingan dan proyek/program yang relevan dengan aktivitas REDD+ merupakan tugas yang penting dan memperhatikan para pemangku-kepentingan yang benar-benar relevan dengan REDD+. Ada 2 langkah dalam register : Langkah pertama yang dilakukan untuk meregister para pemangku-kepentingan dan proyek/program yang relevan dengan aktivitas REDD+ adalah dengan melakukan identifikasi para pemangku-kepentingan. Terdapat 75 jenis data dengan paling tidak 44 pemangku-kepentingan yang relevan terhadap penyediaan data spasial yang diperlukan untuk implementasi REDD+ di Provinsi Riau. Langkah kedua adalah mengelompokkan dan meregister para pemangku-kepentingan. Ada 32 pemangku-kepentingan dari pemerintah dan 12 non-pemerintah. Beberapa pemangku-kepentingan bisa memiliki dan menyediakan data yang sama atau serupa. Beberapa data tersebut juga dipakai bersama oleh beberapa pihak. Kemudian para pemangku-kepentingan tersebut dikelompokkan menjadi pemangku-kepentingan utama sebagai wali dan pengguna data, dan pemangku-kepentingan sekunder yang hanya sebagai pengguna data dan bukan wali data.

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

326 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Task 5Assistance in the Development and Implementation of a Multi-Stakeholder Data Review and Endorsement Process Deliverable 5c :Implement the Action Plan to Enable Effective and Efficient Engagement of Stakeholders and to Ensure Their Views and Opinions are Reflected in the Compiled Data for the Province

Pelaksanaan Rencana Aksi pada kegiatan Deliverable 5c meliputi: (1) Sosialisasi Proyek ini kepada pemangku kepentingan di Provinsi Riau diperkenalkan melalui Pemerintah Provinsi dalam forum resmi SKPD & Instansi Pemerintah Provinsi. Pertemuan resmi juga dihadiri oleh BIG dimaksudkan untuk memperoleh perhatian dan dukungan dari SKPD & Instansi Pemerintah Provinsi untuk tiga agenda nasional, yakni Program REDD+ dan inisiatif OneMap; Sistem JDS; dan Penyediaan Data Dasar untuk REDD+ di Riau. (2) Pada tingkat provinsi telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Riau. (3) Pada tingkat provinsi telah dilaksanakan seri pertemuan multi-stakeholder ataupun forum resmi yang melibatkan LSM, Perguruan Tinggi dan

Swasta dalam bentuk FGD. Topik yang dibahas adalah konsep dan desain pengelolaan data spasial yang berbasis JDS. (4) Pada tingkat provinsi telah dilaksanakan pertemuan pemangku kepentingan dalam rangka membahas integrasi data spasial yang diberikan oleh instansi SKPD dan kelompok/ komunitas masyarakat umum. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk launching Peta Riau.

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

327 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia.Task 6: Sharing Data with Stakeholders Including National and International Stakeholders. Deliverable 6a: Prepare an Action Plan for Effective Sharing of Data with Stakeholders Including National and International Stakeholders

Provinsi Riau, Rencana Aksi dalam laporan 6a ini dikembangkan berdasarkan penilaian kesenjangan yang terjadi di Provinsi Riau terhadap kondisi ideal dari suatu sistem berbagi data spasial untuk para pemangku kepentingan nasional maupun internasional. Di Provinsi Riau hasilnya menekankan pada Rencana Aksi berikut: prioritas perumusan dan penerbitan payung hukum untuk mekanisme Jaringan Data Spasial di tingkat provinsi, penertiban register data resmi setiap simpul, dan merekomendasikan upaya perbaikan sarana dan prasarana untuk sistem berbagi data standar seperti: geodatabase, website termasuk perangkat lunak dan perangkat kerasnya dalam rangka menyajikan dan memudahkan pelaksanaan berbagi data antar stakeholder di tingkat nasional dan internasional

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

328 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia. Task 6: Sharing Data with Stakeholders Including National and International Stakeholders. Deliverable 6b: Implement the Action Plan to Share Data with Stakeholders Including National and International Stakeholders.

Pelaksanaan Rencana Aksi berbagi data (data sharing) dengan pemangku kepentingan di Provinsi Riau termasuk pemangku kepentingan nasional dan internasional. Dokumen Rencana Aksi merencanakan 10 (sepuluh) aksi, yakni (1) menjaring aspirasi untuk Jaringan Data Spasial Daerah melalui lokakarya pemetaan pertisipatif menuju JDSR; (2) menyusun rekomendasi kebijakan induk jaringan data spasial daerah berdasarkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Riau; (3) menyusun petunjuk dan prosedur teknis berbagi data melalui JDSR; (4) pembahasan dan penerbitan payung hukum untuk berbagi data melalui JDSR; (5) sosialisasi kebijakan, mekanisme dan prosedur yang disusun kepada para pemangku kepentingan di dalam JDSR; (6) pengembangan website yang mencakup data spasial; (7) penyusunan rekomendasi perbaikan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat kecukupan sistem berbagi data spasial untuk mendukung JDSR; (8) kompilasi dan registrasi data dan metadata resmi provinsi; (9) pengembangan geodatabase dalam JDSR; dan (10) tinjauan multipihak untuk sistem pengelolaan data resmi provinsi.

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

329 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia. Facilitate and Enable the Institutionalization of Data Management in the Province Deliverable 7a: Analyze the Requirements for Improved Institutionalization of Data in the Province, in particular, Community/ Participatory Mapping

Jaringan Data Spasial Nasional yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial, sejak awal pengembangan hanya melibatkan Kementerian, Lembaga pemerintah, serta Pemerintah Daerah. Namun sejak adanya Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial di akhir tahun 2012, institusi lain seperti Perguruan Tinggi mulai diberi kesempatan untuk masuk dalam Jaringan Data Spasial Nasional. Di awal tahun 2013, beberapa dokumen prosedur operasi standar terkait data spasial dari Pemeta Partisipatif/Komunitas telah disusun. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemeta Partisipatif/Komunitas mulai diberi peluang untuk masuk dalam Jaringan Data Spasial Nasional.

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

330 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Facilitate and Enable the Institutionalization of Data Management in the Province Deliverable 7b: Assist the REDD+ Taskforce to Implement, in Cooperation with Stakeholders, Measures to Improve the Institutionalization of Data Management in the Province

Pelembagaan data dan informasi merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan waktu dan komitmen bersama. Peran terbesar di dalam proses pelembagaan adalah para pemangku kepentingan di lingkup Provinsi Riau. Oleh karena itu di dalam periode akhir pelaksanaan penyediaan data dan informasi di Provinsi Riau, proses pelembagaan (institusionalisation) pengelolaan data yang ditempuh adalah penyusunan konsep kelembagaan pengelolaan data dan informasi, pembangunan kapasitas, dan penyusunan mekanisme pemetaan partisipatif. Di dalam laporan ini disajikan hasil proses penyusunan konsep kelembagaan dan mekanisme pengelolaan data dan informasi sesuai dengan hasil proses penyusunan secara partisipatif.

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

331 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia. Task 8:Assessment of Institutional and Individual Capacity Gaps in Data Management and Design of Required Capacity Development Processes Deliverable 8a: Assess Institutional and Individual Capacities Required for Data Management in the Province

Secara metodologi, pelaksanaan penilaian kapasitas kelembagaan di dalam kegiatan ini dilakukan di dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu: Kapasitas di tingkat system (umum, mencakup keseluruhan elemen sistem), kapasitas di tingkat organisasi, yaitu kapasitas di tingkat satuan organisasi formal dan nonformal yang menyusun sistem, serta Kapasitas di tingkat individu, yaitu kapasitas yang dimiliki individu-individu anggota organisasi. Berdasarkan proses analisis, di tingkat sistem terdapat kesenjangan terutama dalam hal basis legal dan payung hukum sebagai referensi pengelolaan data dan informasi, kelembagaan yang menjadi leading sector pengelolaan data dan informasi, serta ketersediaan mekanisme baku pengelolaan data dan informasi termasuk sharing data. Di tingkat organisasi, kesenjangan utama adalah tidak adanya pengaturan unit kerja yang berperan sebagai clearing house, serta tidak adanya mekanisme yang menjamin ketersediaan tenaga terampil dalam jumlah memadai. Di tingkat individu, akses dan ketersediaan sumber informasi dan pengetahuan menjadi kendala utama.

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

332 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Task 8: Assessment of Institutional and Individual Capacity Gaps in Data Management and Design of Required Capacity Development Processes. Deliverable 8b: Design and Prepare Short- and Long-term Capacity Development Programmes to Address Gaps at District, Provincial and National Levels as well as for Relevant NGOs/CSOs and Community Groups

Kapasitas SKPD tingkat Propinsi/Kabupaten, peningkatan kapasitas kelembagaan perlu didorong untuk menimgkatkan upaya perbaikan kualitas data spasial melalui program pengembangan geodatabse data spasial Riau. Peningkatan kapasitas individu penting dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM teknis dari setiap SKPD, terutama dalam mengoperasikan dan menganalisis data spasial di dalam sistem geodatabase data spasial Riau. Untuk kapasitas Perguruan Tinggi/NGO/ Sektor Swasta, peningkatan kapasitas kelembagaan penting dilakukan dengan mendorong munculnya struktur dalam organisasi NGO menjadi bagian dari sistem JDSR. Peningkatan kapasitas tersebut termasuk dalam rangka memberikan keterampilan dan kemampuan dalam proses penyusunan draft SOP dalam mekanisme berbagi data (data sharing) data spasial

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

333 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Task 9: Develop Data Management Training and Capacity Development Programmes for Stakeholders in the Province Deliverable 9a: Collate and Prepare Relevant Training Material Appropriate for the Province, and Suitable for Direct and Distance Learning

Sistematika modul pelatihan berisi penjelasan konseptual serta tutorial yang menunjukan langkah-langkah teknis pelaksanaan pengelolaan/pengolahan data spasial. Modul pelatihan tersebut terdiri atas beberapa kelompok materi sebagai berikut: 1) Prinsip pengelolaan data dan informasi spasial menggunakan teknologi informasi, 2) Dasar-dasar teori Sistem Informasi Geografis, penginderaan jauh, dan GPS, 3) Operasional perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG)) dasar dan lanjutan, 4) Penggunaan Perangkat Lunak Penginderaan Jarak Jauh (Remote Sensing) dasar dan lanjutan, 5) Aplikasi fitur-fitur Sistem Informasi Geografis untuk GIS dan Remote Sensing Untuk Pemetaan Areal Rawan Kebakaran Hutan, 6) Aplikasi fitur-fitur Sistem Informasi Geografis untuk GIS dan Remote Sensing Untuk pemetaan lahan kritis, 7) Aplikasi fitur-fitur Sistem Informasi Geografis untuk GIS dan Remote Sensing Untuk pemetaan sensitivitas lingkungan. Selain materi teknis tersebut, terdapat materi tambahan berupa materi pelaksanaan pemetaan partisipatif yang selanjutnya dijadikan sebagai referensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan di Provinsi Riau.

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

334 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps For The Riau Province In Indonesia Task 9: Develop Data Management Training and Capacity Development Programmes for Stakeholders in the Province Deliverable 9b: Deliver Priority Training Courses to Key Stakeholders

Dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan data, khususnya dalam pengelolaan data spasial diaplikasikan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan GIS dan Remote Sensing. Kegiatan pelatihan ini dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama dilaksanakan di ruang pertemuan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Pengolahan Data Elektronik dengan diikuti oleh Tujuh SKPD di Provinsi Riau, yaitu Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Komunikasi Informasi dan Pengolahan Data Elektronik, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, dan Dinas Pertambangan. Sedangkan pelaksanaan pelatihan yang kedua dilaksanakan di Bappeda Provinsi Riau dengan diikuti secara khusus oleh staff di yang bertugas sebagai pengelola data di lingkungan Bappeda Provinsi Riau.

Waindo SpecTerra 2013
UNDP, Satgas REDD+

335 Stakeholder Engagement Plan Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. The report identifies 22 stakeholder groups as priorities for engagement

These stakeholders have been prioritized because they play an important role in contributing to, or approving, the work of the project, or because they may be impacted by, or have a significant influence on, future REDD+ programs. The report identifies the appropriate level and means of engagement for each of these stakeholder groups, based on the defined aim of engagement. The report also identifies several obstacles for effective stakeholder engagement and proposes mitigating actions which can be taken be Sekala to facilitate effective stakeholder engagement and input

Sekala 2013.
UNDP, Satgas REDD+

336 Dissemination Plan Of The Basemap And Cadastral Mapping System Design Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System

The plan lays out how the main products of the project, comprising baseline data on land use and natural resources and a design for a cadastral mapping system will be communicated to key stakeholders at local, national and international level. The report identifies four main stakeholder groups as priorities for dissemination. Groups are prioritized because they have an important role to play in following up and implementing the outputs of the project, or because they are likely to be affected by such implementation. Appropriate messages, methods of communication and packaging of information are proposed for each stakeholder group

Sekala 2013.
UNDP, Satgas REDD+

337 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2) Task 1. Identification and classification of the Data required and available for REDD+ Implementation in the Province. Deliverable 1a. Analyse the specific Data required for REDD+ implementation in the Province

Reomendasi : 1) INCAS–LAPAN memiliki cukup banyak data yang dapat digunakan untuk melakukan penyusunan data spasial terkait dengan REDD+. Untuk meninjau data yang relevan perlu bekerjasama dengan INCAS–LAPAN, terutama dalam hal bagi-pakai (sharing) data citra liputan terbaru, dan mendiskusikan standar produk data yang perlu dikembangkan; 2)INCAS–LAPAN memiliki data satelit yang sudah terkoreksi. Selain itu, ketersedian data secara temporal juga cukup lengkap. Oleh karena itu INCAS–LAPAN dapat di jadikan salah satu lembaga yang dapat di ikutsertakan dalam hal penyediaan data maupun metode-metode pengukuran yang digunakan dalam REDD+. 3. Dalam konteks membangun MRV REDD+ Provinsi Sumsel, dipandang perlu melakukan analisis data yang lebih detail dengan acuan dasar pada salah satu standar, misalnya standar dan metodologi VCS, dan penyediaan datanya oleh INCAS. 4). Dalam konteks membangun baseline data dan kepentingan REDD+, “rumah data” yang

akan dibangun sebaiknya memasukkan arsip data dari proyek MRPP-GIZ yang berisi data "plot pengukuran permanen", terkait pengukuran riap karbon. Input data tersebut dijadikan untuk kepentingan "zoom-in" di tingkat tapak "pilot project" (contoh areal HRG Merang Kepayang). Hal ini sekaligus untuk menyediakan prosedur pengukuran, input data, dan akses data yang terintegrasi dengan "rumah data" JDSD.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

338 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2) Task 1. Identification and classification of the Data required and available for REDD+ Implementation in the Province. Deliverable 1b: Develop a classification system (taxonomy) for data inconsultation with the redd+ taskforce

Membangun taksonomi data spasial adalah sistem taksonomi tersebut harus dapat didefinisikan dan diatur, harus dapat disimpan dalam satu kelompok akan tetapi dapat banyak yang menggunakan, dan harus sederhana. Merujuk pada hal tersebut, maka data spasial yang telah dikelompokan pada masing-masing grupakan di paduserasikan dengan grup taksonomidata spasial yang telah disusun untuk kepentingan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN).

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

339 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2) Task 1. Identification and classification of the Data required and available for REDD+ Implementation in the Province. Deliverable 1c : Identify the Availability of Data from Secondary Resources, Required for REDD+ Implementation in the Province

Ketersediaan data spasial (data citra satelit) yang spesifik untuk pelaksanaan REDD+ tersedia terbatas, yakni terutama dapat ditemukan di kantor Dishut Provinsi Sumsel, BPKH Wilayah II Palembang, dan Bappeda Provinsi Sumsel. Data spasial (data citra satelit) spesifik untuk pelaksanaan REDD+ meliputi: 1) Data perubahan tutupan lahan: data tahun 2000 keatas (Ditjen Planologi, KLH, INCAS, dan ALLREDDI). Data dari KLH, itu terkait dengan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH); 2) Peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain, 3) Peta perkembangan izin penggunaan kawasan hutan, mencakup data izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan. 4) Peta perkembangan penataan batas/pengukuhan hutan; 5) Peta GNRHL/GERHAN/OMOT atau program satu milyar pohon (Carbon Stock) dan 5) Sebaran Lahan Gambut

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

340 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 2. Processing and analysis of Data from the Province.Deliverable 2a: Compile currently available Data for the Province as a reference document, and include any constraints & lessons encountered.

The process should lead to the data and information in the final Atlas to be clear from any gaps, overlaps and quality problems, as well as being uncontested by stakeholders, in line with the OneMap policy. The compiled data in the final multi-stakeholder endorsed REDD+ Baseline Atlas are in fact a subset of the spatial data that will be managed collectively in the Spatial Data Network by all involved stakeholders (data custodians). The final version of the Atlas, which is a product to be officially endorsed by all stakeholders, is then to be officially launched as the Baseline Data for REDD+ for the Province or District/Municipality, based on the OneMap principles.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

341 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 2. Processing and analysis of Data from the Province.Deliverable 2b: Analyse compiled data for the province and generate management/excecutive information for REDD+ implementation

Data spasial yang telah diperoleh dari penyedia data dan telah disusun secara teratur (dalam Atlas Ketersediaan Data REDD+) di Provinsi Sumsel masih mengandung permasalahan kualitas data, antara lain: data inkonsisten, berdiri sendiri (tidak memiliki keterhubungan spasial), tidak memiliki metadata, isi atribut yang tidak sesuai, atribut data spasial tanpa dilengkapi kamus data, saling tercampur dengan data spasial lain, datum dan sistem proyeksi yang beragam, penamaan yang berbeda namun informasi spasialnya sama. Berdasarkan hal itu kesediaan para pihak/SKPD menjadi penyedia data resmi dan berkualitas adalah syarat keharusan; sedangkan terkumpulnya data kedalam satu sistem geospasial database atau “rumah data” adalah syarat kecukupan bagi keberhasilan penyediaan data dasar REDD+ Provinsi Sumsel.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

342 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 3. Analysis of incomplete and/or inconsistent Data and process development for the acquisition of additional Data and/or validation of Data Deliverable 3a: Analyse incompleteness and/or inconsistency between Data available and Data required for REDD+ implementation in the Province

Kesimpulan analisis kelengkapan dan kesesuaian data spasial yang tersedia saat ini untuk mendukung pelaksanaan REDD+ di Provinsi Sumatera Selatan: 1) Ketersediaan dan kesesuaian data spasial yang ada saat ini dapat dinilai masih belum mencukupi kebutuhan data spasial yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan REDD+, serta konteksnya JDS provinsi. Oleh karena itu, identifikasi data tambahan dan pengolahan ulang dari data yang ada yang akan

digunakan untuk mendukung kedua kegiatan tersebut dirasa sangat penting untuk dilakukan. 2) Data spasial yang diperlukan belum tersedia pada instansi yang dianggap sebagai wali data yang bersangkutan. Selain itu data yang telah tersedia juga ditemukan adanya ketidaksesuaian topologi, minimnya atribut data, termasuk tidak tersedianya metadata sebagai bagian dari kelengkapan data spasial.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

343 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 3. Analysis of incomplete and/or inconsistent Data and process development for the acquisition of additional Data and/or validation of Data Deliverable 3b: Assist the REDD+ Taskforce in Data Acquisition Processes for the Province, Including Participatory Community-Provided Data/Mapping

Data Atlas REDD+ Sumsel telah dilakukan analisis overlay terhadap peta-peta tematik antara tutupan lahan dengan data status lahan. Hasil overlay menunjukkan data tumpang tindih, yakni antara kawasan lindung (Suaka Alam) dengan potensi pertambangan; antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya lainnya; antara kawasan yang dibebani Izin Pertambangan Batubara; kawasan hutan yang dibebani Izin Perkebunan; kawasan hutan yang dibebani Izin Migas; dan kawasan hutan yang dibebani Izin usaha lainnya. Tema data spesifik REDD+ telah dikoreksi oleh Proyek, khususnya untuk data Provinsi Sumsel, Kab. Banyuasin, Kab. Empat Lawang, Kab. Lubuk Linggau, dan Kab. Musi Rawas. Jenis perbaikannya meliputi aspek kualitas: topologi, merging, proyeksi, joining, query, pemberian atribut, dip, kompilasi, dan konversi. Penyusunan anggaran pemerolehan (akuisisi) data spasial untuk pelaksanaan REDD+ dipengaruhi oleh aspek-aspek berikut ini: ruang lingkup/cakupan data yang diperlukan meliputi ketersediaan, kualitas dan detil data/informasinya; penetapan tingkatan Tier dalam kegiatan monitoring; pilihan dan penggunaan teknologi; dan alternatif metode partisipatif.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

344 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 4. Integrate and Standardise Tools for Maintaining Data in the Province. Deliverable 4a: Review Current Information Management Systems (IMS) and Processes Used for Managing Data in the Province, and Recommend the Most Viable IMS and Processes to Support and Build Upon

Profil teknis/fisik sistem pengelolaan data di UPTB Penataan Ruang Bappeda Sumsel digambarkan sebagai berikut: 100% perangkat teknologi telah tersedia, seperti jaringan, hardware, dan software; 70% kapasitasnya telah terbangun melalui pelaksanaan dan keikutsertaan pelatihan ; sekitar 50% lebih data spasial telah tersedia. Namun saat ini hanya ada 1 orang tenaga GIS yang aktif bekerja mengelola, memanfaatkan data spasial. UPTB Tata Ruang Bappeda dan beberapa SKPD adalah ArcView, dan ada yang sudah memulai dengan ArcGIS. Sistem pengelolaan data spasial berjalan seperti biasanya, yakni dikerjakan sendiri oleh staf UPTB; atau dikerjakan bersama oleh SKPD lain, terutama

dengan staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel; atau dikerjasamakan dengan konsultan (out-sourcing). Potensi kuat yang dimiliki UPTB Penataan Ruang Bappeda adalah telah tersedianya aplikasi Lumbung Geoaplliance sebagai modal awal praktik bagi-pakai (sharing) data antar SKPD di tingkat provinsi dengan menggunakan aplikasi, seperti WebGIS dan WMS. Untuk konteks di Provinsi Sumsel, dalam rangka membangun sistem pengelolaan database spasial, dan sistem bagi-pakai data dapat dimulai dari kantor Bappeda di tingkat provinsi/kabupaten, dengan cara membuat jaringan database spasial secara sederhana yang dapat digunakan untuk bagi-pakai data di lingkup SKPD provinsi maupun kabupaten.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

345 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 4. Integrate and Standardise Tools for Maintaining Data in the Province. Deliverable 4b: Prepare an Action Plan to Enable Further Development of Existing IMS and Processes for Managing Data in the Province, in Particular Community & Participatory Cadastral Mapping

Rencana Tindakan selanjutnya berfokus pada Bappeda Provinsi, sebagai koordinator JDS Provinsi, dan pada Dinas Kehutanan Provinsi, sebagai instansi kunci dan wali data penting dalam konteks REDD+, dan sebagai Simpul Jaringan JDS. Kegiatan yang dijelaskan dalam Rencana Tindakan ini yang mempersiapkan Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi untuk peran dan tanggung jawabnya pada JDS, sama-sama berlaku untuk instansi-instansi yang lain di tingkat Provinsi dan Kabupatan/Kota. Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai peran utama dalam memulai pengembangan dan operasionalisasi JDS.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

346 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 5. Assistance in the development and implementation of a multi-stakeholder data review and endorsement process. Deliverable 5a: Develop a registry of stakeholders and projects/programmes relevant to REDD+ in the Province

Registri parapihak (stakeholder) yang dikembangkan dalam laporan ini dapat menjadi input dan dasar dalam penyediaan data dasar (baseline data) dan peta status lahan (cadastral map) di Provinsi Sumatera Selatan yang mudah, efisien, dan efektif. Aksi yang dapat direncanakan berdasarkan kondisi sementara parapihak dapat dikelompokkan menjadi : a)Penyampaian informasi (sosialisasi) mengenai REDD+ dan JDSD, b)Peningkatan kapasitas SDM pengelola data melalui pelatihan (lebih detil akan diidentifikasi dan disampaikan pada Laporan Task 5b).

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

347 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 5. Assistance in the development and implementation of a multi-stakeholder data review and endorsement process. Deliverable 5b: Prepare an action plan for stakeholder engagement in the province in consultation with the REDD+ Taskforce

Data dari tingkat masyarakat juga termasuk dalam Atlas dan Profil sistem pengelolaan data spasial, selanjutnya dimaksudkan untuk mendukung pengembangan suatu mekanisme untuk memasukkan data spasial dari masyarakat dalam JDSD. Mekanisme ini menyediakan ruang masuknya data spasial dari masyarakat, baik dibantu oleh LSM maupun tidak, ke Bappeda, dan bentuk penyampaian resmi data ini akan dimasukkan dalam catatan (diregistri).Diperlukan campurtangan pimpinan tertinggi di daerah, atau minimal Sekretaris Daerah baik provinsi maupun kabupaten, untuk mendorong para pihak bersedia mendukung pengumpulan data dasar REDD+ dan jaringan data spasial daerah. Untuk mengantisipasi kurang cepatnya surat pengantar dari pihak birokrat pemerintah daerah, minimal setingkat Sekda, digunakan pengantar surat proyek untuk pengumpulan data untuk kegiatan tim pengumpul data ke instansi penyedia.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

348 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 5. Assistance in the development and implementation of a multi-stakeholder data review and endorsement process. Deliverable 5c : Implement the Action Plan to enable effective and efficient engagementof stakeholder and to ensure their views and opinions are reflected inthe compiled data for the Province

Kegiatan dari Rencana Aksi laporan 5b tentang interaksi dan kerjasama dengan stakeholder yang berhasil dilakukan secara efektif di Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Selatantermasuk: 1) Rapat dengan Sekda dan Pimpinan SKPD; 2) Koordinasi dan kerjasama erat dengan Pokja REDD+ yang multi-sector di Provinsi Sumatera Selatan; 3) Pembentukan, kemudian koordinasi dan kerjasama erat dengan Tim Atlas dan Profil yang multi-sector di Kabupaten/Kota; 4) Pengembangan dan sosialisasi konsep Atlas Data Dasar dan konsep Profil Kabupaten/Kota, kemudian proses partisipatif penyusunan dokumen Atlas dan dokumen Profil, termasuk verifikasi data; 5) Konsep dan proses berbagi data, informasi dan pengetahuan melalui kegiatan “Klinik Data” dan “Pelatihan GIS & Berbagi Data”; 6) Distribusi dan launching Atlas dan Profil; 7) Koordinasi dan kerjasama erat dengan jaringan LSM mengenai integrasi data masyarakat dalam Jaringan Data Spasial / pembentukan Forum Data Spasial Masyarakat; 8) Pertemuan, diskusi kelompok dan lokakarya multi-stakeholder tentang kompilasi dan manajemen data spasial, rancangan PerGub tentang JDS, termasuk integrasi data masyarakat dalam Jaringan Data Spasial DAN 9) Website Proyek untuk menerima masukan / umpan balik stakeholder

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

349 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 6. Sharing Data with Stakeholders including National and International Stakeholders Deliverable 6a. Prepare an Action Plan for Effective Sharing of Data with Stakeholders including National and International Stakeholders

Suatu mekanisme utama bagi-pakai data adalah sistem Jaringan Data Spasial (JDS). Selain JDS, data/informasi juga dibagi melalui situs web, termasuk situs web proyek, dan melalui distribusi bahan hardcopy. Sebuah contoh utama hardcopy tersebut adalah buku Atlas Data Dasar REDD+, yang telah dikembangkan bersama-sama dengan Provinsi dan masing-masing Kabupaten/Kota, dan dokumen yang dihasilkan telah didistribusikan kembali kepada para stakeholder di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Atlas ini juga tersedia sebagai file digital di situs web proyek & Pokja REDD+, dan data spasial digital yang mendasarinya tersedia dari Bappeda, disusun sebagai database yang akhirnya akan dapat diakses melalui JDS.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

350 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 6. Sharing Data with Stakeholders including National and International Stakeholders Deliverable 6B: Implement the Action Plan to share data with stakeholders including national and international stakeholders

Berbagi-pakai data dan informasi mengenai Proyek Baseline, REDD+, Pokja REDD+, Satgas REDD+ dan Atlas Data Dasar REDD+, termasuk seluruh data shapefile data GIS- dan data spasial lainnya yang terkumpul, saat ini telah berhasil dibagikan dan dipakai kepada para pemangku kepentingan di nasional, propinsi dan kabupaten/kota, melalui beberapa kegiatan berikut: 1) dibagikan secara langsung dalam berbagai bentuk dokumen baik berupa dokumen cetakan maupun digital; penerimaan bahan dikonfirmasi oleh stakeholder nasional, provinsi dan kabupaten / kota, 2) menempatkan berbagai materi di website Proyek, agar dapat ditinjau dan diunduh (kecuali file GIS yang aslinya, karena penyebarannya adalah kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing); pembukaan dan pengunduhan bahan oleh pengunjung website dikonfirmasi melalui statistik administrasi website; 3) even kegiatan seperti Workshop, Peluncuran Atlas Provinsi, dan Peluncuran Atlas di Kabupaten Banyuasin; berbagi data dan informasi dikonfirmasi dengandaftar peserta, dan dengan liputan media.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

351 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 7. Facilitate and enable the institutionalisation of data management in the province Deliverable 7a: Analyse the requirements for improved institutionalisation of data in the province, in particular community/participatory mapping

Kelembagaan data (spasial) melalui skema Sistem Jaringan Data Spasial (SJDS) baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi Sumatera Selatan belum optimal. Oleh karena itu diperlukan penguatan (improvement) regulasi kelembagaan manajemen data melalui perbaikan payung hukum/landasan pelaksanaan pengelolaan data (spasial) yaitu adanya Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Sistem Jaringan Data Spasial; Dengan demikian integrasi data spasial yang ada di masyarakat seperti peta wilayah batas desa, peta rencana tata ruang wilayah desa, dan lain-lain perlu diakomodasi melalui suatu prosedur formal. Dengan demikian diperlukan adanya standard operating procedure (SOP) untuk mengimplementasikan integrasi data masyarakat tersebut.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

352 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 7. Facilitate and enable the institutionalisation of data management in the province Deliverable 7B : Assist the REDD+ Taskforce to implement, in cooperation with stakeholders, measures to improve the institutionalisation of data management in the Province

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Jaringan data Spasial Provinsi Sumatera Selatan dikembangkan bersama-sama dengan Bappeda Provinsi Sumsel, dan dengan masukan dari dan konsultasi dengan BIG, LSM dan pemangku kepentingan lainnya dari pemerintah, sektor swasta dan Lembaga Pendidikan. Rancangan Pergub ini menfasilitasi penyatuan data partisipatif masyarakat, sektor swasta dan lembaga pendidikan/penelitian ke dalam Jaringan Data Spasial. Konsep integrasi data yang dikontribusi oleh masyarakat ke dalam JDS telah disepakati pada suatu pertemuan di Palembang oleh para pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, LSM dan BIG, pada tanggal 28 November 2012. Rancangan Pergub perlu disampaikan segera oleh Bappeda Provinsi Sumsel ke Biro Hukum untuk divalidasi. Setelah divalidasi, rancangan final Pergub perlu segera diajukan oleh Bappeda untuk diformalisasi oleh Gubernur. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai target untuk memiliki JDS yang telah operasional pada akhir tahun 2013. Oleh karena itu penting bahwa Pergub diterbitkan sesegera mungkin, agar instansi pemerintah dapat mulai mengalokasikan sumber daya (anggaran, personil, waktu) untuk perencanaan, persiapan dan pelaksanaan JDS.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

353 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 8. Assessment of institutional and individual capacity gaps in Data management and design of required capacity development processes Deliverable 8a: Assess institutional and individual capacities required for Data management in the Province

Tingkat kapasitas terbaik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan data saat ini ditunjukkan oleh indikator Keahlian Teknis (2,88) yang merupakan bagian dari level individu (individual level). Adapun gap level kapasitas terbesar antara level saat ini dengan rata-rata terdapat pada indikator Norma/Nilai (-0,67) yang merupakan bagian dari lingkungan pemungkin (enabling environment). Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengelolaan data yang terbaik berada pada indikator Pengetahuan (3,25). Sedangkan gap level kapasitas terbesar terdapat pada indikator Keahlian Teknis (-0,42) dan Sumberdaya (-33). Kapasitas terbaik pihak Swasta dalam pengelolaan data saat ini ditunjukkan oleh indikator Jaringan, Koordinasi, dan Komunikasi (3,50) yang merupakan bagian dari level individu. Gap level kapasitas terbesar antara level saat ini dengan rata-rata terdapat pada indikator Alur Kerja/SOP (-0,50) yang merupakan bagian dari level organisasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa indikator terbaik untuk pengelolaan data pada Kelompok Masyarakat saat ini adalah indikator Kebijakan, Norma/Nilai, Jaringan, Koordinasi, Sumberdaya, Keahlian Teknis dan Pengalaman (3,00). Selain itu gap level kapasitas terbesar terlihat pada indikator Perundangan/Regulasi (-0,67).

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

354 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 8. Assessment of institutional and individual capacity gaps in Data management and design of required capacity development processes Deliverable 8B. Design and prepare short- and long-term capacity development programmes to address gaps at district, provincial and national levels as well as for relevant NGOs/CSOs and community groups

Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas ini dikembangkan dan dibahas bersama dengan stakeholders di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rencana Aksi mempunyai cakupan jangka pendek sampai jangka panjang. Kegiatan yang dilaksanakan atau didukung Proyek Baseline mempunyai cakupan jangka pendek. Selanjutnya, realisasi Rencana Aksi ditangani stakeholders dan pihak-pihak yang mendukung, melalui integrasi dengan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan dari stakeholders pemerintah maupun non-pemerintah.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

355 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2).Task 9. Develop Data Management Training and Capacity Development Programmes for Stakeholders in the Province deliverable 9a. Collate and Prepare Relevant Training Material Appropriate for the Province, and Suitable for Direct and Distance Learning.

Bahan dan manual pelatihan dapat digunakan untuk pelatihan dalam bentuk pembelajaran langsung dan jarak jauh. Pendekatan jarak jauh dipertimbangkan di sini didasarkan pada penggunaan internet. Implementasi pendekatan internet ini adalah situs web yang dikembangkan oleh Proyek di mana pengunjung situs dapat melihat dan menggunakan materi dan manual pelatihan. Selain materi dan manual pelatihan, disediakan ulusan metode pelatihan, kelompok sasaran, indikator hasil pelatihan dan cara-cara verifikasi, untuk digunakan dalam pelaksanaan dan evaluasi pelatihan.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

356 Provision of Baseline Data and Cadastral Maps for South Sumatera Province, Indonesia (Lot 2). Task 9. Develop Data Management Training and Capacity Development Programmes for Stakeholders in the Province deliverable 9b. Deliver Priority Training Courses to Key Stakeholders

Faktor yang paling penting adalah keberlanjutan dari pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh oleh staf / personil yang mengikuti pelatihan. Hal ini harus difasilitasi dan dijamin dalam kebijakan yang jelas dan efektif, dan program dan anggaran yang sesuai mengenai pembangunan kapasitas di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota. Namun ada masalah umum dan serius dengan peningkatan kapasitas yang efektif di seluruh Provinsi. Hal ini juga berlaku untuk sebagian besar provinsi dan kab/kota yang lain di Indonesia. Masalah ini perlu ditangani agar hasil pelatihan bisa benar-benar berkesinambungan dan efektif.

Royal HaskoningDHV. 2013
UNDP, Satgas REDD+

357 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System Delivery Plan For Priority Training To Support Redd+ In Central Kalimantan

This training plan is one of a series of outputs produced by Sekala for the President's Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight (UKP4 and REDD+ Regional Commissariat (Komda REDD+) Central Kalimantan under the project "Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System". The plan lays out how Sekala will deliver immediate technical capacity needs of key actors in spatial information management in Central Kalimantan. The report includes a needs analysis, training schedule, and training materials for five priority training courses: Basic GPS Skills, Basic Cartography, Basic Remote Sensing, Basic Geographic Information Systems (GIS) and Advanced GIS.

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

358 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia. Deliverable 5:Assistance In The Development And Implementation Of A Multi-Stakeholder Data Review And Endorsement Process. Task 5a: Develop A Registry Of Stakeholders And Projects/Programmes Relevant To Redd+ In The Province

This report describes stakeholders and process of a registry for projects/programmes relevant to REDD+ in Jambi Province. The registry of stakeholders is important part of the preparation phase for future REDD+ program implementation in Jambi. It functions to ensure accurate, efficient and transparent spatial data and activities recording for the REDD+ project. In the scope of national or sub-national REDD+, stakeholders registries can provide governments, donors and private sector with transparent and meaningful data from which to make results-based payments for REDD+. The registry process is divided into three steps, depending on the status of the land. Forest area goes through the process within the Forestry Department, while non forest area goes through the BPN administration processes. The validation process requires that a project design document is submitted to Provincial REDD+ Institution for approval. It is recognised that a third party qualified auditor will conduct the validation of any REDD+ project against international standards - this validation information should be shared with the Provincial REDD+ Institution.

Hatfield 2013.
UNDP, Satgas REDD+

359 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia. Deliverable 5:Assistance In The Development And Implementation Of A Multi-Stakeholder Data Review And Endorsement Process. TASK 5b: Prepare An Action Plan for Stakeholder Engagement in The Province in Consultation with The REDD+ Taskforce

This report describes action plan for stakeholders engagement related to the preparation of the REDD+ program implementation in Jambi. Preparation work includes spatial data collection, stakeholder capacity assessment, and the process of building the commitment among government institutions, NGOs, academic organizations, and international organizations in Jambi. The objective is to obtain support, baseline data related with REDD+, and confirmation of those data that will be collected (reported in other report related with baseline data) for the Jambi Province. The action plan and its implementation have been consulted with the REDD+ Task Force. The action plan consists of ten steps, including Get endorsement letter from REDD+ Taskforce, Develop Questionnaire, Visiting & direct consultation to key stakeholders at Districts and Jambi Province (one to one stakeholders engagement), Stakeholders consultation meeting (focus group discussion), Reviewing result analysis from stakeholders consultation engagement, Get endorsement letter from Jambi Governor for data collecting and comments to system registry concept, Send the endorsement letter to all data custodian, Data collecting process and obtain comments on system registry concept, Documenting all collected data with metadata, and Data management training and preliminary implementation of IMS.

Hatfield 2013.
UNDP, Satgas REDD+

360 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. Analysis Of Inconsistency And System Design To Improve The Quality And Quantity Of Spatial And Non-Spatial Data

Moreover, inconsistency in spatial planning involves overlapping rights or designations which are incompatible. For the purposes of this analysis, three types of inconsistency are recognised and quantified. Discrepancy occurs where two or more overlapping rights of the same type overlap - for example two logging concession licenses exist in the same area of forest. Disruption occurs where two different, incompatible, rights overlap spatially - for example when a mining license and a plantation license overlap. Finally, disharmony is where a license overlaps with a land use zone with which it is incompatible. Important examples in the context of mitigation of carbon emissions are when a plantation license overlaps with deep peatlands, or where a mining license overlaps with forest zoned for protection. This report presents an analysis of discrepancy, disruption and disharmony by sector for the forestry, estate crop and mining sectors. The main findings are as follows: Analysis of discrepancy (overlap between licenses within the same sector) shows that overlaps account for 1-2% of the area of forestry and estate crop licenses, and 8% of mining licenses. The higher area for mining is mainly due to large area covered by exploration licenses, which are expected to reduce in size significantly as they progress to operation-production. These overlaps may therefore be erased as the mining license process proceeds.

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

361 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia. DELIVERABLE 6:Sharing Data with Stakeholders Including National and InternationalStakeholders. TASK 6A:Action Plan for Effective Sharing of Data with Stakeholders Including Nationaland International Stakeholders.

Development and publication of metadata will allow Data Customers to discover data and understand the content of data (e.g. coverage, scale, and thematic information related to REDD+), source of data and date of acquisition. To control access to metadata, since some government data are confidential, providing metadata through cataloguing services is one option. This will allow data users to check the metadata catalogue without accessing the metadata or data itself. Data sharing will also require agreements among stakeholders. It is important to set agreed roles and responsibilities of each stakeholder, for example, whether they are a primary custodian or secondary/data user. A data sharing agreement is a set of common rules binding all the organizations involved in a data sharing initiative for REDD+ data management. The agreement should be drafted in clear, concise language that is easily understood.

Hatfield 2013.

UNDP, Satgas REDD+

362 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. Design Of A System For Integrated Cadastral Mapping And Survey In Central Kalimantan

This report proposes the creation of an Integrated Cadastral Mapping and Survey (ICMS) system to ensure that in future, land use allocation is better planned, more efficient, sustainable and socially beneficial. However, the report also highlights three issues, which need to be addressed for the successful establishment of an ICMS: 1)how to deal with very large numbers of small scale, mainly urban, private land ownership rights; 2) the near-absence of documentation of the rights of indigenous communities, and the difficulty of defining and documenting the rights of non-indigenous local communities; 3) the need for a process to deal with existing licenses, many of which overlap or have other problems which would mean they would not pass the verification stage of the proposed ICMS.

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

363 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia. DELIVERABLE 8: Assessment of Institutional and Individual Capacity Gaps in Data Management and Design of Required Capacity Development Processes TASK 8B: Programmes Prepared for Short and Long-Term Capacity Development to Address Gaps at District, Provincial and National Levels as Well as for Relevant NGOs/CSOs and Community Groups

Capacity building has the goal to build the existing capacity of key stakeholders (government institutions, NGOs and Community Groups) to a level that allows decision making, planning, monitoring and evaluation of REDD+ implementation supported by proper and functioning information management system which provide easy access, comprehensive and accurate data/information. Area that need to be targeted in a short term program are: REDD+ GIS and spatial data management training, desktop and field data verification, develop and raising awareness of institutional and individual on the REDD+ issue in Jambi Province, spatial data management, data endorsement process between stakeholders, and preparation of necessary policies and agreement. Area that need to be targeted for a long term program are: building and construction for spatial data management infrastructure in all relevant stakeholders, development of widely used standard operating procedures, define the clearing house for REDD+ spatial data, and develop data sharing and data distribution policy among main spatial data custodians (MoF, BPN, Bappeda, BIG, etc.).

Hatfield 2013.
UNDP, Satgas REDD+

364 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. Record Of Stakeholder's Views On The Proposed Basemap And Integratedcadastral Mapping And Survey System In Central Kalimantan

Endorsement of the proposed Integrated Cadastral Mapping and Survey (ICMS) system by stakeholders is essential for there to be progress with development and implementation of the system. A report under this project documented the perceptions of stakeholders in the ICMS as of 30 April 2012. This report updates that report, in particular reporting on the inputs and comments received during consultations with government and NGO stakeholders in Central Kalimantan during July 2012 on the results of the project research and proposals for the ICMS.

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

365 Provision Of Baseline Data And Cadastral Maps, For The Jambi Province, Indonesia.DELIVERABLE 9: Develop Data Management Training and Capacity Development Programmes for Stakeholders in The Province TASK 9A: Training Material, Collated and Prepared in Accordance with the Specific Needs and Prevailing Conditions of Jambi Province

Training participants are representative from stakeholders from provincial government, city/district government offices, NGOs and local university in Jambi. Personnel assigned for training should be staffs who are responsible in data management, GIS/IT/remote sensing support and analysis. Training materials comprise of the following three main components: 1) The summary of Deliverable 1a about the list of data required for REDD+ in Jambi; 2) Basic GIS and remote sensing is considered important to be delivered, based on the training need assessment. The selected software for GIS training is ArcGIS 10.1, which is widely used by most of stakeholders (although often an older version); and 3) Introduction of an IMS, including: Scope of IMS (brainware, hardware, software, data, procedures, and policy); requirement of system specifications; requirement of functionality specifications; and action required to implement an IMS in Jambi Province.

Hatfield 2013.
UNDP, Satgas REDD+

366 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. Endorsement of the final basemap and proposed Integrated Cadastral Mapping and Survey (ICMS) system by stakeholders is required to ensure that the system is utilized, managed and upgraded

This report updates Report 9 (Record of Stakeholders' Views on the Proposed Basemap and Integrated Cadastral Mapping and Survey System in Central Kalimantan) under this project to provide records of stakeholder consultations and discussions about the endorsement of the basemap and the proposal of ICMS

system as of 15 November 2012. This report also documents inputs, comments and endorsements received during consultations with government and NGO stakeholders in Central Kalimantan during the assignment and the results of the project basemap, research and proposals for the ICMS.

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

367 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. Report On Data Acquisition To Support Redd+ In Central Kalimantan

This report presents information on the key datasets compiled for the project "Provision of Baseline Data and Basemap Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System". It covers the sources of data, problems encountered with the data and how they were overcome, and recommendations for future work to update and improve the analysis. The datasets covered are: the basemap, land cover and land cover change over time; peat types and depth; carbon stock; forest concession licenses; crop estate rights; mining rights; non-formal (customary) rights over forest land and resources.

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

368 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. Report On Delivery Of Priority Training Needs In Support Of Redd+ In Central Kalimantan

This training report is one of a series of outputs produced by PT Sekala for the President's Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight (UKP4) and REDD+ Task Force (Satgas REDD+) under the project "Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System". The report provides details on the training that was provided by Sekala in Central Kalimantan for this assignment. The training sought to improve the skills of Regional Government Working Unit (SKPD) in data collection, analysis and management. While this objective was achieved, further technical support will be required to improve skills and knowledge in the field of spatial analysis and application and for the implementation of a well-managed Integrated Cadastral Mapping and Survey (ICMS) system.

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

369 Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System. Metadata And Storage System

This report presents information on metadata and storage system for the project "Provision of Baseline Data and Base Map Assessment for Central Kalimantan and Institutionalization of an Integrated Cadastral Mapping and Survey System". This report should be read in conjunction with Report 02 "Baseline data for REDD+ in Central Kalimantan Province". This report was delivered to REDD+ Task Force on 2 March 2012 for comments and approval and resubmitted with amendments on 18 December 2012 and again on 18 February 2013.The data saved in a hard disk storage system was delivered to REDD+ Task Force in 7 November 2012 and updated on 18 February 2013.

Sekala 2013
UNDP, Satgas REDD+

370 Penyediaan Data Baseline dan Peta Kadastral untuk Provinsi-Provinsi Prioritas di Indonesia (Lot 1: Provinsi Aceh) Deliverable 8a : Penilaian kesenjangan kapasitas institusi dan individu dalam pengelolaan data serta rancangan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan di lingkup Provinsi Aceh

Sistem dan kapasitas jaringan spasial dibutuhkan oleh Provinsi Aceh, berdasarkan diskusi tentang rencana pembangunan, pengoperasian, pengadaan Spatial Decision Support System (SDSS) yang mengintegrasikan berbagai fungsi manajemen database, serta pengembangan portal pemetaan web-GIS. Sistem tersebut harus mendukung fungsionalitas penting IMS bagi administrator dan pengguna data, seperti navigasi dan visualisasi antar database, mengimpor data dari database lain, mengekspor data dan menciptakan penyimpanan cadangan berbasis cloud, memeriksa integritas data, menentukan tingkat akses pengguna, dan mengontrol file data referensi. IMS Web- GIS yang diusulkan akan dipresentasikan pada rapat koordinasi provinsi pertama. Feedback dari Provinsi dan Kabupaten/ Kota akan diminta. Hasil evaluasi rinci setiap lembaga yang menyediakan data di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota akan dicantumkan dalam rancangan akhir sebagai referensi dasar tentang kapasitas lembaga saat ini.

LTS International 2013
UNDP, Satgas REDD+

371 Progres Pembangunan Sistem Penyediaan Informasi Tentang Pelaksanaan Safeguards Redd+ (System For Information Provision On Redd+ Safeguards/SIS-Redd+) Di Indonesia.

Disusun dari hasil workshop nasional I dan FGDs tahun 2011, penterjemahan amanah COP-17, hasil workshop nasional II dan FGDs sampai dengan April 2012. Isu-isu yang perlu ditindaklanjuti daintaranya adalah 1). Perlunya peraturan-perundangan untuk operasionalisasi SIS-REDD+ dan 2). Perlunya sinergi dengan initiative terkait di SATGAS-REDD+ (PRISAI dalam POKJA Financing), apabila memungkinkan, menuju integrasi SIS-REDD+ dan PRISAI, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional (termasuk tujuan penerapan

safeguards dalam implementasi REDD+) dan persyaratan/komitmen internasional di bawah UNFCCC. Telah diadakan pertemuan awal antara PUSTANLING dengan POKJA Financing SATGAS-REDD+, membahas potensi sinergi/integrasi keduanya. Beberapa 'key messages' dari FGD tanggal 21 Maret 2012 sebagai berikut : 1. Struktur kelembagaan yang telah dihasilkan dari proses stakeholders 2011 sudah dapat diterima, sehingga yang paling penting adalah penyediaan informasinya; 2). Disepakati tidak perlu membuat lembaga baru, tetapi melekat disatu kelembagaan yang ada dan berpengalaman dengan melakukan pengayaan tupoksi/menambah fungsi berdasarkan pada tujuah safeguard dan situasi di Indonesia; 3). Perlu sinkronisasi dan sinergi dengan initiatif serupa, terutama/termasuk dengan SATGAS-REDD+ (PRISAI), 4). Adalah penting untuk mengidentifikasi pendekatan yang tepat untuk mengadress ketujuh safeguard dari COP-16 agar diakui internasional, dan 5). Semua initiative yang ada termasuk REDD+ SES, VCS, SESA dll merupakan sumber informasi yang dapat digunakan untuk menyusun alat penilai pelaksanaan safeguards-REDD+. Semua intitative ini dapat merupakan hub TOOLS untuk menilai pelaksanan REDD+ dalam SIS Indonesia (note : sudah merupakan bagian dari rencana dan desain SIS-REDD+)

PUSTANLING & FCPF 2012

375 Identifikasi Keglatan-kegiatan yang Mengurangi Emisi Karbon melalui Peningkatan Serapan Karbon dan Stabilisasi Simpanan Karbon Hutan di Indonesia

2012 Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan REDD+ di tingkat nasional dan sub-nasional telah mengalami kemajuan. Beberapa dokumen dan kelembagaan utama yang akan mendukung pelaksanaan REDD+ telah dapat disusun atau dibentuk. Pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan diinterpretasikan oleh penelitian ini sebagai hasil dari kegiatan serapan karbon, stabilisasi atau konservasi karbon hutan. Hasil analisis potensi pengurangan emisi menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan RHL dan HKm merupakan kegiatan yang paling efektif untuk mengurangi emisi karbon sehingga perlu diprioritaskan implementasinya. Dengan demikian aspek efektivitas dan efisiensi tercermin dalam kegiatan tersebut.

Sulistya Ekawati; Kirsfianti L. Ginoga; Ari Wibowo Subarudi; Fentie Salaka; Yanto Rochmayanto; Zahrul Muttaqin; Endang Savitri 2013
Puspijak dan FCPF.

376 Prosiding Seminar "Green Grabbing" Di Indonesia: Apa Dan Bagaimana Kita Menyikapinya?

Makalah yang dipresentasikan adalah: 1. Puspijak; akan mempresentasikan hasil penelitian tentang penggunaan lahan dan kehutanan masyarakat; 2. Dr. Suraya Afiff (Universitas Indonesia); akan mempresentasikan latar belakang ilmiah dari munculnya green grabbing dan perkembangannya tersebut saat ini di Indonesia Dr. Christin Wulandari akan mempresentasikan green grabbing ditinjau dari perspektif politik pembangunan dan perubahan sosial 4. Serikat Petani Indonesia; akan mempresentasikan perspektif mereka mengenai dampak green grabbing pada kehidupan para petani 5. KKI Warsi; akan mempresentasikan perspektif mereka mengenai pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat

sekitar hutan 6. Dr. Bambang Supriyanto, MSc akan mempresentasikan Pemantapan Kawasan Konservasi yang Memberdayakan Masyarakat; 7. Riza Noer Arfani (Universitas Gadjah Mada); land/Green Grabbing : Issues, Dimensions and Contemporary Development.

Kirsfianti L. Ginoga & Zahrul Muttaqien 2012
Puspijak dan FCPF

410 Sharing Pembelajaran Dari Implemantasi Redd+ Di Taman Nasional Meru Betiri

Kegiatan-kegiatan di TN Meru Betiri untuk pelaksanaan program kegiatan REDD+ dengan melaksanakan berbagai program bersama masyarakat dan skateholder lainya. Salah satu kegiatan adalah Melakukan pelatihan pelibatan masyarakat dalam MRV stok karbon. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pelatihan adalah pengukuran lapangan dan analisis data. Metoda pengukuran lapangan untuk menduga cadangan karbon pada skala plot dan bentang lahan menggunakan metoda RaCSA (Rapid Carbon Stock Apparisal, atau Kaji Cepat Cadangan Karbon). Pengukuran karbon di tingkat plot meliputi biomassa diatas pemukaan tanah (pohon dan tumbuhan bawah) maupun yang ada di dalam tanah (akar), dan nekromasa (bahan organik dari bagian yang telah mati) dan bahan organik tanah

Bambang Darmadja. 2011

414 Proyek Restorasi dan Konservasi Hutan Gambut di Katingan dan Kotawaringin Timur.

Makalah disampaikan pada Seminar mencari format Proses FPIC untuk Indonesia: Ragam Pandangan. Novotel Bogor 17 September 2012. Makalah memaparkan pengalaman PT. RMU dalam usaha restorasi ekosistem dan langkah-langka untuk REDD+ untuk perlindingan lingkungan (ekosistem) dan sosial. Perlindungan sosial dengan leibatkan masyarakat dimana terdapat 27 desa yang bergantung pada huta di kawasan Katingan. Perusahaan bekerjasama dengan Masyarakat sekitar dalam pemetaan partisipatif FPIC, pemberdayaan masyarakat. perlindungan lingkungan melalui keanekaragaman hayati, habitat satwa liar dan hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCVF).

Dharsono Hartono 2012
PT. Rimba Makmur Utama

Social Risk

430 Pelibatan Masyarakat Berau Dalam PKHB: Strategi Dan Pembelajaran

Potensi Resiko Sosial REDD yang teridentifikasi oleh TNC studi kasus di Kalimantan Timur diantara 1) Hilangnya/pengalihan kendali masyarakat atas hutan kepada Pemerintah/Elit; 2) Pengusiran ; 3) Ketdakadilan/ kesemena-menaan kontrak; 4) Pengurangan akses kepada pemanfaatan lahan; 5) Potensi terjadinya konflik akibat dari pengaturan ulang kekuatan/sumber kesejahteraan; 6) Meningkatkan harga Pangan serta Kebutuhan hidup lainnya; 7) Terjadinya korupsi serta ketiadaan akuntabilitas dan transparansi

TNC 2015

431 Laporan Ringkas Mencegah Risiko Korupsi pada REDD+ di Indonesia

Isu-isu kebijakan yang penting yang perlu ditangani untuk membatasi korupsi dan manipulasi keputusan terkait dengan: 1. menetapkan dan memetakan batas hutan negara dan memberikan pengakuan atas hutan dan lahan milik masyarakat yang bergantung pada hutan dan masyarakat adat; 2. mengintegrasikan sasaran-sasaran yang diuraikan dalam Strategi Nasional REDD+ ke dalam kebijakan tata guna lahan; 3. memperjelas dan secara konsisten menerapkan kriteria untuk konversi hutan; dan 4. menutup celah-celah peraturan dan menghasilkan data dan menjadikannya dapat diakses publik untuk mendukung pembuatan kebijakan yang mendapatkan informasi yang cukup.

Ahmad Dermawan, Elena Petkova, Anna Sinaga, Mumu Muhajir, Yayan Indriatmoko 2011

CIFOR & UNODC

432 Mengintegrasikan Adaptasi ke dalam REDD+ Dampak Potensial dan Rentabilitas Sosial di Setulang, Kabupaten Malinau, Indonesia

Prediksi perubahan iklim tampaknya tidak memengaruhi strategi penjualan kerajinan tangan, karena sumber bahan bakunya yaitu Tane' Olen, relatif tidak terganggu dan merupakan hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Namun demikian, untuk wanatani karet, batasan tertentu untuk iklim dan biofisik perlu dipantau untuk memastikan bahwa petani telah bersiap untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghindari kerugian panen dan kerusakan. Produktivitas jenis pohon buah-buahan, seperti durian dan rambutan juga dapat dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan yang ekstrem.

Emilia Pramova; Bruno Locatelli; Andreas Mench; Edy Marbyanto; Karlina Kartika Hangga Prihatmaja 2013

CIFOR, GIZ

433 Pilihan-pilihan untuk aksi REDD+: Apa saja dampaknya terhadap hutan dan masyarakat? Suatu Pengantar bagi para pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah

Pemilihan lokasi yang tepat merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan dari setiap aksi REDD+, karena manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dalam bentuk karbon, perolehan pendapatan, keanekaragaman hayati dan jasa-jasa ekosistemnya akan tergantung pada kondisi alam dan sosial ekonomi di kawasan tersebut. Hak-hak penggunaan lahan (seperti hak-hak adat terhadap pemanfaatan hutan dan izin-izin konsesi yang ada saat ini), kelengkapan-kelengkapan legal yang terkait dengan pengelolaan hutan dan kesesuaian antara aksi-aksi yang telah direncanakan dengan kerangka-kerangka pengaman REDD+ juga perlu diamati lebih jauh. Potensi manfaat-manfaat karbon akan tergantung pada cadangan karbon yang ada saat ini (pada areal hutan yang memiliki tingkat karbon tinggi akan lebih baik dilakukan aksi-aksi untuk mempertahankan fungsi hutan, sedangkan di areal yang cadangan karbonnya sangat rendah akan lebih sesuai untuk aktifitas rehabilitasi) dan juga tergantung pada pengembangan penggunaan lahan yang diharapkan. Hutan alam

yang beresiko tinggi untuk terjadinya konversi lahan atau berpotensi terdegradasi, serta areal-areal yang telah terdegradasi namun berpeluang sangat kecil untuk bisa pulih secara spontan kepada kondisi awalnya, harus dijadikan prioritas utama bagi aksi-aksi REDD+ sepanjang ada peluang yang realistis untuk dapat berhasil. Monitoring untuk dampak-dampak aksi REDD+ terhadap multi-manfaat juga akan membantu memperluas bukti-bukti di lapangan yang didasarkan pada kesesuaian dari berbagai pendekatan yang berbeda serta kemungkinan hasil-hasilnya yang akan diperoleh. Aktifitas monitoring ini juga dapat memberikan masukan-masukan yang berguna bagi Sistem Informasi Safeguards nasional yang sedang dikembangkan saat ini.

Epple, C., Thorley, J. (2012)
UNEP-WCMC

434 Free Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+: Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek

Pemrakarsa proyek hendaknya menyadari sejumlah resiko bagi mereka sendiri dan masyarakat lokal ketika terlibat dalam proses untuk mendapatkan FPIC. Tak satu pun dari resiko-resiko tersebut dibuat oleh hak atas FPIC sendiri, tetapi mungkin muncul sebagai sebuah akibat dari proses persetujuan. Resiko tersebut mungkin memerlukan investasi sumber daya yang lumayan untuk mengatasinya sebelum sebuah proyek REDD+ dapat dikembangkan. Resiko-resiko utama meliputi: 1) Pemetaan hak-hak tenurial melalui proses pemetaan partisipatif mungkin mengungkapkan klaim-klaim yang diperebutkan dan menyebabkan konflik sumber daya di dalam atau di antara komunitas; 2) Pemetaan wilayah-wilayah yang dikuasai suatu komunitas mungkin mengubah posisi pemerintah dari sikap yang tak peduli tentang pemanfaatan suatu wilayah tertentu oleh komunitas menjadi secara aktif meniadakan hak-hak mereka, dan kemudian melarang komunitas tersebut untuk tinggal atau menggunakan wilayah tersebut. Para pemrakarsa proyek REDD+ harus siap membantu komunitas dalam situasi ini dan membela hak-hak komunitas tersebut untuk diakui pemerintah; 3) Penolakan persetujuan: ketika FPIC dijelaskan kepada para pengembang proyek dan pejabat pemerintah, seringkali sulit bagi mereka untuk menerima bahwa masyarakat berhak untuk tidak memberikan persetujuan.; Di banyak tempat di Asia Tenggara, FPIC juga dipromosikan oleh kalangan Ornop untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak industri perkebunan dan kehutanan, agar masyarakat tersebut mempunyai posisi yang lebih baik dalam berunding dengan perusahaan. Pada banyak budaya dan sistem pertanahan, pemilikan lahan ditandai dengan pembukaan dan penanaman hutan. Walaupun hal ini bertentangan dengan tujuan program REDD+ dan kurang bermakna dalam hubungannya dengan hak atas FPIC, ada resiko bahwa munculnya investor baru di wilayah hutan akan mendorong pembukaan lahan yang spekulatif.

Patrick Anderson
Recoftc, GIZ, Norad 2011

435 Penguatan REDD+ *Safeguard* Tentang Antikorupsi Program REDD+ di Indonesia

Penelitian tersebut difokuskan pada tiga provinsi yang melaksanakan RED+: Riau, Aceh, dan Papua. Risiko-risiko utama yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:
1. Risiko *state capture* dalam penyusunan kebijakan REDD+: melalui praktik koncoisme, patronase, suap, dan favoritisme, para elit tertentu (dalam hal ini

mereka yang memiliki kepentingan finansial dan politik) dapat memengaruhi para pembuat keputusan dalam menyusun kebijakan atau peraturan, termasuk ikut campur dalam penetapan orang-orang yang akan menduduki jabatan pada struktur Badan REDD+ serta lembaga pelaksana REDD+ daerah di masa depan; 2) **Risiko pendistribusian ulang pendapatan REDD+ untuk pihak-pihak tertentu:** Jika elit tertentu berhasil memengaruhi penyusunan kebijakan atau peraturan terkait pelaksanaan REDD+ di tingkat pusat dan provinsi, mereka juga berpotensi memengaruhi proses alokasi anggaran atau pendistribusian ulang dana REDD+ dalam skema APBN dan APBD. **3. Risiko korupsi/suap dalam proses perizinan hutan:** Saat pelaksanaan REDD+, pihak-pihak yang tertarik mengelola hutan akan berusaha ikut terlibat dalam skema REDD+. Dengan begitu, akan ada banyak izin pengelolaan hutan yang diajukan baik secara bisnis melalui restorasi ekosistem maupun pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui Hutan Masyarakat dan Hutan Desa. **4. Risiko kolusi dan suap dalam proses pengadaan REDD+:** Selain perizinan, pelaksanaan REDD+ juga memerlukan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk memasok peralatan teknis, yang meliputi berbagai jasa seperti jasa konsultasi untuk mengukur, memverifikasi, dan melaporkan stok karbon, serta pengadaan personel profesional dan peralatan teknis untuk pelaksanaan dan pemantauan REDD+. **5. Penipuan berupa manipulasi data MRV:** Risiko korupsi juga muncul dalam bentuk tindakan suap demi memanipulasi atau memalsukan data dan informasi terkait pengukuran, verifikasi, dan pelaporan stok karbon, serta kinerja pengurangan emisi. **6. Korupsi dalam lembaga penegakan hukum berwenang:** Di bidang penegakan hukum, risiko korupsi terjadi selama proses penegakan kebijakan atau penetapan peraturan mengenai pelaksanaan REDD+.

Transparency International Indonesia 2016

436 Safeguard Sosial Dan Lingkungan Redd+ Kalimantan Timur

Kalimantan Timur telah memiliki dokumen safeguard yang berjudul Identifikasi Kebutuhan Adaptasi Safeguard REDD+SES di Kalimantan Timur Dokumen ini mengurai hasil analisa kesebelas isu penting tersebut yang sepatutnya dipertimbangkan dalam pengembangan prinsip, kriteria dan indikator perangkat safeguard REDD+ Kaltim, berikut rencana tindak lanjut adaptasi safeguard Kaltim. Dokumen ini juga menyajikan beberapa catatan yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi tim pada saat mengembangkan dan mengujicobakan prinsip, kriteria dan indikator safeguard REDD+ Kaltim. Sebelas Isu penting REDD+ di Kalimantan Timur yaitu 1) Hak atas lahan dan wilayah; 2) Hak atas sumberdaya alam; 3). Peningkatan kesejahteraan masyarakat; 4). Partisipasi masyarakat baik masyarakat adat / lokal atau kelompokrentan / marginal, termasuk isu gender; 5). Pengakuan dan penghargaan kekayaan pengetahuan tradisional; 6). Konservasi keragaman hayati dan ekosistem; 7). Tata kelola hutan; 8). Pembagian manfaat atau benefit sharing 9). Pencegahan terjadinya kebocoran / leakage 10). Pencegahan resiko balik 11). Transparansi dan akuntabilitas

Fadjar Pambudhi
Pokja REDD+ Kaltim, LEI

437 Prinsip, Kriteria, Indikator Dan Verifier Safeguard Redd+ Kalimantan Timur

Pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator Safeguard REDD+ di Kalimantan Timur berdasarkan pada 11 isu penting Kalimantan Timur Konsistensi dengan

pengembangan SES Internasional. Mengacu pada Safeguard Cancun dan Safeguards lain yang sudah ada (SES Kalteng, PRISAI, SIS, SESA dan RBS). Isu Penting Kaltim dipetakan terhadap Prinsip atau Kriteria Safeguards yang ada. Menggali hal-hal utama yang muncul dalam semua Safeguards. Membangun indikator berdasarkan hal utama, sesuai dengan Prinsip SES yang berpadanan.

Pokja REDD+ Kaltim, LEI

439 Opportunity And Risk Of Redd+, Green Economy, And Sustainable Development

Challenges (Risk) : 1) REDD+ and GE will threat the achievement of national development goals a) of As developing Country Grow now, clean up later (prefer short term achievement long term goal and b) Some studies show that moratorium of new licenses for logging and plantation brings negative economic impacts to certain local communities; 2) Sustainability of international commitment is not clear Grant, technology transfer, voluntary carbon market, and countries' commitment in achieving emission reduction goals; 3) Sustainability of Government commitment: Moratorium, Financial support (BLU, K/L DIPA, grants), & Fiscal incentives and Licensing for carbon businesses; 4) The limitation of public funding, Public funding to leverage private participation; 5) Private business involvement in green environment and forest sectors are still limited; 6) Sustainability of local government support: a) Moratorium, Licensing for carbon businesses and b) Benefit and incentives for local economy; 7) Mitigation of tenure conflict in degraded lands including peat lands : a) Benefits and incentives for local community and b) Protection for carbon businessmen; 8) The sustainability of carbon prices and participation parties

Irfa Ampri 2012

440 Staying on Track: Tackling Corruption Risks in Climate Change

The key recommendations to reduce corruptions risks in adaptation and REDD+ which are outlined in this paper include: 1) n The need to avoid fragmentation of funding which can itself create opportunities for corruption and can send mixed messages to developing countries about the importance of addressing corruption; 2) The need to encourage developing countries to ratify and implement global and regional anticorruption instruments, such as the United Nations Convention Against Corruption ('UNCAC'), and utilize UNCAC as an anti-corruption framework in adaptation and REDD+ activities; 3) The importance of carrying out corruption risk assessments in order to ascertain the condition of the general governance framework in the country concerned, and to tailor the anti-corruption measures to the country circumstances; 4) The desirability of using multi-stakeholder accountability mechanisms to improve transparency and accountability in designing, implementing and monitoring adaptation and REDD+ frameworks; 5) The importance of improving the capacity of developing countries to administer the funds anticipated to arrive for adaptation and REDD+, and to strengthen their systems for public financial management and procurement; 6) The need to strengthen the capacity

of civil society to participate and play a 'watchdog' role and the need to establish independent recourse and complaints mechanisms to improve transparency and accountability; 7) The need to support anti-corruption bodies to build their capacity so that they can raise awareness and can develop and implement preventive mechanisms such as system audits, and are able to investigate and monitor corruption cases in adaptation and REDD+; and 8) The need to strengthen transparency and accountability of local governance institutions and systems.

UNDP 2011

441 Update Perundingan Iklim terkait REDD+ Bonn 4-15 Juni 2014

Sistem Informasi Safeguards digunakan untuk menyediakan informasi mengenai bagaimana negara-negara REDD+ memenuhi dan menghormati safeguards tata kelola, sosial, dan lingkungan yang telah ditetapkan di Cancun. Negara yang menjalankan REDD+ harus menyerahkan ringkasan informasi terkait pemenuhan safeguards ini setelah REDD+ diimplementasikan, yang berarti Indonesia sudah harus mulai menyusun ringkasan informasi ini. Akan tetapi, kelompok masyarakat sipil berpendapat bahwa panduan UNFCCC untuk sistem informasi ini masih harus diperkuat untuk dapat menjamin hak-hak masyarakat. Ada dua hal penting terkait hak masyarakat dalam implementasi REDD+.Yang pertama adalah implementasi safeguards ketika program, proyek, atau kegiatan terkait REDD+ dijalankan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa REDD+ tidak menyakiti masyarakat adat dan komunitas lokal serta untuk mengarahkan REDD+ agar tidak hanya menghasilkan penurunan emisi, tetapi juga manfaat sosial-lingkungan yang justru merupakan manfaat utama yang penting bagi kehidupan masyarakat, misalnya amannya hak tenurial, perekonomian yang meningkat, dan kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua adalah pelaporan safeguards melalui Sistem Informasi Safeguards yang bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana rambu pengaman telah dilaksanakan dan dipenuhi.

Anggalia Putri Permatasari-HUMA 2014